PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2025 - 2045









Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2024, Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah;
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat;
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045;
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045;
23. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja 20 (dua puluh) tahun yang dijalankan menjadi per 5 (lima) tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPN tahun 2025-2045;
24. Sasaran Pokok adalah Gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPN tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif;
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;

26. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
28. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 2

(1) RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi,misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka 20 tahun. yang menjabarkan:
   a. Arah kebijakan dan
   b. Sasaran Pokok RPJPD

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada :
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
   b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu;
   c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu; dan
   e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

(3) RPJPD berfungsi sebagai :
   (1) Pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (2) Pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan
   (3) Pedoman penyusunan kebijakan rencana aksi daerah dalam penyelesaian isu strategis.

(4) Ruang lingkup RPJPD, meliputi :
   a. Gambaran umum kondisi Daerah;
   b. Permasalahan dan isu strategis;

c. Visi daerah dan sasaran visi;
d. Misi daerah;
e. Arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f. Tahapan arah kebijakan.

BAB III

SISTIMATIKA RPJPD

Pasal 3

(1) Sistimatika RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045, meliputi:
(ditambahkan Kabupaten dan Tahun)
Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis;
Bab IV : Visi dan Misi;
Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
Bab VI : Penutup;
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.
(4) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
(5) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
(6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(7) DPRD dapat memberi masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan sepervisi pelaksanaan RPJPD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan sepervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arahan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan memalui RPJMD.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Pembatasan jangka waktu perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika terjadi perubahan mendasar.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3), mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR (9/52/2024)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025 - 2045

Nomor Kontrak :
KTR/139.C/B.2/BAPPEDA-LITBANG/2024

Kerjasama
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
dengan Universitas Bengkulu
Tahun Anggaran 2024

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

FIKRI ALJAUHARY, SSTP, MM
NIP. 19821001 200112 1 002

Ketua Tim Pelaksana

Dr. FACHRUZZAMAN, SE, MDM, Ak, CA.,
Asean CPA., Cert.IPSAS
NIP. 19710313 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4. Maksud dan Tujuan I-6
1.5. Sistematika Penulisan I-8
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Geografi II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2. Resiko Bencana II-9
2.1.1.3. Kualitas Lingkungan Hidup II-11
2.1.1.4. Ketahanan Pangan II-15
2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah II-19
2.1.2. Demografi II-41
2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk II-45
2.1.2.2. Rasio Penduduk II-46
2.1.2.3. Kepadatan Penduduk II-48
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-49
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-50
2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-50
2.2.1.2. Laju Inflasi II-56
2.2.1.3. Indeks Gini II-59
2.2.1.4. Kemiskinan II-61
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-64
2.2.1.6. Ketenagakerjaan II-65
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya II-67
2.2.2.1. Kesejahteraan Sosial II-67
2.2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-69
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-71
2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-72
2.3.1.1. Pendidikan Dasar II-72
2.3.1.2. Kesehatan II-83
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-87
2.3.1.3.1. Infrastruktur Dasar II-87
2.3.1.3.2. Perumahan dan Kawasan Permukiman II-90
2.3.1.4. Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-96
2.3.1.5. Sosial II-98
2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-100

2.3.2.1. Ketenagakerjaan II-100
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-103
2.3.2.3. Ketahanan Pangan II-105
2.3.2.4. Lingkungan Hidup II-106
2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil II-110
2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-111
2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-112
2.3.2.8. Perhubungan II-113
2.3.2.9. Komunikasi dan Informasi II-114
2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-116
2.3.2.11. Penanaman Modal II-116
2.3.2.12. Statistik II-118
2.3.2.13. Persandian II-118
2.3.2.14. Kebudayaan II-119
2.3.2.15. Perpustakaan II-119
2.3.2.16. Kearsipan II-120
2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan II-121
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan II-121
2.3.3.2. Pariwisata II-121
2.3.3.3. Kehutanan II-125
2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral II-126
2.3.3.5. Perdagangan II-128
2.3.3.6. Perindustrian II-129
2.3.3.7. Transmigrasi II-130
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-131
2.3.4.1. Kesekretariatan Daerah II-131
2.3.4.2. Kesekretariatan DPRD II-132
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-133
2.3.5.1. Perencanaan II-133
2.3.5.2. Keuangan II-134
2.3.5.3. Kepegawaian II-134
2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan II-135
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-136
2.3.6.1. Pengawasan II-136
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum II-136
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-137
2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-139
2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-145
2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-149
2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi II-150
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 ..... II-153
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik . II-175
2.6.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk II-175
2.6.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin II-177
2.6.2.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki II-177

2.6.2.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan II-177
2.6.3. Analisis Kependudukan II-178
2.6.3.1. Kepadatan penduduk II-178
2.6.3.2. Rasio Ketergantungan II-179
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-180
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-1
3.1. Permasalahan III-1
3.1.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... III-17
3.1.2. Kajian RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2031 ..... III-19
3.2. Isu Strategis III-21
3.2.1. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan III-21
3.2.2. Isu Strategis Provinsi Bengkulu III-44
3.2.3. Isu Strategis Sumatra Dalam RPJPN III-59
BAB IV. VISI DAN MISI IV-1
4.1. Visi IV-1
4.2. Sasaran Visi IV-3
4.3. Misi IV-14
BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1
5.1. Arah Kebijakan V-1
5.2. Sasaran Pokok V-5
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah V-22
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi V-24
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan V-41
BAB VI. PENUTUP VI-1
6.1. Kesimpulan VI-5

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan II-1
Tabel II-2. Jumlah Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan 2023 ..... II-2
Tabel II-3. Tinggi Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 ..... II-5
Tabel II-4. Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya II-6
Tabel II-5. Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan II-6
Tabel II-6. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2030 ..... II-8
Tabel II-7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-10
Tabel II-8. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-12
Tabel II-9. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-12
Tabel II-10. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020 ..... II-16
Tabel II-11. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022 ..... II-16
Tabel II-12. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 ..... II-16
Tabel II-13. Target dan Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-20
Tabel II-14. Hasil Produksi Padi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 ..... II-22
Tabel II-15. Target dan Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Jagung Tahun 2023 ..... II-23
Tabel II-16. Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-25
Tabel II-17. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-26
Tabel II-18. Luas Areal dan Produksi Komoditi Karet Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-28
Tabel II-19. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-29

Tabel II-20. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kakao Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-30
Tabel II-21. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-32
Tabel II-22. Potensi Bahan Galian Pertambangan Kabupaten Bengkulu Selatan II-33
Tabel II-23. Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 (Ton) II-34
Tabel II-24. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan II-35
Tabel II-25. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan (Lanjutan 1) II-36
Tabel II-26. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan (Lanjutan 2) II-36
Tabel II-27. Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan II-38
Tabel II-28. Potensi dan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 ..... II-40
Tabel II-29. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk II-41
Tabel II-30. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 ..... II-42
Tabel II-31. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk II-45
Tabel II-32. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk II-48
Tabel II-33. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 ..... II-51
Tabel II-34. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 ..... II-51
Tabel II-35. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023 ..... II-51
Tabel II-36. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di, 2018–2022 ..... II-53
Tabel II-37. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 ..... II-54
Tabel II-38. Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel II-39. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu II-59
Tabel II-40. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-63
Tabel II-41. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2022 ..... II-68

Tabel II-42. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 ..... II-69
Tabel II-43. Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 (kelompok) II-69
Tabel II-44. Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 (organisasi) II-70
Tabel II-45. Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 ..... II-70
Tabel II-46. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2023 ..... II-71
Tabel II-47. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2023 (persen) II-72
Tabel II-48. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-75
Tabel II-49. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-75
Tabel II-50. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-76
Tabel II-51. Rata-rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-77
Tabel II-52. Rasio Guru Terhadap Siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-78
Tabel II-53. Perkembangan Akreditasi Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-79
Tabel II-54. Siswa Putus Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-80
Tabel II-55. Indeks Literasi dan Indeks Numerasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2024 ..... II-81
Tabel II-56. Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel II-57. Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 (SP 2020) II-84
Tabel II-58. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II-85
Tabel II-59. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018–2022 ..... II-86
Tabel II-60. Prevalensi Stunting Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2023 ..... II-86
Tabel II-61. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019–2023 ..... II-87

Tabel II-62. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019–2023 ..... II-88
Tabel II-63. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu II-90
Tabel II-64. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel II-65. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 ..... II-92
Tabel II-66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 2020-2023 ... II-93
Tabel II-67. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020 ..... II-95
Tabel II-68. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu II-95
Tabel II-69. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 1.000 Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2023 ..... II-96
Tabel II-70. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-97
Tabel II-71. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2022 ..... II-99
Tabel II-72. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023 ..... II-100
Tabel II-73. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ..... II-102
Tabel II-74. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-104
Tabel II-75. Indeks Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-105
Tabel II-76. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-107
Tabel II-77. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-108
Tabel II-78. Capaian Perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2022 ..... II-110
Tabel II-79. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-111

Tabel II-80. Akseptor KB Aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-113
Tabel II-81. Data Angkutan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel II-82. Perusahaan Angkutan Penumpang AKDP dan AKAP Di Kabupaten Bengkulu Selatan II-114
Tabel II-83. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel II-84. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-116
Tabel II-85. Realisasi Investasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 (juta rupiah) II-117
Tabel II-87. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 ..... II-119
Tabel II-88. Perkembangan Pemustaka di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel II-89. Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel II-90. Potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan II-121
Tabel II-91. Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan ke Provinsi Bengkulu menurut Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan Tahun 2019-2020 ..... II-123
Tabel II-92. Pemeringkatan Destinasi Wisata Alam di Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II-123
Tabel II-93. Pemeringkatan Destinasi Wisata Buatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II-124
Tabel II-94. Pemeringkatan Destinasi Wisata Sejarah di Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II-124
Tabel II-95. Luasan dan Proporsi Pemanfaatan Tahura Di Kabupaten Bengkulu Selatan II-126
Tabel II-96. Rasio Elektrifikasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel II-97. Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel II-98. Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-129
Tabel II-99. Pencapaian Indikator Kinerja Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan II-132

Tabel II-100. Perkembangan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-134
Tabel II-101. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019-2022 ..... II-134
Tabel II-102. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bengkulu 2023 ..... II-138
Tabel II-103. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 ..... II-140
Tabel II-104. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 II-141
Tabel II-105. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023 ..... II-141
Tabel II-106. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di, 2018–2022 ..... II-142
Tabel II-107. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 ... II-144
Tabel II-108. Angka Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-147
Tabel II-109. Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... II-148
Tabel II-110. Persentase Jalan dalam Keadaan Baik dan Sedang II-150
Tabel II-111. Realisasi Investasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 (juta rupiah) II-151
Tabel II-112. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2005 - 2025 ..... II-153
Tabel II-113. Gini Rasio Kabuptaen/Kota 2020-2022 ..... II-163
Tabel II-114. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Bengkulu Selatan, 2020-2022 ..... II-164
Tabel II-115. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 ..... II-175
Tabel II-116. Proyeksi Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang) II-176
Tabel II-117. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045 ..... II-176
Tabel II-118. Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045 ..... II-177
Tabel II-119. Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045 ..... II-178
Tabel II-120. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... II-178
Tabel II-121. Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... II-179

Tabel II-122. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2030 ..... II-184
Tabel II-123. Fungsi Jalan Arteri dan Kolektor 1 Bukan Jalan Tol di Kabupaten Bengkulu Selatan II-186
Tabel II-124. Rencana Pola Ruang Berdasarkan Klasifikasi Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan 2030 ..... II-213
Tabel IV-1. Keterkaitan Isu Strategis dengan Pokok-Pokok Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... IV-2
Tabel IV-2. Keterkaitan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Bengkulu, dan Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... IV-3
Tabel IV-3. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 . IV-4
Tabel IV-4. Penyelerasan Sasaran Visi RPJPN, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Bengkulu, dan Sasaran Visi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... IV-10
Tabel IV-5. Sasaran Visi Kabupaten Bengkulu Selatan Sesuai Arah Kebijakan..... IV-11
Tabel IV-6. Misi, Hubungan Visi dan Misi, dan Transformasi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 ..... IV-15
Tabel IV-7. Misi Pertama, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan IV-19
Tabel IV-8. Misi Kedua, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan IV-22
Tabel IV-9. Misi Ketiga, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan IV-24
Tabel IV-10. Misi Keempat, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan IV-25
Tabel IV-11. Misi Kelima, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan IV-28
Tabel IV-12. Penjabaran Misi Per Periode Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 ..... IV-29
Tabel V-1. Visi, Tranformasi, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-5
Tabel V-2. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat untuk Masing-Masing Periode V-6
Tabel V-3. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatkan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan demi Terwujudnya Kemandirian Pangan untuk Masing-Masing Periode V-7
Tabel V-4. Penjabaran Sasaran Pokok Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berfokus pada Industri Pengolahan dan Meningkatkan

Potensi Pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD untuk Masing-Masing Periode V-8
Tabel V-5. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Masing-Masing Periode V-9
Tabel V-6. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan untuk Masing-Masing Periode V-10
Tabel V-7. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah untuk Masing-Masing Periode V-11
Tabel V-8. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat untuk Masing-Masing Periode V-12
Tabel V-9. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat untuk Masing-Masing Periode V-13
Tabel V-10. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat yang Layak untuk Masing-Masing Periode V-13
Tabel V-11. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kesempatan Masyarakat dalam Mengakses Informasi Digital untuk Masing-Masing Periode ... V-14
Tabel V-12. Penjabaran Sasaran Pokok Terciptanya Masyarakat Berbudaya dan Rukun untuk Masing-Masing Periode V-15
Tabel V-13. Penjabaran Sasaran Pokok Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dengan Mutu Keluarga yang Berkualitas untuk Masing-Masing Periode V-16
Tabel V-14. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Resiliensi Perubahan Iklim untuk Masing-Masing Periode V-17
Tabel V-15. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan untuk Masing-Masing Periode V-18
Tabel V-16. Penjabaran Sasaran Pokok Menurunnya Angka Kriminalitas Melalui Peningkatan Penegakan Hukum untuk Masing-Masing Periode V-19
Tabel V-17. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Periode V-20
Tabel V-18. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana, dan Prasarana yang Merata dan Berkualitas untuk Masing-Masing Periode V-21
Tabel V-19. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan untuk Masing-Masing Periode V-22

Tabel V-20. Visi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-23
Tabel V-21. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-25
Tabel V-22. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-39
Tabel V-23. Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Hubungan Antar Dokumen I-5
Gambar II-1. Peta Kabupaten Bengkulu Selatan II-5
Gambar II-2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan II-7
Gambar II-3. Indeks Resiko Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 ..... II-39
Gambar II-4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan II-40
Gambar II-5. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015-2024 ..... II-63
Gambar II-6. Indeks Pembangunan Manusia (Hasil SP2020) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-64
Gambar II-7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023 ..... II-65
Gambar II-8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023 ..... II-66
Gambar II-9. Peta Batas Kawasan Tahura Geluguran Di Kabupaten Bengkulu Selatan II-125
Gambar II-10. Peta Kawasan Transmigrasi Kedurang Di Kabupaten Bengkulu Selatan II-131
Gambar II-11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023 ..... II-146
Gambar II-12. Komponen IPM: Umur Harapan Hidup (UHH) II-155
Gambar V-1. Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ..... V-1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang perencanaan pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas yang disusun tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Sehingga dapat diartikan bahwa periodisasi RPJPD sama dengan periodisasi RPJPN 2005-2025 yang akan berakhir pada tahun 2025. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari penyusunan rancangan awal. Rancangan awal ini dibahas secara intensif oleh tim penyusun bersama perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan saran yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selain itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan melalui forum konsultasi publik untuk memperbaiki dan menyempurnakan rancangan awal RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyusunan rancangan awal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan strategis, antara lain: a) Pendekatan teknokratik, yang mengandalkan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b) Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif; c) Pendekatan

politis, yang mengarahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, dan dibahas bersama dengan DPRD; serta d) Pendekatan kombinasi atas-bawah dan bawah-atas, yang merupakan hasil dari perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Tahap berikutnya melibatkan Bupati Bengkulu Selatan dalam menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan yang lebih matang, berdasarkan saran dan masukan dari Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi. Rancangan ini kemudian diajukan oleh BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan, sebelum dibahas dalam Musrenbang RPJPD. Musrenbang ini bertujuan untuk memperdalam, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan mencapai kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran utama yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Berita acara kesepakatan yang dihasilkan dari Musrenbang ini menjadi dasar bagi perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir yang lebih komprehensif.

Setelah itu, rancangan akhir RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. Hasil pengharmonisasian ini kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut, dengan tujuan mencapai persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada akhirnya, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah yang sah dan resmi.

1.2. Dasar Hukum

RPJPD ini disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
b. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2004. Tentang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031
g. Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

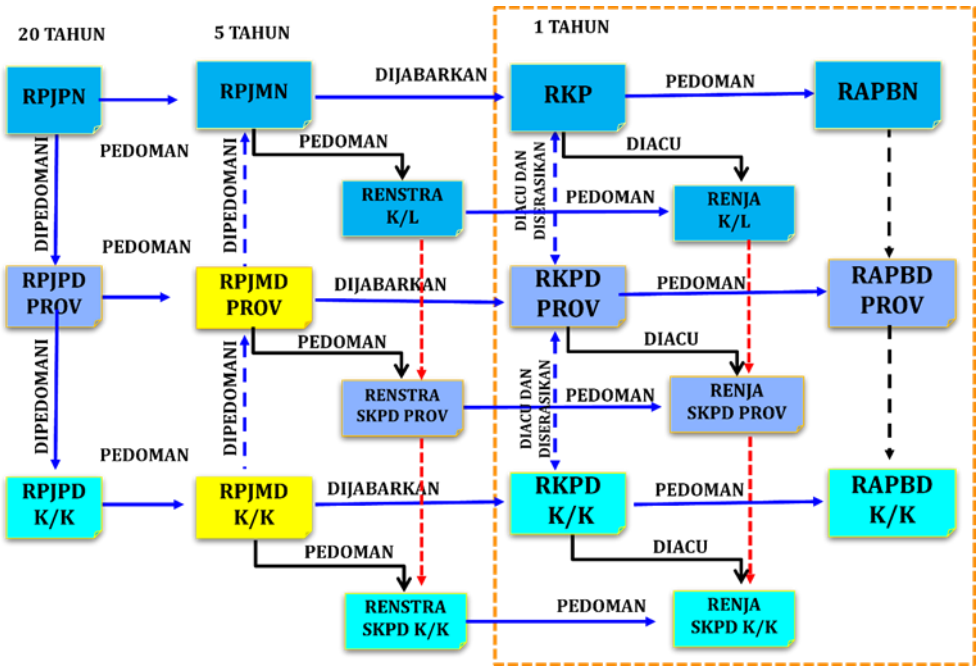
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur rahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga =KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek.



Gambar I-1. Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Selatan memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
b. RPJPD adalah dokumen dengan periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.
c. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
e. Penganggaran program atau kegiatan di daerah tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2025–2045 dirancang sebagai panduan strategis yang akan menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Dokumen ini berfungsi tidak hanya sebagai peta jalan bagi Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. RPJPD ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah visi nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045.

Tujuan utama penyusunan RPJPD ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, untuk memenuhi ketentuan hukum yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, sehingga menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua, RPJPD berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam merumuskan dan menentukan arah pembangunan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan kondisi aktual, potensi daerah yang dapat dioptimalkan, serta proyeksi tantangan dan peluang di masa depan. Ketiga, RPJPD menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Daerah), rencana strategis perangkat daerah

(Renstra SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta rencana kerja tahunan perangkat daerah (Renja SKPD). Selain itu, RPJPD juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang merupakan proses partisipatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan juga dirancang untuk memastikan adanya harmonisasi dan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, arah dan strategi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terintegrasi secara sinergis dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, dan berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Melalui RPJPD ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk memperkuat koordinasi pembangunan di semua tingkat, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai fungsi pemerintahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik saat ini maupun di masa depan. Kabupaten Bengkulu Selatan juga bertekad untuk memainkan perannya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah di kancah global.

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025–2045 ini diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan penerapan yang efektif, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warganya, serta berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.

1.5. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, penyajian RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ini adalah sebagai berikut:

A. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

B. Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bab II memuat setidaknya:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi dibagi menjadi 2 bagian:

a. Geografi yang menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
b. Demografi yang menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi yang menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
b. Kesejahteraan Sosial Budaya yang menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum yang menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Ekonomi Daerah yang menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
b. Daya Saing SDM yang menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah yang menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
d. Daya Saing Iklim Investasi yang menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 yang menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral dalam Dokrenda

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik yang menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonusdemografi, dan penduduk usia tua.
b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah yang menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab III memuat sekurang-kurangnya:

a. Permasalahan yang menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang

disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Isu strategis daerah yang memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

D. Bab IV Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota

Bab IV berisikan visi dan misi kabupaten/kota. Pada bab ini, kabupaten/kota menjabarkan Visi dan Misi dengan memperhatikan muatan RPJP Provinsi dan Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

4.1. Visi

Visi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik masingmasing kabupaten/kota dan provinsi terkait.

4.2. Sasaran Visi

Sasaran Visi Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.

4.3. Misi

Misi (Agenda Pembangunan) Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab V memuat setidaknya:

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik

pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dari masing-masing provinsi.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait

F. Bab VI Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas

pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Analisis pada aspek geografi menyajikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan gambaran kondisi demografi memberikan gambaran mengenai kondisi daerah yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Setelah terbitnya Undang-undang No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma, luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah seluas 1.570,10 km^2 dengan rincian 1.186,10 km^2 wilayah daratan dan 384 km^2 wilayah lautan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah 5.949,14 km2. Sejak tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 11 kecamatan yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II-1. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Manna	Kayu Kunyit	33,17	2,80
2	Bunga Mas	Gindosuli	35,08	2,71
3	Kota Manna	Ibul	32,16	19,77
4	Pasar Manna	Pasar Bawah	5,84	2,96
5	Kedurang	Tanjung Alam	234,55	0,49
6	Kedurang Ilir	Lubuk Ladung	58,20	4,91
7	Seginim	Pasar Baru	61,52	5,19
8	Air Nipis	Suka Negeri	203,28	17,14
9	Pino	Masat	61,88	5,22
10	Ulu Manna	Simpang Pino	236,92	18,84
11	Pino Raya	Pasar Pino	223,50	19,97
Jumlah			1.186,10	100,00

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat variasi yang signifikan dalam ukuran geografis setiap kecamatan. Kecamatan Ulu Manna memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 236,92 km^2, yang mencakup 18,84% dari total luas Kabupaten Bengkulu Selatan. Disusul oleh Kecamatan Pino Raya dengan luas 223,50 km^2 yang mencakup 19,97% dari luas kabupaten, serta Kecamatan Kedurang dengan luas 234,55 km^2 atau sekitar 19,77% dari luas keseluruhan. Di sisi lain, Kecamatan Pasar Manna memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya 5,84 km^2, mencakup 2,96% dari total luas kabupaten. Kecamatan lainnya seperti Manna, Bunga Mas, dan Kota Manna memiliki luas wilayah yang relatif kecil, masing-masing mencakup antara 2,71% hingga 2,80% dari total luas kabupaten. Kecamatan Air Nipis dan Seginim, dengan luas masing-masing 203,28 km^2 dan 61,52 km^2, mencakup sekitar 17,14% dan 5,19% dari luas keseluruhan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara keseluruhan, total luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 1.186,10 km^2, dengan berbagai kecamatan yang memiliki proporsi luas wilayah yang bervariasi. Perbedaan luas wilayah ini mencerminkan beragam karakteristik geografis dan potensi yang dimiliki oleh setiap kecamatan dalam kabupaten ini. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 139 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki jarak yang berbeda- beda ke Ibukota Kabupaten. Berikut data jumlah kelurahan dan desa dalam kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-2. Jumlah Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan 2023

No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Manna	8,8	1	17	18
2	Bunga Mas	16,4	-	10	10
3	Kota Manna	5	8	3	11
4	Pasar Manna	5,8	8	1	9
5	Kedurang	36	-	19	19
6	Kedurang Ilir	23,3	-	12	12
7	Seginim	21,5	1	21	22
8	Air Nipis	30,3	-	10	10
9	Pino	13,6	1	15	16
10	Ulu Manna	23,2	-	10	10
11	Pino Raya	9,6	-	21	21
Jumlah			**19**	**139**	**158**

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2024

Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 memiliki distribusi wilayah administrasi yang beragam di setiap kecamatan. Kecamatan Manna, yang berjarak 8,8 km dari ibukota kabupaten, memiliki 1 kelurahan dan 17 desa, dengan total 18 wilayah administrasi. Kecamatan Kota Manna, yang terletak paling dekat dengan ibukota kabupaten, yaitu 5 km, memiliki jumlah kelurahan yang relatif tinggi, yaitu 8 kelurahan dan 3 desa, dengan total 11 wilayah administrasi. Sementara itu, Kecamatan Pasar Manna, yang berjarak 5,8 km dari ibukota kabupaten, juga memiliki 8 kelurahan namun hanya 1 desa, sehingga totalnya ada 9 wilayah administrasi.

Di sisi lain, Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir, yang masing-masing berjarak 36 km dan 23,3 km dari ibukota kabupaten, memiliki total 19 dan 12 desa tanpa adanya kelurahan. Kecamatan Seginim dan Pino Raya memiliki jumlah desa tertinggi di kabupaten ini, yaitu 21 desa masing-masing, dengan Kecamatan Seginim juga memiliki 1 kelurahan, menjadikan total wilayah administrasinya 22. Kecamatan lainnya seperti Bunga Mas, Air Nipis, Pino, dan Ulu Manna, memiliki jumlah desa yang lebih sedikit, berkisar antara 10 hingga 16 desa, tanpa banyak kelurahan yang mendampingi. Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 19 kelurahan dan 139 desa, dengan total 158 wilayah administrasi yang tersebar di berbagai kecamatan, mencerminkan keragaman administrasi dan distribusi populasi di wilayah ini.

Secara astronomi, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 74 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 409’39”-4033’ 34” Lintang Selatan dan antara 102047’45”-103017’18” Bujur Timur. Luas wilayah Bengkulu Selatan adalah berupa daratan seluas 1.186,10 km2, yang apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Bengkulu hanya sebesar 5,95 persen dari luas Provinsi Bengkulu 19.919,33 km2.

Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Batas administratif Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten yang berbatasan langsung tersebut, telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan batas daerah yang selama ini muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada daerah yang berbatasan, seharusnya sudah tidak ada lagi. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penetapan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Dengan penetapan dan kepastian batas daerah tersebut, menjadi modal dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mendorong kemajuan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada wilayah yang berbatasan dengan daerah lain.

Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di bagian selatan dari Provinsi Bengkulu, dengan ketinggian 74 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaaan laut), daratan di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari:

- Ketinggian 0 m – 100 m sebesar 50,88%
- Ketinggian 100 m – 500 m sebesar 35,08%
- Ketinggian 500 m ke atas sebesar 14,04



Gambar II-1. Peta Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 diedit

Tingkat ketinggian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3. Tinggi Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Manna	34
2	Bunga Mas	30
3	Kota Manna	60
4	Pasar Manna	22
5	Kedurang	130
6	Kedurang Ilir	50
7	Seginim	37
8	Air Nipis	125
9	Pino	130
10	Ulu Manna	145
11	Pino Raya	25
Kabupaten Bengkulu Selatan		**20**

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2024

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki suhu rata-rata minimum 20,500C, maksimum 35,400C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata 82,44-85,89%. Curah hujan di Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata 354,00 mm.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu menetapkan Kawasan

hutan Kabupaten Bengkulu Selatan seluas seluas ± 48.686 Ha atau 5,27 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 Hektar.

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Terbatas. Adapun data luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-4. Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Hutan Lindung	32.756,20	27,62
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	594,73	0,50
3.	Hutan Produksi Terbatas	14.244,64	12,01
4.	Hutan Produksi Tetap	1.704,23	1,44
5.	Hutan Lindung	32.756,20	27,62
Jumlah		**49.299,80**	**41,56**

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2024

Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu (dalam RTRWP Bengkulu), kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun taman nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan, saat ini telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan maupun perubahan fungsi ruang yang ada saat ini merupakan kawasan lindung, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun review atau pengajuan peninjauan kawasan hutan di dalam RTRWP Provinsi Bengkulu yang terkait dengan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-5. Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan

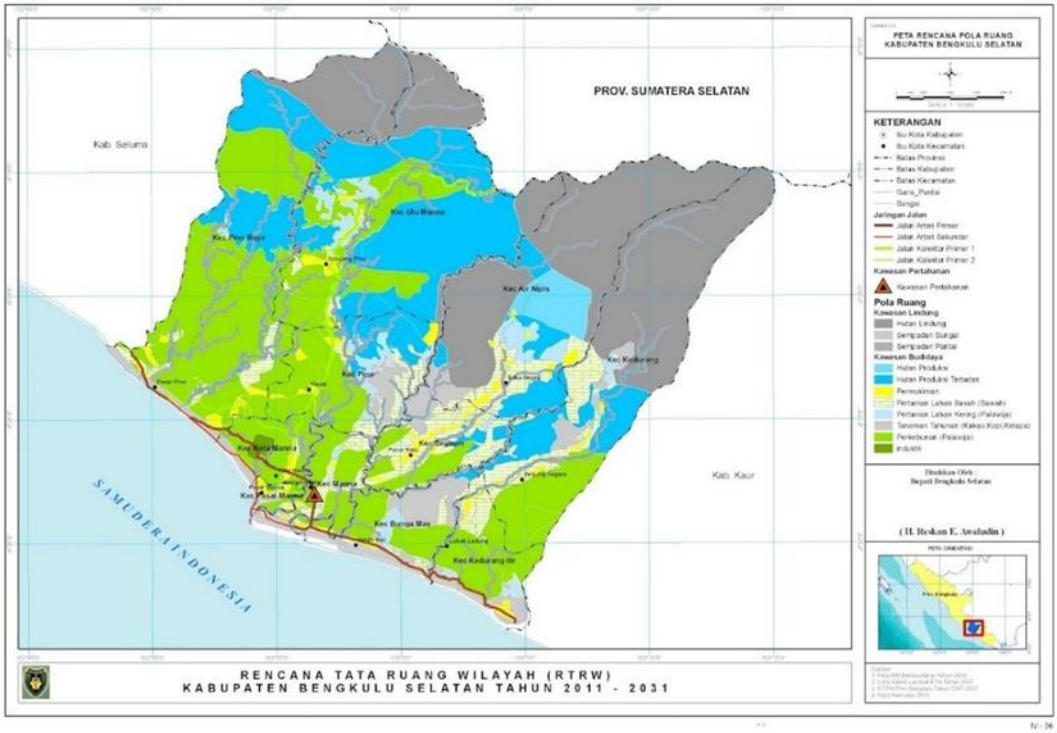
No	Nama Kawasan Hutan	Luas Kawasan (Ha)	Usulan Perubahan (Ha)	RekomendasiPerubahan (Ha)
1.	HL. Raja Mandara Reg. 32	20.727		
2.	HL. Bukit Riki Reg. 32A	4.370	APL. 519	Tidak diubah
3.	HL. Bukit Sanggul Reg. 37	7.982		
4.	HPT. Bukit Rabang Reg. 78	4.216.54	Tahura 101	Tahura 101
5.	HPT Peraduan Tinggii Reg. 79	9.158.42	APL 4.785	Tidak diubah
6.	HPT. Air Kedurang Reg. 81	1.192		
7.	HP. Air Bengkenang Reg 80	1.579	APL 1.927	APL. 222 Ha, HP. 13537 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata dan dikelola kembali, terutama keberadaan dan peruntukan hutan. Berikut ini Peta rencana pola ruang dan data mengenai persentase luas hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Gambar II-2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang peruntukan ruangnya untuk fungsi lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di

bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai ruang kawasan budidaya terdiri dari

kawasan yang peruntukannya untuk hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Struktur ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan direncanakan untuk rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten dengan tujuan dasar agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel II-6. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2030

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Manna (Kecamatan Kota Manna)	PKW	• Pusat Pemerintahan • Pusat Perdagangan dan jasa • Pusat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan. • Permukiman perkotaan • Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
2.	Pasar Bawah (Kecamatan Pasar Manna)	PKW	• Pariwisata • Permukiman perkotaan • Pengembangan sub sektor Perikanan • Industri pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
3.	Kayu Kunyit (Kecamatan Manna)	PKW	• Permukiman perkotaan • Pertambangan (golongan c) • Perkebunan dan sub sektor pertanian • Pariwisata • Indutri pertanian dan pengolahan rumah tangga.
4.	Masat (Kecamatan Pino)	PKL	• Pusat Agro Industri • Pusat Agropolitan • Perkebunan • Pertanian • Permukiman perdeesaan
5.	Simpang Pino (Kecamatan Ulu Manna)	PPK	• Pertanian • Perkebunan • Kawasan Hutan Konservasi • Perternakan • Pertambangan • Pariwisata • Permukiman perdesaa
6.	Lubuk Ladung (Kec. Kedurang Ilir)	PPK	• Pertanian • Agroindustri • Perkebunan • Perikanan • Pertambangan • Peternakan

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
			• Permukiman pedesaan
7.	Gindo Suli (kec. Bunga Mas)	PPL	• Perkebunan • Pariwisata buatan • Industri pengolahan hasil pertanian • Permukiman pedesaan
8.	Tanjung Negara (Kec. Kedurang)	PPL	• Pertanian • Perkebunan • Kawasan hutan konservasi • Peternakan • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
9.	Pasar Baru (Kec. Seginim)	PPL	• Peternakan • Perikanan darat • Pertanian tanaman pangan • Perkebunan • Permukiman pedesaan
10.	Suka Negeri (Kec. Air Nipis)	PPL	• Perkebunan • Kehutanan • Pertanian • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
11.	Pasar Pino (Kec. Pino Raya)	PPL	• Perkebunan • Pertanian • Perikanan • Peternakan • Kehutanan • Permukiman pedesaan

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

2.1.1.2. Resiko Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk daerah rawan bencana (ring of fire). Upaya peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana terus dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (1) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Kajian risiko bencana menghasilkan Indeks Risiko Bencana untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri masuk dalam kategori daerah dengan indeks risiko bencana tinggi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018- 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019 (Data awal)	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kecenderungan yang stabil selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022. Pada periode ini, nilai indeks risiko bencana tercatat tetap berada pada angka 186,40. Stabilitas ini dapat diartikan sebagai konsistensi dalam penilaian risiko bencana, yang mungkin mencerminkan kondisi dan faktor-faktor risiko yang tidak banyak berubah selama empat tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dengan penurunan indeks risiko bencana menjadi 165,18. Penurunan ini sebesar 21,20 poin menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mitigasi dan manajemen risiko bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan. Langkah-langkah yang telah diambil, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, tampaknya berhasil mengurangi potensi risiko yang dihadapi.

Penurunan indeks risiko bencana pada tahun 2023 ini juga bisa menjadi indikasi keberhasilan berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan. Misalnya, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan dan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, sehingga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara keseluruhan, perubahan dalam Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menggambarkan perjalanan yang dinamis dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penurunan indeks di tahun 2023 menjadi titik balik yang penting, mencerminkan keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai dalam menghadapi tantangan bencana.

Ancaman bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa potensi diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan serta cuaca ekstrim

2.1.1.3. Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merujuk pada dimensi spasial yang mencakup energi, kondisi fisik, dan keberadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang saling berinteraksi dengan alam, mempengaruhi kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pelaksanaan berbagai proyek strategis di Kabupaten Kaur, di mana program dan kegiatan pembangunan memerlukan sumber daya alam yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap keadaan alam dan kehidupan, seperti peningkatan polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini berpotensi mengancam daya dukung, ketahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan program pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara komprehensif.

Pengukuran kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup penilaian terhadap kondisi kualitas air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. IKLH berperan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan secara substansial mencerminkan kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data penting untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH tidak hanya memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengindikasikan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terdapat tiga indikator utama yang menjadi komponen dalam perhitungan IKLH, yaitu kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Sebelum tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan tiga indikator, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Namun, mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan perubahan dalam rumus IKLH, dengan tambahan Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Informasi terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2021 hingga 2023 tersedia pada Tabel berikut ini.

Tabel II-8. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021 (Data awal)	2022	2023	2021 (Data awal)	2022	2023
Bengkulu Selatan	55,00	45,00	45,00	92,62	92,39	93,04
Rejang Lebong	58,33	63,33	61,67	86,56	88,41	89,58
Bengkulu Utara	50,00	50,00	30,00	87,47	89,35	91,46
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Seluma	45,00	30,00	60,00	93,04	92,98	94,48
Mukomuko	N/A	40,00	48,46	90,79	90,60	91,82
Lebong	50,00	48,57	52,00	95,32	96,67	96,21
Kepahiang	48,33	43,53	51,11	91,39	91,62	93,96
Bengkulu Tengah	44,29	40,40	54,17	87,68	86,94	89,28
Kota Bengkulu	44,12	45,00	37,78	88,70	88,10	90,65
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Tabel II-9. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021 (Data awal)	2022	2023	2021 (Data awal)	2022	2023
Bengkulu Selatan	46,77	46,83	47,61	68,43 (Sedang)	64,59 (Sedang)	65,03 (Sedang)
Rejang Lebong	43,41	43,41	45,94	66,50 (Sedang)	70,12 (Sedang)	69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara	57,21	57,21	56,93	66,75 (Sedang)	68,51 (Sedang)	60,79 (Sedang)
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)
Seluma	45,90	45,90	45,94	64,65 (Sedang)	59,99 (Sedang)	70,89 (Baik)
Mukomuko	64,48	64,56	64,09	50,89 (Sedang)	66,87 (Sedang)	69,44 (Sedang)
Lebong	77,44	76,03	77,55	74,36 (Baik)	75,06 (Baik)	75,50 (Baik)
Kepahiang	29,19	29,19	29,51	61,58 (Sedang)	60,86 (Sedang)	63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah	25,62	25,62	26,59	57,77 (Sedang)	57,01 (Sedang)	62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu	25,22	25,22	27,93	58,04 (Sedang)	58,12 (Sedang)	57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami penurunan signifikan dari 55,00 pada tahun 2021 menjadi 45,00 pada tahun 2022 dan tetap di angka 45,00 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kualitas air yang perlu segera diatasi untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat. Penurunan kualitas air ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran industri, limbah domestik, dan perubahan lingkungan yang berdampak pada sumber daya air. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, seperti Rejang Lebong yang memiliki IKA lebih tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk

meningkatkan kualitas air, termasuk peningkatan pengelolaan limbah dan penyediaan infrastruktur pengolahan air yang lebih baik.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan hasil yang relatif stabil dan positif. Pada tahun 2021, IKU tercatat sebesar 92,62 dan sedikit menurun menjadi 92,39 pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 93,04 pada tahun 2023. Kualitas udara yang tinggi ini mencerminkan bahwa polusi udara di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada tingkat yang rendah, yang baik untuk kesehatan masyarakat. Kualitas udara yang baik ini mungkin dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas industri berat dan tingkat penghijauan yang cukup di daerah tersebut. Hasil ini sebanding dengan beberapa kabupaten lain seperti Kaur dan Mukomuko yang juga menunjukkan kualitas udara yang tinggi. Meskipun demikian, tetap penting untuk menjaga kualitas udara ini dengan mengendalikan sumber-sumber polusi potensial seperti kendaraan bermotor dan pembakaran terbuka.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan peningkatan kecil dari 46,77 pada tahun 2021 menjadi 46,83 pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 47,61 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami sedikit perbaikan, meskipun masih perlu lebih banyak upaya untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Pengelolaan lahan yang lebih baik dapat dicapai melalui praktik pertanian yang berkelanjutan, reboisasi, dan pengendalian erosi. Dalam perbandingan dengan kabupaten lain, Lebong menonjol dengan IKL yang jauh lebih tinggi, menunjukkan pengelolaan lahan yang lebih efektif. Belajar dari kabupaten-kabupaten yang berhasil bisa menjadi strategi penting untuk meningkatkan pengelolaan lahan di Bengkulu Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kategori "sedang" selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 68,43, menurun menjadi 64,59 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 65,03 pada tahun 2023. Meskipun indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup tidak mengalami perubahan drastis, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 menandakan adanya tantangan yang perlu ditangani untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. IKLH yang stabil namun masih dalam kategori sedang mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa

perbaikan, tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah, kualitas air, dan penggunaan lahan masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kabupaten seperti Lebong dan Mukomuko menunjukkan hasil yang lebih baik dalam berbagai indeks kualitas lingkungan, termasuk IKLH. Memperhatikan dan mengadopsi strategi yang telah berhasil di kabupaten-kabupaten tersebut dapat membantu meningkatkan IKLH di Bengkulu Selatan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa peningkatan dalam kualitas lahan dan stabilitas dalam kualitas udara, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu fokus pada upaya peningkatan kualitas air dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Langkah-langkah seperti peningkatan pengelolaan sumber daya air, pengendalian pencemaran, dan pelaksanaan program-program keberlanjutan lingkungan perlu diperkuat untuk mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya ini termasuk peningkatan infrastruktur pengolahan air, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, dapat mempercepat upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kaur yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, dan Lebong yang menunjukkan pengelolaan lahan yang efektif, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat belajar dan mengadopsi strategi-strategi sukses dari kabupaten-kabupaten tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungannya.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan melalui kegiatan yang ada pada seksi pengendalian gas rumah kaca: kegiatan yang dilakukan baru pada tahap perencanaan dan pengumpulan data sumber emisi yaitu transportasi, industri, dan penggunaan energi. Identifikasi dan inventarisasi lokasi kegiatan yang potensi menghasilkan gas rumah kaca di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan memetakan lokasi sumber penghasil emisi dan merancang tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan nantinya.

Rencana mengendalikan pencemaran udara/pengendalian emisi(GRK) dilakukan dengan sosialisasi peningkatan efisiensi energi, promosi transportasi ramah

lingkungan, dan pengelolaan limbah yang bersih kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya data-data tentang potensi gas rumah kaca nantinya dapat dilakukan penilaian emisi dengan metodologi penghitungan total emisi GRK lewat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap potensi emisi secara berkala, bekerjasama dengan kementrian LHK RI untuk mengetahui parameter udara ambien, dan sumber emisi yang ada di daerah industry, perumahan, padat transportasi, dan perkantoran melalui alat uji kualitas udara yang telah dipasang oleh tim DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan pada lokasi-lokasi tertentu sesuai arahan dari Kementrian LHK RI

2.1.1.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan

global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II-10. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019 (data awal)				2020			
	IK	IA	IP	IKP	IK	IA	IP	IKP
Bengkulu Selatan	92,36	71,52	58,18	72,44	95,18	68,97	63,24	74,54
Rejang Lebong	83,48	74,47	58,85	70,93	71,12	81,13	56,19	68,15
Bengkulu Utara	68,67	79,09	56,31	66,85	71,12	81,13	56,19	68,15
Kaur	87,9	69,98	56,75	70,06	86,72	70,84	58,54	70,68
Seluma	85,05	69,72	52,81	67,55	87,79	70,77	50,38	67,72
Muko-muko	71,83	81,06	62,42	70,84	77,71	82,75	58,29	71,46
Lebong	86,74	75,36	58,9	72,19	94,21	75,01	63,31	76,09
Kepahiang	79,19	79,15	62,14	72,36	80,49	76,87	54,47	68,99
Bengkulu Tengah	77,56	83,78	61,58	73,03	59,78	83,27	60,81	67,24

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)

Tabel II-11. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021				2022			
	IK	IA	IP	IKP	IK	IA	IP	IKP
Bengkulu Selatan	94,06	68,94	58,5	72,3	92,04	70,9	61,96	73,67
Rejang Lebong	73,9	75,07	57,13	67,54	66,9	76,65	59,04	66,68
Bengkulu Utara	68,63	79,29	59,58	68,21	31,02	81,62	61,3	58,31
Kaur	89,14	70,44	60,63	72,12	81,75	68,05	66,41	71,51
Seluma	86,46	70,9	50,2	67,29	86,5	71,65	52,73	68,54
Muko-muko	85,36	80,09	66,33	76,17	70,03	82,3	65,21	71,78
Lebong	93,38	75,57	59,25	74,38	93,65	77,84	58,52	74,86
Kepahiang	75,95	73,89	59,33	68,68	65,44	77,48	60,65	67,14
Bengkulu Tengah	68,29	82,3	58,62	68,63	41,94	84,36	60,56	62,12

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)

Tabel II-12. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	2023			
	IK	IA	IP	IKP
Bengkulu Selatan	93,1	71,1	63,4	74,6
Rejang Lebong	79,1	77,2	64,4	72,7
Bengkulu Utara	63,9	83,6	66,2	70,7
Kaur	85,7	68,8	68,8	73,9
Seluma	85,3	71,2	61,7	71,6
Muko-muko	79,9	82,7	69,7	76,6
Lebong	94,7	76,6	61,1	75,8

Kabupaten/ Kota	2023			
	IK	IA	IP	IKP
Kepahiang	71,3	76,9	62,4	69,4
Bengkulu Tengah	39,5	84,3	61	61,5

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)
Keterangan:
IK: Indeks Ketersediaan
IA: Indeks Keterjangkauan
IP: Indeks Pemanfaatan
IKP: Indeks Ketahanan Pangan

Data Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA), Indeks Pemanfaatan (IP), dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketersediaan (IK), yang mengukur tingkat ketersediaan pangan di suatu daerah, mengalami peningkatan dari 92,36 pada tahun 2019 menjadi 95,18 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, IK sedikit menurun menjadi 94,06 dan kembali menurun ke 92,04 pada tahun 2022 sebelum meningkat menjadi 93,07 pada tahun 2023. Peningkatan IK pada awal periode menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan pangan, namun penurunan pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan di daerah tersebut.

Indeks Keterjangkauan (IA), yang mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang tersedia, mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2019, IA tercatat sebesar 71,52, kemudian menurun menjadi 68,97 pada tahun 2020, dan tetap stabil di sekitar 68,94 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, IA meningkat menjadi 70,9, dan terus meningkat hingga 71,11 pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, aksesibilitas pangan di Bengkulu Selatan masih memerlukan perhatian lebih untuk ditingkatkan, terutama untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah.

Indeks Pemanfaatan (IP), yang mencerminkan sejauh mana pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari 58,18 pada tahun 2019 menjadi 63,24 pada tahun 2020. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 58,5, IP kembali

meningkat ke 61,96 pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut menjadi 63,43 pada tahun 2023. Peningkatan IP ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemanfaatan pangan, yang mencakup aspek kualitas gizi dan keamanan pangan. Penurunan pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti gangguan distribusi atau penurunan kualitas pangan yang perlu diatasi untuk mempertahankan tren positif.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang merupakan gabungan dari ketiga indeks di atas, menunjukkan peningkatan dari 72,44 pada tahun 2019 menjadi 74,54 pada tahun 2020. IKP adalah ukuran keseluruhan yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan di suatu daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Namun, IKP menurun menjadi 72,3 pada tahun 2021 sebelum meningkat lagi menjadi 73,67 pada tahun 2022 dan mencapai 74,63 pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan secara keseluruhan, fluktuasi IKP menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, perbandingan IKP Kabupaten Bengkulu Selatan dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu menunjukkan variasi dalam ketahanan pangan. Rejang Lebong, misalnya, menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan IKP menurun dari 70,93 pada tahun 2019 menjadi 68,15 pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 72,67 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, namun tantangan masih ada dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Bengkulu Utara mengalami penurunan tajam pada IKP dari 66,85 pada tahun 2019 menjadi 58,31 pada tahun 2022, sebelum meningkat menjadi 70,74 pada tahun 2023, menunjukkan adanya masalah besar yang memerlukan perhatian meskipun ada tanda-tanda perbaikan pada tahun terakhir. Sementara itu, Kaur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam IKP dari 70,06 pada tahun 2019 menjadi 73,9 pada tahun 2023, menandakan upaya yang sukses dalam memperbaiki ketahanan pangan secara berkelanjutan. Seluma, di sisi lain, memperlihatkan tren yang stabil dengan sedikit fluktuasi, mencerminkan perlunya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi, tren peningkatan pada tahun-tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang relatif stabil dan berpotensi menjadi contoh dalam upaya memperbaiki ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu.

Untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan produksi pangan lokal serta memperbaiki sistem distribusi agar dapat mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Kedua, kebijakan yang fokus pada peningkatan aksesibilitas pangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, sangat penting. Pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan juga harus diperkuat untuk memastikan keterjangkauan yang merata. Ketiga, program edukasi tentang gizi dan keamanan pangan harus diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses ke pangan, tetapi juga memahami pentingnya kualitas dan cara pemanfaatan yang tepat. Terakhir, pemerintah daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program ketahanan pangan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat meningkatkan ketahanan pangannya secara keseluruhan dan memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap pangan yang berkualitas.

2.1.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah, karena sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2023, konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 33,55% atau sebesar Rp. 1.911 Milliar, meningkat dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 32,67% atau sebesar Rp. 1.864 Milliar.

Cakupan kegiatan pertanian meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian, Kehutanan dan Penebangan Kayu serta Perikanan. Sektor ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja yang utama, karena kurang lebih 46 persen penduduk bekerja pada sektor ini (Susenas, 2022).

Tabel II-13.Target dan Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Rata-rata Provitas (Ton)	Produksi (Ton)	
		Target	Realisasi	Kotor	Bersih		Target	Realisasi
1	Pino Raya	2.105	908	1.948	1.618	4,50	8.908	6.928
2	Pino	1.398	677	1.303	1.082	4,60	6.058	4.688
3	Ulu Manna	479	310	250	207	4,50	2.068	914
4	Kota Manna	210	33	121	101	4,50	888	447
5	Manna	909	277	534	444	4,60	3.930	1.951
6	Pasar Manna	143	12	85	71	4,50	608	316
7	Seginim	3.609	3.166	3.274	2.719	4,80	16.111	12.162
8	Air Nipis	2.859	2.718	2.688	2.232	4,70	12.314	10.154
9	Bunga Mas	657	549	595	494	4,60	2.786	2.134
10	Kedurang	1.6683	1.562	1.558	1.295	4,70	7.185	5.898
11	Kedurang Ilr	575	179	128	106	4,60	2.433	473
	Jumlah	**14.612**	**10.394**	**12.484**	**10.369**	**4.60**	**64.200**	**46.065**
	2022	15.393	13.981	13.578	11283	4,60	63,262,08	51.917
	2021	15.393	15.376	14.659	12085	3,99	63.262,08	58.495
	2020	16.736	15.963	15.671	13.662	4.38	67.421,34	59.492
	2019	16.736	13.635	18.043	17.611	3,99	66.776,64	70.638

Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan target luas tanam padi, baik padi sawah maupun padi ladang, sebesar 14.612 hektar. Namun, realisasi luas tanam hanya mencapai 10.394 hektar, yang menunjukkan pencapaian sekitar 71% dari target yang ditetapkan. Dari luas tanam yang direalisasikan, luas panen kotor tercatat sebesar 12.484 hektar, dan setelah pembersihan, luas panen bersih menjadi 10.369 hektar. Rata-rata produktivitas padi di seluruh kabupaten adalah 4,60 ton per hektar, menghasilkan total produksi sebesar 46.065 ton.

Beberapa kecamatan menunjukkan performa yang signifikan dalam realisasi produksi padi. Kecamatan Seginim memimpin dengan realisasi luas tanam tertinggi, yaitu 3.166 hektar, menghasilkan 12.162 ton padi dari luas panen bersih sebesar 2.719 hektar. Kecamatan Air Nipis juga menunjukkan hasil yang kuat dengan realisasi luas tanam sebesar 2.718 hektar dan produksi padi mencapai 10.154 ton. Ini

menunjukkan bahwa meskipun target keseluruhan belum tercapai, beberapa daerah masih mampu menghasilkan padi dalam jumlah yang signifikan.

Namun, beberapa kecamatan lainnya menghadapi tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Misalnya, Kecamatan Pino Raya, dengan target luas tanam 2.105 hektar, hanya mampu merealisasikan 908 hektar dan menghasilkan 6.928 ton padi. Demikian pula, Kecamatan Pino, dengan target 1.398 hektar, hanya merealisasikan 677 hektar dan menghasilkan 4.688 ton padi. Penurunan realisasi luas tanam dan produksi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya ketersediaan air irigasi, masalah dalam pengelolaan lahan, atau gangguan iklim yang tidak terduga.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi padi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, produksi padi tercatat sebesar 51.917 ton, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 58.495 ton. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam sektor pertanian padi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kesulitan dalam pengelolaan sumber daya air, dan masalah hama atau penyakit tanaman mungkin telah berkontribusi pada penurunan hasil ini.

Untuk mengatasi penurunan ini dan meningkatkan produksi padi di masa depan, beberapa langkah perlu dipertimbangkan. Pertama, optimalisasi penggunaan teknologi pertanian modern dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan. Ini termasuk penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lebih produktif. Kedua, peningkatan sistem irigasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai sepanjang musim tanam. Ketiga, penyuluhan dan pelatihan bagi petani tentang teknik budidaya yang lebih efektif dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi lahan dan tanaman dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan efektif. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan di masa mendatang. Untuk itu, Pemerintah Daerah mengupayakan

peningkatan produksi padi sehingga dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan berkualitas. Adapun data produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-14. Hasil Produksi Padi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi Sawah dan padi Ladang (Ton)	89.232	70.638	59.492	58.495	57.515	46.065
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20% (Ton)	50.755	40.179	33.839	33.272	32.714	27.639
3	Jumlah penduduk Tahun Laporan (estimasi) (Jiwa)	150.601	158.409	166.249	166.249	166.867	172.162
4	Kebutuhan per kapita per tahun (Kg)	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80
5	Jumlah kebutuhan beras (Ton)	17.289	18.185	19.085	19.085	19.156	19.764
6	Surplus beras (Ton)	33.466	21.994	14.754	14.187	13.558	7.875

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Pada tahun 2023, produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan yang cukup serius, dengan penurunan signifikan dalam hasil produksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi padi sawah dan padi ladang tercatat hanya sebesar 46.065 ton, mengalami penurunan drastis dari 57.515 ton pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh sektor pertanian di daerah tersebut, seperti perubahan iklim, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian, atau masalah lainnya yang mempengaruhi produktivitas padi.

Penurunan produksi padi ini juga berdampak langsung pada jumlah beras yang dihasilkan. Setelah memperhitungkan penyusutan dan konversi padi menjadi beras, total produksi beras pada tahun 2023 mencapai 27.639 ton. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana produksi beras mencapai 32.714 ton. Dengan menurunnya produksi beras, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu mencermati situasi ini, terutama mengingat pentingnya beras sebagai bahan pokok pangan bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 tercatat mencapai 172.162 jiwa, menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kebutuhan beras per kapita per tahun yang tetap di angka 114,80 kg, total kebutuhan beras masyarakat pada tahun tersebut diperkirakan mencapai 19.764 ton. Meskipun produksi beras mengalami penurunan, Kabupaten Bengkulu Selatan masih

mencatatkan surplus beras sebesar 7.875 ton. Namun, perlu dicatat bahwa surplus ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan semakin menipisnya margin antara produksi dan kebutuhan konsumsi beras. Surplus yang menurun ini menandakan perlunya tindakan segera untuk mengatasi penurunan produksi padi, baik melalui peningkatan efisiensi pertanian, adopsi teknologi baru, atau intervensi lainnya yang dapat membantu memulihkan dan meningkatkan produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tanpa upaya tersebut, risiko ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah bisa meningkat, yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di masa depan.

Disamping pengembangan produksi padi sebagai produk unggulan, Pemerintah Daerah juga mengupayakan pengembangan komoditi jagung sebagai komoditi alternatif penyokong perekonomian masyarakat. Bahkan Pemerintah Daerah telah menetapkan sebagai program prioritas ”Bengkulu Selatan sebagai sentra jagung nasional”. Berbagai upaya terus diupayakan untuk peningkatan produktivitas jagung, mulai dari membuka kran kerjasama dengan pihak swasta, dan hilirisasi produk jagung.

Tabel II-15. Target dan Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Jagung Tahun 2023

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)		Rata2 Produktifitas (Ton/Ha)	Realisasi (Ton)
			Kotor	Bersih		
1	Pino Raya	31	27	16	4,94	79
2	Pino	349	391	217	4,87	1.056
3	Ulu Manna	253	197	109	5,01	546
4	Kota Manna	121	126	71	5,11	363
5	Manna	205	109	61	5,15	314
6	Pasar Manna	84	38	21	5,10	107
7	Seginim	286	399	224	5,17	1.159
8	Air Nipis	322	370	208	5,26	1.094
9	Bunga Mas	133	169	96	5,16	495
10	Kedurang	249	285	158	5,13	811
11	Kedurang Ilr	324	259	143	5,09	728
	Jumlah	2.357	2.370	1.323	5,09	6.752
	2022	5.180	9.429	5.388	5,58	30.227
	2021	13.360	8.822	8.472	4,80	42.360
	2020	3.566	5.667	5.593	4,96	28.105
	2019	12.203	15.191	15.107	5,25	79.720

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Pada tahun 2023, realisasi produksi jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan hasil yang beragam di berbagai kecamatan. Total luas tanam jagung di seluruh kabupaten mencapai 2.357 hektar, dengan luas panen sebesar 2.370 hektar. Dari jumlah tersebut, rata-rata produktivitas jagung di tingkat kabupaten tercatat sebesar 5,09 ton per hektar, menghasilkan total produksi jagung bersih sebanyak 6.752 ton. Di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pino dan Seginim mencatatkan luas panen yang paling signifikan, masing-masing dengan luas panen sebesar 391 hektar dan 399 hektar. Produktivitas di Kecamatan Seginim juga mencatatkan angka yang cukup baik, yaitu 5,17 ton per hektar, menghasilkan produksi jagung sebesar 1.159 ton, yang merupakan salah satu angka produksi tertinggi di kabupaten. Kecamatan Air Nipis mengikuti dengan produktivitas rata-rata 5,26 ton per hektar dan menghasilkan 1.094 ton jagung.

Kecamatan Kedurang Ilir, dengan luas tanam 324 hektar dan luas panen 259 hektar, memiliki produktivitas rata-rata sebesar 5,09 ton per hektar, menghasilkan total produksi 728 ton. Sementara itu, Kecamatan Ulu Manna dan Kota Manna juga memberikan kontribusi signifikan dengan masing-masing menghasilkan 546 ton dan 363 ton jagung. Kecamatan Bunga Mas, dengan luas panen 169 hektar, mencatat produktivitas 5,16 ton per hektar dan menghasilkan 495 ton jagung.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan dalam total produksi jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023. Produksi jagung bersih tahun ini sebesar 6.752 ton jauh lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yang mencapai 30.227 ton dan tahun 2021 yang mencapai 42.360 ton. Penurunan ini mungkin mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani jagung di wilayah tersebut, seperti perubahan iklim, ketersediaan input pertanian, atau masalah lainnya yang mempengaruhi hasil panen. Data ini mengindikasikan perlunya strategi baru untuk meningkatkan produktivitas dan luas tanam di masa mendatang guna mengembalikan produksi jagung ke tingkat yang lebih tinggi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

A. Perkebunan

Perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama sebagai sumber utama pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk

domestik regional bruto. Dari kondisi yang ada, diketahui bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu penyumbang peningkatan daya beli masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Bengkulu Selatan bergerak pada sektor perkebunan.

Secara umum, sektor perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang merata di seluruh kecamatan. Bahkan untuk mendukung produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berdiri 2 (dua) perusahaan pengolahan kelapa sawit yaitu PT. Sinar Bengkulu Selatan dan PT. Bengkulu Sawit Lestari.

Tabel II-16. Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Kelapa Sawit	2.300,87	26.571,06	-	28.871,93	314.243.083,55	11.826,52
2	Karet	-	642,50	-	642,50	512.698,29	797,97
3	Kopi Robusta	2,50	1.051,47	-	1.053,97	877.511,80	834,56
4	Kopi Arabica	-	-	-	-	-	
5	Kakao	-	209,70	8,50	218,20	128.289,68	611,78
6	Kelapa Dalam	-	582,12	-	582,12	947.608,35	1.627,86
7	Lada	-	6,41	-	6,41	230,56	35,97
8	Cengkeh	-	24,15	-	18,86	2.878,03	119,17
9	Aren	-	65,07	-	65,07	37.352,19	574,03
10	Kayu Manis	-	-	-	-	-	
11	Pinang	49,40	185,40	-	234,80	104.530,56	563,81
12	Kapuk	-	0,50	-	0,50	23,55	47,10
13	Kemiri	-	-	-	-	-	
14	Vanili	-	-	-	-	-	
15	Pala	99,44	-	5,00	104,44	-	
16	Jarak Pagar	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat berbagai produksi komoditas perkebunan dengan variasi luas lahan dan hasil produksi yang signifikan di berbagai kecamatan. Kelapa sawit menjadi komoditas dengan luas lahan terbesar, mencapai 28.871,93 hektar, yang terdiri dari lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 2.300,87 hektar dan Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 26.571,06 hektar. Produksi kelapa sawit pada tahun 2023 mencapai 314.243,08 ton, dengan rata-rata produksi sebesar 11.826,52 ton per hektar. Karet, sebagai salah satu komoditas utama lainnya, memiliki luas lahan sebesar 642,50 hektar, seluruhnya adalah lahan TM. Produksi karet mencapai 512,70 ton, dengan rata-rata produksi sebesar 797,97 ton per hektar. Kopi robusta juga menempati lahan yang cukup luas,

yaitu 1.053,97 hektar, dengan produksi mencapai 877,51 ton dan rata-rata produksi sebesar 834,56 ton per hektar.

Komoditas kelapa dalam juga menunjukkan hasil produksi yang cukup signifikan dengan luas lahan 582,12 hektar dan total produksi mencapai 947,61 ton, dengan rata-rata produksi 1.627,86 ton per hektar. Di sisi lain, kakao memiliki luas lahan 218,20 hektar dan menghasilkan 128,29 ton dengan rata-rata produksi 611,78 ton per hektar. Beberapa komoditas lain seperti lada, cengkeh, aren, pinang, kapuk, dan pala juga berkontribusi terhadap produksi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, meskipun dengan jumlah produksi yang lebih kecil. Misalnya, produksi lada mencapai 230,56 ton dari lahan seluas 6,41 hektar, sementara produksi cengkeh mencapai 2,88 ton dari lahan seluas 24,15 hektar.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan yang dominan di Kabupaten Bengkulu Selatan, baik dari segi luas lahan maupun hasil produksi. Namun, komoditas lain seperti karet, kopi, dan kelapa dalam juga memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah, mencerminkan diversifikasi dalam sektor perkebunan yang perlu terus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi di wilayah ini.

Tabel II-17. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	529,45	9.970,35	-	10.499,80	125.968.891,52	12.634,35
2	Pino	209,57	2.879,99	-	3.089,56	33.322.204,30	11.570,25
3	Ulu Manna	348,10	1.608,85	-	1.956,95	17.777.792,50	11.050,00
4	Seginim	71,50	1.048,65	-	1.120,15	11.572.272,21	11.035,40
5	Air Nipis	115,75	1.313,00	-	1.428,75	13.237.262,50	10.081,69
6	Kedurang	138,00	1.572,04	-	1.710,04	17.686.236,02	11.250,50
7	Kedurang Ilir	190,00	1.944,63	-	2.134,63	22.447.836,41	11.543,50
8	Kota Manna	125,45	2.062,95	-	2.188,40	23.450.584,13	11.367,50
9	Pasar Manna	12,25	159,84	-	172,09	1.767.095,14	11.055,40
10	Bunga Mas	451,30	1.791,62	-	2.242,92	21.320.815,49	11.900,30
11	Manna	109,50	2.219,14	-	2.328,64	25.692.093,35	11.577,50
	Jumlah	2.300,87	26.571,06	-	28.871,93	314.243.083,55	11.826,52
	2022	2.057,42	26.748,76	-	28.806,18	364.546.287,31	13.628,53
	2021	2.433,62	12.699,00	19,50	15.122,12	181.610.554,12	14.335,03
	2020	2.245,62	12.808,00	-	15.058,12	189.067.520,00	14.761,67
	2019	2.421,87	12.588,00	-	15.027,87	183.347.508,00	12.200.50

Pada tahun 2023, luas areal dan produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan distribusi yang signifikan di berbagai kecamatan. Total luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 28.871,93 hektar, yang terdiri dari 2.300,87 hektar Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan 26.571,06 hektar Tanaman Menghasilkan (TM). Produksi kelapa sawit pada tahun 2023 tercatat sebesar 314.243.083,55 kg dengan rata-rata produksi 11.826,52 ton per hektar. Kecamatan Pino Raya merupakan wilayah dengan luas lahan terbesar untuk kelapa sawit, yaitu 10.499,80 hektar, yang menghasilkan 125.968.891,52 kg kelapa sawit, dengan rata-rata produksi mencapai 12.634,35 ton per hektar. Kecamatan Kedurang Ilir juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan luas lahan 2.134,63 hektar dan produksi sebesar 22.447.836,41 kg, serta rata-rata produksi 11.543,50 ton per hektar.

Kecamatan lainnya seperti Manna, Kota Manna, dan Bunga Mas juga memberikan kontribusi yang penting terhadap total produksi kelapa sawit di kabupaten ini. Kecamatan Manna memiliki luas lahan 2.328,64 hektar dan menghasilkan 25.692.093,35 kg dengan rata-rata produksi 11.577,50 ton per hektar. Kecamatan Kota Manna dan Bunga Mas masing-masing mencatat produksi sebesar 23.450.584,13 kg dan 21.320.815,49 kg dengan rata-rata produksi yang juga cukup tinggi.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan dalam total produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit mencapai 364.546.287,31 kg, dengan rata-rata produksi 13.628,53 ton per hektar. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, ketersediaan input pertanian, atau perubahan dalam praktik pengelolaan lahan. Data ini menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar dapat mengembalikan tingkat produksi ke level yang lebih tinggi di masa mendatang.

Tabel II-18. Luas Areal dan Produksi Komoditi Karet Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	-	79,19	-	79,19	67.010,58	-
2	Pino	-	111,57	-	111,57	95.648,96	-
3	Ulu Manna	-	30,82	-	30,82	24.508,06	-
4	Seginim	-	21,85	-	21,85	17.381,68	-
5	Air Nipis	-	65,35	-	65,35	50.417,53	-
6	Kedurang	-	23,06	-	23,06	18.007,55	-
7	Kedurang Ilir	-	194,48	-	194,48	148.485,48	-
8	Kota Manna	-	26,12	-	26,12	22.053,12	-
9	Pasar Manna	-	3,70	-	3,70	2.904,87	-
10	Bunga Mas	-	68,16	-	68,16	50.533,82	-
11	Manna	-	18,20	-	18,20	15.746,64	-
	Jumlah	-	642,50	-	642,50	512.698,29	-
	2022	-	642,50	-	642,50	577.945,67	899,53
	2021	1.140,25	2.996,75	10,00	4.147,00	2.569.872,25	857,55
	2020	1.157,00	3.007,50	-	4.162,50	2.695.593,00	896,29
	2019	1.199,00	3.032,00	-	4.223,00	2.839.689,80	1.120,20

Pada tahun 2023, produksi karet di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di berbagai kecamatan dengan total luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 642,50 hektar. Meskipun tidak ada luas lahan untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) atau Tanaman Tidak Menghasilkan (TT/TR), produksi karet tetap berlangsung di lahan yang ada. Total produksi karet di seluruh kecamatan mencapai 512.698,29 kg, yang mencerminkan kontribusi yang signifikan dari sektor perkebunan karet di daerah ini.

Kecamatan Kedurang Ilir memiliki luas lahan TM terbesar untuk karet, yaitu 194,48 hektar, dan menghasilkan 148.485,48 kg karet. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kedurang Ilir menjadi salah satu pusat produksi karet yang penting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kecamatan Pino Raya, dengan luas lahan TM sebesar 111,57 hektar, menghasilkan 95.648,96 kg karet, juga berperan signifikan dalam produksi karet di kabupaten ini.

Kecamatan lainnya, seperti Air Nipis dan Bunga Mas, masing-masing memiliki luas lahan TM sebesar 65,35 hektar dan 68,16 hektar, dengan produksi mencapai 50.417,53 kg dan 50.533,82 kg karet. Meskipun luas lahan di beberapa kecamatan lainnya, seperti Pasar Manna dan Seginim, relatif lebih kecil, mereka tetap berkontribusi terhadap total produksi karet kabupaten.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat adanya penurunan dalam total produksi karet. Pada tahun 2022, produksi karet mencapai 577.945,67 kg dengan luas lahan yang sama, sementara pada tahun 2021, produksi karet jauh lebih tinggi, yaitu 2.569.872,25 kg, dengan luas lahan yang lebih besar. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh sektor perkebunan karet di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti perubahan iklim, penurunan produktivitas lahan, atau masalah terkait lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani karet di daerah tersebut agar produksi dapat kembali meningkat di masa mendatang.

Tabel II-19. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	2,50	31,20	-	33,70	12.558,00	2,50
2	Pino	-	44,13	-	44,13	21.471,45	-
3	Ulu Manna	-	391,20	-	391,20	339.678,96	-
4	Seginim	-	11,57	-	11,57	4.865,19	-
5	Air Nipis	-	320,05	-	320,05	279.467,66	-
6	Kedurang	-	228,40	-	228,40	206.039,64	-
7	Kedurang Ilir	-	9,99	-	9,99	6.108,50	-
8	Kota Manna	-	3,82	-	3,82	1.604,40	-
9	Pasar Manna	-	1,57	-	1,57	926,93	-
10	Bunga Mas	-	5,54	-	5,54	2.781,08	-
11	Manna	-	4,00	-	4,00	2.010,00	-
	Jumlah	2,50	1.051,47	-	1.053,97	877.511,80	2,50
	2022	2,50	1.051,47	-	1.053,97	959.927,97	912,94
	2021	153,95	2.528,25	21,00	2.703,20	2.051.913,00	811,59
	2020	148,45	2.531,30	-	2.700,70	2.047.099,60	808,73
	2019	129,45	2.553,25	-	2.692.70	2.080.794,20	772,75

Pada tahun 2023, produksi kopi di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan distribusi yang bervariasi di berbagai kecamatan, dengan total luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi sebesar 1.053,97 hektar. Dari jumlah tersebut, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) tercatat seluas 2,50 hektar, sementara Tanaman Menghasilkan (TM) mendominasi dengan luas 1.051,47 hektar. Total produksi kopi pada tahun 2023 mencapai 877.511,80 kg, dengan rata-rata produksi yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Ulu Manna mencatat produksi kopi tertinggi dengan luas lahan TM sebesar 391,20 hektar dan menghasilkan 339.678,96

kg kopi. Ini menandakan bahwa Kecamatan Ulu Manna adalah salah satu pusat utama produksi kopi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kecamatan Air Nipis juga memberikan kontribusi signifikan dengan luas lahan TM sebesar 320,05 hektar dan produksi mencapai 279.467,66 kg.

Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir masing-masing memiliki luas lahan TM sebesar 228,40 hektar dan 9,99 hektar, dengan produksi kopi mencapai 206.039,64 kg dan 6.108,50 kg. Kecamatan Pino Raya, dengan luas lahan TM sebesar 31,20 hektar dan 44,13 hektar, menghasilkan 12.558,00 kg dan 21.471,45 kg kopi. Meskipun luas lahannya relatif lebih kecil, beberapa kecamatan seperti Bunga Mas, Kota Manna, dan Pasar Manna juga berkontribusi terhadap produksi kopi di kabupaten ini.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, total produksi kopi di tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana produksi kopi mencapai 959.927,97 kg. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan kopi di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti penurunan produktivitas lahan, perubahan iklim, atau masalah terkait lainnya. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lebih awal, seperti 2020 dan 2021, terlihat bahwa luas lahan dan produksi kopi pernah jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari dua juta kilogram, menunjukkan potensi besar yang pernah ada di sektor ini. Data ini menunjukkan pentingnya upaya revitalisasi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan perkebunan kopi agar dapat mengembalikan tingkat produksi ke level yang lebih tinggi dan lebih stabil di masa mendatang.

Tabel II-20. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kakao Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	-	12,97	-	12,97	6.635,84	-
2	Pino	-	32,18	-	32,18	15.983,81	-
3	Ulu Manna	-	37,00	-	37,00	22.351,70	-
4	Seginim	-	15,08	-	15,08	9.584,23	-
5	Air Nipis	-	22,89	-	22,89	17.588,68	-
6	Kedurang	-	27,10	8,50	35,60	13.281,71	-
7	Kedurang Ilir	-	8,28	-	8,28	5.208,95	-
8	Kota Manna	-	25,98	-	25,98	16.016,67	-
9	Pasar Manna	-	1,85	-	1,85	1.142,38	-
10	Bunga Mas	-	8,55	-	8,55	7.477,83	-

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
11	Manna	-	17,82	-	17,82	13.017,89	-
	Jumlah	-	209,70	8,50	218,20	128.289,68	-
	2022	-	281,55	8,50	290,05	183.416,41	651,45
	2021	210,25	797,25	12,25	1.019,75	545.562,00	684,30
	2020	243,75	816,00	-	1.067,00	522.971,25	640,90
	2019	234,75	837,75	-	1.072,50	520.418,11	485,24

Pada tahun 2023, produksi kakao di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai kecamatan dengan total luas lahan yang digunakan untuk komoditas ini mencapai 218,20 hektar. Dari jumlah tersebut, 209,70 hektar adalah Tanaman Menghasilkan (TM) dan 8,50 hektar adalah Tanaman Tidak Menghasilkan (TT/TR). Total produksi kakao di seluruh kabupaten mencapai 128.289,68 kg. Kecamatan Ulu Manna mencatat produksi kakao tertinggi dengan luas lahan TM sebesar 37,00 hektar dan menghasilkan 22.351,70 kg kakao. Kecamatan Pino Raya juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan dua wilayah, masing-masing dengan luas TM 12,97 hektar dan 32,18 hektar, menghasilkan total produksi sebesar 6.635,84 kg dan 15.983,81 kg kakao.

Kecamatan lainnya seperti Air Nipis dan Kedurang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi kakao di kabupaten ini. Kecamatan Air Nipis memiliki luas lahan TM sebesar 22,89 hektar dan menghasilkan 17.588,68 kg kakao, sementara Kecamatan Kedurang, dengan luas lahan TM sebesar 27,10 hektar dan TT/TR sebesar 8,50 hektar, menghasilkan 13.281,71 kg kakao.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan signifikan dalam total produksi kakao. Pada tahun 2022, produksi kakao mencapai 183.416,41 kg, sedangkan tahun 2021 dan 2020 mencatat produksi yang jauh lebih tinggi, masing-masing sebesar 545.562,00 kg dan 522.971,25 kg. Penurunan ini menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan kakao di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti penurunan produktivitas lahan atau masalah terkait lainnya. Data ini mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi dan strategi pengelolaan yang lebih baik untuk mengembalikan produksi kakao ke level yang lebih tinggi dan lebih stabil di masa mendatang.

Tabel II-21. Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata-rata (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	-	151,94	-	151,94	168.364,71	-
2	Pino Raya	-	41,12	-	41,12	410.556,47	-
3	Ulu Manna	-	26,90	-	26,90	26.266,51	-
4	Seginim	-	41,30	-	41,30	32.558,86	-
5	Air Nipis	-	63,55	-	63,55	65.011,65	-
6	Kedurang	-	33,98	-	33,98	22.822,67	-
7	Kedurang Ilir	-	17,72	-	17,72	17.516,22	-
8	Kota Manna	-	35,89	-	35,89	31.414,52	-
9	Pasar Manna	-	21,70	-	21,70	20.964,37	-
10	Bunga Mas	-	46,50	-	46,50	52.114,88	-
11	Manna	-	101,52	-	101,52	100.017,50	-
	Jumlah	-	582,12	-	582,12	947.608,35	-
	2022	-	582,12	-	582,12	651.566,92	1.119,30
	2021	115,55	789,00	9,50	914,05	893.665,00	1.132,66
	2020	125,35	798,00	-	923,35	877.913,85	1.102,91
	2019	125,35	798,00	-	923,35	898.675,56	1.198,16

Pada tahun 2023, produksi kelapa di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di berbagai kecamatan dengan total luas lahan yang digunakan mencapai 582,12 hektar, yang seluruhnya merupakan Tanaman Menghasilkan (TM). Total produksi kelapa di seluruh kabupaten mencapai 947.608,35 kg. Kecamatan Pino Raya mencatat produksi kelapa tertinggi dengan dua wilayah, yakni dengan luas lahan masing-masing 151,94 hektar dan 41,12 hektar, menghasilkan total produksi sebesar 168.364,71 kg dan 410.556,47 kg kelapa. Kecamatan Manna juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan luas lahan TM sebesar 101,52 hektar dan produksi mencapai 100.017,50 kg. Selain itu, Kecamatan Air Nipis dan Bunga Mas juga tercatat memiliki produksi yang cukup tinggi, masing-masing menghasilkan 65.011,65 kg dan 52.114,88 kg kelapa. Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir, meskipun memiliki luas lahan yang lebih kecil, tetap berkontribusi dengan masing-masing menghasilkan 22.822,67 kg dan 17.516,22 kg kelapa. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi kelapa pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022, yang tercatat sebesar 651.566,92 kg. Hal ini

menunjukkan bahwa produksi kelapa di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pertumbuhan yang baik dalam kurun waktu tersebut.

B. Pertambangan dan Industri

Sektor pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan berkontribusi menyumbang PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan harga berlaku hanya sebesar 2,23 persen atau sebesar Rp. 129.717.000.000. Rendahnya peranan sektor pertambangan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan karena belum optimalnya eksploitasi disebabkan keterbatasan kewenangan dan regulasi yang mengatur. Adapun potensi bahan galian pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II-22. Potensi Bahan Galian Pertambangan Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian	Lokasi
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu Air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua Dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2.000 Ha)
8.	Marmer	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	• Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang • Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15.	Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

Sumber: BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan, 2022

Potensi yang sudah dilakukan eksploitasi meskipun belum maksimal adalah pada potensi batuan, dimana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7 (tujuh) perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang aktif. Untuk peningkatan pembangunan daerah, kedepan potensi yang ada harus dioptimalkan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun harus tetap mengedepankan prinsip sustainable development serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan.

C. Perikanan

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan yang mensupport pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Produksi perikanan yang ada dapat dikelompokkan menjadi perikanan tangkap, yang terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan umum di daratan serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya berpusat di Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim, sedangkan perikanan tangkap laut merupakan aktivitas kecamatan yang berada di sepanjang pesisir, diantaranya Kecamatan Manna, Bunga Mas, Kota Manna, Pasar Manna, Kedurang Ilir, dan Pino Raya.

Produksi perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya, selama ini memenuhi permintaan pasar di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan juga pasar di daerah Pagar Alam, Lahat, dan sekitarnya. Berikut data produksi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel II-23. Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 (Ton)

Tahun	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
2019	1.820	32.669
2020	2.046	61.942
2021	2.533	48.698
2022	1.248,4	11.906,44
2023	1.640,57	9.165,34

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Pada tahun 2023, produksi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 1.640,57 ton, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 1.248,4 ton. Namun, angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 dan 2021, yang masing-masing mencapai 2.046 ton dan 2.533 ton. Sementara itu, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya mencapai 9.165,34 ton pada tahun 2023, dibandingkan dengan 11.906,44 ton pada tahun 2022. Penurunan ini terlihat lebih tajam bila dibandingkan dengan produksi puncak pada tahun 2020, yang mencapai 61.942 ton.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit peningkatan dalam produksi perikanan tangkap pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya justru menurun

secara drastis. Ini menandakan adanya fluktuasi yang cukup besar dalam hasil perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2019-2023. Produksi perikanan budidaya yang awalnya mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020, terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023. Sebaliknya, produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan sejak puncaknya pada tahun 2021, dengan sedikit peningkatan di tahun 2023.

Menghadapi tantangan ini, langkah-langkah strategis sangat diperlukan untuk memulihkan dan meningkatkan kembali produksi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya peningkatan kualitas perikanan tangkap harus difokuskan pada pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan dan peningkatan teknologi tangkap yang efisien. Di sisi lain, sektor perikanan budidaya membutuhkan perhatian khusus dalam hal peningkatan teknik budidaya, manajemen air, dan pakan, serta perlindungan terhadap penyakit ikan yang dapat menurunkan hasil produksi. Selain itu, penguatan akses pasar dan perbaikan infrastruktur pendukung menjadi kunci untuk memastikan bahwa produk perikanan dari Bengkulu Selatan dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

D. Peternakan

Sektor peternakan merupakan sub sektor unggulan dengan potensi yang sangat besar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis-jenis ternak yang dikembangkan dan populasinya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II-24. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Sapi		Kerbau		Kambing	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Manna	1.688	1.653	157	190	247	203
2	Kota Manna	530	534	192	142	312	445
3	Kedurang	515	675	131	171	568	568
4	Bunga Mas	1.435	1.451	517	517	241	161
5	Pasar Manna	451	432	125	130	75	77
6	Kedurang Ilir	1.073	1.054	51	50	154	154
7	Seginim	691	663	289	147	343	316
8	Air Nipis	461	473	17	20	1.279	1.033
9	Pino	2.489	2.375	650	625	141	141
10	Pinoraya	5.648	5.865	1.149	1.202	931	977
11	Ulu Manna	205	248	103	103	436	436
Jumlah		15.186	15.423	3.381	3.297	4.727	4.511

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

Tabel II-25. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan (Lanjutan 1)

No	Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur	
		2022	2023	2022	2023
1	Manna	3.409	1.496	1.100	–
2	Kota Manna	11.500	11.750	5.200	11.200
3	Kedurang	1.522	1.522	–	–
4	Bunga Mas	4.551	4.551	3.300	3.300
5	Pasar Manna	3.748	4.545	–	–
6	Kedurang Ilir	11.500	11.500	23.690	23.690
7	Seginim	12.315	9.890	740	1.940
8	Air Nipis	15.609	15.214	5.597	5.597
9	Pino	6.336	NA	–	–
10	Pinoraya	166.277	175.711	262	213
11	Ulu Manna	882	882	–	–
Jumlah		231.313	237.649	237.061	39.889

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

Tabel II-26. Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan (Lanjutan 2)

No	Kecamatan	Ayam Pedaging		Itik	
		2022	2023	2022	2023
1	Pino Raya	6.000	19.000	1.048	1.123
2	Pino	16.750	18.050	709	709
3	Ulu Manna	–	–	699	699
4	Air Nipis	82.500	82.500	75	75
5	Seginim	10.000	12.000	93	140
6	Manna	501	501	62	62
7	Bunga Mas	–	32.000	7.166	9.570
8	Kedurang	–	76.008	3.825	3.391
9	Kedurang Ilir	–	–	1.125	–
10	Kota Manna	4.250	8.400	501	1.782
11	Pasar Manna	–	602	285	285
Jumlah		120.001	249.061	15.588	17.836

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Pada tahun 2023, populasi dan produksi ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai kecamatan, dengan beberapa jenis ternak mengalami peningkatan dan beberapa lainnya mengalami penurunan. Untuk populasi sapi, misalnya, Kecamatan Pino Raya memiliki populasi tertinggi dengan 5.865 ekor, naik dari 5.648 ekor pada tahun 2022. Di sisi lain, Kecamatan Manna mengalami sedikit penurunan populasi sapi dari 1.688 ekor pada tahun 2022 menjadi 1.653 ekor pada tahun 2023. Populasi kerbau di seluruh kabupaten juga menunjukkan sedikit fluktuasi, dengan Kecamatan Pino Raya mencatat jumlah tertinggi sebanyak 1.202 ekor, meningkat dari 1.149 ekor pada tahun sebelumnya.

Produksi ternak kambing juga menunjukkan variasi yang menarik. Kecamatan Pino Raya tetap menjadi daerah dengan populasi kambing tertinggi, mencapai 977 ekor pada tahun 2023, naik dari 931 ekor pada tahun sebelumnya. Namun, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Manna dan Air Nipis mengalami penurunan dalam populasi kambing, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi alam, ketersediaan pakan, atau perubahan dalam praktik peternakan di daerah tersebut.

Dalam kategori unggas, terutama ayam kampung dan ayam petelur, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Populasi ayam kampung di Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan meningkat dari 231.313 ekor pada tahun 2022 menjadi 237.649 ekor pada tahun 2023. Kecamatan Pino Raya mencatat peningkatan tertinggi dalam populasi ayam kampung, dengan jumlah mencapai 175.711 ekor, naik dari 166.277 ekor pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah ayam petelur di beberapa kecamatan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan penurunan signifikan di beberapa daerah seperti Kecamatan Manna, yang tidak lagi mencatat produksi ayam petelur pada tahun 2023.

Produksi ayam pedaging di Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2023, jumlah ayam pedaging mencapai 249.061 ekor, naik dari 120.001 ekor pada tahun 2022. Kecamatan Pino Raya dan Kedurang mencatat peningkatan yang signifikan dalam populasi ayam pedaging, dengan Kecamatan Kedurang mencatat populasi tertinggi sebesar 76.008 ekor, yang merupakan peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun 2022 di mana tidak ada produksi ayam pedaging di kecamatan ini.

Terakhir, populasi itik di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan yang stabil. Jumlah itik di seluruh kabupaten meningkat dari 15.588 ekor pada tahun 2022 menjadi 17.836 ekor pada tahun 2023. Kecamatan Bunga Mas mencatat peningkatan yang signifikan dalam populasi itik, dengan jumlah itik meningkat dari 7.166 ekor pada tahun 2022 menjadi 9.570 ekor pada tahun 2023. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Ulu Manna dan Pino menunjukkan stabilitas dalam populasi itik, dengan sedikit atau tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa sektor peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami dinamika dengan fluktuasi populasi dan produksi ternak di berbagai jenis

dan daerah, mencerminkan adaptasi dan perubahan dalam praktik peternakan serta tantangan yang dihadapi oleh para peternak di wilayah ini.

E. Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dibangun dan dikembangkan, sehingga memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi. Banyak potensi pariwisata yang dimiliki, diantaranya wisata alam mulai pantai, danau, dan sungai; wisata buatan, wisata kuliner hingga wisata budaya. Adapun potensi wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel II-27. Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
14	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping,Manggul, Kec. Manna
15	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
16	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
17	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
18	Telaga Rajak Besi	Kedurang
19	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
20	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
21	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
22	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
23	Danau Ulu Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
24	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
25	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025

Berdasarkan indikasi program penataan ruang bidang pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kerangka Acuan Kerja penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis Tahun 2013, maka diprioritaskan untuk pengembangan:

a. Kawasan wisata bahari terpadu di Kecamatan Pasar Manna, dengan lokasi Pantai Pasar Bawah, Tebat Rukis dan Tebat Gelumpai.

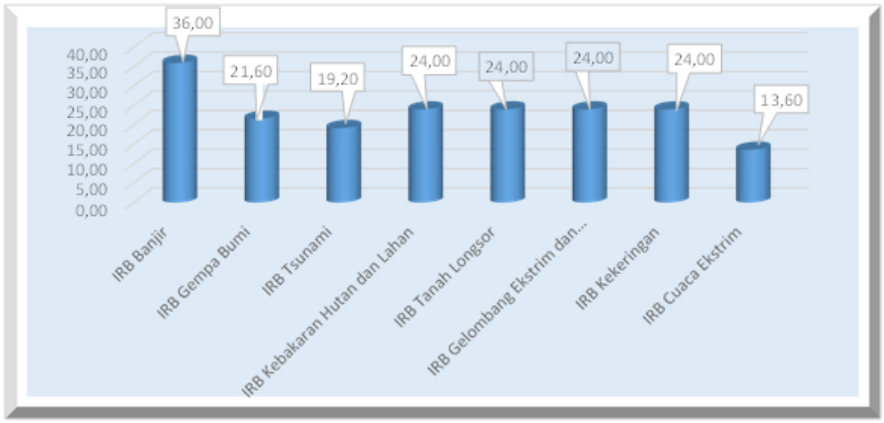
b. Pengembangan Taman Wisata Alam Lubuk Tapi – Kayu Ajaran, dengan lokasi Air Terjun Geluguran dan Arung Jeram Air Manna
c. Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya meliputi Danau Ulu Air Seginim, Pantai Kedurang, Pantai Bengkenang dan Pantai Makhudum.

Dalam rangka mendukung Wonderfull Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan event yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu festival Ayik Manna. Disamping itu, potensi wisata berbasis budaya mulai dikembangkan, diantaranya Seni Bedindang Mutus Tari, Dundang Padi, Bimbang Adat, Kayiak Nari, dan Malam Gegerit.

F. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana karena berada pada daerah rawan bencana (ring of fire). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kelas risiko tinggi dengan skor 186,40.

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem. Bahkan ada daerah yang setiap kali hujan deras melanda selalu terjadi longsor yaitu daerah sepanjang jalur jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar II-3. Indeks Resiko Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

Sumber: BNPB, Tahun 2022

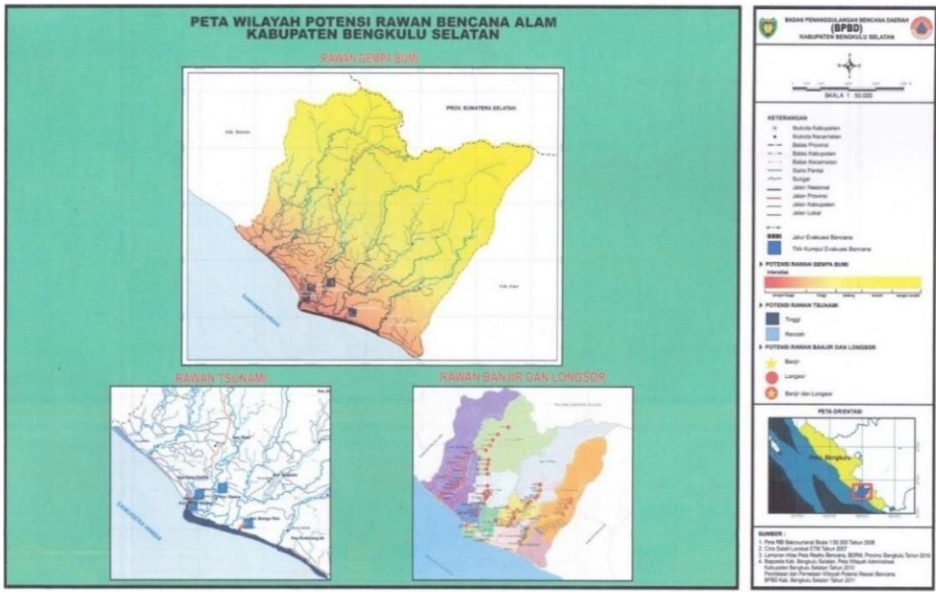
Adapun potensi dan kejadian bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-28. Potensi dan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Bencana		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1	Manna	-	-	-
2	Kota Manna	-	-	-
3	Kedurang	4	-	-
4	Bunga Mas	-	-	-
5	Pasar Manna	-	-	-
6	Kedurang Ilir	-	-	-
7	Seginim	1	6	-
8	Air Nipis	1	2	-
9	Pino	1	6	-
10	Pino Raya	3	1	3
11	Ulu Manna	-	1	2
Jumlah		10	16	5

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan pengurangan risiko bencana menjadi prioritas pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana, diantaranya pemetaan daerah rawan bencana, pelaksanaan mitigasi bencana, pembangunan desa siaga bencana dan penguatan satgas tanggap darurat bencana.



Gambar II-4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan Tsunami paling tinggi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai diantaranya Kecamatan Kedurang Ilir, Bunga Mas, Pasar Manna, Manna dan Pino Raya sedangkan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir dan longsor diantaranya adalah Kecamatan Ulu Manna, Seginim.

2.1.2. Demografi

Tabel II-29. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Kecamatan	jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Manna	17	1,44	9,92	471	104,5
Kota Manna	32,9	1,13	19,19	932	102,4
Kedurang	12,4	1,05	7,21	NA	106,3
Bunga Mas	7,1	1,1	4,12	194	101,3
Pasar Manna	18,1	0,26	10,55	2.445	98,7
Kedurang Ilir	9,3	1,41	5,44	169	106,1
Seginim	17,6	0,9	10,29	344	103,5
Air Nipis	12,9	1,25	7,53	63	105,9
Pino	13,1	0,87	7,65	152	102,7
Pinoraya	22,7	1,21	13,26	NA	106,4
Ulu Manna	8,3	0,8	4,84	45	106
Bengkulu Selatan	**171,5**	**1,03**	**100**	**141**	**103,7**

Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebar di berbagai kecamatan dengan variasi yang signifikan. Kecamatan Kota Manna memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 32,9 ribu jiwa, yang merupakan 19,19% dari total penduduk kabupaten. Kepadatan penduduk di Kota Manna sangat tinggi, mencapai 932 orang per kilometer persegi, mencerminkan urbanisasi yang tinggi dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Kecamatan Pasar Manna mengikuti dengan jumlah penduduk sebesar 18,1 ribu jiwa, yang membentuk 10,55% dari total penduduk kabupaten dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten ini, yaitu 2.445 orang per kilometer persegi, menunjukkan area komersial yang padat.

Kecamatan Manna dan Seginim memiliki jumlah penduduk yang hampir sama, yaitu 17 ribu jiwa dan 17,6 ribu jiwa, masing-masing menyumbang 9,92% dan 10,29% dari total penduduk kabupaten. Kepadatan penduduk di kedua kecamatan ini adalah 471 dan 344 orang per kilometer persegi, menunjukkan distribusi penduduk yang cukup merata dengan infrastruktur yang memadai. Kecamatan Kedurang dan Air Nipis

memiliki jumlah penduduk masing-masing sebesar 12,4 ribu jiwa dan 12,9 ribu jiwa, dengan persentase penduduk 7,21% dan 7,53%. Kepadatan penduduk di Kedurang belum tersedia, sedangkan di Air Nipis kepadatan tercatat sebesar 63 orang per kilometer persegi, menunjukkan wilayah dengan populasi yang lebih tersebar.

Kecamatan Pinoraya mencatat jumlah penduduk sebesar 22,7 ribu jiwa, dengan persentase penduduk 13,26%, yang mencerminkan wilayah dengan populasi yang signifikan namun data kepadatannya tidak tersedia. Kecamatan Pino dan Bunga Mas masing-masing memiliki jumlah penduduk 13,1 ribu jiwa dan 7,1 ribu jiwa, dengan persentase 7,65% dan 4,12%, serta kepadatan penduduk 152 dan 194 orang per kilometer persegi, menunjukkan wilayah yang cukup padat. Kecamatan Kedurang Ilir dan Ulu Manna memiliki jumlah penduduk masing-masing sebesar 9,3 ribu jiwa dan 8,3 ribu jiwa, dengan persentase penduduk 5,44% dan 4,84%. Kepadatan penduduk di Kedurang Ilir tercatat sebesar 169 orang per kilometer persegi, sementara di Ulu Manna sebesar 45 orang per kilometer persegi, menunjukkan wilayah yang lebih terisolasi.

Secara keseluruhan, total jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 171,5 ribu jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,03% per tahun. Rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan variasi yang relatif seimbang di setiap kecamatan, dengan rata-rata rasio sebesar 103,7 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di seluruh kabupaten. Variasi dalam distribusi penduduk, kepadatan, dan laju pertumbuhan di setiap kecamatan memberikan gambaran tentang dinamika demografi dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang merata di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Apabila dilihat komposisi penduduk Bengkulu Selatan menurut jenis kelamin pada usia produktif, dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan jumlah yang sama. Hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk pembangunan berbasis gender.

Tabel II-30. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 – 4	7.406	7.059	14.465
5 – 9	7.058	6.769	13.827
10 – 14	7.342	6.970	14.312
15 – 19	7.432	7.019	14.451

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
20 – 24	7.255	6.988	14.243
25 – 29	6.820	6.479	13.299
30 – 34	6.610	6.134	12.744
35 – 39	6.428	6.033	12.461
40 – 44	6.216	5.941	12.157
45 – 49	5.984	5.785	11.769
50 – 54	5.500	5.288	10.788
55 – 59	4.505	4.347	8.852
60 - 64	3.434	3.335	6.769
65 – 69	2.457	2.488	4.945
70 – 74	1.543	1.707	3.250
75 +	87.297	84.166	171.463

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023

Distribusi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan variasi yang signifikan di setiap rentang usia. Pada kelompok usia 0-4 tahun, terdapat 14.465 anak dengan komposisi 7.406 laki-laki dan 7.059 perempuan. Kelompok usia 5-9 tahun memiliki total 13.827 anak dengan 7.058 laki-laki dan 6.769 perempuan. Kelompok usia 10-14 tahun mencatat 14.312 anak dengan 7.342 laki-laki dan 6.970 perempuan. Demikian pula, kelompok usia 15-19 tahun mencatat jumlah yang hampir sama dengan total 14.451 jiwa, terdiri dari 7.432 laki-laki dan 7.019 perempuan.

Memasuki kelompok usia produktif, yaitu 20-24 tahun, terdapat 14.243 jiwa dengan 7.255 laki-laki dan 6.988 perempuan. Pada kelompok usia 25-29 tahun, total penduduk adalah 13.299 jiwa, terdiri dari 6.820 laki-laki dan 6.479 perempuan. Kelompok usia 30-34 tahun mencatat 12.744 jiwa dengan komposisi 6.610 laki-laki dan 6.134 perempuan. Jumlah ini sedikit menurun pada kelompok usia 35-39 tahun dengan total 12.461 jiwa, terdiri dari 6.428 laki-laki dan 6.033 perempuan. Angka ini terus menurun di kelompok usia 40-44 tahun yang mencatat 12.157 jiwa dengan 6.216 laki-laki dan 5.941 perempuan.

Pada kelompok usia lanjut, terdapat 11.769 jiwa dalam rentang usia 45-49 tahun dengan 5.984 laki-laki dan 5.785 perempuan. Kelompok usia 50-54 tahun mencatat total 10.788 jiwa dengan komposisi 5.500 laki-laki dan 5.288 perempuan. Di kelompok usia 55-59 tahun, terdapat 8.852 jiwa dengan 4.505 laki-laki dan 4.347 perempuan. Angka ini terus menurun pada kelompok usia 60-64 tahun dengan total 6.769 jiwa, terdiri dari 3.434 laki-laki dan 3.335 perempuan. Pada kelompok usia 65-

69 tahun, jumlah penduduk adalah 4.945 jiwa dengan 2.457 laki-laki dan 2.488 perempuan. Jumlah ini berkurang drastis pada kelompok usia 70-74 tahun yang mencatat 3.250 jiwa dengan 1.543 laki-laki dan 1.707 perempuan. Untuk kelompok usia 75 tahun ke atas, terdapat total 171.463 jiwa yang terdiri dari 87.297 laki-laki dan 84.166 perempuan, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada populasi usia lanjut.

Data penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan pola demografi yang khas dengan penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia menengah ke atas, sementara kelompok usia muda dan produktif menunjukkan jumlah yang relatif stabil. Peningkatan yang signifikan pada kelompok usia lanjut mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk populasi usia lanjut. Selain itu, data ini juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan lapangan kerja bagi kelompok usia produktif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Masa bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya, merupakan peluang emas bagi Kabupaten Bengkulu Selatan. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun). Dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, kabupaten ini dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja yang melimpah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi kelompok usia produktif ini. Selain itu, perencanaan yang terfokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan publik akan memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk ini dapat dikelola dengan baik, mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel II-31. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Kecamatan	jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Manna	17	1,44	9,92	471	104,5
Kota Manna	32,9	1,13	19,19	932	102,4
Kedurang	12,4	1,05	7,21	NA	106,3
Bunga Mas	7,1	1,1	4,12	194	101,3
Pasar Manna	18,1	0,26	10,55	2.445	98,7
Kedurang Ilir	9,3	1,41	5,44	169	106,1
Seginim	17,6	0,9	10,29	344	103,5
Air Nipis	12,9	1,25	7,53	63	105,9
Pino	13,1	0,87	7,65	152	102,7
Pinoraya	22,7	1,21	13,26	NA	106,4
Ulu Manna	8,3	0,8	4,84	45	106
Bengkulu Selatan	**171,5**	**1,03**	**100**	**141**	**103,7**

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai kecamatan. Kecamatan Manna, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44% per tahun, merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup stabil, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan kematian dan migrasi masuk. Selain itu, Kecamatan Kota Manna, yang merupakan pusat kota, memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13% per tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa meskipun menjadi pusat perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, Kota Manna tetap mampu mempertahankan pertumbuhan penduduk yang stabil.

Kecamatan Kedurang dan Bunga Mas masing-masing mencatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05% dan 1,1% per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas penduduk di daerah tersebut, meskipun mungkin ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar yang dapat mempengaruhi daya tarik kawasan tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Kedurang Ilir dengan laju pertumbuhan sebesar 1,41% per tahun menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami peningkatan penduduk yang cukup signifikan, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan kesempatan kerja atau adanya program pembangunan daerah yang efektif.

Beberapa kecamatan seperti Seginim dan Air Nipis memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah, masing-masing sebesar 0,9% dan 1,25% per tahun. Laju pertumbuhan yang lebih rendah ini bisa mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial yang mempengaruhi dinamika populasi, seperti kurangnya peluang ekonomi atau migrasi keluar dari daerah tersebut. Demikian pula, Kecamatan Pino dan Ulu Manna mencatat laju pertumbuhan yang lebih rendah masing-masing sebesar 0,87% dan 0,8% per tahun, yang menunjukkan tantangan serupa dalam mempertahankan atau menarik penduduk baru.

Kecamatan Pasar Manna, dengan laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,26% per tahun, menunjukkan pertumbuhan yang paling lambat di antara semua kecamatan. Laju pertumbuhan yang rendah ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti terbatasnya lahan untuk pemukiman baru, kurangnya lapangan kerja, atau tingkat kelahiran yang lebih rendah dibandingkan dengan kematian. Meskipun begitu, Kecamatan Pinoraya menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dengan laju 1,21% per tahun, yang bisa mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi atau program pembangunan yang berhasil menarik penduduk baru.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan geografis di setiap kecamatan. Pertumbuhan yang lebih tinggi di beberapa kecamatan menunjukkan adanya potensi dan daya tarik yang dapat dikembangkan lebih lanjut, sementara kecamatan dengan pertumbuhan yang lebih rendah mungkin memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menarik penduduk baru. Pemerintah daerah perlu terus memantau dan mengevaluasi dinamika ini untuk merencanakan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.

2.1.2.2. Rasio Penduduk

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki total penduduk sebesar 171,5 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,03% per tahun selama periode 2020-2023. Rasio jenis kelamin penduduk di kabupaten ini adalah 103,7, yang berarti terdapat sekitar 103,7 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Penduduk

tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik demografis yang beragam. Kecamatan Kota Manna memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan 32,9 ribu jiwa, yang mewakili 19,19% dari total penduduk kabupaten. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Manna adalah 1,13% per tahun, dan kepadatan penduduk mencapai 932 jiwa per km^2. Rasio jenis kelamin di kecamatan ini adalah 102,4, menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara jumlah laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Kecamatan Pasar Manna memiliki penduduk sebesar 18,1 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, yaitu 0,26% per tahun. Namun, kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten, yaitu 2.445 jiwa per km^2. Rasio jenis kelamin di Pasar Manna adalah 98,7, yang berarti jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, Kecamatan Manna dan Seginim masing-masing memiliki jumlah penduduk sebesar 17 ribu jiwa dan 17,6 ribu jiwa. Manna memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44% per tahun dan kepadatan penduduk 471 jiwa per km^2, sedangkan Seginim memiliki laju pertumbuhan 0,9% per tahun dengan kepadatan 344 jiwa per km^2. Rasio jenis kelamin di Manna adalah 104,5, sementara di Seginim adalah 103,5, menunjukkan sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Kecamatan lainnya seperti Kedurang, Bunga Mas, Kedurang Ilir, Air Nipis, Pino, Pinoraya, dan Ulu Manna memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil namun tetap berkontribusi terhadap komposisi demografis kabupaten. Kedurang memiliki 12,4 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 1,05% per tahun dan rasio jenis kelamin 106,3, sementara Bunga Mas dengan 7,1 ribu jiwa memiliki laju pertumbuhan 1,1% per tahun dan rasio jenis kelamin 101,3. Kecamatan Kedurang Ilir dan Air Nipis masing-masing memiliki kepadatan penduduk 169 jiwa per km^2 dan 63 jiwa per km^2, dengan rasio jenis kelamin masing-masing 106,1 dan 105,9. Kecamatan Pino dan Ulu Manna memiliki penduduk dengan laju pertumbuhan yang rendah, yaitu masing-masing 0,87% dan 0,8% per tahun, serta rasio jenis kelamin 102,7 dan 106.

Secara keseluruhan, komposisi demografis Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan dalam hal jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan, dan rasio jenis kelamin. Kecamatan-kecamatan ini masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi dinamika sosial dan

ekonomi di wilayah tersebut. Upaya perencanaan dan pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan keragaman ini untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten.

2.1.2.3. Kepadatan Penduduk

Data kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang signifikan antara kecamatan-kecamatan di daerah ini. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Pasar Manna, dengan 2.445 jiwa per kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Manna adalah pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang mungkin menarik banyak penduduk untuk tinggal di daerah tersebut. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,7, kecamatan ini juga menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang.

Kota Manna memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi, yaitu 932 jiwa per kilometer persegi. Sebagai pusat administratif, Kota Manna kemungkinan memiliki infrastruktur yang lebih baik dan fasilitas umum yang lebih lengkap, sehingga menarik penduduk untuk tinggal di sana. Rasio jenis kelamin di Kota Manna adalah 102,4, menunjukkan bahwa terdapat sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan di daerah ini. Kecamatan Seginim dan Manna memiliki kepadatan penduduk yang lebih moderat, masing-masing dengan 344 dan 471 jiwa per kilometer persegi. Meskipun kepadatan di kecamatan ini tidak setinggi Pasar Manna atau Kota Manna, mereka tetap menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk yang signifikan. Dengan laju pertumbuhan penduduk masing-masing 0,9% dan 1,44%, kedua kecamatan ini terus berkembang dan mungkin mengalami peningkatan kepadatan di masa depan.

Tabel II-32. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Kecamatan	jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Manna	17	1,44	9,92	471	104,5
Kota Manna	32,9	1,13	19,19	932	102,4
Kedurang	12,4	1,05	7,21	NA	106,3
Bunga Mas	7,1	1,1	4,12	194	101,3
Pasar Manna	18,1	0,26	10,55	2.445	98,7
Kedurang Ilir	9,3	1,41	5,44	169	106,1
Seginim	17,6	0,9	10,29	344	103,5
Air Nipis	12,9	1,25	7,53	63	105,9

Kecamatan	jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Pino	13,1	0,87	7,65	152	102,7
Pinoraya	22,7	1,21	13,26	NA	106,4
Ulu Manna	8,3	0,8	4,84	45	106
Bengkulu Selatan	**171,5**	**1,03**	**100**	**141**	**103,7**

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Air Nipis, Ulu Manna, dan Pino menunjukkan kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Air Nipis memiliki kepadatan hanya 63 jiwa per kilometer persegi, sementara Ulu Manna memiliki kepadatan 45 jiwa per kilometer persegi. Pino, dengan 152 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan kedua kecamatan tersebut, tetapi masih relatif rendah secara keseluruhan. Rendahnya kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya infrastruktur atau fasilitas umum yang menarik penduduk untuk tinggal di sana. Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir memiliki kepadatan penduduk yang tidak tersedia, namun laju pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 1,05% dan 1,41% menunjukkan bahwa penduduk di kecamatan-kecamatan ini terus bertambah. Hal ini mengindikasikan potensi peningkatan kepadatan di masa depan jika infrastruktur dan fasilitas pendukung diperbaiki.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kepadatan penduduk rata-rata sebesar 141 jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk total 171,5 ribu jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,03% per tahun, kabupaten ini terus berkembang. Rasio jenis kelamin yang hampir seimbang sebesar 103,7 menunjukkan distribusi gender yang merata. Untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik di seluruh kecamatan, memastikan bahwa peningkatan kepadatan penduduk dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan

secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

A. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Dalam hal Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.302,90 miliar rupiah. Angka ini meningkat menjadi 5.707,51 miliar rupiah pada tahun 2019, dan terus naik menjadi 5.819,78 miliar rupiah pada tahun 2020. Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, PDRB tetap menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, Nilai PDRB ADHB mencapai 6.196,61 miliar rupiah, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 7.201,15 miliar rupiah pada tahun 2023.

Jika dilihat dari Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, terdapat peningkatan dari 3.444,03 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 3.615,03 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, meskipun terdapat tantangan ekonomi global, Nilai PDRB ADHK tetap meningkat sedikit menjadi 3.624,59 miliar rupiah. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2021 dengan angka 3.742,51 miliar rupiah, dan terus meningkat menjadi 3.994,82 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan dan adaptasi ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil meningkatkan nilai PDRB selama periode 2018 hingga 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan perekonomian daerah, meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti pandemi COVID-19. Dengan mempertahankan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan.

Tabel II-33. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	5.302,90	5.707,51	5.819,78	6.196,61	6.712,80	7.201,15
- ADHK 2010	3.444,03	3.615,03	3.624,59	3.742,51	3.871,61	3.994,82

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bengkulu Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Peranan masing-masing sektor memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

Tabel II-34. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Uraian	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,67	32,80	32,96	33,59	33,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,05	16,32	16,43	16,66	16,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,49	11,33	11,03	10,20	10,27
Transportasi dan Pergudangan	5,81	6,09	6,15	6,41	6,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	5,74	6,09	5,95	5,24

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Tabel II-35. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023

Lapangan Usaha	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,67	32,8	32,96	33,59	33,55
Pertambangan dan Penggalian	2,25	2,23	2,16	2,07	2,09
Industri Pengolahan	3,26	3,15	3,14	3,09	2,91
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,1	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Konstruksi	5,66	5,62	5,62	5,62	5,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,05	16,32	16,43	16,66	16,59
Transportasi dan Pergudangan	5,81	6,09	6,15	6,41	6,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2	2	1,95	1,98	2,04
Informasi dan Komunikasi	2,89	2,97	2,98	3,04	3,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	5,74	6,09	5,95	5,24
Real Estat	3,97	3,94	3,76	3,61	3,62
Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,24	0,27	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,49	11,33	11,03	10,20	10,27

Lapangan Usaha	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Jasa Pendidikan	4,95	4,98	4,88	4,91	4,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,63	1,70	1,66	1,75
Jasa Lainnya	0,69	0,68	0,68	0,71	0,72
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kontribusi yang meningkat dari 32,67% pada tahun 2019 menjadi 33,55% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi, dari 2,25% pada tahun 2019 menjadi 2,09% pada tahun 2023, yang mungkin mencerminkan penurunan aktivitas atau hasil produksi di sektor ini.

Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan tren penurunan kontribusi, dari 3,26% pada tahun 2019 menjadi 2,91% pada tahun 2023. Sebaliknya, sektor Transportasi dan Pergudangan meningkat dari 5,81% pada tahun 2019 menjadi 6,93% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan aktivitas dalam bidang transportasi dan logistik. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap signifikan dengan kontribusi sekitar 16,59% pada tahun 2023, meskipun mengalami sedikit fluktuasi.

Sektor jasa seperti Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan peningkatan kontribusi, mencerminkan pertumbuhan dalam layanan komunikasi dan kesehatan. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami fluktuasi namun tetap penting, sementara sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan menunjukkan penurunan kontribusi. Secara keseluruhan, struktur PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan diversifikasi ekonomi dengan sektor pertanian sebagai sektor dominan, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa, yang mencerminkan perkembangan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan.

Tabel II-36. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di, 2018–2022

Lapangan Usaha	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.864,70	1.909,03	2.042,12	2.254,51	2.416,17
Pertambangan dan Penggalian	128,18	129,72	133,66	139,09	150,39
Industri Pengolahan	186,19	183,55	194,48	207,75	209,25
Pengadaan Listrik dan Gas	5,25	5,88	6,3	6,81	7,23
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,04	8,38	8,58	9,02	9,66
Konstruksi	323,3	326,85	348,07	377,49	410,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	972,96	949,99	1 017,97	1 118,34	1.194,44
Transportasi dan Pergudangan	331,5	354,66	381,09	430,53	498,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,4	116,53	120,74	132,73	146,82
Informasi dan Komunikasi	164,8	172,73	184,71	203,78	227,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	300,87	333,95	377,33	399,31	377,11
Real Estat	226,65	229,32	232,8	242,62	260,92
Jasa Perusahaan	14,95	14,69	15,18	17,87	19,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	655,7	659,64	683,59	684,65	739,44
Jasa Pendidikan	282,58	290	302,41	329,63	354,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,81	95,09	105,14	111,29	126,18
Jasa Lainnya	39,64	39,76	42,45	47,38	51,87
Produk Domestik Regional Bruto	5.707,51	5.819,78	6.196,61	6.712,80	7.201,15

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan peningkatan yang signifikan dari 1.864,70 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 2.416,17 miliar rupiah pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah, menyediakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat.

Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun kontribusi mereka relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Sektor pertambangan meningkat dari 128,18 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 150,39 miliar rupiah pada tahun 2023, sedangkan sektor industri pengolahan meningkat dari 186,19 miliar rupiah menjadi 209,25 miliar rupiah dalam periode yang sama.

Sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan juga mencatat peningkatan yang signifikan.

Sektor konstruksi naik dari 323,3 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 410,92 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara sektor perdagangan meningkat dari 972,96 miliar rupiah menjadi 1.194,44 miliar rupiah. Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dari 331,5 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 498,80 miliar rupiah pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan aktivitas logistik dan transportasi di daerah tersebut.

Sektor jasa seperti Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Informasi dan komunikasi meningkat dari 164,8 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 227,98 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat dari 87,81 miliar rupiah menjadi 126,18 miliar rupiah dalam periode yang sama.

Secara keseluruhan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dari 5.707,51 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 7.201,15 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif dan diversifikasi yang baik di berbagai sektor ekonomi, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor-sektor utama ini akan menjadi kunci untuk keberlanjutan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. PDRB Perkapita

Tabel II-37. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)						
- ADHB	33,7	36,0	36,5	36,9	39,5	42
- ADHK 2010	21,9	22,8	22,7	22,2	22,8	23,3

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, meskipun terdapat fluktuasi dalam nilai yang disesuaikan berdasarkan harga konstan (ADHK 2010). PDRB per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi

dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk, memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2018, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 33,7 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 36,0 juta rupiah pada tahun 2019, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2020 dengan PDRB per kapita mencapai 36,5 juta rupiah, dan sedikit meningkat lagi menjadi 36,9 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dengan PDRB per kapita mencapai 39,5 juta rupiah, dan pada tahun 2023, angka ini terus meningkat menjadi 42 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan terus bertambah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, ketika melihat PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK 2010), tren yang terlihat agak berbeda. Pada tahun 2018, PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar 21,9 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 22,8 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHK sedikit menurun menjadi 22,7 juta rupiah, dan penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan angka mencapai 22,2 juta rupiah. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi secara signifikan. Namun, pada tahun 2022, terjadi pemulihan dengan PDRB per kapita ADHK meningkat menjadi 22,8 juta rupiah, dan pada tahun 2023, angka ini mencapai 23,3 juta rupiah. Pertumbuhan dalam PDRB per kapita ADHB mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan terus bertambah. Namun, fluktuasi dalam PDRB per kapita ADHK menunjukkan bahwa ketika disesuaikan dengan inflasi dan perubahan harga, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak secepat yang diharapkan. Ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nominal tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

Secara keseluruhan, data PDRB per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam ekonomi daerah, dengan peningkatan yang signifikan dalam nilai ekonomi yang dihasilkan per penduduk. Untuk

mempertahankan dan mempercepat tren pertumbuhan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung sektor-sektor ekonomi utama, meningkatkan infrastruktur, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dapat mengatasi tantangan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air dan listrik; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga serta transportasi dan komunikasi. Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki data laju inflasi, oleh karena itu disajikan data inflasi di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu.

Tabel II-38. Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Bulan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0,30	-0,28	0,09	0,14	-0,10	0,04
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0,26	0,54	-0,35	0,10	1,45	0,28
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,60	0,21
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-1,80	0,86	-0,22	0,16	-0,24	-0,07
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	0,20	0,27	0,35	0,52	0,05	0,3
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	**2,35**	**2,91**	**0,89**	**2,42**	**5,92**	**3,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Perkembangan inflasi di Provinsi Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2023 menggambarkan berbagai dinamika ekonomi yang mempengaruhi tingkat harga di daerah tersebut. Pada tahun 2018, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,35%, yang

kemudian meningkat menjadi 2,91% pada tahun 2019, menandakan adanya tekanan harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan dengan inflasi tahunan hanya sebesar 0,89%, mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi kembali naik menjadi 2,42%, menandakan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi dengan peningkatan permintaan barang dan jasa. Namun, tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi tahunan hingga 5,92%, yang merupakan angka tertinggi selama periode ini, disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kenaikan harga bahan pokok, energi, serta dampak dari gangguan rantai pasokan global. Pada tahun 2023, inflasi tahunan sedikit menurun menjadi 3,09%, menunjukkan upaya stabilisasi harga yang dilakukan oleh pemerintah mulai memberikan hasil.

Secara bulanan, inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Januari 2018, inflasi tercatat sebesar 0,99%, sedangkan pada Januari 2023 naik menjadi 0,62%. Ini menunjukkan adanya tekanan harga di awal tahun yang konsisten, meskipun sedikit lebih rendah pada tahun 2023. Bulan Februari 2018 mencatat deflasi sebesar -0,30%, namun pada Februari 2023 inflasi kembali positif sebesar 0,04%, mencerminkan adanya pemulihan harga dari bulan sebelumnya. Maret 2022 mencatat inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,74%, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, bulan ini menunjukkan inflasi yang lebih rendah atau bahkan negatif. Lonjakan inflasi pada bulan-bulan tertentu biasanya terkait dengan perayaan hari besar keagamaan, musim panen, atau fluktuasi harga komoditas strategis.

Pada bulan April, inflasi menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2022 dengan nilai 1,45%, yang merupakan kenaikan signifikan dibandingkan dengan inflasi bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa diatribusikan pada kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara itu, pada bulan Mei, inflasi cenderung stabil dengan fluktuasi kecil, meskipun ada peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,41%, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan musiman.

Juni dan Juli menunjukkan pola yang menarik, di mana inflasi mengalami kenaikan pada tahun-tahun tertentu. Contohnya, pada Juni 2022 inflasi mencapai 0,60%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Juli 2022 mencatat inflasi sebesar 0,91%, yang

menunjukkan adanya kenaikan harga yang signifikan pada pertengahan tahun, seringkali terkait dengan peningkatan permintaan dan harga bahan bakar. Agustus menjadi bulan yang menarik untuk dicermati karena mencatat deflasi besar pada tahun 2018 sebesar -1,80%, yang menandakan penurunan harga yang signifikan. Namun, pada tahun 2023, deflasi di bulan Agustus lebih moderat pada -0,07%, menunjukkan stabilisasi yang lebih baik.

September 2022 mencatat inflasi yang cukup tinggi sebesar 1,22%, berbeda dengan tren deflasi atau inflasi rendah pada tahun-tahun sebelumnya di bulan yang sama. Ini menandakan adanya kenaikan harga yang mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya produksi atau distribusi. Pola yang sama terlihat pada bulan Oktober, di mana inflasi berfluktuasi dari deflasi -0,74% pada tahun 2018 hingga inflasi positif 0,28% pada tahun 2023, menunjukkan adanya dinamika harga yang berubah-ubah. November dan Desember juga menunjukkan fluktuasi inflasi yang menarik. November 2022 mencatat inflasi yang lebih rendah sebesar 0,05%, sementara Desember 2022 menunjukkan inflasi 0,23%. Pada tahun 2023, inflasi di bulan November dan Desember meningkat menjadi masing-masing 0,30% dan 0,24%, menandakan adanya kenaikan harga akhir tahun yang biasanya dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang liburan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi global dan nasional, kebijakan pemerintah, serta situasi pasar lokal. Tren kenaikan inflasi pada tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023 mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas harga. Upaya terus-menerus dari pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk mengelola inflasi dan memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Menghadapi fluktuasi inflasi yang signifikan, diperlukan kebijakan yang adaptif dan proaktif, termasuk pengawasan harga komoditas utama, stabilisasi pasokan bahan pokok, serta kebijakan moneter dan fiskal yang tepat guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan inflasi tahunan selama periode ini menunjukkan bahwa setiap tahun membawa tantangan dan peluang yang berbeda dalam pengelolaan harga. Pada tahun 2018, inflasi tahunan sebesar 2,35% mencerminkan stabilitas harga yang

relatif baik. Namun, tekanan harga meningkat pada tahun 2019 dengan inflasi sebesar 2,91%. Tahun 2020 menjadi tahun yang unik dengan penurunan drastis inflasi tahunan menjadi 0,89%, dipengaruhi oleh pandemi global yang menekan aktivitas ekonomi. Tahun 2021 menandai pemulihan ekonomi dengan inflasi tahunan meningkat menjadi 2,42%, sebelum lonjakan signifikan pada tahun 2022 hingga 5,92%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini menunjukkan dampak dari kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasokan. Tahun 2023 membawa harapan baru dengan penurunan inflasi tahunan menjadi 3,09%, menandakan efektivitas langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan. Tren ini mengindikasikan perlunya perhatian yang konsisten dan strategi yang adaptif untuk menghadapi tantangan inflasi di masa mendatang.

2.2.1.3. Indeks Gini

Indeks gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Gini ratio Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend positif selama tiga (3) tahun terakhir. Meskipun belum sempurna, namun hal ini mengindikasikan adanya perkembangan ke arah pemerataan.

Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,30. Angka ini tetap jika dilihat dengan Gini Ratio tahun 2021 sebesar 0,30 dan menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2020 yang sebesar 0,31.

Tabel II-39. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Kab/Kota	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	**0,32**	**0,31**	**0,30**	**0,30**	**0,35**
Rejang Lebong	0,30	0,29	0,35	0,30	0,3
Bengkulu Utara	0,30	0,28	0,31	0,28	0,3
Kaur	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29
Seluma	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29
Mukomuko	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29
Lebong	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29
Kepahiang	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33
Bengkulu Tengah	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27
Kota Bengkulu	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38

Data Gini Rasio di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya variasi dalam tingkat ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Pada tahun 2019, Gini Rasio Bengkulu Selatan tercatat sebesar 0,32, yang kemudian menurun menjadi 0,31 pada tahun 2020. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, di mana Gini Rasio mencapai 0,30, menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Namun, pada tahun 2023, Gini Rasio meningkat tajam menjadi 0,35, yang merupakan kenaikan signifikan dan menandakan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang memerlukan perhatian khusus.

Perubahan tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya yang berhasil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada awal periode, tantangan ekonomi dan mungkin kebijakan yang kurang tepat di tahun 2023 telah menyebabkan peningkatan ketimpangan. Peningkatan tajam pada tahun 2023 bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam struktur ekonomi, peningkatan pengangguran, atau kebijakan redistribusi yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terfokus untuk mengatasi ketimpangan ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk menghadapi peningkatan ketimpangan yang terjadi pada tahun 2023, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah diterapkan. Peningkatan pengawasan terhadap program-program bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas tinggi juga penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga menyebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan menunjukkan dinamika yang unik. Misalnya, Kota Bengkulu memiliki Gini Rasio yang secara konsisten tinggi, mencapai 0,38 pada tahun 2023, menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan Bengkulu Selatan. Sementara itu, Kabupaten Kepahiang juga menunjukkan peningkatan ketimpangan dengan Gini

Rasio naik dari 0,27 pada tahun 2019 menjadi 0,33 pada tahun 2023. Kabupaten Rejang Lebong mencatat Gini Rasio yang fluktuatif namun relatif stabil, berkisar antara 0,29 hingga 0,35 sepanjang periode ini. Kabupaten Bengkulu Utara, di sisi lain, menunjukkan Gini Rasio yang lebih rendah dan stabil, meskipun ada sedikit peningkatan dari 0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,30 pada tahun 2023. Kabupaten Kaur menunjukkan tren penurunan dengan Gini Rasio menurun dari 0,32 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa kabupaten menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, tantangan dalam mengelola Gini Rasio tetap ada, terutama dengan fluktuasi yang terjadi di berbagai daerah. Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan peningkatan tajam Gini Rasio pada tahun 2023, perlu melakukan evaluasi mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebab ketimpangan ini dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.1.4. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perhitungan dilakukan dengan konsep:

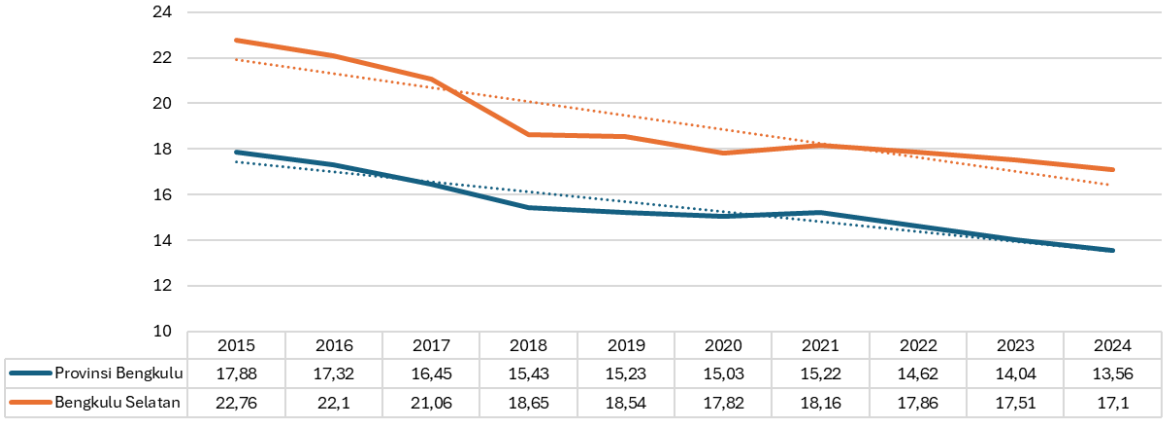
1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode 2019 hingga 2023. Garis kemiskinan terus meningkat dari 377.823 rupiah pada tahun 2019 menjadi 467.762 rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan biaya hidup dan standar kemiskinan di daerah tersebut. Meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, terdapat 29,3 ribu penduduk miskin, yang menurun menjadi 28,41 ribu pada tahun 2020. Namun, jumlah ini meningkat kembali menjadi 31,65 ribu pada tahun 2021 dan tetap stabil sekitar 31,83 ribu pada tahun 2022 dan 31,89 ribu pada tahun 2023.

Persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan yang stabil dari 18,54% pada tahun 2019 menjadi 17,51% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi kemiskinan relatif terhadap total populasi. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menunjukkan penurunan yang positif. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,32 pada tahun 2019 menjadi 2,72 pada tahun 2023, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,83 menjadi 0,65 pada periode yang sama. Penurunan kedua indeks ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di daerah tersebut semakin membaik. Upaya berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta program sosial yang efektif sangat penting untuk melanjutkan tren positif ini dan mengurangi kemiskinan lebih lanjut di Kabupaten Bengkulu Selatan.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56
Bengkulu Selatan	22,76	22,1	21,06	18,65	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51	17,1

Gambar II-5. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015-2024

Tabel II-40. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Kemiskinan	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	377.823	394.513	408.904	435.955	467.762
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	29,3	28,41	31,65	31,83	31,89
Persentase Penduduk Miskin (%)	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,32	3,29	3,28	2,97	2,72
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,83	0,82	0,82	0,71	0,65

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 17,1%, sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan berada pada angka 13,56%. Meskipun Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 18,54% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di kabupaten ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Di sisi lain, Provinsi Bengkulu juga mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, dari 15,23% pada tahun 2019 menjadi 13,56% pada tahun 2024.

Penurunan kemiskinan di kedua wilayah ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 17,51%, sementara di Provinsi Bengkulu angka kemiskinan tercatat sebesar 14,04%. Perbedaan ini menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan membutuhkan

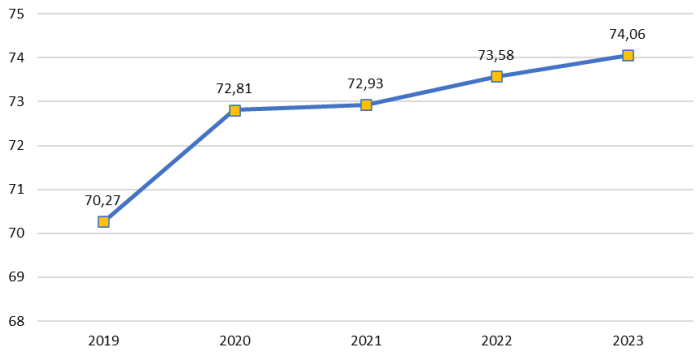
intervensi yang lebih intensif untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat dan mendekati rata-rata provinsi.

Kendati demikian, tren penurunan kemiskinan yang terus berlanjut di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan perkembangan positif yang harus terus didorong. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah, diperlukan strategi yang lebih spesifik dan terarah guna menangani akar penyebab kemiskinan di wilayah ini.

Di tingkat Provinsi Bengkulu, penurunan kemiskinan yang konsisten hingga mencapai 13,56% pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas program-program sosial yang telah dilaksanakan. Meski demikian, upaya untuk terus memperkecil disparitas antara kabupaten-kabupaten di dalam provinsi, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, masih sangat dibutuhkan.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara itu maju, berkembang, atau terbelakang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).



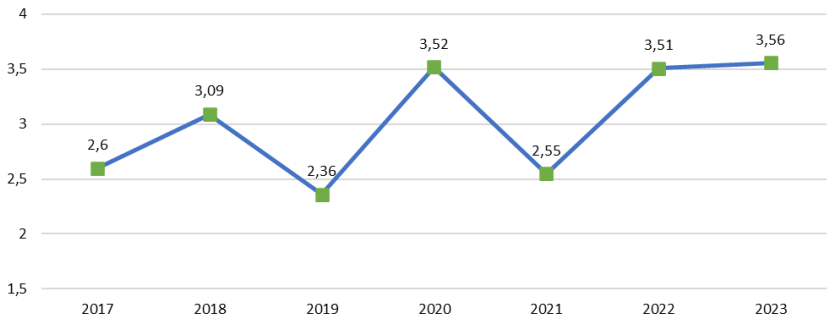
Gambar II-6. Indeks Pembangunan Manusia (Hasil SP2020) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari empat komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan

Pengeluaran Per Kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPM tercatat sebesar 70,27, yang menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat yang relatif baik. Pada tahun 2020, IPM meningkat signifikan menjadi 72,81, mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, meskipun tahun tersebut dipenuhi tantangan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, IPM terus meningkat sedikit menjadi 72,93, dan pada tahun 2022, indeks ini naik lagi menjadi 73,58. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Pada tahun 2023, IPM mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 74,06, menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya secara konsisten.

Peningkatan IPM yang terus-menerus ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga memperbaiki standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus fokus pada pengembangan sumber daya manusia, memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

2.2.1.6. Ketenagakerjaan

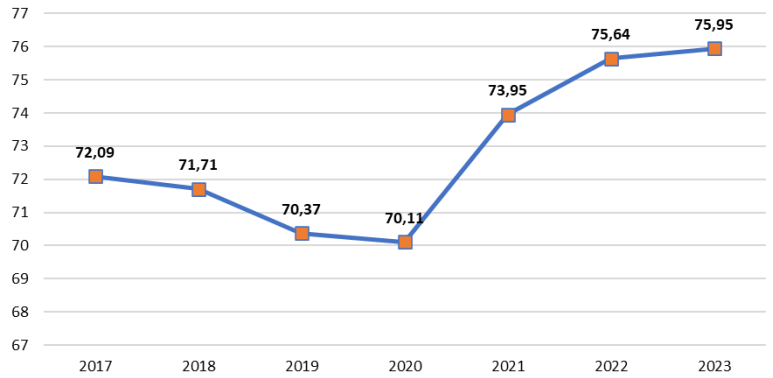


Gambar II-7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pasar

tenaga kerja di daerah tersebut. Pada tahun 2017, TPT tercatat sebesar 2,6%, yang meningkat menjadi 3,09% pada tahun 2018. Penurunan terjadi pada tahun 2019, dengan TPT turun menjadi 2,36%, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, pada tahun 2020, TPT kembali meningkat tajam menjadi 3,52%, kemungkinan besar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT menurun menjadi 2,55%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang cepat. Meskipun demikian, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan TPT mencapai 3,51%, dan terus sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 3,56%.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, tantangan ekonomi global dan lokal masih berdampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan TPT di tahun-tahun terakhir menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor-sektor yang berpotensi tinggi untuk menyerap tenaga kerja, serta program pelatihan keterampilan yang relevan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.



Gambar II-8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif dan peningkatan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 72,09%, yang mengalami sedikit penurunan menjadi 71,71% pada tahun 2018 dan turun lebih lanjut menjadi 70,37% pada tahun 2019. Penurunan ini mungkin mencerminkan

tantangan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Namun, mulai tahun 2020, TPAK menunjukkan pemulihan dan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 melanda, TPAK hanya sedikit menurun menjadi 70,11%. Pada tahun 2021, TPAK meningkat tajam menjadi 73,95%, mencerminkan kembalinya partisipasi angkatan kerja ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan TPAK mencapai 75,64%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 75,95% pada tahun 2023.

Peningkatan TPAK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang memasuki pasar tenaga kerja, yang dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja, termasuk pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung dan memperluas inisiatif-inisiatif yang mendorong partisipasi angkatan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ini disertai dengan kualitas pekerjaan yang baik dan berkelanjutan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", menjadi amanat bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan sosial.

Tabel II-41. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2022

NO	Jenis PMKS	2020 (data awal)	2022 (data termutakhir)
1	Anak Balita Terlantar	12	
2	Anak Terlantar	129	45
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	30	24
4	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	23	81
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	22	
6	Lanjut usia terlantar	8.170	331
7	Penyandang Disabilitas	835	266
8	Tuna Susila	32	58
9	Pengemis	8	
10	Pemulung	16	22
11	Kelompok Minoritas	15	
12	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	36	
13	Korban penyalahgunaan NAPZA	35	
14	Korban tindak kekerasan	63	24
15	Pekerja Migran bermasalah	9	
16	Korban bencana sosial	27	39
17	Fakir Miskin	67.525	
Jumlah		76.987	890

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2023

Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II-42. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

Nama Wilayah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggara (Rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Bengkulu Selatan	13.990	12.400	2.798.000.000	2.480.000.000
Rejang Lebong	21.740	22.915	4.348.000.000	4.583.000.000
Bengkulu Utara	22.957	23.541	4.591.400.000	4.708.200.000
Kaur	10.941	9.695	2.188.200.000	1.939.000.000
Seluma	15.373	14.392	3.074.600.000	2.878.400.000
Mukomuko	10.660	12.489	2.132.000.000	2.497.800.000
Lebong	7.932	8.454	1.586.400.000	1.690.800.000
Kepahiang	11.393	10.646	2.278.600.000	2.129.200.000
Bengkulu Tengah	8.113	9.998	1.622.600.000	1.999.600.000
Kota Bengkulu	20.447	18.775	4.089.400.000	3.755.000.000
Provinsi Bengkulu	143.546	143.305	28.709.200.000	28.661.000.000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

2.2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki seni budaya yang sangat beragam sebagai bukti kekayaan kearifan lokal, yang sangat berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan. Seni budaya yang ada menjadi salah satu modal untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dari sisi pembangunan karakter dan kepribadian masyarakat yang berbudaya, beradab, berkarakter dan bertanggung jawab. Pembangunan seni dan budaya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan serta memperkokoh nilai-nilai seni budaya daerah, sehingga terbangun kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan ruh dari makna "sekundang setungguan". Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan geliat yang positif, dimana terlihat dari banyaknya group seni yang tetap bertahan dan bahkan melahirkan karya.

Tabel II-43. Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 (kelompok)

Grup Kesenian	Tahun						
	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
Sanggar Seni Budaya	15	15	15	15	15	15	15
Sanggar Seni Kreasi	12	12	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Disamping pengembangan seni dan budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keseriusan dalam pengembangan olahraga, sebagai aktivitas fisik yang

bersifat positif untuk menyehatkan jasmani dan rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi dan prestasi daerah. Olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu olahraga prestasi dan olahraga tradisional. Terdapat beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan di Kabupaten Bengkulu Selatan, diantaranya adalah sepak takraw, bola volley, bola basket, badminton, tenis meja dan silat. Untuk olahraga tradisional, yang diminati masyarakat adalah terompah panjang, hadang, engrang, catur, dan bakiak.

Tabel II-44. Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 (organisasi)

Organisasi Olahraga	Tahun						
	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
Olahraga Prestasi	5	5	5	5	5	5	5
Olahraga Tradisional	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 54,56%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Tabel II-45. Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	n/a	59,95	61,13	56,59	54,56

Sumber: ipk.kemdikbud.go.id

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel II-46. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2023

Indikator	2020 (data awal)	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	B

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 hingga 2022, indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat pada kategori C, yang mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Meski terdapat berbagai program reformasi yang dijalankan, hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik.

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan positif dalam indeks ini, yang naik dari kategori C menjadi B. Perubahan ini mencerminkan bahwa upaya perbaikan birokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai membuahkan hasil. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh penerapan kebijakan yang lebih fokus pada reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Pencapaian kategori B ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi, yang diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan transparan dapat terwujud.

2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1. Pendidikan Dasar

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan kualitas dan akses pendidikan menjadi prioritas guna peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut yang akan dijelaskan kemudian.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang masih bersekolah menurut kelompok usia tanpa memperhatikan jenjang pendidikan. APS dapat digunakan sebagai salah satu ukuran tercapainya tujuan pemerintah yakni kepastian penduduk untuk memperoleh pendidikan dasar. Peningkatan APS dapat menjadi salah satu indikator adanya keberhasilan di bidang pendidikan. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan, meskipun bukan berarti meningkatnya APS juga menjadi indikator meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir, baik untuk jenjang usia 7-12 tahun yaitu pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jenjang usia 13-15 tahun yaitu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel II-47. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2023 (persen)

Jenjang Usia	Tahun							
	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 – 12	100	100	100	99,94	99,53	82,03	94,66	99,35
13 – 15	99,23	99,67	100	99,07	98,52	47,16	84,88	99,5

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, diolah, 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat perkembangan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk jenjang usia 7-12 tahun selama periode 2016 hingga 2023. Pada awal periode, yaitu dari tahun 2016 hingga 2018, angka partisipasi untuk kelompok usia ini sangat tinggi, mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di usia tersebut bersekolah. Namun, mulai tahun 2019, angka partisipasi mulai mengalami sedikit penurunan, dengan angka 99,94% dan terus turun menjadi 99,53% pada tahun 2020. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana angka partisipasi turun drastis ke 82,03%, yang bisa jadi mencerminkan adanya tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga anak-anak usia sekolah ini tetap bersekolah. Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dengan angka partisipasi kembali naik menjadi 94,66% pada tahun 2022 dan hampir mencapai tingkat optimal di angka 99,35% pada tahun 2023.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, tren partisipasi sekolah juga menunjukkan tingkat yang sangat tinggi pada awal periode. Angka partisipasi mencapai 99,23% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018, yang menunjukkan kesuksesan dalam menjaga anak-anak usia remaja tetap berada di bangku sekolah. Namun, seperti halnya kelompok usia yang lebih muda, mulai tahun 2019 terjadi penurunan angka partisipasi, yang turun menjadi 99,07% dan kemudian menjadi 98,52% pada tahun 2020. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2021, di mana angka partisipasi anjlok ke 47,16%, menandakan adanya masalah serius yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, yang menghambat kemampuan siswa untuk tetap bersekolah.

Meski menghadapi penurunan yang signifikan pada tahun 2021, Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil melakukan upaya pemulihan yang cukup efektif pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 13-15 tahun meningkat signifikan menjadi 84,88%, dan pada tahun 2023 hampir pulih sepenuhnya dengan angka 99,5%. Demikian pula, kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan peningkatan partisipasi yang hampir mencapai tingkat optimal pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan besar, terutama pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk memulihkan dan

meningkatkan angka partisipasi sekolah di kedua kelompok usia tersebut, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), APM tetap tinggi selama periode tersebut, meskipun ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, APM tercatat sebesar 98,91%, yang menurun sedikit menjadi 98,80% pada tahun 2020 dan lebih lanjut menjadi 98,36% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, APM mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 96,83%, sebelum naik kembali menjadi 97,52% pada tahun 2023. Meskipun ada beberapa penurunan, tingkat partisipasi di jenjang SD tetap mendekati universal, menunjukkan akses yang luas dan ketersediaan pendidikan dasar bagi anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APM menunjukkan tren peningkatan yang lebih jelas. Pada tahun 2019, APM tercatat sebesar 67,00%, yang sedikit menurun menjadi 66,63% pada tahun 2020. Namun, APM mulai meningkat kembali menjadi 67,19% pada tahun 2021 dan tetap stabil pada tahun 2022 dengan angka 67,21%. Pada tahun 2023, APM mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 79,68%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses dan partisipasi siswa di jenjang pendidikan menengah pertama, yang merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Meskipun ada sedikit penurunan dalam APM di jenjang SD pada beberapa tahun, tingkat partisipasi tetap tinggi secara keseluruhan. Di sisi lain, jenjang SMP menunjukkan peningkatan signifikan dalam APM, yang menunjukkan bahwa lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi siswa di kedua jenjang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan partisipasi pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-48. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
SD	%	98,91	98,80	98,36	96,83	97,52
SMP	%	67,00	66,63	67,19	67,21	79,68

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2023

C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APK Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-49. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
SD	%	96,20	107,13	113,54	107,04	105,78
SMP	%	94,18	99,23	83,45	74,09	83,77

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2023

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), APK menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi selama periode tersebut. Pada tahun 2019, APK tercatat sebesar 96,20%, yang meningkat tajam menjadi 107,13% pada tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2021, dengan APK mencapai 113,54%. Namun, pada tahun 2022, APK mengalami penurunan kembali menjadi 107,04% dan sedikit menurun lagi menjadi 105,78% pada tahun 2023. Meskipun ada fluktuasi, tingkat partisipasi kasar di jenjang SD tetap tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah, termasuk mereka yang berusia lebih dari usia standar sekolah dasar.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APK juga menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, APK tercatat sebesar 94,18%, yang meningkat menjadi 99,23% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, APK mengalami penurunan tajam menjadi 83,45% dan terus menurun menjadi 74,09% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, APK menunjukkan pemulihan dengan peningkatan menjadi 83,77%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti putus sekolah atau penurunan pendaftaran baru, sementara peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam partisipasi pendidikan menengah pertama.

Meskipun jenjang SD menunjukkan fluktuasi, tingkat partisipasi kasar tetap tinggi, yang mencerminkan akses pendidikan yang luas untuk anak-anak usia sekolah dasar. Di sisi lain, jenjang SMP menunjukkan penurunan yang signifikan pada beberapa tahun, namun ada tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan retensi siswa di jenjang pendidikan menengah pertama sangat penting untuk memastikan bahwa lebih banyak anak menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS yang ditetapkan dalam satuan tahun, digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-50. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,61	13,62	13,63	13,65

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2024

Data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 13,6 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di daerah tersebut diperkirakan akan menyelesaikan lebih dari 13 tahun pendidikan formal, mencakup pendidikan dasar, menengah, dan sebagian pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, indikator ini sedikit meningkat menjadi 13,61 tahun, menunjukkan kemajuan dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan Harapan Lama Sekolah mencapai 13,62 tahun pada tahun 2021, 13,63 tahun pada tahun 2022, dan 13,65 tahun pada tahun 2023. Peningkatan bertahap ini mencerminkan keberhasilan

berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa lebih banyak anak dapat menyelesaikan pendidikan mereka.

Peningkatan Harapan Lama Sekolah dari 13,6 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,65 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam sektor pendidikan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi anak-anak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu terus mendukung dan memperluas inisiatif pendidikan untuk memastikan bahwa tren positif ini dapat berlanjut di masa depan.

E. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas. Data Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 9,02 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut rata-rata telah menyelesaikan sekitar 9 tahun pendidikan formal, setara dengan pendidikan menengah pertama. Pada tahun 2020, indikator ini meningkat menjadi 9,26 tahun, menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk.

Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,27 tahun pada tahun 2021, 9,39 tahun pada tahun 2022, dan 9,41 tahun pada tahun 2023. Peningkatan bertahap ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.

Tabel II-51. Rata-rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun

		2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,02	9,26	9,27	9,39	9,41

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2024

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,02 tahun pada tahun 2019 menjadi 9,41 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam sektor pendidikan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi penduduk, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu terus mendukung dan memperluas inisiatif pendidikan untuk memastikan bahwa tren positif ini dapat berlanjut di masa depan.

F. Rasio Guru Terhadap Siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap siswa menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini, berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio guru terhadap siswa jenjang pendidikan dasar di SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-52. Rasio Guru Terhadap Siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
SD	Rasio	1:16	1:13	1:12	1:12	n/a*
SMP	Rasio	1:14	1:12	1:15	1:12	n/a

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, Tahun 2022
**n/a = data belum tersedia*

Rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk jenjang SD dan SMP sudah relatif memadai, dimana rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD sebesar 1:12. Hal ini berarti 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 12 siswa. Interpretasi yang sama juga untuk jenjang SMP dimana rasio sebesar 1:12, yang berarti 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 12 siswa.

G. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Kondisi akreditasi sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018- 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-53. Perkembangan Akreditasi Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Jenjang / Akreditasi	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
SD						
A	%	16,8	16,8	14,2	15,00	n/a
B	%	52,8	52,8	53,3	51,67	n/a
C	%	29,6	29,6	30,8	31,67	n/a
Belum	%	0,8	0,8	1,7	1,66	n/a
SMP						
A	%	19,4	19,4	21,2	24,24	n/a
B	%	52,8	52,8	57,6	54,55	n/a
C	%	22,2	22,2	15,2	15,15	n/a
Belum	%	5,6	5,6	6,1	6,06	n/a

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, Tahun 2021
**n/a = data belum tersedia*

Berdasarkan data pada tabel di atas, masih banyak sekolah yang status akreditasinya belum sempurna dan bahkan belum terakreditasi sampai dengan tahun 2021. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

H. Siswa Putus Sekolah

Pendidikan bertujuan membantu manusia mencapai kedewasaannya, yaitu menjadi individu yang memiliki keseimbangan emosi, intelektual, dan tindakan. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan mereka melaksanakan kebebasan memilih dengan tanggung jawab dan etika yang tinggi. Mencapai tujuan pendidikan tersebut memerlukan proses yang panjang, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri.

Namun, proses pendidikan akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan jika hakikat pendidikan tidak dianggap penting dalam perkembangan manusia sebagai

makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Kendala-kendala ini dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan di setiap jenjangnya.

Salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah kasus anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan meskipun masih berada pada usia sekolah. Secara umum, di Indonesia, angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan dalam empat tahun terakhir masih melebihi satu juta siswa per tahun. Mayoritas dari mereka (80 persen) adalah siswa yang berada di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). Meskipun persentase anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sekitar 0,37% untuk SD dan 0,80% untuk SMP, tampak kecil jika dilihat dari persentase, angka sebenarnya menunjukkan bahwa sekitar 50 hingga 60 siswa SD dan 60 hingga 70 siswa SMP setiap tahun mengalami putus sekolah. Meskipun persentase ini tampak kecil, jumlah anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka cukup signifikan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anak di Bengkulu Selatan mendapatkan kesempatan pendidikan yang penuh dan berkesinambungan.

Tabel II-54. Siswa Putus Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Jenjang	Sekolah	Jumlah Siswa	Siswa Putus
SD	120	14.676	54
Negeri	115	13.692	49
Swasta	5	984	5
SMP	35	7.590	61
Negeri	30	7.201	54
Swasta	5	389	7

I. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kunci keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Literasi, yang melibatkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, dan numerasi, yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengolah angka, adalah keterampilan yang tak terpisahkan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Di

era di mana informasi dan data menjadi sangat berlimpah, kemampuan literasi memungkinkan individu untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak, sementara numerasi membantu mereka dalam menganalisis data, membuat perhitungan, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Bengkulu Selatan, keterampilan literasi dan numerasi menjadi sangat relevan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Misalnya, warga yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah memahami petunjuk medis dari tenaga kesehatan, membaca label pada produk makanan untuk memastikan kesehatan keluarga mereka, atau mengisi formulir administratif yang diperlukan dalam berbagai layanan publik. Di sisi lain, kemampuan numerasi yang kuat memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, membuat anggaran yang tepat, dan bahkan menjalankan usaha kecil dengan lebih efisien.

Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, literasi dan numerasi juga menjadi elemen kunci dalam pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik akan memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran, menganalisis masalah, dan mengembangkan solusi yang efektif. Literasi dan numerasi membuka pintu bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia pengetahuan, mengasah kemampuan berpikir kritis, dan mempersiapkan mereka untuk berbagai tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mengembangkan dan memperkuat kemampuan literasi dan numerasi di kalangan anak-anak usia sekolah menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat luas. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memastikan bahwa generasi muda memiliki keterampilan dasar yang kuat untuk mendukung kemajuan pendidikan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Tabel II-55. Indeks Literasi dan Indeks Numerasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2024

Jenjang	Sekolah	Literasi (Indeks)		Numerasi (Indeks)	
		2023	2024	2023	2024
SD	120	53,99	60,35	41,55	55,96
SMP	35	57,75	65,57	36,72	59,62

Sumber: Raport Pendidikan tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan data literasi dan numerasi untuk jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kemampuan dasar ini di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di tingkat SD, indeks literasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 53,99, dan meningkat menjadi 60,35 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperkuat kemampuan membaca dan memahami teks di kalangan siswa SD. Di sisi lain, indeks numerasi di tingkat SD juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 41,55 pada tahun 2023 menjadi 55,96 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, dan mengolah angka.

Perkembangan positif juga terlihat di jenjang SMP. Indeks literasi di tingkat SMP pada tahun 2023 mencapai 57,75 dan meningkat menjadi 65,57 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa siswa SMP di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin mahir dalam kemampuan membaca dan pemahaman teks yang lebih kompleks. Selain itu, indeks numerasi di tingkat SMP yang pada tahun 2023 berada di angka 36,72, mengalami peningkatan tajam menjadi 59,62 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan siswa SMP untuk memahami dan mengaplikasikan konsep matematika dalam berbagai situasi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dasar di bidang literasi dan numerasi. Peningkatan yang konsisten dari tahun 2023 ke 2024 di kedua jenjang pendidikan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dasar yang sangat penting bagi keberhasilan siswa dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan efektivitas program-program pendidikan yang telah diterapkan, serta pentingnya melanjutkan upaya-upaya ini untuk memastikan bahwa seluruh siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas yang mampu meningkatkan literasi dan numerasi mereka.

2.3.1.2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada beberapa indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

A. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan, karena pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. AKB di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-56. Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
AKB/1.000 Kelahiran Hidup	Nilai	10	11	10	17	8

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.

B. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani seseorang. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain fungsinya sebagai indikator keberhasilan program kesehatan, AHH juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai taraf kesehatan masyarakat. Pada dasarnya AHH untuk jangka pendek relatif stabil, karena program pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan bukanlah program yang berdampak langsung (bersifat instant), sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapatmelihat dampaknya.

AHH memiliki hubungan yang erat dan positif dengan pembangunan sosial ekonomi. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka AHH juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, bila AHH tinggi maka dapat menjadi indikasi bahwa pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin maju. Daerah yang kondisi sosial ekonominya di bawah rata-rata biasanya mempunyai AHH yang relatif rendah. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-57. Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023 (SP 2020)

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,45	67,79	72,47	72,49	72,67

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, menunjukkan Data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 67,45 tahun. Angka ini meningkat menjadi 67,79 tahun pada tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat.

Tren positif ini berlanjut dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, di mana Angka Harapan Hidup melonjak menjadi 72,47 tahun. Peningkatan ini terus berlanjut stabil pada tahun 2022 dengan angka 72,49 tahun, dan sedikit naik lagi menjadi 72,67 tahun pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan dan inisiatif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk upaya peningkatan layanan kesehatan, gizi, serta kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Peningkatan Angka Harapan Hidup dari 67,45 tahun pada tahun 2019 menjadi 72,67 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan berkualitas dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus mendukung dan memperluas inisiatif kesehatan untuk memastikan bahwa tren positif ini dapat berlanjut di masa

depan, dengan fokus pada pencegahan penyakit, peningkatan layanan kesehatan, dan edukasi kesehatan masyarakat.

C. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan menjadi kebutuhan dan mutlak dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia guna mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan dalam bidang kesehatan adalah baiknya layanan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel II-58. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 – 2021

No	Fasilitas Kesehatan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	RSU	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	14	14	14	14	14
3	Puskesmas Pembantu	41	41	47	41	42
4	Rumah Bersalin	0	0	0	-	-
5	Apotik	27	22	20	36	42
6	Pos Kesehatan Desa	64	-	5	-	-
7	Toko Obat Berizin	3	0	3	3	3
8	Posyandu	204	130	121	173	182

Sumber: Data diolah Dinas Kesehatan Tahun 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum (RSU) tetap konsisten dengan satu unit yang melayani seluruh kabupaten, dan jumlah Puskesmas juga stabil di angka 14 selama lima tahun tersebut, menunjukkan komitmen untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Namun, jumlah Puskesmas Pembantu mengalami fluktuasi, sempat meningkat menjadi 47 unit pada tahun 2021 sebelum turun kembali menjadi 41 dan kemudian sedikit naik menjadi 42 pada tahun 2023.

Sementara itu, jumlah apotek mengalami peningkatan signifikan, dari 20 apotek pada tahun 2021 menjadi 42 apotek pada tahun 2023, yang mencerminkan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap obat-obatan dan layanan farmasi. Di sisi lain, data mengenai Pos Kesehatan Desa menunjukkan ketidakstabilan, dengan jumlah yang terdaftar hanya 5 pada tahun 2021 dan kemudian tidak tercatat pada

tahun-tahun berikutnya. Toko Obat Berizin tetap stabil dengan jumlah 3 unit selama periode tersebut.

Posyandu, yang merupakan fasilitas penting untuk ibu dan anak, juga mengalami perubahan signifikan. Jumlah Posyandu sempat menurun dari 204 unit pada tahun 2019 menjadi 121 unit pada tahun 2021, namun kembali meningkat hingga mencapai 182 unit pada tahun 2023. Meskipun ada fluktuasi dalam beberapa jenis fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah apotek dan Posyandu menunjukkan adanya upaya positif untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik dan paripurna. Adapun data jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut.

Tabel II-59. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018–2022

No	Tenaga Medis	Satuan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
1	Dokter	Orang	67	108	73	125	-
2	Perawat	Orang	153	658	434	434	508
3	Bidan	Orang	458	576	521	611	605
4	Farmasi	Orang	413	90	112	115	106
5	Ahli Gizi	Orang	113	65	44	44	53

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2023

D. Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Tabel II-60. Prevalensi Stunting Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2023

	2021 (data awal)	2022	2023
Prevalensi Stunting (%)	2,7	2.9	2.9

Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan sedikit peningkatan yang mengindikasikan tantangan dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 2,7%. Angka ini meningkat sedikit menjadi 2,9% pada tahun 2022, dan angka tersebut tetap stabil pada tahun 2023 dengan prevalensi stunting sebesar 2,9%. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, tetap menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam upaya perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak di daerah tersebut.

Stabilitas angka prevalensi stunting yang tetap tinggi pada 2,9% selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya dalam program pencegahan dan penanganan stunting. Ini termasuk perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lain, peningkatan dari 2,7% pada tahun 2021 menjadi 2,9% pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Infrastruktur Dasar

Jalan menjadi kunci utama untuk menjamin terwujudnya konektivitas guna membuka akses dan keterhubungan baik antar daerah maupun antar wilayah (kecamatan) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun ruas jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan sebagai berikut:

Tabel II-61. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019–2023

No	Status Jalan	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Negara	Km	43,50	43,50	43,50	106.11	106.11
2	Provinsi	Km	139,75	139,75	139,75	123.18	123.18
3	Kabupaten	Km	1.280,97	1.280,97	1.280,97	1.280.97	1.280.97

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Jalan Negara mengalami peningkatan panjang yang signifikan pada tahun 2022. Dari 43,50 km pada tahun 2019 hingga 2021, panjang jalan negara meningkat menjadi 106,11 km pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya pengalihan jalan dari tingkat provinsi atau kabupaten ke tingkat nasional, atau mungkin pembangunan jalan baru yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Jalan Provinsi menunjukkan penurunan panjang pada tahun 2022. Dari 139,75 km pada tahun 2019 hingga 2021, panjang jalan provinsi berkurang menjadi 123,18 km pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga tahun 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh pengalihan sebagian jalan provinsi menjadi jalan negara atau kabupaten.

Jalan Kabupaten tetap stabil selama periode tersebut, dengan panjang jalan mencapai 1.280,97 km dari tahun 2019 hingga 2023. Stabilitas panjang jalan kabupaten menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam status jalan di tingkat kabupaten, dan fokus mungkin lebih pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Perubahan dalam panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dan status jalan. Peningkatan panjang jalan negara dan penurunan panjang jalan provinsi mencerminkan perubahan dalam prioritas pengelolaan infrastruktur jalan, yang dapat berpengaruh pada kualitas dan pemeliharaan jalan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua jalan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, dipelihara dengan baik untuk mendukung mobilitas, perdagangan, dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Adapun data jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan menurut kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-62. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019–2023

No	Kondisi Jalan	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Baik	Km	716,95	368,34	82,92	92,67	96,07
2	Sedang	Km	133,98	348,51	598,33	604,32	608,78
3	Rusak	Km	212,86	564,12	536,06	39,02	68,36
4	Rusak Berat	Km	214,67	n/a	63,66	544,96	507,76

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Data kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi besar selama periode tersebut. Pada tahun 2019, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat sebesar 716,95 km, namun mengalami penurunan drastis menjadi 368,34 km pada tahun 2020 dan lebih lanjut turun menjadi 82,92 km pada tahun 2021. Sedikit peningkatan terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan panjang jalan baik masing-masing sebesar 92,67 km dan 96,07 km. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang sebelumnya dalam kondisi baik mengalami degradasi. Jalan dalam kondisi sedang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari 133,98 km pada tahun 2019, panjang jalan sedang meningkat tajam menjadi 348,51 km pada tahun 2020 dan terus naik hingga 598,33 km pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan panjang jalan sedang masing-masing sebesar 604,32 km dan 608,78 km. Peningkatan ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang mengalami penurunan kualitas dari baik menjadi sedang, namun tetap dalam kondisi yang bisa dilalui dengan cukup baik.

Jalan dalam kondisi rusak juga mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2019, panjang jalan rusak tercatat sebesar 212,86 km, yang meningkat tajam menjadi 564,12 km pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 536,06 km, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 39,02 km, sebelum naik kembali menjadi 68,36 km pada tahun 2023. Penurunan besar pada tahun 2022 dapat menunjukkan upaya perbaikan besar-besaran yang dilakukan pada jalan-jalan yang rusak. Jalan dalam kondisi rusak berat juga menunjukkan perubahan drastis. Pada tahun 2019, panjang jalan rusak berat adalah 214,67 km. Data untuk tahun 2020 tidak tersedia, namun pada tahun 2021, panjang jalan rusak berat turun drastis menjadi 63,66 km. Namun, pada tahun 2022, panjang jalan rusak berat melonjak menjadi 544,96 km dan sedikit menurun menjadi 507,76 km pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang mengalami degradasi parah dalam kualitas selama periode tersebut.

Kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami degradasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan banyak jalan yang sebelumnya dalam kondisi baik memburuk menjadi kondisi sedang, rusak, atau rusak berat. Meskipun ada

beberapa upaya perbaikan yang dilakukan, peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat menunjukkan perlunya perhatian dan investasi yang lebih besar dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk memastikan mobilitas yang aman dan efisien di seluruh daerah.

2.3.1.3.2. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan daerah terkait pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2018-2022, dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Kepemilikan Bangunan

Tabel II-63. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
	2020 (data awal)		2021		2022		2023	
Bengkulu Selatan	87,20	12,80	90,59	9,41	91,17	8,84	87,31	12,69
Rejang Lebong	82,02	17,98	82,40	17,60	81,25	18,75	84,61	15,39
Bengkulu Utara	90,88	9,12	90,83	9,17	91,73	8,27	94,17	5,83
Kaur	91,48	8,52	94,45	5,55	96,43	3,57	95,78	4,22
Seluma	91,20	8,80	92,93	7,07	92,73	7,27	94,16	5,84
Mukomuko	82,52	17,48	84,90	15,10	83,48	16,52	86,15	13,85
Lebong	86,59	13,41	83,92	16,08	86,14	13,86	88,88	11,12
Kepahiang	87,76	12,24	83,93	16,07	87,77	12,24	86,95	13,05
Bengkulu Tengah	94,03	5,97	93,18	6,82	96,68	3,32	95,41	4,59
Kota Bengkulu	66,32	33,69	66,98	33,02	80,25	19,75	80,74	19,26
Provinsi Bengkulu	**83,56**	**16,44**	**84,32**	**15,68**	**87,46**	**12,54**	**88,38**	**11,62**

Pada tahun 2020, 87,20% rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki bangunan tempat tinggal mereka sendiri, sementara 12,80% rumah tangga tinggal di bangunan yang bukan milik mereka sendiri. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri meningkat menjadi 90,59%, dengan hanya 9,41% rumah tangga tinggal di bangunan yang bukan milik mereka sendiri. Peningkatan ini mencerminkan upaya dan mungkin program pemerintah daerah untuk meningkatkan kepemilikan rumah di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki bangunan tempat tinggal sendiri sedikit meningkat lagi menjadi 91,17%, sementara 8,84% rumah tangga tinggal di bangunan yang bukan milik mereka sendiri. Namun, tahun 2023, terjadi penurunan

persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri menjadi 87,31%, dengan 12,69% rumah tangga tinggal di bangunan yang bukan milik mereka sendiri.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, seperti Bengkulu Utara dan Kaur, yang menunjukkan peningkatan stabil dalam persentase kepemilikan rumah, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Kabupaten Kaur, misalnya, mencapai persentase tertinggi dengan 96,43% rumah tangga memiliki tempat tinggal sendiri pada tahun 2022 dan hanya sedikit menurun menjadi 95,78% pada tahun 2023. Kabupaten Seluma juga menunjukkan peningkatan dari 91,20% pada tahun 2020 menjadi 94,16% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan persentase kepemilikan rumah pada awal periode, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi dan mungkin penguatan program-program perumahan untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dalam kepemilikan rumah. Upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung rumah tangga dalam memiliki tempat tinggal sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sehat. Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Berikut data rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak.

Tabel II-64. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	%	65,85	45,78	54,22	65,00	62,72

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 35,00 persen Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum memiliki akses terhadap air minum layak.

Tabel II-65. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Kota Bengkulu	85,16	88,77	92,21	94,51	62,72
Kaur	66,42	79,4	86,2	83,94	56,37
Bengkulu Utara	41,21	56,24	53,11	82,64	84,11
Mukomuko	53,32	79,41	75,99	75,73	84,18
Provinsi Bengkulu	57,6	62,47	67,39	73,07	70,93
Seluma	33,38	37,54	47,04	71,59	75,45
Bengkulu Selatan	**65,85**	**45,78**	**58,22**	**65**	59,7
Kepahiang	46,19	63,82	62,65	61,81	62,14
Rejang Lebong	56,63	45,24	65,07	57,25	50,44
Lebong	65,81	61,16	57,37	54,85	93,38
Bengkulu tengah	44,82	49,32	63,06	51,89	62,72

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2024

Data akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tercatat sebesar 65,85%. Angka ini menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 45,78%, yang menunjukkan adanya penurunan drastis dalam akses air minum yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak kembali meningkat menjadi 58,22%, mengindikasikan adanya perbaikan dalam infrastruktur dan penyediaan air minum. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan persentase mencapai 65%, hampir mendekati angka yang tercatat pada tahun 2019.

Namun, pada tahun 2023, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak kembali menurun menjadi 59,7%. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih ada

tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan akses air minum layak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Bengkulu Selatan, fluktuasi yang signifikan masih terjadi. Penurunan akses pada tahun 2020 dan 2023 menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan akses air minum layak bagi seluruh rumah tangga. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, seperti Kaur, Bengkulu Utara, dan Lebong, yang menunjukkan tren peningkatan lebih konsisten dalam periode yang sama, Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakatnya. Beberapa kabupaten lain berhasil mencapai peningkatan yang lebih stabil, mencerminkan keberhasilan inisiatif dan program perbaikan infrastruktur air yang lebih efektif.

C. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Adapun rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses sanitasi layak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Kabupaten/Kota	2020 (data awal)	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	**72,02**	**74,73**	**84,09**	**83,81**
Rejang Lebong	70,02	71,5	70,2	64,41
Bengkulu Utara	79,23	81,37	83,44	82,84
Kaur	76,09	78,63	81,23	86,43
Seluma	78,26	84,29	86,16	87,17
Mukomuko	81,04	86,78	79,12	80,94
Lebong	46,8	51,55	51,92	55,62
Kepahiang	65,95	66,89	64,58	69,25
Bengkulu Tengah	85,44	80,23	74,65	83,07
Kota Bengkulu	95,71	95,79	94,49	93,94
Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, 72,02% rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Angka ini meningkat menjadi 74,73% pada tahun 2021, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur sanitasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik. Tren peningkatan ini berlanjut dengan signifikan pada tahun 2022, di mana persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 84,09%. Peningkatan yang besar ini menunjukkan efektivitas program-program sanitasi yang diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk pembangunan fasilitas sanitasi dan kampanye kesehatan masyarakat. Namun, pada tahun 2023, persentase ini sedikit menurun menjadi 83,81%, meskipun masih mempertahankan tingkat yang tinggi dibandingkan dengan awal periode.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kinerja yang baik dalam hal peningkatan akses sanitasi. Misalnya, Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dari 70,02% pada tahun 2020 menjadi 64,41% pada tahun 2023. Sebaliknya, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan Kabupaten Seluma mencapai 87,17% pada tahun 2023 dan Kabupaten Kaur mencapai 86,43% pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun terakhir, Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam akses sanitasi layak selama periode 2020 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi sanitasi. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program-program sanitasi, memastikan pemeliharaan fasilitas yang ada, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan akses sanitasi layak bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni

Kebutuhan perumahan yang layak merupakan hal yang esensial bagi setiap manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 menyebutkan jika setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sehingga dalam upaya mewujudkan kebutuhan perumahan yang layak huni, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan juga berusaha untuk memberikan kemudahan terhadap perolehan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia. Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) minimal 7,2 m2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (durable housing) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah (BPS, 2019).

Tabel II-67. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
1	Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Hunian Layak	%	80,58	76,45	76,36	68,02	72,02

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel II-68. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
	2020		2021		2022	
Bengkulu Selatan	87,20	12,80	90,59	9,41	91,17	8,84
Rejang Lebong	82,02	17,98	82,40	17,60	81,25	18,75
Bengkulu Utara	90,88	9,12	90,83	9,17	91,73	8,27
Kaur	91,48	8,52	94,45	5,55	96,43	3,57
Seluma	91,20	8,80	92,93	7,07	92,73	7,27
Mukomuko	82,52	17,48	84,90	15,10	83,48	16,52
Lebong	86,59	13,41	83,92	16,08	86,14	13,86
Kepahiang	87,76	12,24	83,93	16,07	87,77	12,24
Bengkulu Tengah	94,03	5,97	93,18	6,82	96,68	3,32
Kota Bengkulu	66,32	33,69	66,98	33,02	80,25	19,75
Provinsi Bengkulu	**83,56**	**16,44**	**84,32**	**15,68**	**87,46**	**12,54**

2.3.1.4. Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kualitas kehidupan masyarakat yang berkualitas, salah satunya dibangun dari kualitas ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga dengan baik, serta perlindungan masyarakat yang terkelola secara optimal. Dalam upaya meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disupport oleh tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten dan professional.

Tabel II-69. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 1.000 Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2023

Indikator	Satuan	Tahun							
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Polisi Pamong Praja	%	0,13	1,36	1,36	1,36	1,24	1,75	1,79	1,78

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Tahun 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat perkembangan rasio Satuan Polisi Pamong Praja per 1.000 penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016, rasio ini dimulai dari angka yang relatif rendah yaitu 0,13%, menunjukkan bahwa pada saat itu jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Namun, pada tahun 2017 terjadi lonjakan yang signifikan, di mana rasio ini meningkat drastis menjadi 1,36%. Peningkatan ini kemungkinan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Rasio ini kemudian stabil di angka 1,36% hingga tahun 2019, yang menandakan konsistensi dalam jumlah personel yang dipertahankan oleh pemerintah daerah.

Memasuki tahun 2020, terdapat sedikit penurunan dalam rasio ini menjadi 1,24%, yang mungkin disebabkan oleh perubahan jumlah personel atau faktor lain seperti pertumbuhan penduduk. Namun, tren penurunan ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2021, rasio kembali meningkat tajam ke angka 1,75%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2022, di mana rasio mencapai puncaknya di 1,79%, menunjukkan penguatan lebih lanjut dalam jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2023, rasio ini sedikit menurun menjadi 1,78%, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkulu Selatan selama delapan tahun terakhir, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketertiban dan keamanan di wilayahnya.

A. Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk daerah rawan bencana (ring of fire). Upaya peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana terus dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (1) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Kajian risiko bencana menghasilkan Indeks Risiko Bencana untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri masuk dalam kategori daerah dengan indeks risiko bencana tinggi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-70. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kecenderungan yang stabil selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022. Pada periode ini, nilai indeks risiko bencana tercatat tetap berada pada angka 186,40. Stabilitas ini dapat diartikan sebagai konsistensi dalam penilaian risiko bencana, yang mungkin mencerminkan kondisi dan faktor-faktor risiko yang tidak banyak berubah selama empat tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dengan penurunan indeks risiko bencana menjadi 165,18. Penurunan ini

sebesar 21,20 poin menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mitigasi dan manajemen risiko bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan. Langkah-langkah yang telah diambil, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, tampaknya berhasil mengurangi potensi risiko yang dihadapi.

Penurunan indeks risiko bencana pada tahun 2023 ini juga bisa menjadi indikasi keberhasilan berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan. Misalnya, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan dan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, sehingga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara keseluruhan, perubahan dalam Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menggambarkan perjalanan yang dinamis dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penurunan indeks di tahun 2023 menjadi titik balik yang penting, mencerminkan keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai dalam menghadapi tantangan bencana.

Ancaman bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa potensi diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan serta cuaca ekstrim

2.3.1.5. Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, menjadi amanat bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel II-71. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2022

NO	Jenis PMKS	2020 (data awal)	2022 (data termutakhir)
1	Anak Balita Terlantar	12	
2	Anak Terlantar	129	45
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	30	24
4	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	23	81
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	22	
6	Lanjut usia terlantar	8.170	331
7	Penyandang Disabilitas	835	266
8	Tuna Susila	32	58
9	Pengemis	8	
10	Pemulung	16	22
11	Kelompok Minoritas	15	
12	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	36	
13	Korban penyalahgunaan NAPZA	35	
14	Korban tindak kekerasan	63	24
15	Pekerja Migran bermasalah	9	
16	Korban bencana sosial	27	39
17	Fakir Miskin	67.525	
Jumlah		76.987	890

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2023

2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial).

Untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah, digunakan suatu ukuran yang disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-72. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	70,37	70,11	73,95	75,64	75,95
Kepahiang	76,32	77,93	76,09	74,46	77,86
Rejang Lebong	66,03	72	67,62	67,72	68,6
Lebong	72,18	69,54	69,28	72,22	68,44
Kaur	73,99	76,45	70,13	70,57	73,44
Seluma	65,24	65,68	64,11	62,72	67,16
Bengkulu Utara	74,51	74,38	72,01	72,8	70,23
Kota Bengkulu	75,7	78,99	75,59	74,47	75,73
Bengkulu Tengah	67,61	69,71	67,32	65,16	64,96
Mukomuko	65,19	65,99	65,42	66,29	66,61

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2024

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan dinamika positif dalam partisipasi angkatan kerja di daerah tersebut. Pada tahun 2019, TPAK di Bengkulu Selatan tercatat sebesar 70,37%, yang

menunjukkan partisipasi tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2020, TPAK sedikit menurun menjadi 70,11%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, pembatasan sosial, dan pengurangan kesempatan kerja di berbagai sektor.

Meskipun menghadapi tantangan pandemi, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk bangkit dan memulihkan ekonominya. Pada tahun 2021, TPAK mengalami lonjakan tajam menjadi 73,95%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan kembalinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu Selatan berhasil beradaptasi dengan kondisi baru dan kembali aktif dalam pasar tenaga kerja. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan TPAK meningkat lagi menjadi 75,64%, menandakan adanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2023, TPAK mencapai puncaknya dengan nilai 75,95%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun tersebut.

Peningkatan yang konsisten dalam TPAK selama periode ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan dukungan dari masyarakat setempat. Upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong investasi di berbagai sektor, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif tampaknya telah berhasil mendorong lebih banyak penduduk usia kerja untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Hasil ini juga menunjukkan potensi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memanfaatkan peluang kerja yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ke depan, dengan mempertahankan momentum ini, Bengkulu Selatan dapat terus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, TPAK Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang baik, meskipun masih di bawah beberapa kabupaten seperti Kepahiang dan Kota Bengkulu, yang memiliki TPAK tertinggi dan stabil di sekitar 75-78%. Di sisi lain, Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan, dengan penurunan dan kenaikan TPAK yang mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas partisipasi tenaga kerja. Sementara itu, Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah mencatat TPAK yang relatif

rendah dan juga mengalami fluktuasi, mengindikasikan dinamika ekonomi yang lebih beragam dan tantangan dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Secara keseluruhan, peningkatan TPAK di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi angkatan kerja, meskipun ada kabupaten lain yang mencatat angka yang lebih tinggi. Konsistensi peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Sementara beberapa kabupaten lain menunjukkan performa yang lebih tinggi, tren positif di Bengkulu Selatan menunjukkan potensi daerah ini untuk terus berkembang dan memperkuat perekonomiannya melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja. Peningkatan TPAK ini juga mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan ekonomi lokal yang berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan terus memperkuat strategi pengembangan ekonomi dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar berpendidikan SMA, kemudian diikuti SD, Perguruan Tinggi, dan SMP, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel II-73. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
1	SD	28.853
2	SMP	17.574
3	SMA	34.403
4	Perguruan Tinggi	17.269
Total		103.041

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Data angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat pendidikan yang telah ditamatkan oleh penduduk usia kerja. Dari total 103.041 orang yang masuk dalam angkatan kerja, mayoritas memiliki pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan jumlah mencapai 34.403 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Bengkulu Selatan memiliki pendidikan menengah, yang umumnya

diperlukan untuk berbagai jenis pekerjaan di sektor formal dan informal. Selain itu, terdapat 28.853 orang yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), menjadikan kelompok ini sebagai yang terbesar kedua. Angka ini mengindikasikan masih adanya jumlah signifikan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, yang mungkin membatasi akses mereka ke peluang kerja yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencatat 17.574 orang dalam angkatan kerja, yang menempatkannya pada posisi ketiga dalam distribusi pendidikan.

Di sisi lain, sebanyak 17.269 orang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, yang menunjukkan adanya bagian yang cukup signifikan dari angkatan kerja yang memiliki kualifikasi akademis lebih tinggi. Kelompok ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus dan berpeluang memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Distribusi tingkat pendidikan di antara angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan ini mencerminkan adanya tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah tersebut. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, masih terdapat proporsi yang signifikan dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan keterampilan dan pendidikan bagi tenaga kerja yang berpendidikan rendah, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka di pasar kerja yang semakin kompetitif.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator untuk melihat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah indeks pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel

yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Selain IPG, indeks lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel II-74. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender	%	94,05	94,14	94,31	94,72	94.74
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	55,2	55,03	54,62	55,63	N/A
3	Indeks Ketimpangan Gender	%	0.83	0.83	0.76	0.74	0.78

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren yang stabil dan positif dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPG berada pada angka 94,05%, yang sedikit meningkat menjadi 94,14% pada tahun 2020. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2021 dengan IPG mencapai 94,31% dan lebih tinggi lagi pada tahun 2022 sebesar 94,72%. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai angka tertinggi dalam periode ini yaitu 94,74%. Peningkatan IPG ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pembangunan yang lebih inklusif bagi laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang semakin membaik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, IDG tercatat sebesar 55,2%, namun sedikit menurun menjadi 55,03% pada tahun 2020. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan IDG mencapai 54,62%. Meskipun demikian, pada tahun 2022, IDG mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 55,63%. Data tahun 2023 belum tersedia, namun peningkatan pada tahun 2022 memberikan indikasi

adanya upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan pemberdayaan gender, termasuk dalam aspek partisipasi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan penurunan yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun terakhir yang tersedia. Pada tahun 2019 dan 2020, IKG tercatat sama yaitu 0,83%. Pada tahun 2021, IKG menurun menjadi 0,76%, dan terus turun pada tahun 2022 menjadi 0,74%, yang menunjukkan penurunan ketimpangan gender yang positif. Namun, pada tahun 2023, IKG sedikit meningkat menjadi 0,78%. Meskipun demikian, secara keseluruhan, penurunan ketimpangan gender menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam mengurangi disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah. Dengan demikian, IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II-75. Indeks Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	72,44	74,54	72,30	73,67	74,63

Sumber: Laporan Badan Ketahanan Pangan, RI, Tahun 2024

Data Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi namun dengan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2019, Indeks Ketahanan Pangan tercatat sebesar 72,44%, yang kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 74,54%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek ketahanan pangan, seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2021, indeks ini sedikit menurun menjadi 72,30%, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti gangguan distribusi pangan atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

Meskipun demikian, Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil memulihkan kondisi ketahanan pangannya pada tahun-tahun berikutnya, dengan indeks kembali naik menjadi 73,67% pada tahun 2022 dan mencapai 74,63% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa fluktuasi, Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi penduduknya, dengan tren peningkatan yang positif selama periode lima tahun terakhir. Upaya berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam aksesibilitas dan kualitas pangan di daerah ini.

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merujuk pada dimensi spasial yang mencakup energi, kondisi fisik, dan keberadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang saling berinteraksi dengan alam, mempengaruhi kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pelaksanaan berbagai proyek strategis di Kabupaten Kaur, di mana program dan kegiatan pembangunan memerlukan sumber daya alam yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap keadaan alam dan kehidupan, seperti peningkatan polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini berpotensi mengancam daya dukung, ketahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan berdampak negatif

terhadap masyarakat dan program pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara komprehensif.

Pengukuran kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup penilaian terhadap kondisi kualitas air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. IKLH berperan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan secara substansial mencerminkan kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data penting untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH tidak hanya memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengindikasikan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terdapat tiga indikator utama yang menjadi komponen dalam perhitungan IKLH, yaitu kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Sebelum tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan tiga indikator, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Namun, mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan perubahan dalam rumus IKLH, dengan tambahan Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Informasi terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2021 hingga 2023 tersedia pada Tabel berikut ini.

Tabel II-76. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	55,00	45,00	45,00	92,62	92,39	93,04
Rejang Lebong	58,33	63,33	61,67	86,56	88,41	89,58
Bengkulu Utara	50,00	50,00	30,00	87,47	89,35	91,46
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Seluma	45,00	30,00	60,00	93,04	92,98	94,48
Mukomuko	N/A	40,00	48,46	90,79	90,60	91,82
Lebong	50,00	48,57	52,00	95,32	96,67	96,21
Kepahiang	48,33	43,53	51,11	91,39	91,62	93,96
Bengkulu Tengah	44,29	40,40	54,17	87,68	86,94	89,28
Kota Bengkulu	44,12	45,00	37,78	88,70	88,10	90,65
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Tabel II-77. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	46,77	46,83	47,61	68,43 (Sedang)	64,59 (Sedang)	65,03 (Sedang)
Rejang Lebong	43,41	43,41	45,94	66,50 (Sedang)	70,12 (Sedang)	69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara	57,21	57,21	56,93	66,75 (Sedang)	68,51 (Sedang)	60,79 (Sedang)
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)
Seluma	45,90	45,90	45,94	64,65 (Sedang)	59,99 (Sedang)	70,89 (Baik)
Mukomuko	64,48	64,56	64,09	50,89 (Sedang)	66,87 (Sedang)	69,44 (Sedang)
Lebong	77,44	76,03	77,55	74,36 (Baik)	75,06 (Baik)	75,50 (Baik)
Kepahiang	29,19	29,19	29,51	61,58 (Sedang)	60,86 (Sedang)	63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah	25,62	25,62	26,59	57,77 (Sedang)	57,01 (Sedang)	62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu	25,22	25,22	27,93	58,04 (Sedang)	58,12 (Sedang)	57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami penurunan signifikan dari 55,00 pada tahun 2021 menjadi 45,00 pada tahun 2022 dan tetap di angka 45,00 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kualitas air yang perlu segera diatasi untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat. Penurunan kualitas air ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran industri, limbah domestik, dan perubahan lingkungan yang berdampak pada sumber daya air. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, seperti Rejang Lebong yang memiliki IKA lebih tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas air, termasuk peningkatan pengelolaan limbah dan penyediaan infrastruktur pengolahan air yang lebih baik.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan hasil yang relatif stabil dan positif. Pada tahun 2021, IKU tercatat sebesar 92,62 dan sedikit menurun menjadi 92,39 pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 93,04 pada tahun 2023. Kualitas udara yang tinggi ini mencerminkan bahwa polusi udara di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada tingkat yang rendah, yang baik untuk kesehatan masyarakat. Kualitas udara yang baik ini mungkin dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas industri berat dan tingkat penghijauan yang cukup di daerah tersebut. Hasil ini sebanding dengan beberapa kabupaten lain seperti Kaur dan Mukomuko yang juga menunjukkan kualitas udara yang tinggi. Meskipun

demikian, tetap penting untuk menjaga kualitas udara ini dengan mengendalikan sumber-sumber polusi potensial seperti kendaraan bermotor dan pembakaran terbuka.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan peningkatan kecil dari 46,77 pada tahun 2021 menjadi 46,83 pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 47,61 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami sedikit perbaikan, meskipun masih perlu lebih banyak upaya untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Pengelolaan lahan yang lebih baik dapat dicapai melalui praktik pertanian yang berkelanjutan, reboisasi, dan pengendalian erosi. Dalam perbandingan dengan kabupaten lain, Lebong menonjol dengan IKL yang jauh lebih tinggi, menunjukkan pengelolaan lahan yang lebih efektif. Belajar dari kabupaten-kabupaten yang berhasil bisa menjadi strategi penting untuk meningkatkan pengelolaan lahan di Bengkulu Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kategori "sedang" selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 68,43, menurun menjadi 64,59 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 65,03 pada tahun 2023. Meskipun indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup tidak mengalami perubahan drastis, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 menandakan adanya tantangan yang perlu ditangani untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. IKLH yang stabil namun masih dalam kategori sedang mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan, tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah, kualitas air, dan penggunaan lahan masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kabupaten seperti Lebong dan Mukomuko menunjukkan hasil yang lebih baik dalam berbagai indeks kualitas lingkungan, termasuk IKLH. Memperhatikan dan mengadopsi strategi yang telah berhasil di kabupaten-kabupaten tersebut dapat membantu meningkatkan IKLH di Bengkulu Selatan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa peningkatan dalam kualitas lahan dan stabilitas dalam kualitas udara, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu fokus pada upaya peningkatan kualitas air dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Langkah-langkah seperti peningkatan pengelolaan sumber daya air, pengendalian pencemaran, dan pelaksanaan program-program keberlanjutan lingkungan perlu diperkuat untuk

mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya ini termasuk peningkatan infrastruktur pengolahan air, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, dapat mempercepat upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kaur yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, dan Lebong yang menunjukkan pengelolaan lahan yang efektif, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat belajar dan mengadopsi strategi-strategi sukses dari kabupaten-kabupaten tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungannya.

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas.

Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kualitas baik menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana pada tahun 2019 dengan indeks 3,56 dan meningkat pada tahun 2020 sehingga indeks pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi 3,64 dengan kategori Baik.

Progress rekam dan capaian kepemilikan e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-78. Capaian Perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2022

Indikator	Satuan	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
Perekaman e- KTP	%	86,28	98,9	98,21	99,04	103,3	97,58	94,12

Sumber: Disdukcapil Provinsi Bengkulu, Tahun 2023

Selama periode 2016 hingga 2022, capaian perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2016, tingkat perekaman

e-KTP berada di angka 86,28%, yang kemudian mengalami peningkatan tajam pada tahun 2017 mencapai 98,9%. Angka ini sedikit menurun menjadi 98,21% pada tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 99,04%. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, di mana capaian perekaman e-KTP melampaui 100%, mencapai 103,3%, yang mungkin mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi program perekaman, termasuk perekaman ulang atau tambahan yang sebelumnya belum tercatat.

Namun, setelah capaian puncak tersebut, angka perekaman kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, capaian perekaman turun menjadi 97,58%, dan pada tahun 2022 turun lebih jauh menjadi 94,12%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan demografi, migrasi penduduk, atau kendala teknis dalam proses perekaman. Meskipun begitu, capaian perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan tetap menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan, dengan angka perekaman yang terus berada di atas 90% sejak tahun 2017.

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dan mengamanatkan percepatan pembangunan desa guna membangun masyarakat desa yang adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat desa, menjaga dan mengatur kewenangan desa, dan memaksimalkan pelayanan masyarakat. Instrument untuk menilai pencapaian implementasi dari undang-undang desa tersebut adalah melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berdasarkan capaian IDM, Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam kabupaten dengan status berkembang. Berikut data indeks desa membangun di kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-79. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun	%	0,6486	0,6575	0.6749	0.7011	0.7161

Sumber: Peringkat Status IDM Tahun 2020, Kemendesa, Tahun 2019-2023

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Indeks Desa Membangun adalah indikator yang mengukur kemajuan desa-desa dalam hal pembangunan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada tahun 2019, Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 0,6486. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,6575, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembangunan desa. Pada tahun 2021, indeks ini meningkat lagi menjadi 0,6749, yang mencerminkan peningkatan yang konsisten dalam kualitas hidup dan infrastruktur di desa-desa.

Tren positif ini berlanjut dengan signifikan pada tahun 2022, di mana Indeks Desa Membangun mencapai 0,7011. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2023, indeks ini terus meningkat menjadi 0,7161, yang menandakan bahwa desa-desa di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Desa Membangun dari 0,6486 pada tahun 2019 menjadi 0,7161 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil dalam upaya pembangunan desa. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan ekonomi di desa-desa. Peningkatan ini juga mencerminkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta keberhasilan dalam menerapkan strategi-strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan capaian pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR). CPR merupakan Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi pada saat pencacahan.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, agar terwujud keluarga sejahtera,

maju dan bahagia. Disamping itu, sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait pencapaian program Keluarga Berencana (KB). Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peserta program Keluarga Berencana cukup tinggi dengan akseptor KB aktif sebagaimana data berikut:

Tabel II-80. Akseptor KB Aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
Akseptor KB Aktif	Jiwa	24.370	21.548	22.690	NA	25.103

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2017-2022

Cukup tingginya akseptor KB aktif mempengaruhi pencapaian Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yang berguna untuk membandingkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, menjadi dasar penyusunan program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

2.3.2.8. Perhubungan

Dalam rangka mendukung tercapainya konektivitas jaringan khususnya dalam hal ketersediaan sarana prasarana transportasi, perlu terus dikembangkan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur perhubungan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan akses konektivitas baik dengan daerah lain maupun antar wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga memudahkan transportasi dan mobilisasi masyarakat serta memberikan value added menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana transportasi darat yaitu ketersediaan jaringan jalan menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penggunaan moda angkutan jalan. Berikut data angkutan umum di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-81. Data Angkutan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data Termutakhir)
1	Mobil Penumpang	2,248	3,227	3,575	3,941	2,890
2	Mobil Bus	38	26	19	31	19
3	Mobil Barang	1,397	1,676	1,694	1,733	1,229
4	Sepeda Motor	25,572	27,567	27,694	27,168	21,827
5	Kendaraan Khusus dan Lainnya	14	25	30	-	-
Jumlah		29,269	32,521	33,012	32,873	25,965

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

Pelayanan transportasi darat untuk masyar dilayani oleh perusahaan transportasi darat AKDP dan AKAP sebagai berikut:

Tabel II-82. Perusahaan Angkutan Penumpang AKDP dan AKAP Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Perusahaan	Jurusan/Trayek	Jenis Kendaraan
PO. Putra Rafflesia	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. San Travel	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Bengkulu Kito	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Krui Putra	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Sriwijaya	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Lubuk Tapi Ekspress	Manna- Palembang	Bus
PO. Sinar Sekundang	Manna - Palembang	Bus

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2021

2.3.2.9. Komunikasi dan Informasi

Pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menuju terwujudnya good government dan clean governance.

Pembangunan TIK menjadi syarat utama untuk mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi Pemerintah Daerah, sehingga sistem layanan pemerintahan dapat terintegrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat semakin prima.

Dengan pembangunan TIK yang terintegrasi, maka keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan melalui transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keluasan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan publik. Di Kabupaten

Bengkulu Selatan, 40 (empat puluh) organisasi perangkat daerah sudah memiliki website dengan domain bengkuluselatankab.go.id. Berikut capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel II-83. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	Nilai	2,32	2,27	1,96	2,31	2,45

Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya dalam hal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun dengan tren peningkatan menuju perbaikan. Pada tahun 2019, Indeks SPBE tercatat sebesar 2,32, yang menandakan upaya awal yang cukup baik dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional pemerintahan. Namun, pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan pada indeks ini menjadi 2,27, yang mungkin disebabkan oleh tantangan implementasi atau adaptasi terhadap teknologi baru dalam lingkungan pemerintahan.

Penurunan lebih lanjut terlihat pada tahun 2021, di mana Indeks SPBE turun menjadi 1,96, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menjalankan program-program terkait digitalisasi pemerintahan. Namun, respons positif terlihat pada tahun 2022, di mana indeks ini kembali naik menjadi 2,31, mencerminkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan dalam infrastruktur dan layanan berbasis elektronik. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan Indeks SPBE mencapai nilai 2,45, angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan semakin matang dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Secara keseluruhan, meskipun mengalami tantangan dan penurunan di beberapa tahun, kinerja urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tren peningkatan pada Indeks SPBE dari tahun 2021 hingga 2023 memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah

berhasil memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung fungsi pemerintahan, dan diharapkan terus berlanjut untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Apalagi ditengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), dimana aktivitas ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan akhirnya gulung tikar. Koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sehingga peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengembangan usaha mikro pada tingkat daerah menjadi suatu prioritas. Sejalan dengan itu, cara-cara baru, inovasi, kreatifitas dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan terhadap usaha mikro menjadi suatu keharusan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara umum persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro antara lain: (1) kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam izin usaha; (2) kurangnya pemahaman tentang perencanaan bisnis (Business Plan); (3) produk belum memenuhi standar mutu (PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi Halal, Komposisi Produk, Masa Produk dan Registrasi Produk); (2) Belum memiliki catatan transaksi usaha; (5) terbatasnya akses teknologi dan pemasaran; (6) sulitnya terhadap akses pembiayaan; (7) terbatasnya tenaga pendampingan tehadap pelaku usaha. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana data berikut:

Tabel II-84. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi	Unit	96	90	83	227	234	234
UKM	Unit	391	446	596	564	597	597

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2023

2.3.2.11. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif- tidaknya iklim penanaman modal di daerah.

Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain itu, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan dan adanya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor.

Penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2020, dimana pada tahun 2018 realisasi investasi Rp.40.848.600.000,- meningkat menjadi Rp.627.880.000.000,- pada tahun 2020. Sempat menurun pada tahun 2021 sebesar Rp.70.994.200.000,- yang kemungkinan besar disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2023 dengan total investasi sebesar Rp.126.792.200.000,-. Kondisi ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mulai terbangun dengan kondusif. Perkembangan investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut

Tabel II-85. Realisasi Investasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 (juta rupiah)

Sektor	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	20.000,0	11.196,0	163.305,0	28.700,0	47.847,2	18.700,0
Pertambangan	3.500,0			735,0	100,0	0,0
Industri Makanan		116.680,0	2.016,3	0,0	3.447,5	2.106,5
Industri Mineral Non Logam					870,0	12.175,0
Listrik, Gas dan Air	164,8	65,4	140,2	8,6		0,0
Konstruksi	1.520,0	0,0	5.098,7	2.071,1		8.105,5
Perdagangan dan Reparasi	2.964,0	3.224,9	3.214,8	27.397,0	31.198,2	70.798,6
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi				1.596,0	1.102,8	0,0
Hotel dan Restoran	9.149,8	105,0	100,0			14.906,6
Jasa Lainnya	3.550,0	104.045,0	454.005,0	10.486,5	6.374,5	0,0
Total	**40.848,6**	**235.316,3**	**627.880,0**	**70.994,2**	**90.940,2**	**126.792,2**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (2023)

2.3.2.12. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, dimana pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik, sedangkan Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan data statistik sektoral.

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan statistik dengan melakukan pengumpulan data sektor melalui produsen data yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, kebijakan dan program/kegiatan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang kemudian dituangkan dalam dokumen Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan dokumen lainnya.

2.3.2.13. Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini menjadi penting, karena pengamanan informasi pada era digital sekarang ini sudah menjadi kebutuhan. Era keterbukaan dan terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan siber. Insiden siber merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, web defacement dan gangguan akses terhadap layanan elektronik.

Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden siber berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya. Pengamanan persandian perlu ditingkatkan terutama terhadap website milik pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.3.2.14. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis pada kearifan lokal masyarakat Bengkulu Selatan. Kebijakan yang diambil adalah peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya melalui pengelolaan warisan budaya dan peningkatan pelestarian nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya. Adapun salah satu progam yang dilaksanakan setiap tahun adalah pemeliharaan cagar budaya yang merupakan peninggalan-peninggalan pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Festival Ayiak Manna, serta promosi wisata berbasis budaya, diantaranya Seni Bedindang Mutus Tari, Dundang Padi, Bimbang Adat, Kayiak Nari dan Malam Gegerit. Data dan informasi perkembangan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

Tabel II-86. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Grup Kesenian	Satuan	Tahun				
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
Sanggar Seni Budaya	Kelompok	15	15	15	15	15
Sanggar Seni Kreasi	Kelompok	12	12	12	12	12
Cagar Budaya	Unit	52	52	52	52	52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3.2.15. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dari sisi penguatan minat baca masyarakat. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan literasi untuk memperkaya khasanah dan ilmu pengetahuan. Minat baca masyarakat adalah suatu

cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Salah satu indikator meningkatnya minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Perkembangan tingkat kunjungan pemustaka pada perpustakaan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-87. Perkembangan Pemustaka di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
Jumlah Pemustaka/ Pengunjung Perpustakaan	Orang	9.243	6.290	8.830	1.741	1.320

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

Penurunan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan disebabkan beberapa kondisi diantaranya belum memiliki Gedung perpustakaan yang representatif, serta belum optimalnya layanan literasi berbasis digitalisasi yang disediakan di perpustakaan.

2.3.2.16. Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2019, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh ANRI menunjukkan hasil masih sangat kurang dengan nilai 9,71. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya belum adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; belum adanya program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; Ketersediaan sarana prasarana kearsipan masih belum memadai, dan belum adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat (budidaya). Sentra perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Seginim, Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Kedurang. Bahkan 3 kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-Kp/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Perkembangan Produksi Perikanan Di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-88. Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
Perikanan Laut	Ton	1.600,94	1.625,49	1.631,49	1.560,5	1.248,4
Perikanan budidaya	Ton	12.121,2	9.490,03	10.671,9	10.436,86	11.906,44

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2023

2.3.3.2. Pariwisata

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dibangun dan dikembangkan, sehingga memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi. Banyak potensi pariwisata yang dimiliki, diantaranya wisata alam mulai pantai, danau, dan sungai; wisata buatan, wisata kuliner hingga wisata budaya. Adapun potensi wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel II-89. Potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
14	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
15	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
16	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
17	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
18	Telaga Rajak Besi	Kedurang
19	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
20	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
21	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
22	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
23	Danau Ulu Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
24	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
25	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025

A. Karakteristik Wisatawan Provinsi Bengkulu

Menurut buku Profil Kepariwisataan Provinsi Bengkulu 2022, Wisnus yang melakukan perjalanan ke Provinsi Bengkulu dari tahun 2018-2020 secara rata-rata didominasi oleh kelompok umur di bawah 15 tahun hingga 24 tahun dengan persentase sebesar 39,76% diikuti secara berturut oleh kelompok umur 25-34 tahun (22,18%), dan kelompok umur 35-44 tahun (17,67%). Sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok umur 15-44 tahun mendominasi sebesar 79,61% dari total wisnus yang melakukan perjalan ke Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut, berdasarkan jenis kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan pada tahun 2020 didominasi oleh kegiatan wisata kuliner dengan persentase sebesar 18,60 persen diikuti dengan kegiatan wisata kota dan pedesaan dengan persentase sebesar 12,18 persen dan kegiatan wisata bahari sebesar 11,23 persen.

Tabel II-90. Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan ke Provinsi Bengkulu menurut Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan Tahun 2019-2020

Jenis Wisata	2019	2020
Wisata Bahari	18,51%	11,23%
Eko Wisata	5,74%	4,72%
Wisata Petualangan	0,28%	8,88%
Wisata Sejarah/ Religi	2,68%	6,12%
Wisata Kesenian	1,05%	3,34%
Wisata Kuliner	5,06%	18,60%
Wisata Kota & Pedesaan	56,70%	12,18%
Wisata MICE	0,61%	2,57%
Wisata Olahraga/Kesehatan	1,93%	4,01%
Obyek Wisata Terintegrasi	7,44%	1,26%
Tidak melakukan satupun kegiatan diatas	0%	27,09%

Sumber: Profil Kepariwisataan Provinsi Bengkulu 2022

Buku Profil Kepariwisataan tahun 2022 yang dirilis oleh Dinas Pariwisata Provinsi bengkulu telah melakukan pendataan dan pemeringkatan destinasi wisata berdasarkan jenis di Kabupaten/Kota tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II-91. Pemeringkatan Destinasi Wisata Alam di Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	Jumlah Pengunjung		Total
			WNA	WNI	
1	Bengkulu Tengah	Sungai Suci Kec. Pondok Kelapa	150	20.780	20.930
2	Rejang Lebong	Suban Air Panas	0	18.111	18.111
3	Rejang Lebong	Danau Mas	0	16.697	16.697
4	Kota Bengkulu	Danau Dendam Tak Sudah	0	14.278	14.278
5	Bengkulu Tengah	Air Terjun Air Sengak Kec. Taba Penanjung	0	10.030	10.030
6	Rejang Lebong	Bukit Kaba	0	9.343	9.343
7	Bengkulu Tengah	Curug Cai Kec. Taba Lagan	0	8.280	8.280
8	Kepahiang	Mountain Valley	0	6.877	6.877
9	Bengkulu Tengah	Air Terjun Curup Embun Kec. Semidang Lagan	0	4.880	4.880
10	Kepahiang	Curug Embun	7	4.591	4.598
11	Bengkulu Tengah	Air Terjun Penembang Kec. Merigi Kelindang	0	3.145	3.145
12	Bengkulu Utara	Air Terjun Lemo Nakai	0	2.759	2.759
13	Lebong	Pendakian Bukit Pabes	0	425	4.000
14	Lebong	Air Putih	0	325	3.530
15	Lebong	Danau Picung	0	106	4.230

Sumber: Profil Kepariwisataan Provinsi Bengkulu 2022

Data pada tabel pemeringkatan destinasi wisata alam di Kabupaten/Kota Tahun 2021, menunjukkan bahwa destinasi wisata alam yang paling digemari yaitu Sungai Suci yang terletak terletak di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa,

Kabupaten Bengkulu Tengah dan berjarak sekitar 15 km dari pusat Kota Bengkulu. Kunjungan pada destinasi wisata dalam kategori wisata buatan didominasi oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dengan daya tarik wisatanya yaitu Wahana Surya, Buana Alit Desa Abu Sakim, dan Glamping Rindu Hati. Masing-masing daya tarik wisata buatan tersebut memberikan kontribusi kunjungan wisatawan nusantara sebesar 107.040 orang, 29.185 orang dan 21.390 orang. Terkhusus daya tarik wisata buatan Wahana Surya, tidak hanya mampu menarik minat wisatawan nusantara namun juga mampu menarik minat wisatawan mancanegara sebanyak 100 orang sehingga sepanjang tahun 2021, daya tarik wisata ini mampu menarik kunjungan sebanyak 107.140 orang.

Tabel II-92. Pemeringkatan Destinasi Wisata Buatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Destinasi Wisata	Jumlah Pengunjung		Total
			WNA	WNI	
1	Bengkulu Tengah	Wahana Surya Kec. Pondok Kelapa	100	107.040	107.140
2	Bengkulu Tengah	Buana Alit Desa Abu Sakim Kec.Pondok Kelapa	0	29.185	29.185
3	Bengkulu Tengah	Glamping Rindu Hati Kec. Taba Penanjung	0	21.390	21.390
4	Bengkulu Utara	Alun-Alun Kota	0	1.914	1.914
5	**Bengkulu Selatan**	**Manna Water Park**	**20**	**1700**	**1.720**
6	Bengkulu Tengah	Taman Wisata Kota Kec. Karang Tinggi	0	1.100	1.100
7	Bengkulu Utara	Pemancingan Injatama	0	856	856
8	Bengkulu Utara	Dam Pemancingan	0	395	395
9	Bengkulu Tengah	Taman Wisata Family Kec. Pondok Kelapa	0	285	285
10	Bengkulu Utara	Dam Air Lais	0	205	205
11	Bengkulu Utara	Tugu Pahlawan	0	190	190
12	Bengkulu Utara	Kolam Pemancingan	0	188	188
13	Bengkulu Utara	Pemancingan Tapak Balai	0	161	161
14	Bengkulu Utara	Pusat Pelatihan Gajah Sebelat	0	157	157
15	Bengkulu Utara	Kebun Spot Center	0	121	121

Sumber: Profil Kepariwisataan Provinsi Bengkulu 2022

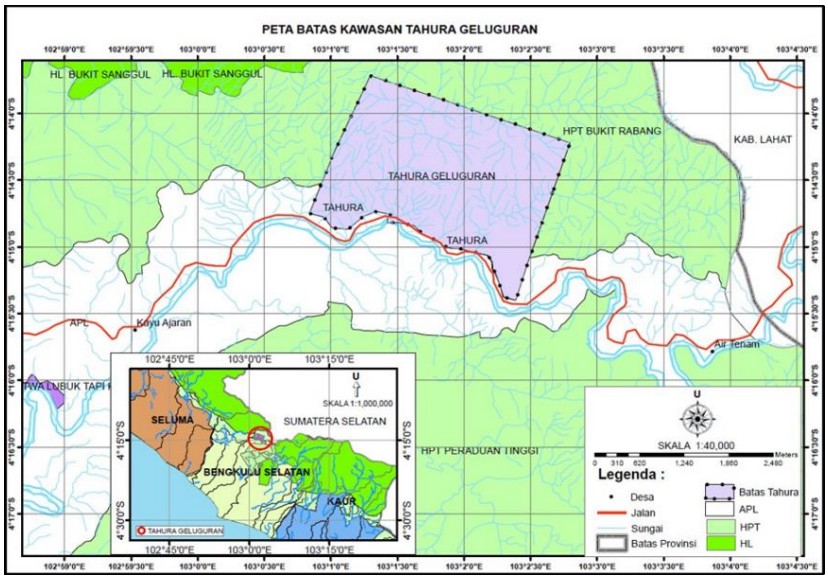
Tabel II-93. Pemeringkatan Destinasi Wisata Sejarah di Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	Jumlah Pengunjung		Total
			WNA	WNI	
1.	Kota Bengkulu	Benteng Malborough	0	11.662	11.662
2.	Kota Bengkulu	Rumah Pengasingan Soekarno	0	6.620	6.620
3.	**Bengkulu Selatan**	**Taman Merdeka**	**100**	**3.900**	**4.000**
4.	Mukomuko	Situs Benteng Ana	0	1.050	1.050
5.	Kota Bengkulu	Rumah Ibu Fatmawati	0	902	0
6.	Bengkulu Tengah	Bungker Coa Sako Kec. Taba Penanjung	0	900	900

No	Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	Jumlah Pengunjung		Total
			WNA	WNI	
7.	Bengkulu Tengah	Makam Raja Balai Buntar Kec. Pondok Kelapa	0	798	798
8.	Seluma	Meriam Kuno	0	700	700
9.	Bengkulu Tengah	Makam Putri Gading Cempaka Kec. Pondok Kelapa	0	673	673
10.	Bengkulu Tengah	Bangunan Lojok Kec. Karang Tinggi	0	605	605
11.	Bengkulu Tengah	Keramat Nibung Kec. Merigi Sakti	0	490	490
12.	Bengkulu Tengah	Bangunan Belanda Kec. Karang Tinggi	0	470	470
13.	Bengkulu Tengah	Makam Pendiri Lembak Viii Kec. Pondok Kubang	0	321	321
14.	Bengkulu Tengah	Makam Panglima Sakti Kec. Merigi Sakti	0	285	285
15.	Bengkulu Tengah	Makam Putri Mas Kec. Talang Empat	0	282	282

Sumber: Profil Kepariwisataan Provinsi Bengkulu 2022

2.3.3.3. Kehutanan



Gambar II-9. Peta Batas Kawasan Tahura Geluguran Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat taman hutan rakyat (Tahura) Geluguran terletak di Kecamatan Ulu Manna, yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 dengan Luas 586,55 Ha.

Dalam rangka optimalisasi dan pengembangan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Geluguran, dilakukan pengalokasian dan penyusunan blok Kawasan Tahura, sehingga kedepannya dapat lebih dilakukan percepatan dalam pembangunan dan

pemanfaatannya. Adapun luas dan proporsi taman hutan rakyat (Tahura) Geluguran, sebagai berikut:

Tabel II-94. Luasan dan Proporsi Pemanfaatan Tahura Di Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	BLOK	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Perlindungan	149,27	25,45 %
2	Pemanfaatan	77,67	13,24 %
3	Lainnya	359,61	61,31 %
	a. Khusus	101,85	17,36 %
	b. Tradisional	134,44	22,93 %
	c. Rehabilitasi	59,60	10,16 %
	d. Koleksi	63,72	10,86 %
Jumlah Total		586,55	100 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan Energi dan Sumber Daya Mineral bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun mengingat urusan ini bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyediaan kehidupan masyarakat yang baik, aman dan sejahtera, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi percepatan pelayanan energi dan sumber daya mineral.

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bengkulu Selatan, dititikberatkan pada penyediaan kebutuhan listrik. Hal ini karena ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE), yang merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga.

Tabel II-95. Rasio Elektrifikasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022 (data termutakhir)
1	Rasio Elektrifikasi	%	100,00	99,99	99,87	99.25	99.84

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2023

Data rasio elektrifikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan beberapa fluktuasi kecil dalam tingkat akses rumah tangga terhadap listrik. Rasio elektrifikasi adalah indikator penting yang mencerminkan sejauh mana rumah tangga di suatu daerah memiliki akses terhadap listrik. Pada tahun 2018, Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai rasio elektrifikasi yang sangat tinggi sebesar 100,00%. Angka ini mencerminkan bahwa hampir semua rumah tangga di daerah tersebut memiliki akses terhadap listrik. Namun, pada tahun 2019, rasio elektrifikasi sedikit menurun menjadi 99,99%, menunjukkan bahwa ada beberapa rumah tangga yang kehilangan akses listrik.

Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2020, di mana rasio elektrifikasi tercatat sebesar 99,87%. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan rasio elektrifikasi turun ke angka 99,25%, yang merupakan titik terendah dalam periode lima tahun ini. Meskipun demikian, pada tahun 2022, rasio elektrifikasi meningkat kembali menjadi 99,84%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan akses listrik bagi rumah tangga. Fluktuasi dalam rasio elektrifikasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kerusakan infrastruktur listrik, peningkatan jumlah rumah tangga baru yang belum terhubung ke jaringan listrik, atau perubahan dalam pengelolaan layanan listrik. Penurunan signifikan pada tahun 2021 mungkin mencerminkan dampak dari kondisi ekonomi atau lingkungan yang mempengaruhi infrastruktur listrik.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa penurunan dalam rasio elektrifikasi, Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mempertahankan tingkat elektrifikasi yang sangat tinggi selama periode 2018 hingga 2022. Upaya yang konsisten dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga, termasuk yang berada di daerah terpencil atau baru berkembang, terus mendapatkan akses terhadap listrik. Pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik perlu bekerja sama untuk memperkuat infrastruktur listrik, memperbaiki jaringan yang rusak, dan memastikan layanan yang stabil dan andal bagi seluruh masyarakat.

2.3.3.5. Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebesar 16,66 persen pada tahun 2022. Besaran kontribusi sektor perdagangan tersebut menjadi kontribusi terbesar kedua setelah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Perkembangan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-96. Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Perdagangan Besar dan Eceran	%	17,05	16,33	16,43	16,66	16,59

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Data kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2019, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 17,05% terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 16,33%, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas perdagangan dan ekonomi secara umum.

Pada tahun 2021, kontribusi sektor ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 16,43%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi, dengan aktivitas perdagangan mulai kembali normal. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 16,66%, menunjukkan stabilisasi dan pertumbuhan sektor perdagangan. Namun, pada tahun 2023, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sedikit menurun menjadi 16,59%. Meskipun penurunan ini tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa fluktuasi, sektor perdagangan besar dan eceran tetap menjadi salah satu kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten

Bengkulu Selatan. Untuk meningkatkan kontribusi sektor ini, diperlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur perdagangan, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan akses pasar bagi para pelaku usaha. Selain itu, dukungan terhadap digitalisasi perdagangan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global juga penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor perdagangan.

2.3.3.6. Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, karena pengembangan industri diharapkan dapat berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya perindustrian, antara lain membangun pusat pertumbuhan kegiatan industry, melakukan pembinaan baik dari sisi manajerial maupun kompetensi SDM guna penguatan nilai tambah.

Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, sektor perindustrian (industri pengolahan) masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan, dikarenakan belum tumbuhnya inovasi, kreatifitas dan nilai tambah produk. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-97. Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan (manufacturing)	%	3,31	3,26	3,15	3,14	3,09	2,91

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan menyumbang 3,31% terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan. Kontribusi ini sedikit menurun menjadi 3,26% pada tahun 2019 dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini turun menjadi 3,15%, diikuti dengan sedikit penurunan lagi menjadi 3,14% pada tahun 2021. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 3,09%, dan pada

tahun 2023, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai titik terendah sebesar 2,91%.

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini dapat mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor tersebut, termasuk keterbatasan investasi, teknologi, dan infrastruktur, serta dampak dari kondisi ekonomi yang lebih luas, termasuk pandemi COVID-19 yang mungkin telah mempengaruhi kegiatan industri secara signifikan. Selain itu, penurunan ini juga bisa menunjukkan pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan sektor-sektor lain mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor industri pengolahan.

Dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, sektor industri pengolahan tampaknya mengalami kesulitan untuk mempertahankan atau meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Untuk membalikkan tren ini, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan industri, seperti insentif investasi, peningkatan akses ke teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri.

Secara keseluruhan, tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah dan strategis untuk mengembangkan sektor ini. Dengan dukungan yang tepat, sektor industri pengolahan dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.3.7. Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan, dalam rangka percepatan kemajuan daerah. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pembangunan transmigrasi bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Transmigrasi tidak hanya untuk menjawab permasalahan distribusi penduduk, namun untuk pemerataan pertumbuhan berbasis pembangunan wilayah yang didukung dengan teknologi informasi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, kawasan transmigrasi yang masih dalam tahap pembangunan dan pemberdayaan adalah Kawasan Transmigrasi Kedurang.



Gambar II-10. Peta Kawasan Transmigrasi Kedurang Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi Bengkulu, 2021

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Kesekretariatan Daerah

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Sekretariat Daerah berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan dan percepatan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, capaian kinerja Pemerintah Daerah masih rendah, begitu juga dengan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih belum optimal.

Pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-98. Pencapaian Indikator Kinerja Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	C	C	C	C	B
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	CC	CC	CC	B	B

Pencapaian indikator kinerja Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam beberapa aspek selama periode 2019 hingga 2023. Salah satu indikator yang mencolok adalah peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, di mana Kabupaten Bengkulu Selatan mempertahankan nilai "C" dari tahun 2019 hingga 2022, sebelum akhirnya naik menjadi "B" pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperkuat reformasi birokrasi, yang mungkin melibatkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten juga mengalami kemajuan. Dari nilai "CC" yang bertahan selama tiga tahun berturut-turut dari 2019 hingga 2021, nilai ini meningkat menjadi "B" pada tahun 2022 dan tetap berada di posisi tersebut pada tahun 2023. Perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pencapaian ini menandakan kemajuan yang positif dalam kinerja Kesekretariatan Daerah, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di masa depan.

2.3.4.2. Kesekretariatan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa DPRD memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah fungsi legislasi, yaitu bersama kepala daerah membuat Peraturan Daerah, yang menjadi arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Penguatan Fungsi Legislasi, sesuai ketentuan pada pasal 95

ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa; "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda".

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD
b. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan pembangunan yang tepat sasaran. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

2.3.5.2. Keuangan

Fungsi penunjang urusan keuangan ditujukkan untuk menjamin peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kinerja urusan keuangan menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah dijalankan.

Salah satu indikator yang digunakan menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Berikut data pencapaian kualitas pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir.

Tabel II-99. Perkembangan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Opini BPK atas laporan Keuangan	Nilai	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

2.3.5.3. Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan sumber daya manusia ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja. Indikator untuk menilai profesionalitas ASN adalah Indeks Profesionalitas ASN, sebagai metode composite index yang digunakan untuk mengukur kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja ASN.

ASN yang profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan tata Kelola pegawainya semakin baik, efektif dan efisien. Indeks profesionalitas ASN penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Tabel II-100. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53	53	35,15	36,12	52,83

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 dan 2020, indeks profesionalitas ASN tercatat stabil di angka 53, mencerminkan tingkat kompetensi dan kinerja ASN yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis, dengan indeks merosot menjadi 35,15. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tantangan pandemi, atau masalah internal yang memengaruhi kinerja ASN. Meski demikian, pada tahun 2022, indeks mengalami sedikit peningkatan menjadi 36,12, menandakan adanya upaya perbaikan, meskipun masih belum pulih sepenuhnya. Pada tahun 2023, indeks kembali mengalami kenaikan signifikan, mencapai 52,83, hampir mendekati nilai yang dicapai pada tahun-tahun awal, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan langkah-langkah peningkatan kompetensi ASN mulai membuahkan hasil. Tren peningkatan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk percepatan peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan iklim inovasi, guna mendorong pemecahan persoalan serta tantangan yang dihadapi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen mendorong berbagai upaya yang mencurahkan daya upaya hasil pikir dan kajian dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam sistem inovasi daerah.

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Inovasi dalam pembangunan diharapkan dapat memicu tumbuhnya kreativitas dan improvisasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan.

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1. Pengawasan

Penyelenggaraan urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good government dan clean governance, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian utama untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Peran dan fungsi APIP antara lain melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) serta tata kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maturitas SPIP Kabupaten Bengkulu Selatan masih berada pada level 2 (berkembang) dengan skor 2,850. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi, sehingga keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi dengan unit lainnya. Efektivitas pengendalian SPIP belum dilakukan evaluasi secara mendalam dan tersistematif, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Keterlibatan dan tindakan pimpinan dalam menangani kelemahan masih belum dinilai konsisten.

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu yang menjadi fokus kinerja Badan Kesbangpol adalah pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan setelah terdaftar, Ormas tersebut akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan, sehingga mampu melaksanakan peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung pelaksanaan pembangunan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pemahaman yang kuat tentang daya saing daerah dan penerapan strategi yang efektif dalam setiap fokus ini dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Daya saing daerah memang memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat local indikator yang terangkum dan dikelompokkan dalam aspek daya saing daerah dikelompokkan pada tiga (3) fokus besar yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai alat untuk mengukur daya saing suatu daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan penggunaan IDSD adalah untuk memberikan ukuran yang komprehensif tentang daya saing daerah yang dapat mencerminkan

tingkat produktivitasnya. Adapun komponen IDSD terdiri dari, lingkungan pendukung, pasar, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi.

Tabel II-101. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bengkulu 2023

	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Innovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional*	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Prov. Bengkulu	4,26	2,67	4,26	3,53	3,73	3,84	3,1	4,5	2,96	3,95	2,52	2,28	3,47
Rata-Rata Kab/Kota	4,07	2,26	3,88	3,46	3,68	3,51	2,92	3,95	1,24	3,7	2,59	1,24	3,06
Bengkulu Selatan	4,08	2,38	4,18	3,22	3,7	3,99	3,77	3,97	1,87	3,68	2,3	1,08	3,19
Rejang Lebong	4,09	2,39	3,99	3,32	3,77	3,44	3,99	4,48	1,25	3,91	2,12	1,49	3,19
Bengkulu Utara	4,19	2,51	3,77	3,29	3,73	3,33	2,07	3,6	1,41	3,85	2,37	1,24	2,95
Kaur	3,81	2,02	3,29	3,84	3,61	3,36	2,35	4,1	0,74	3,47	3,41	0,92	2,91
Seluma	3,87	1,93	3,78	3,62	3,71	3,15	2,34	3,56	0,79	3,57	2,22	0,84	2,78
Mukomuko	4,06	1,73	3,53	3,68	3,61	3,22	2,47	3,22	1,57	3,65	2,49	0,17	2,78
Lebong	4,09	2,05	3,1	3,71	3,35	3,36	2,55	3,66	0,53	3,44	3,97	2,01	2,99
Kepahiang	4,2	2,49	4,05	3,41	3,71	3,41	2,9	4,07	0,46	3,57	2,27	0,64	2,93
Bengkulu Tengah	4,16	2,09	4,12	3,68	3,72	3,44	1,79	4,11	-	3,57	2	0,5	-
Bengkulu	4,16	2,98	5	2,81	3,88	4,35	5	4,67	2,53	4,33	2,79	3,52	3,83

Pilar 1: Institusi *Pilar 2: Infrastruktur* *Pilar 3: Adopsi TIK*
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro *Pilar 5: Kesehatan* *Pilar 6: Keterampilan*
Pilar 7: Pasar produk *Pilar 8: Pasar tenaga kerja* *Pilar 9: Sistem keuangan*
Pilar 10: Ukuran pasar *Pilar 11: Dinamisme bisnis* *Pilar 12: Kapabilitas inovasi*

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang cukup kompetitif pada tahun 2023 dengan skor rata-rata 3,19. Analisis lebih dalam terhadap berbagai pilar yang membentuk IDSD ini memberikan gambaran mengenai kekuatan dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing daerah. Pada pilar Lingkungan Pendukung (Pilar 1), Bengkulu Selatan mencatat skor 4,08, yang sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar dan pelayanan publik di daerah ini sudah cukup baik dan mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pilar Sumber Daya Manusia (Pilar 2) mencatat skor 2,38, yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat.

Pilar Pasar (Pilar 3) dengan skor 4,18 menunjukkan bahwa pasar di Bengkulu Selatan cukup aktif dan kompetitif. Namun, Ekosistem Inovasi (Pilar 4) dengan skor 3,22 mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa kegiatan inovatif, masih diperlukan upaya lebih untuk menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam Pilar Lingkungan Usaha (Pilar 5), Bengkulu Selatan mencatat skor 3,7, yang menunjukkan iklim usaha yang cukup kondusif, meskipun masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pilar Kesiapan Teknologi (Pilar 6)

dengan skor 3,99 menunjukkan bahwa daerah ini cukup siap dalam hal infrastruktur teknologi, meskipun pemanfaatannya masih bisa ditingkatkan lebih lanjut.

Pilar Kelembagaan (Pilar 7) mencatat skor 3,77, yang merupakan indikasi bahwa struktur pemerintahan dan kelembagaan daerah sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi dan efisiensi birokrasi. Pilar Kesiapan Infrastruktur (Pilar 8) dengan skor 3,97 menunjukkan bahwa infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum cukup memadai, namun perlu peningkatan untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Namun, tantangan terlihat pada Pilar Kapasitas Inovasi (Pilar 9) yang mencatat skor 1,87, menunjukkan perlunya dorongan yang lebih besar dalam hal penelitian, pengembangan, dan adopsi inovasi. Pilar Kapasitas Keuangan (Pilar 10) dengan skor 3,68 menunjukkan bahwa ada stabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi.

Pada Pilar Kesejahteraan (Pilar 11), Bengkulu Selatan memiliki skor 2,3, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, pada Pilar Keamanan (Pilar 12) dengan skor 1,08, menunjukkan bahwa keamanan masih menjadi perhatian utama yang perlu ditangani untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga. Secara keseluruhan, skor IDSD Bengkulu Selatan sebesar 3,19 mencerminkan potensi yang besar namun juga tantangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Untuk meningkatkan daya saing, fokus harus diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur. Upaya-upaya strategis ini diharapkan dapat mendukung visi "Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan" serta memperkuat posisinya sebagai daerah yang kompetitif di Provinsi Bengkulu.

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Dalam hal Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.302,90 miliar rupiah. Angka ini meningkat menjadi 5.707,51 miliar rupiah pada

tahun 2019, dan terus naik menjadi 5.819,78 miliar rupiah pada tahun 2020. Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, PDRB tetap menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, Nilai PDRB ADHB mencapai 6.196,61 miliar rupiah, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 7.201,15 miliar rupiah pada tahun 2023. Jika dilihat dari Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, terdapat peningkatan dari 3.444,03 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 3.615,03 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, meskipun terdapat tantangan ekonomi global, Nilai PDRB ADHK tetap meningkat sedikit menjadi 3.624,59 miliar rupiah. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2021 dengan angka 3.742,51 miliar rupiah, dan terus meningkat menjadi 3.994,82 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan dan adaptasi ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil meningkatkan nilai PDRB selama periode 2018 hingga 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan perekonomian daerah, meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti pandemi COVID-19. Dengan mempertahankan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan.

Tabel II-102. PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	5.302,90	5.707,51	5.819,78	6.196,61	6.712,80	7.201,15
- ADHK 2010	3.444,03	3.615,03	3.624,59	3.742,51	3.871,61	3.994,82

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bengkulu Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Peranan masing-masing sektor memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

Tabel II-103. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Uraian	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,67	32,80	32,96	33,59	33,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,05	16,32	16,43	16,66	16,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,49	11,33	11,03	10,20	10,27
Transportasi dan Pergudangan	5,81	6,09	6,15	6,41	6,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	5,74	6,09	5,95	5,24

Tabel II-104. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023

Lapangan Usaha	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,67	32,8	32,96	33,59	33,55
Pertambangan dan Penggalian	2,25	2,23	2,16	2,07	2,09
Industri Pengolahan	3,26	3,15	3,14	3,09	2,91
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,1	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Konstruksi	5,66	5,62	5,62	5,62	5,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,05	16,32	16,43	16,66	16,59
Transportasi dan Pergudangan	5,81	6,09	6,15	6,41	6,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2	2	1,95	1,98	2,04
Informasi dan Komunikasi	2,89	2,97	2,98	3,04	3,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	5,74	6,09	5,95	5,24
Real Estat	3,97	3,94	3,76	3,61	3,62
Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,24	0,27	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,49	11,33	11,03	10,20	10,27
Jasa Pendidikan	4,95	4,98	4,88	4,91	4,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,63	1,70	1,66	1,75
Jasa Lainnya	0,69	0,68	0,68	0,71	0,72
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kontribusi yang meningkat dari 32,67% pada tahun 2019 menjadi 33,55% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi, dari 2,25% pada tahun 2019 menjadi 2,09% pada tahun 2023, yang mungkin mencerminkan penurunan aktivitas atau hasil produksi di sektor ini.

Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan tren penurunan kontribusi, dari 3,26% pada tahun 2019 menjadi 2,91% pada tahun 2023. Sebaliknya, sektor Transportasi dan Pergudangan meningkat dari 5,81% pada tahun 2019 menjadi

6,93% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan aktivitas dalam bidang transportasi dan logistik. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap signifikan dengan kontribusi sekitar 16,59% pada tahun 2023, meskipun mengalami sedikit fluktuasi.

Sektor jasa seperti Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan peningkatan kontribusi, mencerminkan pertumbuhan dalam layanan komunikasi dan kesehatan. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami fluktuasi namun tetap penting, sementara sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan menunjukkan penurunan kontribusi. Secara keseluruhan, struktur PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan diversifikasi ekonomi dengan sektor pertanian sebagai sektor dominan, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa, yang mencerminkan perkembangan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan.

Tabel II-105. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di, 2018–2022

Lapangan Usaha	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.864,70	1.909,03	2.042,12	2.254,51	2.416,17
Pertambangan dan Penggalian	128,18	129,72	133,66	139,09	150,39
Industri Pengolahan	186,19	183,55	194,48	207,75	209,25
Pengadaan Listrik dan Gas	5,25	5,88	6,3	6,81	7,23
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,04	8,38	8,58	9,02	9,66
Konstruksi	323,3	326,85	348,07	377,49	410,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	972,96	949,99	1 017,97	1 118,34	1.194,44
Transportasi dan Pergudangan	331,5	354,66	381,09	430,53	498,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,4	116,53	120,74	132,73	146,82
Informasi dan Komunikasi	164,8	172,73	184,71	203,78	227,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	300,87	333,95	377,33	399,31	377,11
Real Estat	226,65	229,32	232,8	242,62	260,92
Jasa Perusahaan	14,95	14,69	15,18	17,87	19,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	655,7	659,64	683,59	684,65	739,44
Jasa Pendidikan	282,58	290	302,41	329,63	354,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,81	95,09	105,14	111,29	126,18
Jasa Lainnya	39,64	39,76	42,45	47,38	51,87
Produk Domestik Regional Bruto	**5.707,51**	**5.819,78**	**6.196,61**	**6.712,80**	**7.201,15**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan peningkatan yang signifikan dari 1.864,70 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 2.416,17 miliar rupiah pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah, menyediakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat.

Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun kontribusi mereka relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Sektor pertambangan meningkat dari 128,18 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 150,39 miliar rupiah pada tahun 2023, sedangkan sektor industri pengolahan meningkat dari 186,19 miliar rupiah menjadi 209,25 miliar rupiah dalam periode yang sama.

Sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan juga mencatat peningkatan yang signifikan. Sektor konstruksi naik dari 323,3 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 410,92 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara sektor perdagangan meningkat dari 972,96 miliar rupiah menjadi 1.194,44 miliar rupiah. Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dari 331,5 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 498,80 miliar rupiah pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan aktivitas logistik dan transportasi di daerah tersebut.

Sektor jasa seperti Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Informasi dan komunikasi meningkat dari 164,8 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 227,98 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat dari 87,81 miliar rupiah menjadi 126,18 miliar rupiah dalam periode yang sama.

Secara keseluruhan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dari 5.707,51 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 7.201,15 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif dan diversifikasi yang baik di berbagai sektor ekonomi, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor-

sektor utama ini akan menjadi kunci untuk keberlanjutan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. PDRB Perkapita

Tabel II-106. PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)						
- ADHB	33,7	36,0	36,5	36,9	39,5	42
- ADHK 2010	21,9	22,8	22,7	22,2	22,8	23,3

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, meskipun terdapat fluktuasi dalam nilai yang disesuaikan berdasarkan harga konstan (ADHK 2010). PDRB per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk, memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2018, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar 33,7 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 36,0 juta rupiah pada tahun 2019, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2020 dengan PDRB per kapita mencapai 36,5 juta rupiah, dan sedikit meningkat lagi menjadi 36,9 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dengan PDRB per kapita mencapai 39,5 juta rupiah, dan pada tahun 2023, angka ini terus meningkat menjadi 42 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan terus bertambah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, ketika melihat PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK 2010), tren yang terlihat agak berbeda. Pada tahun 2018, PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar 21,9 juta rupiah. Angka ini meningkat menjadi 22,8 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHK sedikit menurun menjadi 22,7 juta rupiah, dan penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan angka mencapai 22,2 juta rupiah. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi

secara signifikan. Namun, pada tahun 2022, terjadi pemulihan dengan PDRB per kapita ADHK meningkat menjadi 22,8 juta rupiah, dan pada tahun 2023, angka ini mencapai 23,3 juta rupiah.

Pertumbuhan dalam PDRB per kapita ADHB mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan terus bertambah. Namun, fluktuasi dalam PDRB per kapita ADHK menunjukkan bahwa ketika disesuaikan dengan inflasi dan perubahan harga, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak secepat yang diharapkan. Ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nominal tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

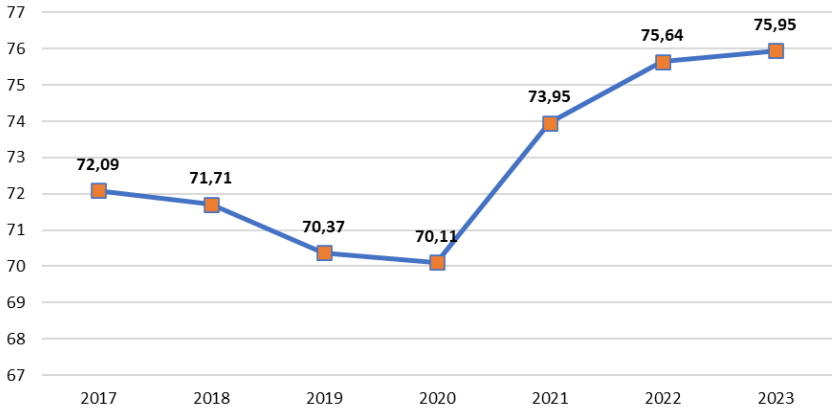
Secara keseluruhan, data PDRB per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam ekonomi daerah, dengan peningkatan yang signifikan dalam nilai ekonomi yang dihasilkan per penduduk. Untuk mempertahankan dan mempercepat tren pertumbuhan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung sektor-sektor ekonomi utama, meningkatkan infrastruktur, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diimplementasikan dapat mengatasi tantangan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif dan peningkatan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 72,09%, yang mengalami sedikit penurunan menjadi 71,71% pada tahun 2018 dan turun lebih lanjut menjadi 70,37% pada tahun 2019. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Namun, mulai tahun 2020, TPAK menunjukkan pemulihan dan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 melanda, TPAK hanya sedikit menurun menjadi 70,11%. Pada tahun 2021, TPAK meningkat tajam menjadi 73,95%, mencerminkan kembalinya partisipasi angkatan kerja ke tingkat yang lebih tinggi

seiring dengan pemulihan ekonomi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan TPAK mencapai 75,64%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 75,95% pada tahun 2023.



Gambar II-11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2023

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif dan peningkatan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 72,09%, yang mengalami sedikit penurunan menjadi 71,71% pada tahun 2018 dan turun lebih lanjut menjadi 70,37% pada tahun 2019. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Namun, mulai tahun 2020, TPAK menunjukkan pemulihan dan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 melanda, TPAK hanya sedikit menurun menjadi 70,11%. Pada tahun 2021, TPAK meningkat tajam menjadi 73,95%, mencerminkan kembalinya partisipasi angkatan kerja ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan TPAK mencapai 75,64%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 75,95% pada tahun 2023.

Peningkatan TPAK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang memasuki pasar tenaga kerja, yang dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja, termasuk pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung dan memperluas inisiatif-

inisiatif yang mendorong partisipasi angkatan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ini disertai dengan kualitas pekerjaan yang baik dan berkelanjutan.

B. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel II-107. Angka Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Angka Ketergantungan	52,84	45,88	45,66	45,75	45,88

Data Angka Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dan stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, Angka Ketergantungan tercatat sebesar 52,84, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 53 penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2020, Angka Ketergantungan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 45,88, menandakan adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, dengan Angka Ketergantungan sedikit menurun menjadi 45,66. Stabilitas ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan angka sebesar 45,75 dan kembali ke 45,88 pada tahun 2023.

Penurunan dan stabilitas Angka Ketergantungan ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan lebih banyak penduduk usia produktif, beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok ini berkurang, memungkinkan peningkatan produktivitas dan potensi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas Angka Ketergantungan juga mencerminkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara penduduk usia produktif dan non-produktif, yang penting untuk perencanaan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Merujuk pada dokumen RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2025-2045, proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel II-108. Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Komposisi Umur (%)	2025	2030	2035	2040	2045
0–14	42.858	43.595	44.012	43.504	43.250
15–64 (Bonus Demografi)	121.108	127.140	131.880	136.002	138.626
65+	13.148	17.391	22.120	27.280	32.515
Dependency Ratio (%)	46,24	47,97	50,15	52,05	54,65

Proyeksi demografi Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan perubahan yang signifikan dalam komposisi umur penduduk pada tahun 2025 dan 2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk dalam kelompok usia 0-14 tahun diproyeksikan mencapai 42.858 jiwa. Kelompok usia 15-64 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif, diperkirakan berjumlah 121.108 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 65 tahun ke atas diproyeksikan sebanyak 13.148 jiwa. Rasio ketergantungan pada tahun ini adalah 46,24%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus mendukung sekitar 46 penduduk usia non-produktif.

Memasuki tahun 2030, proyeksi menunjukkan peningkatan di semua kelompok umur. Kelompok usia 0-14 tahun diperkirakan akan meningkat menjadi 43.595 jiwa. Kelompok usia produktif 15-64 tahun juga akan meningkat signifikan menjadi 127.140 jiwa, menunjukkan potensi tenaga kerja yang lebih besar. Namun, peningkatan yang paling mencolok terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas, yang diproyeksikan mencapai 17.391 jiwa. Rasio ketergantungan pada tahun 2030 diperkirakan naik menjadi 47,97%, menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan mendukung hampir 48 penduduk usia non-produktif.

Dalam konteks bonus demografi, peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang signifikan pada tahun 2025 hingga 2030 memberikan peluang besar bagi Kabupaten Bengkulu Selatan. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai puncaknya, dan rasio ketergantungan berada pada titik terendah. Pada periode ini, potensi ekonomi daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia.

Untuk memanfaatkan bonus demografi ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas tinggi menjadi sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menarik investasi dari sektor swasta. Dengan adanya investasi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, penduduk usia produktif dapat berkontribusi secara optimal pada perekonomian daerah, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Proyeksi demografi Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2025 ke 2030 menunjukkan peningkatan populasi di semua kelompok umur, terutama pada kelompok usia produktif dan lanjut usia. Peningkatan rasio ketergantungan mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada penyediaan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi untuk mendukung populasi non-produktif. Strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dari perubahan demografi ini, termasuk investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan kunci yang mampu menjadi pemicu percepatan pembangunan serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas di semua sektor

potensial, diyakini akan menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi kabupaten yang semakin maju dan sejahtera. Infrastruktur jalan, yang menunjang peningkatan konektivitas dan kualitas mobilitas ekonomi dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui jalan nasional yang menghubungkan dengan kabupaten dalam Provinsi Bengkulu maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel II-109. Persentase Jalan dalam Keadaan Baik dan Sedang

Indikator	Satuan	2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Jalan Keadaan Baik dan Sedang	%	71,45	70,20	66,56	55,96	55

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2019-2024

Data kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam persentase jalan dengan keadaan baik dan sedang. Pada tahun 2019, 71,45% jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan berada dalam kondisi baik dan sedang. Namun, pada tahun 2020, persentase ini menurun sedikit menjadi 70,20%.

Tren penurunan berlanjut lebih drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, hanya 66,56% jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang, menurun lebih lanjut menjadi 55,96% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kondisi semakin memburuk dengan hanya 55% jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kesimpulannya, penurunan persentase jalan yang dalam kondisi baik dan sedang dari 71,45% pada tahun 2019 menjadi 55% pada tahun 2023 menunjukkan perlunya perhatian mendesak dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas, perdagangan, dan pembangunan ekonomi daerah. Upaya perbaikan yang terencana dan berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kondisi jalan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Penyelenggaraan urusan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan penanaman

modal sangat dipengaruhi oleh kondusif- tidaknya iklim penanaman modal di daerah. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain itu, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan dan adanya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor.

Penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2020, dimana pada tahun 2018 realisasi investasi Rp.40.848.600.000,- meningkat menjadi Rp.627.880.000.000,- pada tahun 2020. Sempat menurun pada tahun 2021 sebesar Rp.70.994.200.000,- yang kemungkinan besar disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2023 dengan total investasi sebesar Rp.126.792.200.000,-. Kondisi ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mulai terbangun dengan kondusif. Perkembangan investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel II-110. Realisasi Investasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2023 (juta rupiah)

Sektor	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022	2023
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	20.000	11.196	163.305	28.700	47.847,2	18.700
Pertambangan	3.500			735	100	0
Industri Makanan		116.680	2.016,3	0	3.447,5	2.106,5
Industri Mineral Non Logam					870	12.175
Listrik, Gas dan Air	164,8	65,4	140,2	8,6		0
Konstruksi	1.520	0	5.098,7	2.071,1		8.105,5
Perdagangan dan Reparasi	2.964	3.224,9	3.214,8	27.397	31.198,2	70.798,6
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi				1.596	1.102,8	0
Hotel dan Restoran	9.149,8	105	100			14.906,6
Jasa Lainnya	3.550	104.045	454.005	10.486,5	6.374,5	0
Total	**40.848,6**	**235.316,3**	**627.880**	**70.994,2**	**90.940,2**	**126.792,2**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (2024)

Realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai sektor selama periode 2018 hingga 2023. Secara keseluruhan, total investasi mengalami fluktuasi yang besar, dengan puncak investasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 627.880 juta rupiah dan menurun menjadi 126.792,2 juta rupiah pada tahun 2023. Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan mengalami lonjakan besar pada tahun 2020 dengan investasi mencapai 163.305 juta rupiah, namun menurun tajam pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 18.700 juta rupiah pada tahun 2023. Sektor Pertambangan menunjukkan aktivitas yang minimal, dengan investasi hanya pada tahun 2018 sebesar 3.500 juta rupiah dan beberapa tahun berikutnya hampir tidak ada investasi.

Industri Makanan mencatat investasi signifikan pada tahun 2019 sebesar 116.680 juta rupiah, namun mengalami fluktuasi dengan nilai investasi yang sangat rendah pada tahun-tahun berikutnya. Industri Mineral Non Logam baru mulai mendapatkan investasi pada tahun 2022 dengan 870 juta rupiah, meningkat tajam menjadi 12.175 juta rupiah pada tahun 2023. Sektor Listrik, Gas, dan Air serta Konstruksi juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Investasi di sektor listrik, gas, dan air mencapai puncaknya pada tahun 2018 dan 2020, tetapi menurun menjadi nol pada tahun 2023. Sektor konstruksi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai 8.105,5 juta rupiah setelah mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Perdagangan dan Reparasi menunjukkan tren peningkatan investasi yang stabil, dengan nilai investasi mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 70.798,6 juta rupiah. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi serta Hotel dan Restoran menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2023 setelah beberapa tahun dengan aktivitas investasi yang minimal. Jasa Lainnya mengalami puncak investasi pada tahun 2020 sebesar 454.005 juta rupiah, namun kemudian menurun drastis hingga nol pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan mencerminkan variasi yang besar di berbagai sektor dan menunjukkan kebutuhan akan strategi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk menarik dan mempertahankan investasi di berbagai bidang. Pemerintah daerah perlu terus memfokuskan upaya pada menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi,

termasuk perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan promosi investasi.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

A. Capaian Indikator Makro

Indikator Makro dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Ketimpangan Pendapatan dan PDRB per Kapita. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Berikut adalah Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2005 – 2025:

Tabel II-111. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2005 - 2025

No	Indikator	Capaian Awal Periode	Target	Capaian Akhir Periode	Tingkat Capaian	Pertumbuhan / Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,08	71,98	71,42	99,22%	1,91%
2	Angka Kemiskinan (%)	37,45	16,4	17,86	91,83%	-52,31%
3	Angka Pengangguran (%)	11,32	3	3,51	85,47%	-68,99%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,91	4,97	3,45	69,42%	-41,62%
5	Pendapatan Perkapita (000)	8.546,4	36.886	36.886	100%	331,59%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,36	0,25	0,3	83,33%	-16,67%
7	PDRB Per Kapita	3180.13	3871.61	3871.61	100%	21.74%
	Rata-Rata				**88,85%**	

Rata-rata capaian indikator makro RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan sampai pada Tahun 2022 menunjukkan 85,85 persen dari target akhir yang diharapkan pada tahun 2025. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

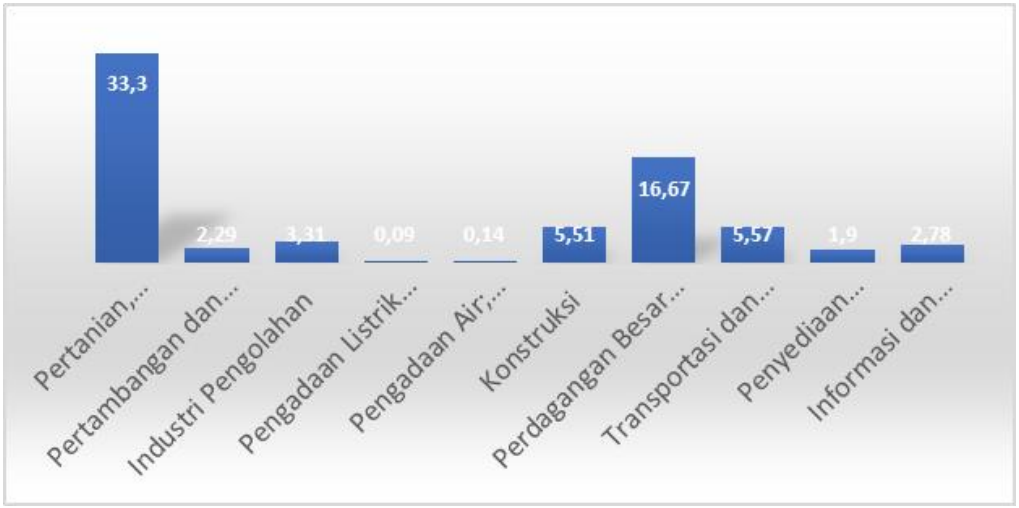
IPM menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara secara komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi. Adapun pengukuran

IPM di Indonesia menggunakan 3 dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Tiap dimensi kemudian juga dijabarkan dengan indikatornya masing-masing. Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita. Adapun IPM turut berfungsi sebagai salah satu data untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM sendiri pertama kali dicetuskan dalam *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Secara internasional, indikator ini disebut *Human Development Index* (HDI) dan rutin dipublikasikan tiap tahun lewat *Human Development Report* (HDR). Karena itu, indikator ini biasa digunakan untuk membagi negara ke dalam kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, data dari IPM juga dapat berfungsi untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi dalam pembangunan manusia di sebuah negara.

Kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencapai 71,42. Angka ini meningkat 1,34 poin dibandingkan dengan Tahun 2005 yang sebesar 70,08. Saat ini masih dibawah IPM Nasional yang sebesar 72,91 dan IPM Provinsi Bengkulu sebesar 72,16. Namun demikian, capaian IPM Tahun 2022 Bengkulu Selatan hampir mencapai target di RPPD 2005-2025 sebesar 71,98. Sejak Tahun 2016 IPM Bengkulu Selatan berada pada status “tinggi”, dan saat ini menempati peringkat ke-3 dibandingkan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dibawah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Pertumbuhan IPM Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebesar 1,91 persen dibanding capaian pada periode awal RPJPD. Peningkatan IPM Tahun 2022 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM.

Peningkatan IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu 2022 mengalami percepatan dari

tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur harapan hidup (UHH) pada tahun 2022 Provinsi Bengkulu memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,69 tahun sedangkan Kabupaten Bengkulu Selatan 68,15 tahun (urutan ke 6 dari 10 kabupaten/kota).



Gambar II-12. Komponen IPM: Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Provinsi Bengkulu adalah 13,68 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas yakni 8,91 tahun pada tahun 2022. Adapun HLS dan RLS untuk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sudah cukup baik yakni 13,63 tahun (sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, urutan ke 3 dari 10 kabupten/kota) dan 9,39 tahun (lebih tinggi dari rata-rata provinsi, urutan ke 2 dibawah Kota Bengkulu dari 10 kabupaten/kota).

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 10,318 juta rupiah, jumlah tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni 10,560 juta rupiah. Tingkat pengeluaran per kapita Bengkulu Selatan tersebut berada pada urutan ke 6 dari 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

Dari ketiga dimensi pengukuran IPM tersebut, berdasarkan angka capaian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022, maka aspek Kesehatan (berdasarkan angka umur harapan hidup; urutan 6 dari 10 kabupaten/kota)

dan aspek ekonomi (bersarkan angka pengeluaran riil per kapita; urutan 6 dari 10 kabupaten/kota) masih perlu berbagai upaya untuk meningkatkan indikator pada dua aspek tersebut.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 mencapai 3,45 persen, melambat dibanding periode awal RPJPD yang mencapai 5,91 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada saat dan pasca pandemi covid-19. Bahkan jika dilihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, yakni saat covid-19 melanda seluruh wilayah Indonesia, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu maka pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan termasuk yang masih dapat bertahan secara positif.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bengkulu Selatan pada tahun 2022 mengalami percepatan laju pertumbuhan. Percepatan tersebut dipengaruhi oleh menaiknya produksi di hampir semua sektor lapangan usaha. Nilai PDRB Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,87 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3,74 triliun rupiah dari tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,45 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,25 persen. Percepatan pertumbuhan ini terjadi karena mulai pulihnya aktivitas perekonomian setelah meredanya pandemi Covid-19. Sekitar 11 dari 17 sektor ekonomi mengalami percepatan pertumbuhan di tahun ini, dengan Sektor Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan sektor yang paling terdampak mengalami percepatan laju pertumbuhan. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada, terdapat 15 sektor yang mengalami pertumbuhan positif. 7 sektor diantaranya (kebanyakan di sektor jasa) mengalami pertumbuhan positif sebesar lebih dari 5 persen. Sedangkan 8 lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi (pertumbuhan positif lebih dari 5 persen) dicapai oleh Jasa Perusahaan yaitu sebesar 12,54 persen. Diikuti dengan pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,57 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13 persen, sektor Jasa Lainnya sebesar 8,02 persen, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,98 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,24 persen, dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,02 persen. Sementara itu, 8 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen antara lain: sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,36 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah sebesar 4,14 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,02 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,73 persen; Real Estate sebesar 2,90 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,79 persen; Konstruksi sebesar 1,53 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,36 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif hanya ada 2 sektor, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar -0,14 persen, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -2,79 persen.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami percepatan pada triwulan IV 2022 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya. Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,51% (yoy). Secara umum, percepatan pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi komponen ekspor dan konsumsi pemerintah sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara negara mitra dagang dan program upaya percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah. Sementara dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirincimenjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori,

disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian danPerburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja yang utama. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 2.254,51 miliar rupiah atau sebesar 33,59 persen dari total PDRB. Sementara itu untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 1.267,16 miliar rupiah. Kategori ini merupakan lapangan usaha unggulan di Kabupaten Bengkulu Selatan karena sekitar 46 persen penduduk bekerja di lapangan usaha ini (Sakernas 2021). Sebagian produk pertaniannya diekspor ke luar daerah seperti beras, jagung, CPO, karet, kopi, kelapa, ikan nila, dan produk perikanan laut lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi di Bengkulu Selatan menunjukkan pergeseran dari lapangan usaha pertanian ke non pertanian. Pada tahun 2010 peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sekitar 39,93 persen namun pada tahun 2022 menjadi 33,59 persen. Pergeseran ini tentu dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan seperti perumahan. Pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di tahun 2022 melebihi rata-rata kabupaten dengan 4,02 persen. Ini merupakan pertama kalinya sejak 2013 angka pertumbuhan sektor pertanian mencapai 4 persen. Seluruh subkategori mengalami pertumbuhan yang positif kecuali subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Pembahasan pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan perkembangan inflasi, ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), libur sekolah, berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dampak 2nd round effect penyesuaian harga BBM.

Berdasarkan kelompok komoditas, tekanan inflasi pada triwulan ini didorong oleh kelompok transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok transportasi, peningkatan disumbangkan oleh komoditas bensin, mobil, pemeliharaan/service, dan solar. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peningkatan tekanan inflasi disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, minyak goreng, beras, telur ayam ras, dan rokok putih.

Pada triwulan IV 2022, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu melanjutkan perbaikan. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani yang berada pada tren membaik dan kemiskinan yang menurun sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sementara, pada Agustus 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu mengalami penurunan menjadi 3,59% dari 3,65% pada Agustus 2021.

Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2022 melanjutkan tren peningkatan sejak triwulan II 2022. NTP rata-rata Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2022 tercatat pada level 138,61. Kondisi level NTP yang berada di atas 100 mencerminkan bahwa daya tukar (term of trade) dari pendapatan atas produk pertanian masih lebih tinggi dibandingkan dengan biaya barang/jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Adapun posisi NTP terkini pada Januari 2023 mulai relatif stabil pada level 139,58.

c. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebesar 17,86 persen. Bila dibandingkan dengan awal periode RPJPD yakni sebesar 25,37%, maka persentase penduduk miskin Bengkulu Selatan Tahun 2022 turun signifikan sebesar 7,51 persen. Capaian Persentase penduduk miskin Bengkulu Selatan Tahun 2022 belum mencapai target akhir periode RPJPD

Tahun 2025 sebesar 16,83 persen. Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data BPS pada periode September 2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 14,34%, atau menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 14,43%. Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu masih menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional. Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sebesar 17,86%, dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bengkulu Selatan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun secara nasional.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dengan demikian maka untuk menurunkan angka kemiskinan yakni dengan meningkatkan berbagai indikator yang berhubungan dengan garis

kemiskinan, baik Garis Kemiskinan Makanan (GKM) maupun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Terkait hal ini maka menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ini. Perlu strategi dan kebijakan secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kebijakan terkait pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan penyumbang angka tertinggi bagi PDRB.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bengkulu Selatan turun menjadi 3,51 persen pada tahun 2022 dari 12,53 persen pada awal periode RPJPD. Angka ini hamper mencapai target capaian akhir RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 sebesar 3 persen. Sebagai perbandingan, keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari data berikut, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.076.115 orang, naik 15.595 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0.06 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.037.496 orang, naik sebanyak 15.721 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (31.811 orang). Sektor-sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dengan penurunan sebesar 6.602 orang. Sebanyak 336.783 orang (32,46 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,62 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,67 persen poin dan 3,14 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,59 persen, turun sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 21.606 orang (1,40 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1.463 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (2.057 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (313 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17.773 orang).

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.541.550 orang, naik sebanyak 21.120 orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.076.115 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 465.435 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1.037.496 orang penduduk yang bekerja dan 38.619 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 15.595 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 15.721 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 126 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,81 persen, naik 0,06 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

e. Gini Rasio

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva lorenz dan aspek matematis.

Ukuran kesenjangan ini juga memenuhi desirable property dari ukuran kesenjangan, namun demikian Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (additively decomposable). Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi

(kesenjangan sempurna). Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

i. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
ii. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan kesenjangan sedang.
iii. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan data tahun 2022, indeks gini Bengkulu Selatan mencapai 0,3. Angka ini belum mencapai target indeks gini di di akhir periode RPJPD Tahun 2025 yakni sebesar 0,25. Nilai Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,06 poin yakni dari 0,36 menjadi 0,3. Angka gini rasio sebesar 0,3 tersebut dapat dimaknai bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup merata. Berikut perbandingan gini rasio se Provinsi Bengkulu:

Tabel II-112. Gini Rasio Kabuptaen/Kota 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio		
		2020	2021	2022
1	Bengkulu Tengah	0,26	0,25	0,24
2	Mukomuko	0,25	0,26	0,26
3	Lebong	0,28	0,27	0,27
4	Bengkulu Utara	0,28	0,31	0,28
5	Kaur	0,32	0,28	0,28
6	Seluma	0,29	0,25	0,29
7	**Bengkulu Selatan**	**0,31**	**0,30**	**0,30**
8	Rejang Lebong	0,29	0,35	0,30
9	Kepahiang	0,31	0,28	0,30
10	Kota Bengkulu	0,37	0,38	0,37

Sumber: BPS Bengkulu

f. Pendapatan per Kapita

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa

tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.

Tabel II-113. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Bengkulu Selatan, 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB (ADHB, Juta RP)	5.819.775	6.196.478	6.712.801
2	Nilai PDRB (ADHK, Juta RP)	3.624.589	3.742.506	3.871.606
3	PDRB per Kapita (ADHB, Ribu Rp)	35.089	36.886	39.465
4	PDRB per Kapita (ADHK, Ribu Rp)	21.853	22.278	22.761
5	Pertumbuhan Nila PDRB (ADHK)	0,26	3,25	3,45
6	Pertumbuhan PDRB PerKapita (ADHK)	1,34	1,94	2,12
7	Jumlah Penduduk	165.855	167.989	170.093

Sumber: BPS Bengkulu Selatan

PDRB per kapita Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel 2.3 di atas, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bengkulu Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar 39,465 juta rupiah pada tahun 2022.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara "riil" mengalami fluktuasi selama periode 2020-2022. Pertumbuhan per kapita meningkat rata-rata pada kisaran 4 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan per kapita meningkat menjadi 3.45 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut secara "riil" mengalami fluktuasi.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja RPJPD 2005-2025

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut.

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi 1: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		
Sasaran Pokok 1: Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat	HLS dan RLS untuk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sudah cukup baik yakni 13,63 tahun (sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, urutan ke 3 dari 10 kabupten/kota) dan 9,39 tahun (lebih tinggi dari rata-rata provinsi, urutan ke 2 dibawah Kota Bengkulu dari 10 kabupaten/kota). Persentase Jumlah Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), pada tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mencapai angka 98,078%. Profesionalisme guru adalah dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar.	APM dan APK untuk tingkat SLTP, capaiannya baru masuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan target capaian akhir periode RPJPD. APM dan APK tingkat SLTP Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 baru mencapai 67,21 dan 74,09. Artinya, masih terdapat proporsi yang cukup besar anak sekolah tingkat SLTP yang bersekolah pada tingkat yang tidakm sesuai dengan kelompok umurnya. Profesionalisme guru dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah.
Sasaran Pokok 2: Meningkatkan aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program pemerintah pusat dalam pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai), serta inovasi untuk pelayanan di daerah terpencil dan sangat terpencil, dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, atau *telemedicine*. Regionalisasi rujukan melalui penguatan sistem rujukan baik di tingkat Kabupaten, Regional, maupun Nasional	Mutu fasilitas kesehatan yang baik, di antaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKRTL) / Rumah Sakita (RS) Rasio puskesmas, poliklinik pustu persatuan penduduk, capaian rasio tersebut pada tahun 2022 baru mencapai 32,93 atau dengan kategori sangat rendah. Belum idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk, masalah sebaran dokter tersebut juga masih belum merata. Kesadaran dan kemauan

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui sosialisasi advokasi dan *capacity building*.	masyarakat untuk hidup sehat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
Sasaran Pokok 3: Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis	Capaian rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 75,64%. Apabila dibandingkan dengan target capaian akhir periode RPJPD, maka capaian pada tahun 2022 telah berada pada kategori sangat tinggi (98,23%). Kualitas dan Pemerataan Pendidikan, Bidang pendidikan merupakan instrumen paling penting guna menghasilkan tenaga kerja yang mampu dan terampil sehingga bisa memenuhi persyaratan serta kebutuhan industry Adanya Program Pelatihan Prakerja	Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal investasi. Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Minimnya pengalaman dari pencari kerja
Sasaran Pokok 4: Peningkatan kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan daerah	Sejak Tahun 2016 IPM Bengkulu Selatan berada pada status "tinggi", dan saat ini menempati peringkat ke-3 dibandingkan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dibawah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Pertumbuhan IPM Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebesar 1,91 persen dibanding capaian pada periode awal RPJPD. Peningkatan IPM Tahun 2022 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Kebijakan peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekruitmen dan kaderisasi yang baik. Berbagai peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk mencapai upaya pengarusutamaan gender. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana perempuan adalah bagian penting untuk mencapai hal tesebut.	Ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indokator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Sasaran Pokok 5: Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development)	Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Capaian IKLH Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni sebesar 64,59 atau dengan kategori cukup baik (60 s.d 70). Angka capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJPD yakni sebesar 68,92 maka sudah mencapai 93,72% atau tercapai dengan kategori sangat tinggi. Pemantauan perubahan tutupan lahan, pemeliharaan tutupan hutan melalui berbagai program/kegiatan, dan penanaman pohon dengan berbagai pendekatan. Pembangunan yang efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA).	Minimnya program dan kegiatan yang fokus pada meningkatkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan dan lahan. Terbatasnya pengolahan air limbah domestik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), restorasi (kualitas air) sungai, serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar. Tingginya risiko, tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Indeks risiko bencana Kabupaten Bengkulu Selatan yakni sebesar 168,4. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada urutan ke 29 dengan kelas risiko yang tinggi dari 514 Kabupaten/ Kota se Indonesia.
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab		
Sasaran Pokok 1: Meningkatnya profesialisme aparatur pemerintah	Program reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Manajemen Perubahan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas. Deregulasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Penataan dan penguatan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Penataan tatalaksana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi	Lemahnya implementasi dari aparatur pemerintah yang profesional dalam bekerja dan keseuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang bermuara pada tata kelola pemerintah yang baik. Belum optimalnya pelaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian indeks reformasi Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 seperti yang terlihat pada tabel 2.12 yakni dengan nilai C, apabila mengacu pada kategori penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah, maka nilai C masuk pada kategori kurang artinya sistem dan tatanan dalam tata kelola kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem reformasi birokrasi sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. Capaian nilai indeks

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	sistem, proses, dan prosedur kerja pada kementerian. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kementerian sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	profesionalitas ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni sebesar 36,12 dengan demikian profesionalitas ASN di Bengkulu Selatan masuk kategori sangat rendah (kurang dari 60).
Sasaran Pokok 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan umum	Capaian nilai SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni dengan nilai B (60-70). Nilai SAKIP B disebut juga dengan kategori baik, dalam penjelasan kategori baik yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022, yakni sebesar 80,00 atau dengan kategori baik. Penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahaan Berbasis Elektronik. Capaian nilai pelayanan publik Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni 3,925. Nilai tersebut masuk dalam kategori B (3,51-4,00) dengan makna bahwa pelayanan publik di Bengkulu Selatan dapat dikatakan baik	Perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Komitmen dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian. Lemahnya Budaya Pelayanan Prima Minimnya Standar Pelayanan Publik Terbatasnya penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut Belum optimalnya sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Minimnya terobosan berupa inovasi baik dalam bidang tata Kelola pemerintah daerah maupun dalam bidang pelayanan publik.

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Sasaran Pokok 3: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik dan berwibawa	Tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi, efektif dan efisien Capaian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut sudah lebih baik dari capaian awal periode RPJPD dimana opini atas pemeriksaan laporan keuangan masih WDP. Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.	Potensi aparatur pemerintah terhadap intervensi dalam penggunaan APBD; campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah; ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai; dan penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi.
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan		
Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju	Pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada saat dan pasca pandemi covid-19. Bahkan jika dilihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, yakni saat covid-19 melanda seluruh wilayah Indonesia, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu maka pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan termasuk yang masih dapat bertahan secara positif.	Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sebesar 17,86%, dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bengkulu Selatan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun secara nasional.
Sasaran Pokok 2: Meningkatnya produktivitas masyarakat dengan dukungan keleluasaan akses terhadap pembangunan	3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan; sektor perdagangan; sektor administrasi pemerintahan. Peningkatan produksi di hampir semua sektor lapangan usaha	Capaian Persentase penduduk miskin Bengkulu Selatan Tahun 2022 belum mencapai target akhir periode RPJPD Tahun 2025 sebesar 16,83 persen.
Misi 4: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri		
Sasaran Pokok 1: Meningkatnya akses secara merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain	Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten induk yang relatif masyarakatnya sudah tertata rapi dan berbudaya yang kehidupannya berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan. Akses terhadap listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar sudah tersedia dan terbiasa	Sebaran pemukiman masyarakat yang relatif tersebar dari perbatasan Kabupaten Kaur, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Kabupaten Seluma, serta Samudera Hindia menyulitkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengkoneksitaskan sarana dan prasarana kebutuhan dasar.

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
sebagainya) di seluruh wilayah terutama yang berbasis agroindustri	dimanfaatkan masyarakat.	
Sasaran Pokok 2: Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dalam rangka mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil–hasil komoditas unggulan daerah berbasis agroindustri	Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten di wilayah Kabupaten Bengkulu Sealatan sudah menghubungkan antar kecamatan yang ada dan ke kabupaten lain baik di Provinsi Bengkulu maupun ke Provinsi Sumatera Selatan. Hubungan bisnis antara masyarakat kabupaten Bengkulu Selatan dan daerah perbatasan sudah terjalin sejak lama terutama perdaganan hasil agroindustry dengan mengandalkan transportasi darat.	Keterbatasan besaran APBD karena masih bergantung pada dana transfer dari pusat dalam bentuk DAK, DAU dan lainnya menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Dana yang peruntukan untuk mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil komoditas unggulan relatif hanya mampu untuk menutupi biaya perawatan (maintenance) atas sarana dan prasarana yang ada.
Sasaran Pokok 3: Menguatnya kelembagaan lokal yang mampuni berperan aktif dalam pembangunan daerah	Kelembagaan lokal yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan seperti Koperasi memang sudah sejak lama berkembang di tengah masyarakat. Belakangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat menggelontorkan Dana Desa, maka selain BUMDes yang mulai berkembang, Koperasi di desa-desa juga mendapatkan manfaat karenanya,	Penduduk yang relatif bependidiakn rendah di daerah pedesaan memberikan ruang bagi penduduk yang sudah lebih maju untuk dapat mengeksploitasi hal ini yang menyebabkan angka Gini Ratio di Kabupaten Bengkulu Selatan masih timpang antara penduduk kaya dengan miskin.
Sasaran Pokok 4: Berkembangnya kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	Dokumen RTRW dan pengembangan Komoditas Jagung dan hasil bumi lainnya telah diinventarisir dan terencana dengan baik.	Susah merubah pola pertanian masyarakat desa yang sudah terbiasa berkebun tanaman keras seperti kopi dan karet untuk berubah ke tanaman lainnya yang lebih bernilai ekonomis, apalagi ke tanaman non keras.
Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu		
Sasaran Pokok 1: Berkembangnya sistem agroindustri terpadu	Pola sistem agroindustri terpadu terbukti lebih berpeluang memberikan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat Bengkulu Selatan, Dana Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat secara terpadu untuk secara Bersama-sama melakukan pergerakan pertanian yang berbasis agroindustri.	Susah mencari hamparan tanah dataran dengan luasan seribu hektar yang tidak terpotong sebagai syarat utama bagi industri besar agroindustri untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sasaran Pokok 2: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Unggulan	Masyarakat telah menyadari makin terbatasnya lahan pertanian, perkebunan, dan persawahan, sehingga upaya peningkatan produktifitas dengan pola intensifikasi terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi sawah di daerah Bengkulu Selatan.	Merubah kebiasaan bercocok tanaman tanaman konvensional ke tanaman jenis baru yang lebih bernilai ekonomis masih susah dilakukan karena faktor kebiasaaan secara turun temurun
Misi 6: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal		
Sasaran Pokok 1: Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur,	Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan sejak lama memang sudah terbuka dan terbiasa merantau dan melanjutkan Pendidikan keluar	Perkembangan teknologi informasi menyebabkan akses masyarakat terhadap pengaruh budaya luar yang negatif susah untuk dipantau.

Sasaran Pokok	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
berakhlak mulia dan saling toleransi antar individu	Bengkulu Selatan sehingga tidak sulit utnuk memberikan pemahaman untuk saling toleransi antar individu.	
Sasaran Pokok 2: Berkembangnya kegiatan pelestarian norma dan nilai–nilai budaya daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah	Kearifan lokal di Bengkulu Selatan dan jiwa gotong royong dan kebersamaan yang tinggi untuk membangun daerah sejak lama sudah terbentuk di masyarakat.	Banyaknya penduduk/masyarakat yang mobilitasnya tinggi kadang menyebabkan nilai-nilai budaya daerah sering tergantikan dengan nilai budaya yang dibawa perantau pulang ke daerah.
Misi 7: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat		
Sasaran Pokok 1: Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku	Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah terbuka dan pelintasan sejak zaman dahulu, sehingga masyarakatnya terbiasa berhubungan dengan dunia;uar dan budaya merantau yang juga tinggi menyebabkan pemahaman masyarakat atas perundangan relatif baik.	Pengaruh teknologi menyebakan shock cultures bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga sering terjadi pelanggaran hukum berupa kejadian kriminal sebagai dampaknya.
Sasaran Pokok 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, saling toleransi antar individu serta hamonisasi dalam kehidupan bermasyarakat	Mekarnya Kabupaten induk Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma dan terbukanya akses jalan antar provinsi, menyebabkan terjadi pembandingan dimasyarakat sehingga meningkatkan nilai-nilai kebersamaan dan saling toleransi atar individu dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, Sisi lain kemajuan teknologi di tangan masyarakat yang berpendidikan memberikan nilai positif untuk membuka ruang perubahan cara beroikir dan wawasan masyarakat.	Kebutuhan ekonomi dan tuntutan klehidupan kadang lebih cepat tumbuh dari peningkatan kemampun ekonomi masyarakat, memberikan ruang untuk terjadinya intoleran dan merusak nilai-nilai kebersamaan.

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025

C. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut terhadap Pencapaian RPJPD 2005-2025

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap evaluasi dokumen dan capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai dokumen RPJPD 4 kali 5 tahunan. Pemaknaan 4 kali 5 tahunan ini dimaksudkan bahwa tidak menutup kemungkinan dokumen ini dapat direvisi dalam pelaksanaannya seiring dengan waktu dan perubahan yang terjadi. RPJPD menjadi dokumen rujukkan oleh para calon Kepala Daerah ketika menyusun Visi dan Misinya saat pencalonan Kepala Daerah. Setelah terpilih

maka Kepala Daerah akan menyusun RPJMD untuk 5 tahunan periode kepemimpinanya sesuai dengan tahapan di RPJPD. Penyusunan dokumen RPJMD selain merujuk ke dokumen RPJPD juga merujuk ke dokumen Rencana Strategis Kementerian terkait. Untuk perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyiapan APBD tahun berjalan. Penyusuan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD merujuk ke Dokumen RKPD dalam menyiapkan DPA. Kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana dokumen RPJMD yang ada tidak sinkron dengan tahapan yang ada di tahapan RPJPD dan evaluasi tahunan atas pelaksanaan RPJMD juga tidak dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu periodeisasi RPJMD pertama yang masih bernuansa kualitatif ke angka kuantitatif sangat sulit untuk diterjemahkan, sementara keberlanjutan dokumen RPJMD antar periode tidak sinkron di dalam RPJPD. Perbedaan yang terjadi seharusnya dapat disikapi dengan melakukan penyesuaian dokumen RPJPD untuk tahapan RPJMD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Direkomendasikan ke depan, Kabupaten Bengkulu Selatan benar-benar memberikan prioritas terhadap dokumen perencanaan ini, baik jangka panjang dan jangka menengah hingga tataran perencanaan operasional tahunannya. Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengukuran ketercapaian indikator kinerja dan keberlanjutannya. Semuanya diarahkan kepada perwujudakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Peningkatan layanan Kesehatan sebagai layanan dasar melalui kebijakan terintegrasi termasuk didalamnya pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) dan penurunan Prevalensi Stunting melalui intervensi spesifik, sensitif, dan kordinatif;
c. Peningkatan layanan pendidikan sebagai layanan dasar melalui kebijakan kemudahan dalam mengakses pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan menengah sehingga usia rata-rata lama sekolah meningkat;
d. Angka rata-rata kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan masih diatas angka rata-rata kemiskinan nasional dan angka rata-rata kemiskinan Provinsi walaupun kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 terjadi penurunan, namun

tetap perlu adanya langkah intensif untuk menurunkan secara signifikan melalui kebijakan yang terintegrasi yang capaiannya terlihat dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim;

e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan kemudahan realisasi investasi sesuai dengan RIRU (*Regional Investment Relations Unit*) maka perlu penyelesaian regulasi pemanfaatan ruang (Peraturan Daerah RTRW dan RDTR) dan regulasi yang memberi kemudahan investasi dan insentif investasi bagi investor, sejalan dengan itu maka perlu dibuat peta potensi Investasi sebagai ringkasan umum;
f. Peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup;
g. Kewajiban Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan yang menggambarkan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan tetap Mengutamakan pembangunan berkelanjutan dengan konsen peningkatan mutu hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan memiliki konsep yang berlandaskan pelestarian dan kepedulian lingkungan hidup;
h. Upaya Pelestarian adat dan budaya serta kearifan lokal melalui event tahunan serta Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu, masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di daerah;
i. Pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan formal dan non formal serta penguatan wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai keagamaan dengan kebijakan dan program kota tahfiz, program pemberantasan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif, untuk melindungi dan menciptakan generasi muda yang agamis dan berwawasan kebangsaan.
j. Rasio puskesmas dan dokter yang masih sangat senjang membutuhkan perhatian dan skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Bengkulu

Selatan dalam bidang Kesehatan.

k. Risiko Bencana yang relatif tinggi karena memang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berada di atas lempeng yang masih terus bergerak, seringnya gempa dan struktur tanah pegunungan, khususnya berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang rentan longsor harus menjadi perhatian dalam perencanaan masa depan secara sustainability dan bersahabat dengan lingkungan.

l. Reformasi Birokrasi masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas bekerja ASN. Dibutuhkan SOTK yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan untuk menjamin visi dan misi kepala daerah dapat tercapai dan terwujudkan.

m. Profesionalitas ASN merupakan keniscahayaan yang harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan karena budaya kerja, etos kerja, dan kedisiplinan ASN masih belum optimal. Pemningkatan kualitas dan kompetensi menjadi prioritas sgar ASN menjasi professional.

n. Dibutuhkan aturan dan kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan yang dapat meningktkan standar pelayanan minimum.

o. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya.

p. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar dan program “bapak asuh”.

q. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.

r. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.

s. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pertanian) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial. Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat pengeluaran terbawah.

t. Memberikan pemahaman dan wawasan pemanfaatan Dana Desa yang lebih efektif dengan perencanaan dan APBDes yang dipertanggungjawabkan secara benar melalui Siskeudes yang makin baik. Mengembangkan BUMDes dengan bekerjasama dengan pihak terkait agar bisa menjadi lembaga ekonomi kerakyatan selain koperasi di pedesaaan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 mencapai 167.989 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 170.093 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sebesar 103,83. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103-104 penduduk laki-laki. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-114. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	7.047	6.701	13.748
5–9	7.269	6.958	14.227
10–14	7.338	6.958	14.296
15–19	7.364	6.979	14.343
20–24	7.085	6.719	13.804
25–29	6.871	6.417	13.288
30–34	6.644	6.203	12.847
35–39	6.525	6.179	12.704
40–44	6.290	6.046	12.336
45–49	6.164	5.913	12.077
50–54	5.350	5.157	10.507
55–59	4.300	4.121	8.421
60–64	3.303	3.213	6.516
65–69	2.343	2.429	4.772
70–74	1.493	1.687	3.180
75–79	1.258	1.769	3.027
Jumlah	**86.644**	**83.449**	**70.093**

Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan dalam angka 2023

Untuk memproyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dilakukan pendekatan berdasarkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Dalam buku tersebut diproyeksi bahwa jumlah total penduduk Provinsi Bengkulu pada periode 2025-2045 akan mengalami pertumbuhan 18,61% dari tahun 2025 yang diperkirakan jumlah penduduk sebanyak 2.138,05 ribu orang menjadi sebanyak 2.536,00 ribu orang di tahun 2045. Akan tetapi dalam periode lima tahunan pada periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tahun 2025) diperkirakan mencapai 5,64%, sedikit berkontraksi menjadi 4,68% pada tahun 2035 terhadap tahun 2030 dan pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,23% terhadap tahun 2040.

Tabel II-115. Proyeksi Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)

Umur	2022	Pertumbuhan	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
0–4	179,25	3,21%	185	-1,32%	182,56	-1,54%	179,74	-0,62%	178,63	0,46%	179,45
5–9	174,09	0,36%	174,71	5,70%	184,67	-1,29%	182,29	-1,53%	179,51	-0,60%	178,43
10–14	172,37	0,67%	173,52	0,77%	174,85	5,71%	184,83	-1,28%	182,47	-1,51%	179,71
15–19	171,16	0,25%	171,58	1,04%	173,36	0,78%	174,71	5,71%	184,69	-1,27%	182,35
20–24	173,24	-1,31%	170,97	-0,04%	170,91	1,05%	172,71	0,80%	174,1	5,72%	184,05
25–29	172,45	0,66%	173,59	-1,89%	170,31	-0,01%	170,29	1,07%	172,11	0,82%	173,52
30–34	168,95	0,84%	170,37	1,51%	172,94	-1,87%	169,71	0,01%	169,73	1,08%	171,57
35–39	161,37	3,01%	166,22	1,86%	169,31	1,54%	171,91	-1,84%	168,75	0,02%	168,79
40–44	151,22	3,31%	156,22	5,47%	164,77	1,89%	167,89	1,57%	170,53	-1,82%	167,43
45–49	136,65	6,18%	145,1	6,25%	154,17	5,53%	162,7	1,94%	165,86	1,61%	168,53
50–54	116,57	8,89%	126,93	11,68%	141,76	6,35%	150,76	5,62%	159,24	2,01%	162,44
55–59	95,64	10,15%	105,35	16,00%	122,21	11,85%	136,69	6,51%	145,59	5,74%	153,95
60–64	73,58	13,66%	83,63	18,64%	99,22	16,30%	115,39	12,12%	129,38	6,70%	138,05
65–69	52,72	14,97%	60,61	25,28%	75,93	19,14%	90,46	16,80%	105,66	12,46%	118,82
70–74	32,22	24,46%	40,1	28,88%	51,68	26,22%	65,23	20,04%	78,3	17,43%	91,95
75+	27,91	22,36%	34,15	46,27%	49,95	38,34%	69,1	33,27%	92,09	27,01%	116,96
Total	2.059,37	3,82%	2.138,05	5,64%	2.258,60	4,68%	2.364,41	3,90%	2.456,64	3,23%	2.536,00

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

Menggunakan pertumbuhan penduduk pada data tabel diatas dapat diproyeksikan jumlah penduduk Kabupatan Bengkulu Selatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel II-116. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045

Umur	2022	Pertumbuhan	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
0–4	13.748	3,21%	14.189	-1,32%	14.002	-1,54%	13.786	-0,62%	13.700	0,46%	13.763
5–9	14.227	0,36%	14.278	5,70%	15.092	-1,29%	14.897	-1,53%	14.670	-0,60%	14.582
10–14	14.296	0,67%	14.391	0,77%	14.502	5,71%	15.329	-1,28%	15.134	-1,51%	14.905
15–19	14.343	0,25%	14.378	1,04%	14.527	0,78%	14.640	5,71%	15.477	-1,27%	15.281

Umur	2022	Pertumbuhan	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
20–24	13.804	-1,31%	13.623	-0,04%	13.618	1,05%	13.762	0,80%	13.873	5,72%	14.665
25–29	13.288	0,66%	13.376	-1,89%	13.123	-0,01%	13.122	1,07%	13.262	0,82%	13.370
30–34	12.847	0,84%	12.955	1,51%	13.150	-1,87%	12.905	0,01%	12.906	1,08%	13.046
35–39	12.704	3,01%	13.086	1,86%	13.329	1,54%	13.534	-1,84%	13.285	0,02%	13.288
40–44	12.336	3,31%	12.744	5,47%	13.441	1,89%	13.696	1,57%	13.911	-1,82%	13.658
45–49	12.077	6,18%	12.824	6,25%	13.625	5,53%	14.379	1,94%	14.659	1,61%	14.895
50–54	10.507	8,89%	11.441	11,68%	12.777	6,35%	13.589	5,62%	14.353	2,01%	14.641
55–59	8.421	10,15%	9.276	16,00%	10.760	11,85%	12.035	6,51%	12.819	5,74%	13.555
60–64	6.516	13,66%	7.406	18,64%	8.787	16,30%	10.219	12,12%	11.457	6,70%	12.225
65–69	4.772	14,97%	5.486	25,28%	6.873	19,14%	8.188	16,80%	9.564	12,46%	10.755
70–74	3.180	24,46%	3.958	28,88%	5.101	26,22%	6.438	20,04%	7.728	17,43%	9.075
75+	3.027	22,36%	3.704	46,27%	5.417	38,34%	7.494	33,27%	9.988	27,01%	12.685
Total	170.093	3,82%	177.114	5,64%	188.126	4,68%	198.013	3,90%	206.785	3,23%	214.391

2.6.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

2.6.2.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki

Menggunakan pendekatan yang sama dengan proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2045, didapatkan proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk dan total penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2045 sebagai berikut:

Tabel II-117. Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045

Umur	2022	Pertumbuhan	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
0–4	7.047	3,04%	7.261	-1,34%	7.164	-1,56%	7.052	-0,60%	7.010	0,47%	7.043
5–9	7.269	0,52%	7.307	5,50%	7.708	-1,33%	7.606	-1,53%	7.490	-0,58%	7.447
10–14	7.338	-0,10%	7.331	0,78%	7.388	5,50%	7.794	-1,31%	7.692	-1,52%	7.575
15–19	7.364	0,18%	7.377	-0,16%	7.366	0,78%	7.423	5,52%	7.833	-1,30%	7.731
20–24	7.085	-0,93%	7.019	0,08%	7.024	-0,15%	7.014	0,80%	7.070	5,53%	7.461
25–29	6.871	0,77%	6.924	-1,35%	6.830	0,09%	6.837	-0,14%	6.827	0,81%	6.883
30–34	6.644	1,10%	6.717	1,69%	6.830	-1,33%	6.740	0,10%	6.746	-0,13%	6.738
35–39	6.525	3,11%	6.728	2,29%	6.882	1,70%	6.999	-1,30%	6.908	0,10%	6.915
40–44	6.290	3,10%	6.485	5,48%	6.840	2,30%	6.998	1,74%	7.119	-1,28%	7.028
45–49	6.164	5,90%	6.528	5,83%	6.908	5,52%	7.289	2,35%	7.460	1,76%	7.592
50–54	5.350	8,29%	5.794	11,09%	6.436	5,89%	6.815	5,60%	7.197	2,40%	7.370
55–59	4.300	9,52%	4.709	14,82%	5.407	11,21%	6.013	6,05%	6.377	5,72%	6.742
60–64	3.303	12,36%	3.711	17,26%	4.352	15,04%	5.006	11,47%	5.581	6,22%	5.928
65–69	2.343	13,94%	2.670	22,62%	3.273	17,60%	3.850	15,51%	4.447	11,77%	4.970
70–74	1.493	24,75%	1.863	26,90%	2.364	23,20%	2.912	18,38%	3.447	16,04%	4.000
75+	1.258	24,22%	1.563	47,77%	2.309	36,00%	3.140	29,33%	4.062	23,52%	5.017
Total	1.052,98	8445,79%	89.985	5,66%	95.082	4,63%	99.488	3,80%	103.265	3,07%	106.439

2.6.2.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan

Menggunakan pendekatan yang sama dengan proyeksi penduduk dan proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk dan total penduduk berjenis kelamin laki-laki Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2045, didapatkan proyeksi jumlah

pertumbuhan penduduk dan total penduduk berjenis kelamin perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2045 sebagai berikut:

Tabel II-118. Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2045

Umur	2022	Pertumbuhan	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
0–4	6.701	3,39%	6.928	-1,28%	6.840	-1,54%	6.734	-0,64%	6.691	0,45%	6.721
5–9	6.958	0,18%	6.970	5,91%	7.382	-1,25%	7.290	-1,52%	7.179	-0,61%	7.135
10–14	6.958	1,47%	7.060	0,77%	7.114	5,93%	7.536	-1,25%	7.442	-1,51%	7.330
15–19	6.979	0,31%	7.001	2,32%	7.163	0,78%	7.219	5,92%	7.646	-1,23%	7.552
20–24	6.719	-1,71%	6.604	-0,16%	6.594	2,33%	6.748	0,80%	6.802	5,92%	7.204
25–29	6.417	0,56%	6.453	-2,47%	6.294	-0,11%	6.287	2,35%	6.435	0,82%	6.487
30–34	6.203	0,57%	6.238	1,32%	6.321	-2,43%	6.167	-0,09%	6.162	2,37%	6.308
35–39	6.179	2,91%	6.359	1,41%	6.448	1,37%	6.537	-2,40%	6.380	-0,06%	6.376
40–44	6.046	3,52%	6.259	5,46%	6.601	1,46%	6.697	1,41%	6.792	-2,37%	6.631
45–49	5.913	6,48%	6.296	6,69%	6.718	5,55%	7.090	1,52%	7.198	1,45%	7.303
50–54	5.157	9,51%	5.648	12,31%	6.343	6,82%	6.775	5,66%	7.159	1,59%	7.272
55–59	4.121	10,82%	4.567	17,24%	5.355	12,50%	6.024	6,98%	6.444	5,77%	6.816
60–64	3.213	15,04%	3.696	20,10%	4.439	17,55%	5.219	12,77%	5.885	7,17%	6.307
65–69	2.429	16,05%	2.819	28,04%	3.609	20,66%	4.355	18,06%	5.142	13,10%	5.815
70–74	1.687	24,16%	2.095	30,87%	2.741	29,17%	3.541	21,57%	4.304	18,70%	5.109
75+	1.769	20,87%	2.138	45,15%	3.103	40,27%	4.353	36,50%	5.942	29,71%	7.708
Total	1.006,40	8557,77%	87.132	6,81%	93.065	5,92%	98.571	5,10%	103.603	4,32%	108.075

2.6.3. Analisis Kependudukan

2.6.3.1. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat ini adalah sebanyak 8.20% jika dibandingkan secara dengan jumlah di Provinsi Bengkulu.

Tabel II-119. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Tahun	Keterangan	Jumlah
2023	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	170.093
	Kepadatan	143,41
2025	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	177.114
	Kepadatan	149,32
2030	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	188.126
	Kepadatan	158,61

Tahun	Keterangan	Jumlah
2035	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	198.013
	Kepadatan	166,94
2040	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	206.785
	Kepadatan	174,34
2045	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	214.391
	Kepadatan	180,75

Pada tabel proyeksi kepadatan penduduk diatas, Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2045 masih dalam klasifikasi rendah dengan 180,75 orang perkilometer persegi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman diklasifikasikan sebagai berikut: 1) rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2) sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3) tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; dan 4) sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

2.6.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel II-120. Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Komposisi Umur (%)	2025	2030	2035	2040	2045
0–14	42.858	43.595	44.012	43.504	43.250
15–64	121.108	127.140	131.880	136.002	138.626
65+	13.148	17.391	22.120	27.280	32.515
Dependency Ratio (%)	46,24	47,97	50,15	52,05	54,65

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksi akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2045. Kabupaten Bengkulu Selatan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing sehingga penduduk yang sedang berada di

usia produktif dapat dengan mampu menanggung ketergantungan usia tidak produktif.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pembahasan tentang pengambangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam dokumen tersebut mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas wilayah 118.610 Ha, yang terletak antara 4°09'39" - 4°33'34" Lintang Selatan dan 102°47'45" - 103°17'18" Bujur Timur, yang secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Tujuan dari penataan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan. RTRW tersebut disusun berfungsi sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Kebijakan 1: Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan.
2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, dll) secara merata.

Kebijakan 2: Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan.
3. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3: Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4: Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder
3. Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5: Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi untuk iklim usaha
2. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi

3. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Kebijakan 6 : Pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

A. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Secara garis besar rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.
2. Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang menempatkan Kota Manna sebagai PKW dan Masat sebagai PKL. Hirarki pusat-pusat permukiman saat ini (eksisting) adalah sebagai berikut :
    a. Kawasan permukiman perkotaan (ibukota kecamatan) :
        - Kayu Kunyit
        - Kota Manna
        - Pasar Manna
    b. Kawasan permukiman pedesaan (ibukota kecamatan) :
        - Simpang Pino
        - Tanjung Negara
        - Suka Negeri
        - Pasar Baru - Seginim

- Masat
- Pasar Pino
- Gindo Suli
- Lubuk Ladung

3. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi. Untuk sistem perkotaan Bengkulu Selatan, pusat-pusat perkotaan yang perlu didorong ataupun dikendalikan pertumbuhannya adalah :
    a. Manna, kawasan perkotaan Manna yang terdiri dari 3 wilayah yaitu Manna, Kota Manna dan Pasar Manna merupakan wilayah yang saat ini pertumbuhannya perlu didorong namun di satu sisi juga perlu dibatasi. Perlu didorong mengingat statusnya sebagai PKW, namun sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai sebagai kota dengan status PKW. Sementara juga perlu dibatasi agar pembangunan-pembangunan di masa mendatang tidak merusak lingkungan karena pembangunan yang ada harus tetap melihat daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
    b. Kota dengan status sebagai PPL, kota-kota ini harus didorong pertumbuhannya agar pembangunan lebih merata dan dapat dirasakan oleh semua pihak.
4. Pembangunan jaringan jalan juga dibatasi sedemikian rupa tanpa mengurangi aksesibilitas antar pusat-pusat demi menjaga kualitas dan kelestarian hutan lindung dan cagar alam
5. Untuk mendukung kegiatan pariwisata, mitigasi bencana, mobilisasi hasil produksi laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta komoditas

unggulan lainnya perlu dilakukan percepatan pembangunan prasarana transportasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-121. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2030

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Manna (Kecamatan Kota Manna)	PKW	- Pusat Pemerintahan - Pusat Perdagangan dan jasa - Pusat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan. - Permukiman perkotaan - Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
2.	Pasar Bawah (Kecamatan Pasar Manna)	PKW	- Pariwisata - Permukiman perkotaan - Pengembangan sub sektor Perikanan - Industri pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
3.	Kayu Kunyit (Kecamatan Manna)	PKW	- Permukiman perkotaan - Pertambangan (golongan c) - Perkebunan dan sub sektor pertanian - Pariwisata - Indutri pertanian dan pengolahan rumah tangga.
`4.	Masat (Kecamatan Pino)	PKL	- Pusat Agro Industri - Pusat Agropolitan - Perkebunan - Pertanian - Permukiman perdeesaan
5.	Simpang Pino (Kecamatan Ulu Manna)	PPK	- Pertanian - Perkebunan - Kawasan Hutan Konservasi - Perternakan - Pertambangan - Pariwisata - Permukiman perdesaa
6.	Lubuk Ladung (Kecamatan Kedurang Ilir)	PPK	- Pertanian - Agroindustri - Perkebunan - Perikanan - Pertambangan - Peternakan - Permukiman pedesaan
7.	Gindo Suli (Kecamatan Bunga Mas)	PPL	- Perkebunan - Pariwisata buatan - Industri pengolahan hasil pertanian - Permukiman pedesaan
8.	Tanjung Negara (Kecamatan Kedurang)	PPL	- Pertanian - Perkebunan - Kawasan hutan konservasi

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
			- Peternakan - Perikanan darat - Permukiman pedesaan
9.	Pasar Baru (Kecamatan Seginim)	PPL	- Peternakan - Perikanan darat - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Permukiman pedesaan
10.	Suka Negeri (Kecamatan Air Nipis)	PPL	- Perkebunan - Kehutanan - Pertanian - Perikanan darat - Permukiman pedesaan
11.	Pasar Pino (Kecamatan Pino Raya)	PPL	- Perkebunan - Pertanian - Perikanan - Peternakan - Kehutanan - Permukiman pedesaan

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan 2011

Sampai saat ini, jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih berjumlah 11 kecamatan dengan 142 Desa dan 16 Kelurahan.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Sebelum merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu sistem jaringan jalan yang ada dan dikaitkan dengan rencana sistem pusat-pusat perkotaan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi :
   - jalur Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Bandar Lampung – PKL Bintuhan (Ibukota Kabupaten Kaur, Bengkulu) – PKW Manna - Tais (Kabupaten Seluma) – Bengkulu menuju ke Sumatera Barat.
   - PKW Manna menuju Tanjung Sakti (Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan).
   - Jalan nasional (kolektor) K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun (Manna) serta Jl. A. Yani dan Jalan Simpang Kurawan-Kantor Bupati.
   - Jalan nasional lain adalah yang melintas dari Kedurang Ilir sampai Pino Raya yang melintasi pusat perkotaan :
     i. PPK Lubuk Ladung (Kedurang Ilir)

ii. PPL Gindo Suli (Bunga Mas)
iii. PKW Kayu Kunyit (Manna)
iv. PPL Pasar Manna (Pasar Manna)
v. PKW Kota Manna
vi. PPL Pasar Pino (Pino Raya)

b. Jaringan Jalan Provinsi : adalah jalan yang menghubungkan Manna dan Batas Provinsi Sumatera Selatan. Jalan ini melalui PKL Masat (Pino) dan PPK Simpang Pino (Ulu Manna).

c. Jaringan Jalan Kabupaten : selain ruas jalan nasional dan provinsi di atas, selebihnya adalah jalan kabupaten yang secara status terdapat 220 ruas jalan dengan panjang total 548,54 Km yang menghubungkan IKK ke masing-masing desa pada tiap-tiap kecamatan.Sesuai KepMenPU No. 630/Kpts/M/2009, jaringan jalan menurut fungsinya yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup jaringan kolektor 1. Distribusi jaringan jalan menurut fungsi ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-122. Fungsi Jalan Arteri dan Kolektor 1 Bukan Jalan Tol di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Fungsi Jalan
1.	Maras – Sp. Kurawan (Manna)	14.770	Kolektor 1
2.	Sp. Kurawan – K. Bupati (Manna)	4.110	Kolektor 1
3.	K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun (Manna)	5.720	Kolektor 1
4.	Sp. Rukis (Manna) – Tanjung Kemuning	40.700	Kolektor 1
5.	Jln. Iskandar Baksir (Manna)	1.450	Kolektor 1
6.	Manna – Tanjung Sakti (Bts Prov. Sumsel)	40.852	Kolektor 1
7.	Jln. A. Yani (Manna)	2.875	Kolektor 1
Total Kabupaten Bengkulu Selatan		**110.477**	

Sumber: KepMenPU No. 630/Kpts/M/2009 dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Kolektor Primer yang berstatus jalan lintas nasional dan jalan provinsi yaitu yang menghubungkan simpul-simpul:
   a. Lubuk Ladung (PPK) – Gindo Suli (PPL)
   b. Gindo Suli (PPL) – Kayu Kunyit (PKW)
   c. Kayu Kunyit (PKW) – Pasar Bawah (PPL)
   d. Pasar Bawah (PPL) – Kota Manna (PKW)

e. Kota Manna (PKW) – Pasar Pino (PPL)
f. Pasar Pino (PPL) – Tais (Kabupaten Seluma)
g. Kota Manna (PKW) – Masat (PKL)
h. Masat (PKL) – Simpang Pino (PPK)

2. Jalan Lokal Primer yang berstatus sebagai jalan kabupaten menghubungkan simpul-simpul:
   a. Kota Manna (PKW) – Manna (PKW) – Bunga Mas (PPL)
   b. (Kurawan – Pusat Pemerintahan – Gn. Ayu – Jeranglah – Tumbuk Tebing)
   c. Masat (PKL) – Pasar Baru (PPL)
   d. Pasar Baru (PPL) – Tanjung Negara (PPL)
   e. Masat (PKL) – Pasar Pino (PPL)
   f. Pasar Pino (PPL) – Simpang Pino (PPK)
   g. Kurawan (PKL) – Pusat Pemerintahan – Gn. Ayu (PKW) – Tb. Tebing (PKL)
3. Jalan Lingkungan Primer yang berstatus sebagai jalan kabupaten menghubungkan simpul: Pasar Baru (PPL) – Sukanegeri (PPL)
4. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten berbatasan, yaitu:
   a. Desa Palasiring (Kab. Bengkulu Selatan) – Desa Bungin Tambun (Kab. Kaur),
   b. Jalan dari Dusun Talang Tinggi, Karang Cayo (Kab. Bengkulu Selatan) - Gunung Mesir (Kab. Seluma)
   c. Jalan dari Desa Cinto Mandi, Kec. Pino Raya (Kab. Bengsel) – Desa Jembat Akar (Kab. Seluma)

2. Rencana Pengembangan Terminal

Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan, rencana pengembangan sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada (eksisting), jenis dan kelas pelayanannya, rencana pengembangan terminal angkutan penumpang untuk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

a. Terminal Tipe B (Gunung Ayu) di Kota Manna (PKW); bersifat pengembangan
b. Terminal Tipe C di Masat (PKL); bersifat pembangunan
c. Terminal Tipe C di Tanjung Negara (PPK) dan Pasar Baru (PPL); bersifat pembangunan.

Mengingat kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat primer dan membutuhkan angkutan barang, maka fungsi terminal penumpang sebagaimana dimaksud di atas sebaiknya digabung menjadi satu kesatuan. Untuk Masat sebagai pusat agroindustri dapat saja dikembangkan sub terminal agroindustri yang diintegrasikan sebagai terminal penumpang.

3. Rencana Pengembangan Pelabuhan Nelayan

Rencana pengembangan pelabuhan nelayan dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan dan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, fungsi, skala pelayanan dan keberadaan pelabuhan yang ada. Dalam hal ini pelabuhan memiliki peran sebagai:

a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya
b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
c. Tempat kegiatan alih moda transportasi
d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan
e. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang, dan
f. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan laut sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Tatanan Kepelabuhan adalah :

a. Pelabuhan utama
b. Pelabuhan Pengumpul, dan
c. Pelabuhan pengumpan

Berdasarkan hirarki dan fungsi pelabuhan laut seperti yang diuraikan diatas, rencana pengembangan pelabuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah peningkatan fungsi Pelabuhan Nelayan Pasar Bawah di Kecamatan Pasar Manna menjadi pelabuhan pengumpan lokal.

Rencana Sistem Jaringan Listrik

Sumber energi listrik di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah PLTD dengan gardu induk berada di Kecamatan Kota Manna. Kondisi faktual saat ini adalah suplai listrik untuk Kabupaten Bengkulu Selatan berada dalam kondisi yang terbatas. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan kapasitas pembangkit yang tersedia tidak mampu melayani permintaan akan listik yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 4 (empat) PLN Sub Ranting untuk pendistribusian daya listrik ke konsumen di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu: Sub Ranting Manna, Sub Ranting Kedurang, Sub Ranting Masat dan Sub Ranting Kelutum dengan total pemakaian listrik pada tahun 2008 sebesar 17.884.883 Kwh yang melayani 17.503 pelanggan. Mengingat akan terjadinya perubahan struktur ekonomi wilayah yang saat ini didominasi sektor primer akan bergeser ke kegiatan sekunder dan tersier, maka untuk kegiatan sekunder (industri) diperlukan adanya pasokan listrik yang memadai dan stabil. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Bengkulu Selatan karena kondisi pasokan listrik saat ini mengalami kekurangan suplai (defisit). Pemenuhan kebutuhan listrik tersebut dilakukan melalui pemulihan kinerja PLTD yang ada serta rencana pembangunan SUTT 150 KV Pagar Alam – Manna dan pembangunan gardu induk di Masat, Kecamatan Pino.

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Salah satu modal daerah untuk menarik investasi dan sekaligus meningkatkan perkonomian wilayah adalah tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Stasiun telkom di Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di Kecamatan Kota Manna. Saat ini telekomunikasi nirkabel juga sudah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana sampai tahun 2007 sudah beroperasi 4 operator telekomunikasi nirkabel.

Mengingat besarnya peran telekomunikasi memerlukan dukungan dari teknologi infomasi seperti telepon nirkabel dan internet, maka pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang cenderung berteknologi tinggi ini perlu lebih baik lagi seperti perlunya penggunaan bersama BTS (join provider). Satu BTS dapat digunakan secara bersama dari 3-7 provider. Efisiensi ini tidak saja akan mengurangi biaya masing-masing provider tapi juga akan menciptakan estetika permukiman dan pengurangan dampak negatif dari sistem BTS tersebut seperti pengurangan sebaran (radius) radiasi dari pancaran elektromagnetik BTS tersebut. Lokasi BTS di Kabupaten Bengkulu terdapat di Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna, Pino, Pino Raya, Seginim, Ulu Manna, Kedurang dan di Kecamatan Bunga Mas.

Selain telepon nirkabel, pengembangan prasarana telekomunikasi juga dilakukan dengan melakukan pengembangan jaringan internet ke seluruh kantor kecamatan dan lembaga pelayanan publik lainnya karena pemanfaatan teknologi informasi ini juga akan meningkatkan profesionalitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kerja pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pengembangan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

1. Penambahan kapasitas sentral telepon
2. Penambahan kabel primer dan sekunder
3. Untuk perluasan jaringan maka pemerintah daerah perlu menyediakan ruang untuk mendirikan tiang
4. Penambahan tower relay dari pemasangan sejumlah microcell di daerah yang diperkirakan akan terjadi blackspot.
5. Menyebarkan fasilitas telekomunikasi umum, seperti telepon umum dan warung telekomunikasi di tempat strategis.

Rencana Pengembangan Sumberdaya Air

1. Jaringan Air Minum

Dengan menggunakan standar kebutuhan air minum sebesar 120 liter/orang/hari, maka air minum minimal yang harus disediakan pada akhir tahun perencanaan (tahun 2030) adalah sebesar 186,73 liter/detik. Pada saat ini kapasitas produksi PDAM baru mencapai 157,5 liter/detik, berarti hingga tahun 2030 diperlukan tambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada tahun-tahun yang akan datang agar kebutuhan akan air bersih dapat ditangani yaitu dengan mencari sumber-sumber air bersih untuk mendukung agar pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berkembang dengan baik.

Saat ini terdapat 3 lokasi Sumber Pengolahan Air Minum (SPAM) yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih aktif beroperasi, yakni :

1. SPAM Manna; debit air 70 liter/detik, melayani 2.712 sambungan
2. SPAM Seginim; debit air 10 liter/detik, melayani 425 sambungan
3. SPAM Kedurang, debit air 5 liter/detik, melayani 420 sambungan

Wilayah yang sudah terlayani jaringan PDAM di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah wilayah perkotaan (Manna, Pasar Manna dan Kota Manna) dan wilayah di Kecamatan Kedurang serta Air Nipis. Sementara wilayah lain yang belum terlayani oleh PDAM sumber air bersihnya berasal dari air sumur.

Rencana pengembangan sumber daya air ke depan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Kemampuan intake harus ditambah dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada dan masih dapat diandalkan tetapi harus disertai dengan pengelolaan daerah hulu yang benar agar beban dan biaya pengolahan air menjadi kecil
- Kapasitas produksi pengolahan air perlu dikembangkan sesuai dan bersamaan dengan penambahan kemampuan sistem transmisi.
- Pembuatan instalasi pengolahan air regional yang akan dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memanfaatkan sumber mata air (air terjun).

Adapun perkiraan kebutuhan air bersih untuk penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Sarana	Standar Keb. Air Bersih (ltr/unit/ hari)	2015		2020		2025		2030	
			Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)
1	Sarana Pendidikan									
	TK	300	158	47400	172	51600	187	56100	204	61200
	SD	1000	26	26000	29	29000	31	31000	34	34000
	SLTP	1500	6	9000	7	10500	7	10500	8	12000
	SLTA	1500	5	7500	6	9000	6	9000	7	10500
	Perguruan Tinggi	1500	2	3000	2	3000	3	4500	3	4500
2	Sarana Kesehatan									
	Rumah Sakit	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000
	Puskesmas	1500	1	1500	1	1500	2	3000	2	3000
	BKIA + RS Bersalin	1000	5	5000	6	6000	6	6000	7	7000
	Balai Pengobatan	300	53	15900	57	17100	62	18600	68	20400
3	Sarana Peribadatan									
	Masjid Agung	5000	5	25000	6	30000	6	30000	7	35000
	Mushola	300	634	190200	689	206700	750	225000	816	244800
4	Sarana Perdagangan Pasar	5000	5	25000	6	30000	6	30000	7	35000
5	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum									
	Pos Polisi	100	21	2100	23	2300	25	2500	27	2700
	Kantor Kelurahan/Desa	300	21	6300	23	6900	25	7500	27	8100
	Pemadam Kebakaran	1000	2	2000	2	2000	2	2000	2	2000
	Kantor Pos	1000	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000
	Kantor Polisi	1000	5	5000	6	6000	6	6000	7	7000
	Kantor Kecamatan	1000	3	3000	3	3000	4	4000	4	4000

No	Jenis Sarana	Standar Keb. Air Bersih (ltr/unit/ hari)	2015		2020		2025		2030	
			Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)	Jml Fas. (unit)	Keb. (ltr/hari)
	Kantor Telkom	1000	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000
	Kantor PLN	1000	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000
	Kantor PDAM	1000	8	8000	9	9000	9	9000	10	10000
	Kuburan	100	1	100	1	100	2	200	2	200
6	Sarana Kebudayaan dan Rekreasi									
	Gedung Bioskop	1000	8	8000	9	9000	9	9000	10	10000
	Gedung Serbaguna	1000	8	8000	9	9000	9	9000	10	10000
	Gedung Kesenian	1000	8	8000	9	9000	9	9000	10	10000
	Perpustakaan	1000	8	8000	9	9000	9	9000	10	10000
7	Sarana Olahraga dan Kaw.Terbuka									
	Taman Lingkungan	100	63	6300	69	6900	75	7500	82	8200
	Taman Kecamatan	1000	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000
	Lapangan Olahraga	10000	8	80000	9	90000	9	90000	10	100000
8	Perumahan									
	Tipe A (54–200 m^2)	300	19009	5702700	20681	6204300	22499	6749700	24478	7343400
	Tipe B (200–600 m^2)	300	9504	2851200	10340	3102000	11250	3375000	12239	3671700
	Tipe C (600–2.000 m^2)	300	3168	950400	3447	1034100	3750	1125000	4080	1224000
9	Kebutuhan Air Bersih			10018600		10911000		11856100		12906700
10	Kebocoran (15%)	15%		1502790		1636650		1778415		1936005
11	Cadangan (10%)	10%		1001860		1091100		1185610		1290670
Total Keb. Air Bersih (Lt/hr)				12523250		13638750		14820125		16133375
Total Keb. Air Bersih (Lt/detik)				144.95		157.86		171.53		186.73

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011

2. Jaringan Irigasi

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah pertanian sehingga di Kabupaten Bengkulu Selatan banyak terdapat jaringan irigasi baik berupa jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi non teknis. Jaringan irigasi teknis terutama terdapat di wilayah yang merupakan sentra pertanian seperti di Kecamatan Seginim, Pino, Air Nipis dan Kecamatan Kedurang.

Dari seluruh jaringan irigasi yang ada, jaringan/saluran irigasi teknis yang utama yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 4 saluran, yakni :

a. Bendungan Air Endelengau Ganjuah di Kecamatan Pino
b. Bendungan Nipis Kanan di Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim
c. Bendungan Nipis Kiri di Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim
d. Bendungan Selebang di Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Pengelolaan Sampah

Penanganan terhadap sampah memerlukan penelitian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, serta dampak yang akan ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi suatu wilayah.

Secara garis besar pengelolaan sampah dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pemilahan; dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik di TPS sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
b. Pengolahan: dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk penanganan sampah organik
c. Pengumpulan: sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/tarik, truk, motor gerobak
d. Pengangkutan; dari TPS diangkat dengan truk menuju Tempat Pembuangan sampah akhir (TPA) Pagar Dewa.
e. Pembuangan akhir; sampah dari TPS dikumpulkan dan dibawa ke TPA Pagar Dewa dimana nantinya sampah-sampah organik akan diolah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan controlled landfill.

Berikut beberapa asumsi dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung timbulan sampah dan kebutuhan TPS serta TPA:

a. Timbulan sampah domestik: 2 liter/orang/hari domestik
b. Setiap kab/kota membutuhkan minimal 1 TPA dan TPA Terpadu
c. Setiap kecamatan membutuhkan minimal 1 TPS (25 m2).

Rencana pengelolaan persampahan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

a. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang dan pemilahan sampah organik dan anorganik dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun yang akan dikembangkan
b. Pengembangan pola pelayanan
c. Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak seperti TPS, container, truk dan TPA
    - Pewadahan

      Pengadaan wadah penampungan sampah di sumbernya dilakukan oleh masyarakat yang bentuk dan volumenya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
    - Pengumpulan

      Jenis peralatan pengumpulan sampah yang direncanakan terdiri dari 3 jenis yaitu gerobak tarik, gerobak motor dan dump truck
    - Pemindahan

      Jenis peralatan pemindahan sampah yang direncanakan yaitu: transfer depo, container, bak sampah
    - Pengangkutan

      Jenis peralatan untuk pengangkutan sampah yaitu ; dump truck, arm roll truck
    - Tempat Pembuangan Akhir

      Pada saat ini, Pemerintah Bengkulu Selatan memprakarsai pembangunan tempat pembuangan akhir sampah yang berlokasi di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nama TPA Pagar Dewa dengan luas kurang lebih 4 Ha (sumber: Kantor Lingkungan Hidup, Kab. Bengsel). Jarak lokasi TPA Pagar Dewa dengan kegiatan sekitarnya:
        - Dari Perumnas Pagar Dewa: kurang lebih 770 meter
        - Dari korp bata (tempat pembuatan batu bata) : kurang lebih 600 meter
        - Dari Kota Manna : kurang lebih 3 km

Di TPA tersebut juga akan dibangun pusat daur ulang sampah yang terdiri dari proses komposting dan proses pemanfaatan barang-barang bekas yang masih digunakan. Pengelolaan sampah di TPA Pagar Dewa direncanakan dengan sistem *Controlled Landfill*.

C. Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan rencana distribusi peruntukkan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi sbb :

a. Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial
b. Ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten
c. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukkan ruang
d. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan
e. Sebagai dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dirumuskan berdasarkan :

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, penataan kawasan hutan, dll
c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, perkembangan tata guna lahan, kesesuaian lahan dan penataan kawasan hutan di wilayah ini.

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut:

- Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan
- Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia.

Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu (dalam RTRWP Bengkulu), kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun taman nasional yang mengacu pada peraturan menteri kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, saat ini telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan maupun perubahan fungsi ruang yang ada saat ini merupakan kawasan lindung, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas oleh pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi 175 mm
- Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan 40% atau lebih
- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 m dpl atau lebih

Berdasarkan data yang ada, wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Hutan Lindung Bukit Sanggul, Hutan Lindung Rajamandara dan Hutan Lindung Bukit Riki.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan tehadap Kawasan Bawahannya

Kawasan Resapan Air

Hutan lindung dan kawasan dengan kelas lereng di atas 40% merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Seperti yang telah di bahas sebelumnya, di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat tiga kawasan lindung yaitu HL Bukit Sanggul, HL Rajamandara dan HL Bukit Riki.

Fakta lapangan menggambarkan bahwa sebagian kawasan ini berada dalam kondisi dengan bukaan vegetasi yang cukup luas dan tanaman kopi. Hasil superimpose peta kelas lereng diatas 40% dengan peta rawan longsor menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan tersebut merupakan kawasan rawan longsor. Mengingat ancaman bencana alam di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak saja dari potensi longsor namun juga rawan gempa, maka untuk menghindari bencana yang lebih besar, seluruh kawasan yang berada pada kelerengan diatas 40% seyogyanya harus dipulihkan melalui penanaman tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Rencana pengelolaan kawasan diatas 40% ini adalah dengan melakukan reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan lainnya.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiik pantai dan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai (Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung). Adapun rencana pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Sempadan pantai kawasan non permukiman, dipertahankan (100 meter dari titik pasang) dengan menanami tanaman sebagai vegetasi penahan abrasi dengan memperhatikan aspek estetika.
- Sempadan pantai kawasan permukiman, agar dibuat tanggul pencegah abrasi

Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kriteria jalur sempadan sungai adalah:

a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil /anak sungai yang tidak bertanggul di luar kawasan permukiman.
b. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inpeksi antara 10 - 15 meter.

Adapun rencana pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

a. Garis sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman yang sudah ada, minimal 15 meter dari titik pasang tertinggi di kiri dan kanan sungai. Pada kawasan ini hendaknya dibuat jalan inspeksi atau ditanami vegetasi untuk memberikan penguatan tanah
b. Garis sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman yang terencana hendaknya berjarak 15-25 meter dari titik pasang tertinggi di sepanjang kiri dan kanan sungai
c. Garis sempadan sungai yang melewati luar kawasan permukiman dan di areal rawan banjir hendaknya berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi di kiri dan kanan sungai. Kawasan sungai hendaknya ditanami vegetasi untuk memberikan penguatan tanah

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kelompok kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terdiri atas taman wisata alam. Tujuan perlindungan terhadap taman wisata alam adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Taman wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Taman Wisata Alam Lubuk Tapi – Kayu Ajaran dengan luas areal seluas kurang lebih 5,50 Ha yang berada di Kecamatan Ulu Manna.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana dapat dibagi atas:

- Kawasan Pusat Gempa
- Kawasan Potensi Tsunami
- Kawasan pengaruh Kegempaan (Zona Seismik)
- Kawasan Rawan Banjir
- Kawasan Gerakan Tanah dan batuan/kawasan rawan erosi dan tanah longsor

Kawasan Rawan Gempa Bumi

Seperti halnya wilayah di Provinsi Bengkulu, wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan juga adalah kawasan yang rawan terhadap gempa bumi. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Tercatat lebih dari 500 titik pusat gempa dengan magnitude lebih dari 5 skala ritcher di sekitar Kabupaten Bengkulu Selatan yang tersebar di Samudera Indonesia (Hindia) dan sesar mendatar Sumatera yang berpotensi menjadi sumber gempa bumi.

Berdasarkan RTRWP Bengkulu, kawasan rawan gempa bumi ini dibagi kedalam 3 zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona daerah bahaya ini didasarkan kepada:

- Zona Rawan Rendah berada di daerah dengan litologi yang bersifat fisik kompak/massif dan mempunyai nilai percepatan dan pemindahan relative kecil
- Zona Rawan Menengah, resiko yang terjadi berhubungan dengan alur erosi dan longsoran selama gempa dan rayapan tanah setelah gempa, terjadi pada lereng yang kemiringan lebih besar dari 15%.
- Zona Rawan Tinggi, didasari oleh endapan alluvium, endapan pasir pantai, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (liquefaction) apabila terjadi gempa.

Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan pada Khususnya potensi gempa yang terjadi masuk kedalam zona rawan gempa bumi rendah, kecuali wilayah di bagian timur laut

Bengkulu Selatan (wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia) termasuk zona rawan gempa bumi tinggi yang bisa berpotensi menjadi tsunami.

Tahun	Skala Gempa				Total
	M > 7 SR	M = 6,0-6,9 SR	M =5,0-5,9 SR	M < 5 SR	
2005	0	0	5	0	5
2006	0	0	13	35	48
2007	2	2	36	6	46
2008	0	2	10	221	234
2009	0	1	29	254	274
2010*	0	1	5	261	267

Kawasan Rawan Banjir

Di kawasan Bengkulu Selatan juga terdapat kawasan rawan banjir, yaitu di sekitar Air Manna yang saat ini telah berkembang menjadi kawasan permukiman.

Untuk menanggulangi banjir, maka pada daerah-daerah rawan banjir, diperlukan berbagai upaya penanggulangan yang dibagi kedalam dua program sebagai berikut:

Program Jangka panjang:

- Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
- Dalam upaya penanggulangan banjir diperlukan ada koordinasi antara instansi yang terkait dalam perencanaan dan pengelolaan DAS dan wilayah sungai kawasan perkotaan secara terpadu.
- Memelihara kawasan hutan yang menjadi penyanggah banjir.

Program Jangka Pendek:

- Identifikasi lokasi rawan banjir dan penyebab terjadinya banjir untuk mendapatkan solusi mengatasi banjir.
- Pengaturan dan perbaikan daerah-daerah rawan banjir banjir
- Perbaikan lewat rekayasa teknis misalnya talud, sarana penampungan air, dan peningkatan fungsi drainase perkotaan.

Kawasan Rawan Erosi dan Tanah Longsor

Selain gempa bumi dan banjir, kondisi topografi yang berbukit sampai pegunungan mengkondisikan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan juga rawan terhadap bencana tanah longsor. Kawasan yang memiliki potensi rawan longsor adalah Kecamatan Pino Raya, Ulu Manna dan Kecamatan Kedurang Ilir. Untuk mengatasi potensi longsor tersebut, perlu dilakukan perencanaan antara lain:

- Pemetaan lokasi yang potensial terhadap gerakan tanah/batuan
- Setelah mengetahui lokasi atau titik rawan gerakan tanah/batuan, maka dilakukan pencegahan yang dibagi menjadi pembangunan struktur sebagai program jangka pendek
- Perbaikan kawasan yang telah mengalami degradasi hutan sebagai program jangka panjang
- Pengaturan pemanfaatan lahan terutama pada wilayah yang berlereng terjal umumnya di atas 40 %.

6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain;

a. Ruang Terbuka Hijau Publik
   - Taman kota kurang lebih 23 hektar
   - Tempat pemakaman umum kurang lebih 25 hektar
   - Sepadan sungai 73 hektar
   - Sepadan pantai kurang lebih 150 hektar
   - jalur hijau sepanjang jalan kurang lebih 27 hektar.

b. Ruang Terbuka Hijau Privat sebagai berikut :
   - Halaman rumah kurang lebih 635 hektar
   - Kebun kurang lebih 915 hektar

<u>Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya</u>

Kawasan budidaya merupakan ruang untuk berbagai macam kegiatan eksploitasi guna kelangsungan hidup manusia dan kepentingan daerah, yang diharapkan mampu memacu perkembangan wilayah kabupaten yang bersangkutan. Kegiatan pada kawasan ini perlu diatur pemanfaatannya oleh karena kondisi fisik masing-masing wilayah/kawasan berbeda-beda dan memiliki sifat khusus yang berbeda-beda pula. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang berbeda antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Kegiatan pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Dalam rencana kawasan budidaya, ruang bagi kawasan hutan produksi dibedakan atas:

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Berdasarkan data yang ada, wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah HPT Bukit Rabang, HPT Peraduan Tinggi dan HPT Air Kedurang. Berdasarkan RTRWP Bengkulu, di kawasan Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini terdapat kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang mengajukan usulan perubahan (alih fungsi) lahan menjadi Tahura Gluguran seluas 400 Ha.

Peruntukan Hutan Produksi Tetap

Dalam jangka panjang, kawasan hutan produksi ini diarahkan untuk menstabilkan bahan baku industri yang berasal dari hutan produksi alam, meningkatkan produksi bahan baku yang berasal dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan melibatkan masyarakat lokal. Kawasan hutan produksi tetap (umumnya hanya disebut sebagai hutan produksi, HP) di Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup areal seluas kurang lebih 14.008 Ha. Kawasan HP dijumpai di Kecamatan Manna dengan nama HP Air Bengkenang.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Secara umum, sehubungan dengan pengembangan potensi sumberdaya wilayah untuk sektor pertanian, keragaman sifat lahan akan sangat menentukan jenis komoditas yang dapat diusahakan serta tingkat produktivitasnya. Hal ini disebabkan setiap jenis komoditas pertanian memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Pengembangan komoditas pertanian pada wilayah yang sesuai dengan persyaratan pedo-agroklimat tanaman (seperti iklim, tanah, dan topografi) akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas prima. Keragaman sifat lahan ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pewilayahan komoditas (zonasi ruang) pertanian. Perencanaan pembangunan pertanian yang berdasarkan pewilayahan akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, serta menjamin efektifitas perencanaan yang sinergis dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui suatu analisis kesesuaian lahan.

Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kegiatan pertanian lahan basah adalah kegiatan pertanian yang memerlukan air terus menerus sepanjang tahun, dengan komoditi utamanya adalah padi sawah. Dari analisis yang dilakukan sebelumnya didapatkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah meliputi area seluas kurang lebih 19.666 Ha. Kawasan lahan yang sesuai dan sangat sesuai ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu di Kecamatan Pino, Pino Raya, Kedurang, Seginim dan Air Nipis

Rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan pertanian lahan basah yang perlu dilakukan adalah:

- Perluasan areal persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas “lahan tidur”, baik melalui pompanisasi maupun melalui cekdam (bendungan) baru.
- Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah
- Pencanangan dan penetapan lahan-lahan kategori kelas I untuk dijadikan ”Lahan Pertanian Abadi”

- Pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru dikembangkan untuk petani-petani transmigrasi lokal

Kawasan Pertanian Lahan Kering

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk pengembangan pertanian lahan kering meliputi area seluas kurang lebih 61.867 Ha yaitu berada di Kecamatan Pino, Ulu Manna, Pino Raya dan Kedurang. Rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan pertanian lahan kering yang perlu dilakukan adalah:

- Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang diklasifikasikan sebagai lahan subur kelas satu. Perlu pengembangan konsep 'lahan pertanian abadi' untuk lahan subur kelas satu, baik untuk lahan kering maupun lahan basah
- Penyelesaian tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya pada suatu kawasan/lokasi
- Usaha penanggulangan banjir yang berpotensi melanda kawasan pertanian.
- Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada komoditas jagung sebagai andalan utama, dan untuk kepentingan diversifikasi juga dikembangkan hortikultura
- Untuk diversifikasi, diperlukan metode tumpangsari bagi komoditas-komoditas yang secara komposit sesuai dikembangkan
- Menerapkan sistem usaha tani konservasi terutama pada lahan-lahan dengan potensi erosi tinggi untuk menghindari degradasi lahan.

3. Kawasan Peruntukkan Perkebunan

Lahan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat kurang lebih sekitar 514 Ha. Berdasarkan survei lapangan dan analisis data, terdapat empat komoditas perkebunan yang dianggap unggul dan perlu untuk dikembangkan, yakni kelapa sawit, kopi, kelapa, dan kakao. Potensi pengusahaan komoditas unggulan perkebunan tersebut cukup besar, dan dapat dikembangkan di hampir semua bagian wilayah di Bengkulu Selatan.

4. Kawasan Peruntukkan Perikanan

Budidaya Perikanan Pesisir

Pengembangan kawasan perikanan di pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilakukan pada bentangan pantai sepanjang 70 km. Potensi kawasan perikanan ini dapat dimanfaatkan terutama sebagai lokasi marikultur, baik untuk areal budidaya rumput laut maupun budidaya ikan-ikan laut (kakap, baronang, kerapu). Demikian pula pengembangan pertambakan juga memiliki prospek yang baik namun belum sama sekali tambak yang memenuhi persyaratan teknis.

Selain itu, kewenangan Kab. Bengkulu Selatan di wilayah laut (menurut UU No. 32/2004) sebesar 1/3 dari kewenangan Provinsi Bengkulu (12 mil-laut), yaitu sebesar 4 mil-laut menjadi potensi kawasan perairan yang dapat dijadikan kawasan perikanan tangkap (coastal fisheries).

Namun demikian, produktifitas perikanan pesisir (pantai) sangat bergantung pada tingkat kesuburan eksositem-ekosistem penunjang terutama mangrove, lamun dan terumbu karang. Kawasan mangrove menunjang produktifitas perikanan terutama dalam hal penyedian bahan-bahan organik (serasa vegetasi) bagi biota laut. Kawasan padang lamun, selain berkemampuan untuk menghasilkan biomas vegetal, juga berfungsi sebagai areal asuh bagi biota-biota laut (ikan, krustasea, moluska, ekinodermata). Demikian pula kawasan terumbu karang menunjang produktifitas perikanan, terutama dalam hal penyedian attractive area yang berfungsi sebagai penyuplai makanan dan proteksi biota vulnerabel dari pemangsaan. Oleh karena itu, gambaran produktifitas perikanan pesisir tercermin oleh tingkat 'kesuburan' ekosistem-ekosistem penunjang.

Isu utama yang berkaitan dengan pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan adalah keterbatasan areal. Luasan ini harus menjadi wadah bagi semua kegiatan di wilayah laut seperti pelayaran, kepelabuhanan, perikanan budidaya (marikultur), perikanan tangkap dan konservasi dan suaka alam laut. Dalam desain perencanaan pengelolaan terpadu wilayah pesisir (Integreted Coastal Zone Planning and Management) sektor perikanan bukan satu-satunya kegiatan yang menempati kawasan pesisir tersebut. Oleh karena itu, alokasi ruang (spasial) untuk kawasan perikanan budidaya dan penangkapan harus disepakati oleh seluruh stake holder yang dituangkan dalam zoning regulation.

Alokasi ruang yang diperuntukan bagi kawasan perikanan pesisir menjadi informasi penting dalam menetapkan strategi pengembangan perikanan pesisir. Pengembangan kawasan perikanan budidaya diarahkan pada marikultur (budidaya rumput laut dan ikan), sedangkan pengembangan tambak seyogianya dibatasi dan tidak dibangun di areal hutan mangrove.

Selanjutnya, pengembangan kawasan perikanan tangkap lebih diarahkan pada penata-kelolaan daerah penangkapan di wilayah perairan pantai (coastal waters). Berdasarkan kategori ruang, wilayah perikanan pantai untuk daerah penangkapan terbentang dari garis pantai ke arah luar hingga kedalam ± 200 m (flat kontinen). Berdasarkan kondisi topografi dan bathimetrik, pesisir selatan memiliki flat kontinen yang relatif sempit, diperkiran kurang 4 mil-laut. Kawasan flat kontinen ini merupakan lokasi 'hunting' bagi nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Rencana pengembangan kawasan perikanan pesisir dalam konteks ICZPM:

- Mengembangkan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk menetapkan ruang untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- Mengembangkan perencanaan detail perikanan budidaya (tingkat kawasan, dengan skala > 1 : 50.000) yang menggambarkan potensi lahan (tambak, KJA, areal rumput-laut) melalui analisis kesesuaian lahan pertambakan;
- Mengembangkan sub-sistem perikanan budidaya, seperti pembangunan panti-panti pembenihan ikan laut, dan pembangunan pabrik pakan dari bahan baku lokal;
- Mengembangkan kelembagaan yang menunjang sistem informasi perikanan bagi keperluan pembudidaya dan nelayan, sistem pendidikan dan latihan dan sistem pendanaan usaha;
- Mengembangkan sistem fish aggregate divice (rumpon, terumbu buatan) untuk menyediakan daerah penangkapan yang aksesibel;
- Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (pelabuhan/TPI, armada penangkapan, pabrik es, penyalur BBM)

Budidaya Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap yang berada sebelah luar perairan pantai biasanya dikategorikan sebagai kawasan pengembangan perikanan oseanik. Karakterisitik

stok ikan yang mobil dan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, terutama ikan-ikan pelagis. Sehingga, stok ril yang menjadi kewenangan setiap daerah hanya stok ikan-ikan demersal dan ikan-ikan karang yang bermobilitas terbatas. Belum ada informasi rinci mengenai potensi stok ikan-ikan karang dan demersal yang berada di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan.

Oleh karena itu, model pengelolaan perikanan di kawasan Bengkulu Selatan harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut. Demikian juga kewenangan pengelolaan kawasan perairan setiap kabupaten sebesar 4 mil-laut direncanakan secara konseptual (berdasarkan pertimbangan ilmiah) dan realistik (berdasarkan prioritas dan kepentingan masyarakat atau dan pemerintah).

Isu utama pengelolaan kawasan perairan pesisir (khususnya < 4 mil-laut) adalah kondisi lebih tangkap (over-fishing). Keadaan lebih-tangkap ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu penggunaan upaya penangkapan (fishing effort) berlebihan yang terkonsentrasi di kawasan perairan tersebut dan penggunaan alat dan metode penangkapan ikan yang tidak ramah-lingkungan. Gejalah-gejalah lebih-tangkap di kawasan perairan pantai dapat teridentifikasi dari data runtun-waktu (time series), berupa: (1) menurunnya jumlah hasil tangkapan persatuan upaya (Catch Per Unit Effort, CPUE) dan (2) menurunnya ukuran rata-rata ikan yang tertangkap. Olehkarena itu, kebijakan perikanan tangkap adalah mengendalikan fishing effort di perairan pantai (<4 mil-laut) dan mengembangkan armada penangkapan yang berdaya jelajah tinggi untuk dapat beroperasi di wilayah periaran sebelah luar (> 4 mil-laut), misalnya armada berukuran 50 GT.

Berdasarkan uraian fakta dan analisis kondisi kawasan perikanan di Pasar Manna, maka rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di wilayah laut 'sebelah-luar' diarahkan untuk:

- Pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi, seperti kapal perikanan 50 GT yang dapat mengoperasikan alat tangkap lepas pantai (huhate, rawai-tuna, jaring insang,)
- Pengembangan prasarana penangkapan seperti TPI atau pelabuhan perikanan, pabrik es;

- Pengembangan kelembagaan nelayan untuk keperluan diklat, penata-kelolaan dana dan permodalan, penata-kelolaan sarana penangkapan seperti BBM, material alat tangkap.

5. Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN).

- Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.
- Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah:
    a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
    b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
    c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
    d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
    e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
    f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka

menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusakan sebagaian luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
b. Sumber devisa negara;
c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
e. Daya dukung lingkungan; dan/atau
f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Sebagian wilayah di Bengkulu Selatan merupakan rencana usaha pertambangan, karena mempunyai bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi. Arahan pengembangan dan pengelolaan pertambangan ke depannya diarahkan harus memperhatikan aspek pengelolaaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat serta ketentuan-ketantuan dalam aspek pertambangan.

6. Kawasan Peruntukkan Industri

Di Bengkulu Selatan hanya ada indusri kecil dengan jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Mengingat semakin terbatasnya luas lahan untuk kegiatan usaha pertanian serta perlunya peningkatan SDM masyarakat, maka kegiatan industri yang berbasis agro perlu didorong pertumbuhannya. Oleh karena itu industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan perlu mendapat prioritas utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Agroindustri sebaiknya dikembangkan di sekitar Pino dan Pino Raya dan pengolahan ikan laut di Pasar Manna. Kegiatan industri yang dikembangkan dapat saja berupa industri kecil sampai sedang namun tetap berupa industri ramah lingkungan dan non polutan.

7. Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Berbagai jenis kawasan pariwisata yang ada dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian dari suatu sistem kesatuan kepariwisataan secara keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu . Secara umum, potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi: (i) wisata alam bahari; (ii) wisata alam hutan; dan (iii) wisata sejarah dan budaya. Karena daya tariknya masing-masing yang unik, semua jenis wisata tersebut dapat dikembangkan di wilayah ini.

Peruntukkan Pariwisata Budaya

Obyek wisata budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Meriam Anak Jina di Desa Palak Bengkerung di Kecamatan Air Nipis, Meriam Honey Sweet Horizon di Kelurahan Belakang gedung Pasar Manna, Bunker Kelurahan Belakang gedung Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna, Batu Golmen di Kecamatan Pino, Batu Tapak Kaki Kambing Hutan di Desa Batu Aji Kecamatan Ulu Manna, Patilasan Pertapaan Gajah Mada di Dusun Tingi, Kecamatan Air Nipis.

Peruntukkan Pariwisata Alam

- Wisata Alam Bahari

  Kawasan wisata bahari merupakan kawasan di daerah pantai yang diperuntukkan untuk melakukan aktivitas wisata mulai dari fenomena alam yang dimiliki, budaya dan kehidupan sosial masyarakat pesisir, biota laut dan habitat laut serta kualitas perairan. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki arena yang cukup luas untuk wisata bahari. Kawasan wisata bahari di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pantai Wisata Pasar Bawah di Kecamatan Pasar Manna.

- Wisata Air Terjun

  Air Terjun Geluguran di Desa Batu Aji, Kecamatan Ulu Manna dan Air Terjun Tiga Tingkat di Batu Aji, Kecamatan Ulu Manna.

8. Kawasan Peruntukkan Permukiman

Berdasarkan cakupan wilayah menurut fungsi dan kegiatannya, kawasan permukiman di Kabupaten Bengkulu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan.

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan pada umumnya berada di wilayah yang telah berkembang dan dengan pola mengikuti jaringan jalan yang telah ada, pusat-pusat pelayanan, dan pemukiman yang telah lama ada dan tumbuh. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Manna, Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna dan di ibukota kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Permukiman perkotaan diarahkan untuk mengisi kawasan belum terbangun di ibukota kecamatan terutama pada pusat-pusat wilayah pembangunan
- Pengarahan pemanfaatan ruang perkotaan ditinjau agar struktur ruang linier disetiap ibukota kecamatan diubah menjadi struktur ruang konsentris yang lebih terpadu dan kompak
- Secara bertahap agar dilakukan penyusunan RTR Kawasan ibukota kecamatan untuk seluruh ibukota kecamatan dan penyusunan RDTRK untuk ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan pembangunan, dan penyusunan RTRK untuk ibukota kecamatan yang mempunyai perkembangan perkotaan yang pesat.
- Pengembangan kawasan permukiman untuk menunjang kawasan pertanian, agro-industri dan lain-lain
- Peningkatan sarana dan prasarana permukiman, terutama sarana sosial, air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi.

Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang pemanfaatan ruangnya didominasi oleh kegiatan utama pertanian, bukan perkotaan dan memiliki homogenitas dalam kegiatan usaha ekonominya. terkonsentrasi pada wilayah-wilayah berkembang dan pada umumnya terletak di sekitar wilayah pertanian. Di kabupaten Bengkulu Selatan kawasan permukiman pedesaan berada di desa yang ada di 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Bunga Mas, Kedurang, Kedurang Ilir, Seginim, Air Nipis, Pino, Ulu Manna dan Kecamatan Pino Raya.

Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman secara terpadu dengan kegiatan ekonomi antara lain pertanian, peternakan, dan perikanan dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan diusahakan agar hanya memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif. Rencana pengembangan kawasan pemukiman pedesaan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

- Lebih mengkonsentrasikan pemukiman pedesaan pada kelompok pemukiman perkampungan yang sudah ada, agar tidak terjadi penyebaran pemukiman secara sporadik yang mengakibatkan penggunaan lahan dan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efisien.
- Pengembangan desa pusat pertumbuhan
- Peningkatan aksesibilitas antara kawasan pemukiman dengan kawasan pertanian
- Peningkatan sarana dan prasarana permukiman untuk mengantisipasi perkembangan kawasan terbangun/permukiman sebagai implikasi dari pembangunan jalan pantai utara, yang tentu akan merangsang perkembangan disekitarnya karena aksesibilitasnya yang tinggi, maka kawasan terbangun pemukiman perlu diarahkan agar perkembangannya tidak sporadik.

Rencana pengembangan kawasan pemukiman baik perdesaan dan perkotaan adalah berdasarkan standar kecukupan dan kelayakan ruang. Kecukupan dan kelayakan jumlah unit perumahan didasarkan pada asumsi bahwa satu keluarga (yang di Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata terdiri dari 5 jiwa) menempati satu unit rumah Dengan menggunakan asumsi Kavling Kecil : Kavling Sedang : Kavling Besar adalah 6 : 3 : 1, dengan masing-masing ukuran tanah 300 : 600 : 900 m2. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan proyeksi penduduk 203.981 jiwa diakhir tahun perencanaan 2030, membutuhkan setidaknya 24.478 unit rumah kavling kecil, 12.239 unit rumah kavling sedang, dan 4.080 unit kavling besar. Luas areal yang dibutuhkan untuk pengembangan areal permukiman baru secara kasar diperoleh dari selisih angka total yang dibutuhkan luas lahan yang sekarang ini ada untuk pemukiman. Luas lahan

total harus juga memperhitungkan areal terbuka, fasilitas sosial ekonomi, jalan, dan kondisi wilayah yang ada.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah kawasan militer seluas 3.317 Ha. Rencana pengembangan kawasan militer di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pembangunan koramil di Kecamatan Ulu Manna dan di Kelutum, Kecamatan Pino.

Tabel II-123. Rencana Pola Ruang Berdasarkan Klasifikasi Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan 2030

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (kurang lebih)	(%)
Hutan Lindung	23.064	19,75
Hutan Produksi Terbatas	6.406	5,48
Hutan Produksi	14.008	11,99
Permukiman	5.504	4,71
Pertanian Lahan Basah	11.046	9,46
Pertanian Lahan Kering	6.028	5,16
Tanaman Tahunan	24.091	20,63
Perkebunan	20.346	17,42
Industri	291	0,24
Sempadan Sungai	296	0,25
Sempadan Pantai	2.400	2,05
Kawasan pertahanan	3.317	2,84
Total :	**116.797**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011

D. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan

Lokasi dan Jenis Kawasan Strategis Kabupaten

Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terdapat Kawasan Strategis Nasional (KSN) maupun kawasan strategis provinsi, sehingga di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terdapat kawasan strategis kabupaten. Pertimbangan utama dalam penentuan kawasan strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

- Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (regional atau bahkan nasional).
- Berpotensi geografis, namun pengembangan sarana dan prasarana membutuhkan investasi yang besar.
- Prospek ekonomi wilayah sangat cerah, karena ditunjang oleh sumberdaya alam yang sangat memadai.
- Pengembangannya dapat memacu wilayah-wilayah sekitarnya (termasuk hinterland) yang agak terbelakang pembangunannya
- Sektor yang akan diakomodasikan (diunggulkan) mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup kabupaten.
- Adanya minat dan ketertarikan investasi swasta dan pemerintah yang cukup tinggi.
- Terbukanya peluang baru akibat pemekaran wilayah.

1. Kawasan Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan

Dilihat dari penetapan jenis-jenis kawasan strategis serta pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan kawasan strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan seperti yang diuaraikan diatas, kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terdiri dari kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yakni kawasan strategis perkotaan dan kawasan strategis perdesaan.

Kawasan Strategis Perkotaan

Merupakan kawasan yang meliputi kecamatan Kota Manna, Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Manna. Pembangunan kawasan Strategis ini adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi atara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (social system), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (ecosystem). Didalam Kawasan Strategis Perkotaan, terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dibangun berdasarkan basis sektor yang ada, sesuai dengan kondisi dan potensi lahan dan ekosistem Kabupaten Bengkulu selatan. Ada 7 (tujuh) jenis kegiatan unggulan yang diusulkan dalam Kawasan Strategis Perkotaan ini. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perdagangan dan Jasa, suatu kegiatan yang dikembangkan berbasiskan pada perdagangan dan jasa untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja di daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan pemerintah daerah ditetapkan di ruas Jalan Sudirman; Jalan Ahmad Yani; Jalan Kolonel Berlian; Jalan Tukiran; Jalan Sersan M. Taha; Sebagian kawasan jalan Kemas Jamaludin; Jalan Trip Kastalani; Jalan Duayu; Jalan Iskandar Baksir; Sekitar kawasan simpang tiga kayu kunyit; Jalan Kartini; dan Sebagian jalan Affan Baksin
b. Kegiatan Industri Kecil, suatu kegiatan yang dikembangkan berbasiskan pada Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat ditetapkan di Kelurahan Pasar Bawah; Kelurahan Kota Medan; Kelurahan Tanjung Mulia; Kelurahan Belakang Gedung; Kelurahan Kayu Kunyit; Kelurahan Pasar Mulia; Desa Padang Gilang; Desa Jeranglah; dan Desa Ketaping
c. Kegiatan Kerajinan, suatu kegiatan yang dikembangkan berbasiskan pada industri kerajinan tangan (handmade), untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja di daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan pemerintah daerah ditetapkan di daerah Kelurahan Kota Medan; Kelurahan Tanjung Mulia; Kelurahan Kayu Kunyit; dan Kelurahan Pasar Mulia.
d. Kegiatan Pusat Pemerintahan ditetapkan di kawasan Padang Panjang Kecamatan Kota Manna
e. Kegiatan Permukiman Perkotaan ditetapkan di Pusat Kota di Kecamatan Pasar Manna; Pusat Kota di Kecamatan Kota Manna; Pusat Kota di Kecamatan Manna; Perumnas Ketaping di Kecamatan Manna; Perumnas Kayu Kunyit di Kecamatan Manna; Perumnas Pintu Langit di Kecamatan Kota Manna; Perumnas Pagar di Kecamatan Kota Manna; dan sekitar kawasan perdagangan.

Kawasan Strategis Perdesaan

Kawasan Strategis Perdesaan merupakan kawasan yang meliputi Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Pino, Kecamatan Seginim, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Kedurang, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Ulu Manna, dan Kecamatan Bunga Mas. Didalam Kawasan Strategis Perdesaan, terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dibangun berdasarkan basis sektor yang ada, sesuai dengan kondisi dan potensi lahan Kabupaten Bengkulu selatan. Ada 2 (dua) jenis kegiatan unggulan yang

diusulkan dalam Kawasan Strategis Perdesaan ini. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan agroindustri, suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan produksi-produksi kelapa dan kelapa sawit. Kegiatan agroindustri (sentra industri kelapa dan kelapa sawit) berada di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Pino.
b. Kegiatan agropolitan dan minapolitan, suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pertanian dan perikanan darat. Kegiatan agropolitan dan minapolitan berada di Kecamatan Seginim, Air Nipis, Kedurang dan Kedurang Ilir.

E. Arah Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dalam pola ruang.

Prioritas Pemanfaatan Ruang

Prioritas pemanfaatan ruang merupakan rangkaian program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang. Tujuan dari penetapan prioritas pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah agar terjaganya kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya, sehingga terjaganya konsistensi perkembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan strategi perkotaan provinsi dan nasional.

a. Prioritas Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya mewujudkan pemanfataan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang telah direncanakan, dimana langkah kegiatannya dapat berupa mempertahankan yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai peruntukannya ataupun memberikan fungsi lindung pada kawasan budidaya (misalnya hutan produksi atau perkebunan yang diberi fungsi lindung).

Dalam rangka perwujudan kawasan lindung diperlukan pengelolaan yang berdasarkan pada pertimbangan semua aspek yang terkait dengan tata ruang. Pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan lindung yang diprioritaskan perwujudannya adalah kawasan lindung yang berdekatan dan atau berbatasan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan.
2. Kawasan lindung dengan tipologi kawasan yang berpotensi dan atau memiliki "kekhasan alam" maka dipertahankan keberadaannya. Kawasan lindung tersebut meliputi:

   a. Kawasan Lindung Hutan

   Pelestarian Kawasan lindung hutan merupakan komponen yang penting dalam lingkup tata ruang, sehingga pengelolaannya (pengawasan dan pengendalian) di hutan lindung ini untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan cagar alam perlu menjadi prioritas. Berdasarkan Hal tersebut, maka pelestarian Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan cara :

   - Menambah dan memelihara keanekaragaman flora dan fauna.
   - Pembangunan pos-pos keamanan di sekitar kawasan lindung hutan yang berfungsi menjaga keamanan kawasan hutan.

   Sedangkan dalam upaya pemulihan fungsi kawasan lindung seperti kerusakan hutan lindung diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

   1) Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung
   2) Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung
   3) Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung
   4) Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat
   5) Rehabilitasi kawasan hutan lindung
   6) Penegakkan hukum pemberantasan pembalakan liar (illegal logging)
   7) Penerapan pola intensif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung
   8) Pengawasan dan pengamanan kawasan lindung
   9) Prioritasi penanganan kawasan hutan yang rusak sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampaknya

10) Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak
11) Pengembangan program pada hutan lindung
12) Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas
13) Pemantauan dan evaluasi.

F. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi kawasan rawan bencana longsor, banjir, gempa dan tsunami. Berdasarkan hal tersebut, perlu diprioritaskan pemanfaatan ruangnya. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

i. Inventarisasi potensi bahaya erosi yang berasal dari lahan pertanian, hutan produksi, pertambangan, dan guna lahan lainnya.
ii. Mengidentifikasi setiap bahaya bencana alam berdasarkan penyebab, persebaran geografis, ukuran dan kemungkinan frekuensi kemunculannya.
iii. Mengidentifikasi kemungkinan kerusakan fisik dan aktivitas yang paling rentan terhadap kerusakan akibat bencana.
iv. Mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi sosial ekonomi dari bencana.
v. Memberikan penilaian kerentanan sebagai aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif.
vi. Memberikan layanan konsultasi tentang mitigasi bencana yang berbasis masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik dan tindakan-tindakan dalam menanggulangi bencana.

Perwujudan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana

i. Mitigasi Rawan Bencana Tsunami

1. Program utama yang sebaiknya dilakukan dalam kerangka mitigasi tsunami adalah :
    1) Sosialisasi mengenai potensi bahaya tsunami di Kabupaten Bengkulu Selatan, melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan terhadap bahaya tsunami
    2) Pemasangan buoy (tsunami warning system) di perairan Kabupaten Bengkulu Selatan

3) Pembangunan bangunan pemecah gelombang di kawasan pesisir wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (terutama di kawasan padat penduduk ; Manna)
4) Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana tsunami Kabupaten Bengkulu Selatan.
5) Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tsunami.

2. Klasifikasi kawasan rawan bencana tsunami berdasarkan ketinggian kawasan diatas permukaan laut.
    1) Zona kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl
    2) Zona kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10-15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal
    3) Zona kerawanan rendah, yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15-30 m dpl dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
3. Peraturan zonasi yang berlaku untuk kawasan dengan tingkat kerawanan tsunami :
    1) Pada sempadan pantai tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan hunian.
    2) Pada sempadan pantai ditanami tanaman yang dapat mengurangi laju gelombang tsunami seperti cemara laut, mangrove, kelapa dalam dan tanaman sejenis ataupun perlindungan buatan.
    3) Pada kawasan tersebut disediakan escape road dan escape building yang diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kepadatan penduduk, system jaringan jalan, topografi dan bangunan lain di sekitarnya.
    4) Bangunan hunian dan bangunan fungsi lain dapat dibangun di luar sempadan pantai yang memenuhi syarat tahan gempa dan berupa rumah panggung dengan konstruksi yang mampu mengurangi gelombang tsunami.

5) Setiap pendirian bangunan harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang, sehingga setiap bangunan memenuhi syarat tahan gempa dan ramah tsunami (building code).
6) Kawasan rawan tsunami dapat dibudidayakan sebagai kawasan perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan kegiatan lain dengan intensitas bangunan (hunian maupun non hunian) secara terbatas (maksimal 30%).
7) Pada setiap kawasan berpenghuni (permukiman) ditempatkan papan informasi tentang tsunami, termasuk petunjuk jalur evakuasi (escape road) dan gedung penyelamat (escape building). Escape road dibuat tegak lurus terhadap pantai. Ecscape building mempunyai fungsi sebagai balai desa, ruang public dan sekaligus menjadi pusat informasi tentang bencana alam dan bagian dari bangunan berupa menara pemantauan.

4. Untuk klasifikasi kawasan dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi dilakukan mitigasi structural ataupun non structural. Pendekatan mitigasi bencana tsunami dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu :

Pendekatan Struktur (Fisik)

1) Metode Perlindungan Alami, dengan penanaman mangrove dan cemara laut, penguatan sand dune, pelestarian terumbu karang.
2) Metode Perlindungan Buatan :
   - Breakwater, tembok laut, tanggul, konstruksi pelindung, bangunan pengendali, rumah panggung
   - Mengembangkan terumbu karang
   - Struktur tahan bencana; sisi panjang dan struktur sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan antisipasi arah penjalaran gelombang, shear wall dan lateral bracing ditempatkan searah dengan penjalaran gelombang dan lantai terbawah dari bangunan dibuat terbuka.

Pendekatan Non Struktur (Non Fisik), seperti:

1) Pembuatan peta rawan bencana
2) Sistem peringatan dini
3) Penetapan sempadan pantai dan sungai (hulu-hilir)
4) Penegakan hukum
5) Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana
6) Penyusunan AMDAL
7) Integrated coastal and ocean management
8) Pengentasan kemiskinan

ii. Mitigasi Rawan Bencana Gempa Bumi

Program utama mitigasi yang perlu diambil dalam menghadapi gempa/longsor adalah:

1. Pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh wilayah padat penduduk (terutama di Manna) dan seluruh wilayah kecamatan di sepanjang pesisir pantai.
2. Penguatan kapasitas masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menghadapi bahaya gempa bumi
3. Standarisasi kualitas bangunan tanah gempa bumi, terutama bangunan/objek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah kabupaten
4. Sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten
5. Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Pembangunan dan penguatan system komunikasi ke daerah-daerah terpencil di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan.
8. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

Secara teknis mitigasi longsor/gempa bumi dilakukan dengan cara:

1. Menghindar (Avoidance), yaitu dengan cara tidak membangun dan menempatkan bangunan di tempat-tempat yang berpotensi terkena longsor atau gempa bumi.
2. Stabilisasi (Stabilzation) ; dengan cara membuat kemiringan lereng menjadi landai dan stabil sehingga kemungkinan longsor menjadi kecil, atau bangunan yang akan didirikan menggunakan pondasi tiang pancang sampai ke bagian lapisan tanah yang stabil
3. Penetapan Persyaratan Keselamatan Struktur Bangunan (Provision for safety in structures); struktur bangunan harus dirancang dengan memperhutungkan keselamatan jiwa manusia yaitu dengan bangunan yang tahan gempa bumi (2 sloop).
4. Pembatasan penggunaan lahan dan penempatan jumlah jiwa (Limitation of land use and occupancy); Jenis peruntukan lahan, seperti lahan pertanian atau lahan permukiman dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan potensi bencana yang mungkin timbul. Penempatan jumlah jiwa per hektar dapat disesuaikan untuk mengurangi tingkat bencana.

iii. Mitigasi Rawan Bencana Longsor

Program utama yang perlu dilakukan untuk mitigasi rawan bencana longsor adalah:

1. Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya
2. Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air
3. Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air
4. Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air
5. Pengendalian permukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor
6. Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor
7. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan

8. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor
9. Peraturan daerah yang mengatur sanksi hokum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan tanah longsor.
10. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah
11. Sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan > 40%).

iv. Mitigasi Rawan Bencana Banjir

Pada kawasan dengan genangan yang cukup lama perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung (inclave). Karena bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang dapat diduga maka rekayasa teknik pengendalian kerusakan air dapat dilakukan disamping dibangunnya system peringatan dini. Namun untuk mencegah banjir limpasan karena deforestasi tentu hanya dapat dilakukan dengan rehabilitasi kawasan hulu. Program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir.
2. Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir, seperti kerusakan kawasan tangkapan air pada hulu sungai, kerusakan DAS, kawasan rawa, cekungan dan factor-faktor lainnya.
3. Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi structural maupun non structural.
4. Pelaksanaan program mitigasi yang telah dirumuskan seperti:
    a. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS
    b. Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir)
    c. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensial terdampak)
    d. Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dan ekosistem rawa/tanah basah (wet land).

3. Kawasan lindung dengan tipologi; a) pelaksanaan perwujudan relatif mudah; b) biaya perwujudan relatif kecil; dan c) merupakan kawasan prioritas perlindungan, karena memiliki fungsi perlindungan strategis terhadap kualitas dan kuantitas air maupun bencana alam seperti banjir, erosi, pendangkalan

sungai, dll, maka palaksanaan kegiatannya dilakukan pada lima tahun pertama. Kawasan lindung yang terlingkup pada tipologi di atas meliputi :

a. Sempadan Pantai

Potensi wilayah pesisir pantai memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan manusia sehingga untuk dapat memiliki akses terhadap pemanfaatan pantai, maka wilayah sekitar pantai merupakan wilayah potensial pertumbuhan budidaya yang tinggi. Saat ini, di beberapa wilayah pesisir pantai Bengkulu Selatan telah terjadi penguasaan lahan dan kegiatan pertanian/perikanan dan bangunan di kawasan sempadan pantai. Kondisi ini akan berdampak pada degradasi lingkungan pantai disamping keselamatan pengguna juga terancam. Dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan pantai, menjaga ekosistem dan meningkatkan keamanan lingkungan dari gelombang besar maupun hantaman gelombang tsunami serta meningkatkan keindahan (estetika) pantai, maka diperlukan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah dan atau kegiatan budidaya yang berada di kawasan sempadan pantai.

b. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mangganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Keterbatasan lahan dan perkembangan penduduk yang terus bertambah menyebabkan lahan sekitar sungai menjadi pilihan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan tercemarnya kualitas dan kuantitas air sekitar sungai, disamping dari sisi kesehatan dan estetika menjadi tidak baik. Selain itu juga menjadi salah satu penyebab banjir karena terjadinya pendangkalan dan penyempitan lebar sungai. Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dan berdiri bangunan-bangunan di sempadan

sungai, maka diperlukan pengelolaan (pengawasan, pengendalian dan pengembalian) fungsi sempadan sungai.

G. Prioritas Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Prioritas pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu yang telah dirumuskan diawal. Sedangkan komponen kawasan budidaya yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah meliputi:

1. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) meliputi : Hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi). Hutan produksi merupakan salah satu komponen yang dapat diperhitungkan mengingat potensi dari sektor ini cukup dapat menunjang perekonomian wilayah. Dalam rangka membuka lahan baru untuk kegiatan budidaya, masyarakat cenderung melakukan penebangan dan pembakaran hutan dan membiarkan kondisi hutan yang telah ditebang. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman bagi mahluk hidup dan lingkungan sekitarnya, seperti hilangnya/matinya satwa hutan tersebut, pencemaran udara, ancaman bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain. Sehingga untuk mencegah bencana alam akibat pemanfaatan hutan yang tidak ramah lingkungan maka perlu adanya prioritas dalam pemanfaatan hutan produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan hidup.
2. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) meliputi : Pertanian, Perkebunan/Tanaman Tahunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Permukiman.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

A. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penduduk Indonesia yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Hal ini tidak lepas dari kesadaran bersama bahwa manusia tidak hanya sebagai penikmat pembangunan. Disamping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia.

Pengalaman-pengalaman negara maju seperti Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, serta negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan mereka sebagian mereka besar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Salah satu indikator kualitas SDM adalah indeks pembanugunan manusia (IPM). Kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencapai 71,42. Angka ini meningkat 1,34 poin dibandingkan dengan Tahun 2005 yang sebesar 70,08. Saat ini masih dibawah IPM Nasional yang sebesar 72,91 dan IPM Provinsi Bengkulu sebesar 72,16. Namun demikian, capaian IPM Tahun 2022

Bengkulu Selatan hampir mencapai target di RPPD 2005-2025 sebesar 71,98. Sejak Tahun 2016 IPM Bengkulu Selatan berada pada status "tinggi", dan saat ini menempati peringkat ke-3 dibandingkan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dibawah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Pertumbuhan IPM Bengkulu Selatan Tahun 2022 sebesar 1,91 persen dibanding capaian pada periode awal RPJPD. Peningkatan IPM Tahun 2022 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM.

Peningkatan IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur harapan hidup (UHH) pada tahun 2022 Provinsi Bengkulu memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,69 tahun sedangkan Kabupaten Bengkulu Selatan 68,15 tahun (urutan ke 6 dari 10 kabupaten/kota). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Provinsi Bengkulu adalah 13,68 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas yakni 8,91 tahun pada tahun 2022. Adapun HLS dan RLS untuk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sudah cukup baik yakni 13,63 tahun (sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, urutan ke 3 dari 10 kabupten/kota) dan 9,39 tahun (lebih tinggi dari rata-rata provinsi, urutan ke 2 dibawah Kota Bengkulu dari 10 kabupaten/kota).

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 10,318 juta rupiah, jumlah tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni 10,560 juta rupiah. Tingkat pengeluaran per kapita Bengkulu Selatan tersebut berada pada urutan ke 6 dari 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Dari ketiga dimensi pengukuran IPM tersebut, berdasarkan angka capaian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022, maka aspek Kesehatan (berdasarkan angka umur harapan hidup; urutan 6 dari 10 kabupaten/kota) dan aspek ekonomi (berdasarkan angka pengeluaran riil per kapita; urutan 6 dari 10 kabupaten/kota) masih perlu berbagai upaya untuk meningkatkan indikator pada dua aspek tersebut.

Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan semua anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Sekolah Dasar (SD) tetap tinggi, dengan angka mendekati universal pada 2019 hingga 2023, terjadi sedikit penurunan dari 98,91% pada 2019 menjadi 96,83% pada 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 97,52% pada 2023. Namun, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), meskipun APM menunjukkan tren peningkatan, dari 67,00% pada 2019 menjadi 79,68% pada 2023, angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar anak belum sepenuhnya terakomodasi pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) juga mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama di jenjang SMP, di mana terjadi penurunan signifikan dari 99,23% pada 2020 menjadi 74,09% pada 2022, sebelum sedikit pulih menjadi 83,77% pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan adanya masalah dalam retensi siswa di jenjang pendidikan menengah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti putus sekolah atau ketidaksesuaian dengan kelompok usia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar relatif baik, banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan usia mereka. Hal ini diperparah dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, di mana pada tahun 2022, ketersediaan sekolah hanya mampu melayani 70,2% dari penduduk usia sekolah dasar, meninggalkan sekitar 30% anak yang belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang memadai. Di sisi lain, data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tren peningkatan, dengan HLS meningkat dari 13,6 tahun pada 2019 menjadi 13,65 tahun pada 2023, dan RLS dari 9,02 tahun pada 2019 menjadi 9,41 tahun pada 2023. Meskipun demikian, peningkatan ini masih belum cukup untuk mengatasi tantangan signifikan dalam memastikan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Secara keseluruhan, kondisi ini menuntut tindakan nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan retensi pendidikan, terutama di jenjang pendidikan menengah. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa lebih banyak anak di kabupaten ini dapat

menyelesaikan pendidikan mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah di masa depan.

Mengacu pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja pada RPJP 2005-2025, masih terdapat beberapa permasalahan terkait sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama dari aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan peran perempuan dalam pembangunan.

a. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata

   1) Angka persentase jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Kabupaten Bengkulu Selatan masih berada dibawah angka Provinsi Bengkulu yakni 99,85% serta tingkat nasional sebesar 99,80%. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tetap perlu mengupayakan peningkatan angka melek hurup ini melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan.
   2) APM dan APK untuk tingkat SLTP, capaiannya baru masuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan target capaian akhir periode RPJPD. APM dan APK tingkat SLTP Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 baru mencapai 67,21 dan 74,09. Artinya, masih terdapat proporsi yang cukup besar anak sekolah tingkat SLTP yang bersekolah pada tingkat yang tidak sesuai dengan kelompok umurnya. Kondisi ini tentunya perlu tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui kebijakan serta program yang relevan untuk meningkatkan APM dan APK khususnya pada tingkat SLTP.
   3) Profesionalisme guru dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar juga perlu ditunjang dengan kemampuan dibidang system informasi dan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan digitalisasi dalam pendidikan.
   4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah. Berdasarkan indikator rasio ketersediaan sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar, pada tahun 2022 nilai indikator ini sebesar 0,702, artinya ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun

2022 baru mencapai 70,2%. Jika ingin mencapai angka ideal 100%, maka pada periode yang akan datang pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sarana sekolah bagi sekitar 30% penduduk usia sekolah dasar.

b. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan Kesehatan diantaranya dapat dilihat dari cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS sebagai penyelenggara program JKN, per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui Program JKN. Dengan semakin besarnya jumlah peserta, akses terhadap layanan di fasilitas kesehatan akan meningkat. Tingginya angka pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung oleh mutu fasilitas kesehatan yang baik, di antaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKRTL) / Rumah Sakita (RS). Dengan akreditasi, harapannya akan diperoleh standar layanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan Kesehatan di daerah juga dapat dinilai berdasarkan rasio puskesmas, poliklinik / puskesmas pembantu per satuan penduduk.

1) Rasio puskesmas, poliklinik / puskesmas pembantu persatuan penduduk, capaian target rasio tersebut pada tahun 2022 baru mencapai 33% (0,0003 dari 0,001) atau dengan kategori sangat rendah. Memanfaatkan sarana prasarana kesehatan yang dimiliki untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat terutama yang dapat menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pemerintah dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang sudah ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Poliklinik Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), POD (Pos Obat

Desa) dan sebagainya. Puskesmas yang sudah ada dapat ditingkatkan menjadi puskesmas yang melayani masyarakat selama 24 jam.

2) Capaian rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 menunjukkan angka 0,0144 dengan kategori capaian sedang jika dibandingkan dengan target capaian diakhir periode RPJPD yakni sebesar 0,020. Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Posyandu merupakan bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dilaksanakan oleh keluarga bersama dengan masyarakat dibawah bimbingan petugas kesehatan dari Puskesmas setempat. Posyandu merupakan perpaduan Antara pos KB (keluarga berencana), pos imunisasi, pos timbang, pos vaksinasi dan pos kesehatan desa. Salah satu tujuan Posyandu adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak serta angka kelahiran melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
3) Belum idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk (0,0004 dari 0,001), masalah sebaran dokter tersebut juga masih belum merata. Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah, dengan demikian jika Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai target untuk mencapai rasio yang ideal tersebut, maka paling tidak jumlah dokter harus ditambah 100% dari jumlah yang ada saat ini. Selain masalah masih belum idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk, masalah sebaran dokter tersebut juga masih belum merata.
4) Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat demi tercapainya derajat kesehatan Masyarakat. Ukuran indikator tersebut dapat dilihat dari angka usia harapan hidup (tahun). Angka usia harapan hidup (UHH) merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan demikian UHH merupakan

indikator yang sangat penting karena dianggap mewakili aspek Kesehatan dalam perhitungan IPM. Berdasarkan capaian angka UHH Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 sebesar 68,15 (urutan ke 6 dari 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu)

5) Peran swasta dalam pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan.
6) Percepatan penurunan stunting, Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan.

c. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis

1) Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal investasi.
2) Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Faktor penyebab terjadinya pengangguran terbuka adalah ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini sering terjadi pada fresh graduate atau lulusan baru dari perguruan tinggi. Selain itu, fenomena tersebut juga bisa dialami oleh pekerja yang memiliki rencana untuk mengubah jalur karirnya di bidang lain.
3) Minimnya pengalaman dari pencari kerja, faktor lain penyebab terjadinya pengangguran terbuka adalah minimnya pengalaman dari pencari kerja. Kejadian tersebut terjadi akibat kurangnya persiapan dan pelatihan bagi siswa atau mahasiswa saat akan memasuki dunia kerja. Umumnya, pada lowongan dalam jajaran entry-level atau posisi yang membutuhkan kompetensi, kualifikasi atau kemampuan dasar juga tetap memberlakukan persyaratan pengalaman terkait.

4) Beberapa dampak dari meningkatnya pengangguran yang perlu diantisipasi yakni 1) Menyebabkan Kesenjangan Sosial, Salah satu dampak pengangguran terbuka adalah adanya kesenjangan sosial dengan para pencari kerja sering merasa tidak diperlakukan secara adil dalam lingkungan masyarakat; 2) Menurunkan Daya Saing dan Kemampuan, Dampak yang kedua adalah hilangnya keahlian calon pekerja karena terlalu lama tidak dipergunakan atau disalurkan pada bidang terkait; 3) Menambah Angka Kemiskinan.

d. Peran perempuan dalam pembangunan daerah

Berbagai peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk mencapai upaya pengarusutamaan gender. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana perempuan adalah bagian penting untuk mencapai hal tesebut. Tidak hanya itu, sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen di tingkat global, diantaranya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan.

1) Ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Indek Pemberdayaan Gender (IPG) terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.
2) IPG/IDG Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni sebesar 55,63 artinya tingkat partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi oleh perempuan sebesar 55,63% dibandingkan laki-laki. Angka tersebut masih dibawah IPG provinsi yakni sebesar 70,13, capaian IPG Bengkulu Selatan jika

dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke 9 dari 10 kabupaten/kota.

B. Tata Kelola Pemerintahan

a. Profesialisme aparatur pemerintah

1) Lemahnya implementasi dari aparatur pemerintah yang profesional dalam bekerja dan keseuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang bermuara pada tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi dari aparatur pemerintah yang profesional dalam bekerja dan keseuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang bermuara pada tata kelola pemerintah yang baik, salah satunya dapat diukur melalui indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2) Belum optimalnya pelaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
3) Capaian indeks reformasi Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni dengan nilai C, apabila mengacu pada kategori penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah, maka nilai C masuk pada kategori kurang artinya sistem dan tatanan dalam tata kelola kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem reformasi birokrasi sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. Jika dibandingkan dengan capaian awal periode RPJPD, maka capaian reformasi birokrasi belum ada perubahan yang signifikan, untuk mencapai target akhir periode yakni dengan nilai A, maka perlu kerja keras dari semua pihak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode selanjutnya, yakni dengan melakukan perbaikan pada 8 area perubahan.
4) Belum terimplementasi sistem reformasi birokrasi sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Kapabel; Pelayanan Publik yang Prima.

5) Capaian nilai indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni sebesar 36,12 dengan demikian profesionalitas ASN di Bengkulu Selatan masuk kategori sangat rendah (kurang dari 60).

b. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan

1) Capaian indeks SPBE Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 yakni sebesar 2,31. Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa SPBE Bengkulu Selatan tahun 2022 berada pada kategori cukup. Untuk mencapai kategori sangat baik, membutuhkan usaha melalui kebijakan dan program yang relevan. Kebijakan dan program tersebut terkait keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki seperti pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahaan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini bisa dilihat dari adanya Layanan yang terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai yang sudah cukup matang sehingga fungsi kolaborasi antar layanan dapat berjalan dengan baik.

2) Lemahnya Budaya Pelayanan Prima, peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada stakeholder. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan dari para stakeholder yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan stakeholder.

3) Minimnya Standar Pelayanan Publik, standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan publik yang mengatur jenis dan mutu

pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap stakeholder secara minimal. Selain untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi stakeholder, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada stakeholder. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan.

4) Terbatasnya penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada stakeholder. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dengan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
5) Belum optimalnya sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Indikator berikutnya yang terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan umum, yakni nilai pelaynan publik. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
6) Minimnya terobosan berupa inovasi baik dalam bidang tata Kelola pemerintah daerah maupun dalam bidang pelayanan publik. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah yakni melalui inovasi layanan. Indikator kuantitatif yang relevan dengan hal

tersebut adalah indeks inovasi daerah. Berdasarkan PP NO. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Tujuan Inovasi Daerah yakni untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui: Peningkatan Pelayanan Publik; Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah.

Terdapat beberapa Bentuk Inovasi Daerah:

- Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Inovasi Pelayanan Publik
- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun Kriteria Inovasi Daerah yang baik adalah sebagai berikut:

- Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
- Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
- Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dapat direplikasi

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 menunjukkan angka 37,92. Nilai capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya serta masih jauh dari angka yang ditargetkan untuk dicapai pada akhir periode RPJPD yakni sebesar 70. Jika dibandingkan dengan target tersebut, maka capaian saat ini baru 54,21% atau masuk kategori rendah.

B. Pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa

- Potensi aparatur pemerintah terhadap intervensi dalam penggunaan APBD. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi, efektif dan efisien.

- Benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

C. Produktifitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pembangunan

a. Pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa

Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 sebesar 17,86%, dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bengkulu Selatan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun secara nasional. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

D. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi, Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru, dan Komoditas Unggulan

a. Akses secara merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain

sebagainya). Sebaran pemukiman masyarakat yang relatif tersebar dari perbatasan Kabupaten Kaur, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Kabupaten Seluma, serta Samudera Hindia menyulitkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengkoneksitaskan sarana dan prasarana kebutuhan dasar.

b. Sarana dan prasarana ekonomi dalam rangka mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil–hasil komoditas unggulan. Keterbatasan besaran APBD karena masih bergantung pada dana transfer dari pusat dalam bentuk DAK, DAU dan lainnya menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
c. Kelembagaan lokal yang mampuni berperan aktif dalam pembangunan daerah. Penduduk yang relatif bependidikan rendah di daerah pedesaan memberikan ruang bagi penduduk yang sudah lebih maju untuk dapat mengeksploitasi hal ini yang menyebabkan angka Gini Ratio di Kabupaten Bengkulu Selatan masih timpang antara penduduk kaya dengan miskin.
d. Kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustry
    1) Sulit merubah pola pertanian masyarakat desa yang sudah terbiasa berkebun tanaman keras seperti kopi dan karet untuk berubah ke tanaman lainnya yang lebih bernilai ekonomis.
    2) Pengetahuan dan keahlian terkait inovasi dalam pertanian/perikanan
    3) Dukungan sarana dan prasarana
e. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development).

    Capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yakni sebesar 64,59 atau dengan kategori cukup baik (60 s.d 70). Walaupun demikian pada periode yang akan datang pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tetap dituntut untuk mengupayakan perbaikan IKLH. Sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, diperlukan program dan kegiatan yang fokus pada meningkatkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan dan lahan.

1) Minimnya program dan kegiatan yang fokus pada meningkatkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan dan lahan.
2) Terbatasnya pengolahan air limbah domestik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), restorasi (kualitas air) sungai, serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar. Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas air dapat dilakukan dengan melakukan penurunan beban pencemaran melalui pengetatan baku mutu air limbah dan recycle water, pengolahan air limbah domestik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), restorasi (kualitas air) sungai, serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar. Sementara itu upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara dapat dilakukan dengan melakukan intervensi peraturan (memperketat baku mutu emisi, pembatasan beban emisi dan kapasitas produksi untuk industri), pembatasan kapasitas kendaraan di jalan, serta program green transportation. Yang terakhir upaya untuk meningkatkan indkes tutupan hutan dan lahan dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan, pemeliharaan tutupan hutan melalui berbagai program/kegiatan, dan penanaman pohon dengan berbagai pendekatan.
3) Tingginya risiko, tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu indikator kuantitatif yang relevan dengan hal tersebut adalah indeks risiko bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas.

4) Indeks risiko bencana Kabupaten Bengkulu Selatan yakni sebesar 168,4. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada urutan ke 29 dengan kelas risiko yang tinggi dari 514 Kabupaten/Kota se Indonesia. Menurut data BNPB, salah satu bentuk bencana dengan risiko yang paling tinggi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bencana tanah longsor. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menyiapkan berbagai kebijakan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dapat menurunkan indeks risiko bencana tersebut, sekaligus mengantisipasi serta meminimalisasi dampak dari kemungkinan terjadinya risiko bencana tersebut. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

E. Kemandirian Berbasis Agroindustri Terpadu

a. Perkembangan sistem agroindustri terpadu

Terbatasnya hamparan tanah dataran dengan luasan seribu hektar yang tidak terpotong sebagai syarat utama bagi industri besar agroindustri untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Produksi dan Produktivitas Pertanian Unggulan

Merubah kebiasaan bercocok tanaman konvensional ke tanaman jenis baru yang lebih bernilai ekonomis masih susah dilakukan karena faktor kebiasaaan secara turun temurun

F. Religiusitas dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

a. Karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan saling toleransi antar individu. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan akses masyarakat terhadap pengaruh budaya luar yang negatif susah untuk dipantau.

b. Kegiatan pelestarian norma dan nilai–nilai budaya daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Banyaknya penduduk/masyarakat yang

mobilitasnya tinggi kadang menyebabkan nilai-nilai budaya daerah sering tergantikan dengan nilai budaya yang dibawa perantau pulang ke daerah.

G. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

a. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Pengaruh teknologi menyebakan shock cultures bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga sering terjadi pelanggaran hukum.

b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, saling toleransi antar individu serta hamonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan ekonomi dan tuntutan klehidupan kadang lebih cepat tumbuh dari peningkatan kemampun ekonomi masyarakat, memberikan ruang untuk terjadinya intoleran dan merusak nilai-nilai kebersamaan.

3.1.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 telah memperhatikan berbagai aspek penting pembangunan berkelanjutan. Penyusunan RPJPD ini mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan yang tercermin dalam KLHS, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah memperhatikan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi referensi utama dalam perencanaan pembangunan di tingkat global dan nasional. Berdasarkan analisis KLHS, beberapa indikator SDGs di Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencapai target nasional, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan besar masih terlihat dalam indikator lain, seperti akses air bersih yang

hanya mencapai 65% dari total rumah tangga, jauh dari target nasional 100%, dan sanitasi yang masih memerlukan peningkatan kualitas. Selain itu, tingkat kemiskinan masih tinggi, mencapai 17,86%, yang menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum memberikan dampak yang optimal.

Dalam kaitannya dengan sektor kesehatan, terdapat permasalahan besar terkait tingginya insiden penyakit menular seperti tuberkulosis (651 per 100.000 penduduk) dan malaria (4 per 1.000 penduduk). Meskipun cakupan imunisasi dasar untuk bayi sudah mencapai 96,48%, upaya untuk menanggulangi penyakit menular memerlukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, penyediaan obat-obatan yang memadai, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit. Selain itu, rendahnya akses perlindungan sosial, terutama melalui program jaminan kesehatan, menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan belum merata di kalangan kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Di sektor pendidikan, meskipun angka partisipasi pendidikan dasar menunjukkan peningkatan, kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya kualitas fasilitas pendidikan di beberapa wilayah, yang menghambat upaya penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2023 mencapai 99,35%, namun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 hingga 82,03%, sebelum kembali naik. Situasi serupa juga terlihat pada kelompok usia 13-15 tahun, di mana partisipasi sekolah sempat menurun drastis menjadi 47,16% pada 2021, tetapi berhasil pulih hingga 99,5% pada 2023. Perbaikan kualitas pendidikan memerlukan upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Di sektor ekonomi, pentingnya optimalisasi sumber daya alam seperti hasil produksi pertanian dan perkebunan juga harus diperhatikan. Produksi padi, sebagai salah satu komoditas utama di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, produksi padi tercatat hanya sebesar 46.065 ton, turun dari 57.515 ton pada tahun 2022. Surplus beras juga turun drastis dari 33.466 ton

pada tahun 2018 menjadi hanya 7.875 ton pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi pangan dan kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat, yang perlu diatasi dengan modernisasi teknologi pertanian serta peningkatan infrastruktur pertanian.

Secara keseluruhan, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas data lokal, sistem informasi yang andal, serta koordinasi antar sektor yang lebih baik. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2. Kajian RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2031

RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 telah menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. RTRW ini memberikan kerangka dasar bagi pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Dalam konteks ini, RTRW berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan di berbagai sektor, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Prinsip-prinsip ini telah diintegrasikan ke dalam RPJPD sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Pengelolaan tata ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 juga mencakup pemanfaatan lahan yang lebih efektif, terutama dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. RTRW memberikan arahan strategis untuk pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao, dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan. Dalam RPJPD, kebijakan ini diterjemahkan ke

dalam berbagai program yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijak, mendorong peningkatan produktivitas melalui modernisasi teknologi, serta mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor unggulan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

Lebih jauh, RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 juga menekankan pentingnya pengendalian zonasi wilayah, baik untuk kawasan pemukiman, industri, maupun konservasi alam. Prinsip pengelolaan ruang ini sangat relevan bagi pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana perlu ada keseimbangan antara kebutuhan ruang untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan. RPJPD mengadopsi pendekatan ini dengan menetapkan zona-zona pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan lahan agar sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, upaya untuk menarik investasi yang ramah lingkungan juga menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan jangka panjang, sejalan dengan visi menjaga keberlanjutan sumber daya alam daerah.

Sektor pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan, juga mendapatkan perhatian khusus dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031. Keindahan alam dan keragaman budaya di wilayah ini menjadi aset penting yang perlu dikembangkan secara optimal. Dalam RPJPD, strategi untuk pengembangan pariwisata diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan promosi destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat regional dan nasional. Dengan peningkatan sektor pariwisata, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Selain itu, RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 juga memberikan landasan bagi pengelolaan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi, sangat penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan. RPJPD mencerminkan prioritas ini dengan mendorong pembangunan infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan, yang tidak hanya

mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, RPJPD dan RTRW bersama-sama berperan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keselarasan antara RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 dan RPJPD ini menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah, dengan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan didasarkan pada perencanaan yang matang dan komprehensif. Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi pariwisata yang dimilikinya, diharapkan dapat terus berkembang menuju visi sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

3.2.1. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan

A. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tetap merupakan modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Selatan masih memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk. Kuantitas penduduk usia produktif ini harus terus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, dimulai dari usia dini. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Saat ini, sumber daya

manusia masih menjadi isu yang memerlukan pengoptimalan dari berbagai aspek pendukungnya.

Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023, IPM di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan menjadi 74,06, namun masih berada di bawah capaian provinsi dan menduduki peringkat ketiga di antara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi berbagai isu terkait kualitas sumber daya manusia, termasuk partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang masih rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari capaian kualitas dan kuantitas, tetapi juga dari pemerataannya.

Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia di tahun 2023 harus terus menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa isu strategis yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia:

a. **Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata melalui kebijakan terintegrasi termasuk didalamnya pencapaian UHC (Universal Health Coverage) dan penurunan Prevalensi Stunting melalui intervensi spesifik, sensitif, dan kordinatif**.

   Peningkatan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat diukur melalui cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebagai penyelenggara program JKN, pada Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau sekitar 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui program JKN. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada tahun 2023, dengan 267 juta jiwa atau 95,77 persen dari penduduk Indonesia tercakup dalam program JKN.

   Peningkatan jumlah peserta JKN ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Akses yang lebih besar ini diharapkan dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan semakin banyaknya penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Namun, seiring dengan tingginya angka pemanfaatan layanan kesehatan, penting bagi pemerintah untuk memastikan mutu fasilitas kesehatan tetap terjaga.

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan adalah melalui proses akreditasi, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit. Akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan layanan yang aman, efektif, dan berkualitas. Dengan demikian, akreditasi juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermutu. Upaya untuk meningkatkan cakupan JKN dan memperbaiki mutu layanan kesehatan diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan Kesehatan di daerah juga dapat dinilai berdasarkan rasio puskesmas, poliklinik pustu persatuan penduduk. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2024, tingkat capaian awal periode RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan rasio 0,0001 artinya ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama berada pada angka 1 berbanding 10.000 penduduk. Target yang diharapkan pada akhir periode yakni 0,001 atau 1 banding 1000 penduduk. Adapun capaian pada tahun 2022 yakni t-1 dari evaluasi RPJPD, rasio puskesmas/pustu berada pada angka 0,0003 yang berarti tersedia 1 puskesmas/pustu bagi 3,3 ribu penduduk. Apabila dibandingkan dengan target capaian diakhir periode, maka tingkat capaian rasio tersebut pada tahun 2022 baru mencapai 32,93 atau dengan kategori sangat rendah. Maka untuk mencapai tingkat capaian yang lebih baik mengarah ke target akhir periode RPJPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu membuat kebijakan penambahan puskesmas atau

puskesmas pembantu untuk menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan Kesehatan dimasa yang akan datang.

b. **Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata melalui kebijakan kemudahan dalam mengakses pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan menengah sehingga usia rata-rata lama sekolah meningkat.**

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 adalah 9,39 tahun dan meningkat menjadi 9,41 pada tahun 2023 yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah. Perlu adanya dorongan rata-rata lama sekolah hingga angka 12 tahun, hal ini sesuai dengan salah satu target capaian indikjator transformasi sosial untuk menciptakan manusia Indonesia unggul dalam draf RPJPN 2025-2045. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar, pada tahun 2022 nilai indikator ini sebesar 0,702, artinya ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 adalah 70,2%. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

c. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut. Pada tahun 2017, TPT tercatat sebesar 2,6%, yang kemudian meningkat menjadi 3,09% pada tahun 2018. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019, dengan TPT turun menjadi 2,36%, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan TPT menjadi 3,52%, mencerminkan dampak langsung dari gangguan ekonomi global yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT kembali menurun menjadi 2,55%, yang mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022, dengan TPT mencapai 3,51%, dan sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 3,56%.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, tantangan ekonomi global dan lokal masih berdampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan TPT di tahun-tahun terakhir menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi untuk menyerap tenaga kerja, serta memperkuat program pelatihan keterampilan yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang menjadi andalan ekonomi lokal.

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 72,09%, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 71,71% pada tahun 2018 dan turun lebih lanjut menjadi 70,37% pada tahun 2019. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Namun, mulai tahun 2020, TPAK menunjukkan tren

pemulihan yang signifikan, meskipun pandemi COVID-19 melanda. Pada tahun tersebut, TPAK hanya sedikit menurun menjadi 70,11%, tetapi pada tahun 2021, TPAK meningkat tajam menjadi 73,95%, mencerminkan kembalinya partisipasi angkatan kerja ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi.

Peningkatan TPAK berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 75,64%, dan sedikit naik lagi pada tahun 2023 menjadi 75,95%. Tren positif ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang memasuki pasar tenaga kerja, yang berpotensi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan partisipasi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung dan memperluas inisiatif-inisiatif yang mendorong partisipasi angkatan kerja, serta memastikan bahwa peningkatan ini diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kolaborasi antara sektor pendidikan, pelatihan vokasional, serta industri lokal agar tenaga kerja yang masuk ke pasar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah.

d. Bonus demografi

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan. Bonus demografi adalah peluang besar bagi negara yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga semakin besar. Bonus demografi mengacu pada kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, potensi tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga meningkat, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan

pendapatan, dan menggerakkan perekonomian dengan pengeluaran belanja mereka.

Proyeksi komposisi umur di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan adanya peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di kelompok usia 15-64 tahun. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun pada tahun 2022 mencapai 6.979 orang, dan diproyeksikan meningkat menjadi 7.001 orang pada tahun 2025 dan 7.163 orang pada tahun 2030. Kelompok usia 20-24 tahun diperkirakan akan sedikit menurun dari 6.719 orang pada tahun 2022 menjadi 6.604 orang pada tahun 2025, dan terus menurun menjadi 6.594 orang pada tahun 2030. Meskipun terjadi sedikit penurunan di kelompok usia muda, peningkatan terlihat pada kelompok usia 30-34 tahun, yang diperkirakan naik dari 6.203 orang pada tahun 2022 menjadi 6.238 orang pada tahun 2025 dan 6.321 orang pada tahun 2030.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peluang emas untuk memanfaatkan bonus demografi demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin besarnya penduduk usia produktif, ketergantungan pada penduduk usia non-produktif akan berkurang. Ini berarti lebih banyak penduduk yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian, sehingga mengurangi beban sosial seperti pensiun dan jaminan sosial.

Namun, bonus demografi harus dipersiapkan dengan baik. Jika tidak dimanfaatkan dengan tepat, kondisi ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan tingginya tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa angkatan kerja yang masuk ke pasar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu berkontribusi secara produktif bagi ekonomi lokal.

B. Perlunya Pengembangan Ekonomi dan Komoditas Unggulan Menuju Kemandirian Daerah

a. Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan menuju angka rata-rata kemiskinan nasional dan angka rata-rata kemiskinan Provinsi melalui kebijakan yang terintegrasi.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 17,1%, menurun dari 17,86% pada tahun 2022. Namun, angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, yang mencapai 13,56% pada tahun yang sama. Meskipun terjadi perbaikan, selisih antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu masih cukup signifikan. Pada tahun 2023, selisihnya mencapai 3,47%, dan meskipun sedikit menyempit menjadi 3,54% pada tahun 2024, hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara Provinsi Bengkulu terus mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, Kabupaten Bengkulu Selatan masih tertinggal dalam mengatasi masalah ini. Penurunan kemiskinan di Provinsi Bengkulu berhasil menempatkannya pada posisi ke-11 dalam peringkat nasional pada tahun 2024, setelah berada di posisi ketujuh pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar didorong oleh perubahan struktur provinsi di Papua yang menambah empat provinsi baru. Namun, Kabupaten Bengkulu Selatan memerlukan perhatian yang lebih serius dalam implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan intensif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah ini.

Perbandingan ini menekankan pentingnya kebijakan yang terarah, terutama untuk Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan ini. Kabupaten ini juga perlu fokus pada pelaksanaan program sosial seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif yang telah dirancang untuk mendukung target nasional, yakni penurunan tingkat

kemiskinan hingga di bawah 1% pada tahun 2045. Dengan langkah-langkah strategis yang terfokus dan terintegrasi, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dan menyelaraskan pertumbuhannya dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan nasional.

Penting bagi kebijakan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk terus menitikberatkan pada penanganan ketimpangan sosial-ekonomi yang ada, dengan mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan kemiskinan di kabupaten ini akan terus menurun dan mendekati rata-rata provinsi serta nasional dalam beberapa tahun ke depan.

b. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan kemudahan realisasi investasi sesuai dengan RIRU (Regional Investment Relations Unit) maka perlu penyelesaian regulasi pemanfaatan ruang (Peraturan Daerah RTRW dan RDTR) dan regulasi yang memberi kemudahan investasi dan insentif investasi bagi investor, sejalan dengan itu maka perlu dibuat peta potensi Investasi untuk Komoditas Unggulan.**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 mencapai 3,45 persen, melambat dibanding periode awal RPJPD yang mencapai 5,91 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bengkulu Selatan pada tahun 2022 mengalami percepatan laju pertumbuhan. Pada tahun 2023, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, meskipun laju pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan awal periode RPJPD. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 7.201,15 miliar rupiah, meningkat dari 6.712,80 miliar rupiah pada tahun 2022. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB mencapai 3.994,82 miliar rupiah, meningkat dari 3.871,61 miliar rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 3,18 persen ini menunjukkan ketahanan dan adaptasi perekonomian daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Meskipun

demikian, pertumbuhan pada tahun 2023 sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,45 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kontribusi sebesar 33,55 persen pada tahun 2023. Sektor ini, yang menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten, juga menunjukkan peningkatan nilai dari 2.254,51 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 2.416,17 miliar rupiah pada tahun 2023. Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi kabupaten terus mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh pergeseran ke sektor-sektor non-pertanian. Pergeseran ini dipengaruhi oleh alih fungsi lahan dan peningkatan kontribusi dari sektor lain, seperti Transportasi dan Pergudangan, yang pada tahun 2023 menyumbang 6,93 persen, meningkat dari 6,41 persen pada tahun 2022.

Sektor lain yang memberikan kontribusi penting adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang menyumbang 16,59 persen pada tahun 2023, sedikit menurun dari 16,66 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, sektor perdagangan tetap menjadi salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten. Sektor Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 5,71 persen, meningkat dari 5,62 persen pada tahun sebelumnya. Sektor ini diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.

Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan kontribusi, dari 3,09 persen pada tahun 2022 menjadi 2,91 persen pada tahun 2023, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor manufaktur di kabupaten. Penurunan ini menggarisbawahi perlunya diversifikasi dan pengembangan sektor-sektor baru untuk mendukung industrialisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, PDRB per kapita juga menunjukkan peningkatan dari 39,5 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 42 juta rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan nilai tambah bruto yang dihasilkan

oleh seluruh kegiatan ekonomi di kabupaten, meskipun PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sedikit lebih lambat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita ADHK mencapai 23,3 juta rupiah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil perlu didorong lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal.

Tren pertumbuhan yang positif dalam PDRB ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mempertahankan kinerja ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan global dan nasional. Dengan fokus pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan transportasi, serta didukung oleh pengembangan sektor jasa, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Pemanfaatan potensi ekonomi dengan adanya integrasi antar Kawasan kabupaten/provinsi.

Guna mendorong terjadinya pertumbuhan wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mendorong terjadinya kerjasama antar daerah tersebut sangat diperlukan, diantaranya dengan menggali sektor-sektor potensial lintas daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengidentifikasian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi: identifikasi karakteristik fisik, kependudukan dan ekonomi. Identifikasi ini untuk mengetahui potensi wilayah yang dapat menunjang interaksi antara daerah kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Bengkulu Selatan. Identifikasi yang kedua adalah identifikasi sektor basis yaitu sektor yang dapat diandalkan potensinya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya dan memilki keunggulan komperatif yang merupakan faktor penentu bagi peningkatan pendapatan suatu daerah. Kemudian dilakukan identifikasi keterkaitan antar daerah di wilayah melalui keterkaitan ekonomi dan keuangan

d. Pengelolaan ekonomi (pertanian, perkebunan, dan perikanan) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial.

Pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat atau komunal muncul ketika terdapat kesepakatan pemanfataan bersama di antara anggotanya. Kesepakatan ini bisa terjadi karena terdapat interaksi secara reguler dan berkesinambungan antara anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Salah satu hal yang terpenting adalah bahwa aksi bersama hanya dimungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia di dalam suatu komunitas. Konsep modal sosial diartikan sebagai sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat dan membuat orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan pertanian, Perkebunan, dan perikanan yang berbasis komunitas dengan modal sosial diyakini akan dapat mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena adanya instrumen kontrol sosial dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya transaksi karena biaya koordinasi dalam komunitas lokal menurun, selain itu, juga akan berkontribusi pada pengelolaan pertanian/Perkebunan/perikanan yang berkelanjutan.

e. Ketahanan dan Kemandirian Pangan.

Peringatan akan terjadinya krisis pangan dan energi telah menjadi isu global yang harus diwaspadai oleh semua negara tak terkecuali Indonesia. Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) juga telah mengeluarkan peringatan terkait ancaman krisis pangan dunia yang berakibat selain adanya lonjakan harga energi, juga akan terjadi pada harga pangan dan pupuk.

Maka diperlukan kebijakan dan regulasi yang tegas, selaras, dan berpihak pada penerapan Sistem Pangan Nasional Berkelanjutan. Perlunya melakukan tata kelola pembangunan pertanian berorientasi kedaulatan pangan melalui penguatan dan kebijakan terhadap akses input produksi. Sehingga tidak lagi bergantung pada sumberdaya non lokal.

Kemandirian pangan perlu diperkuat dengan tidak bergantung pada pangan impor, yang pada akhirnya akan terjadi kedaulatan pangan, yaitu dengan

memanfaatkan keberagaman sumber daya hayati, mengembalikan keberagaman pangan lokal, dan membangun industri berbasis pertanian di perdesaan. Terdapat lima komponen dalam mewujudkan kemandirian pangan yaitu ketersediaan yang cukup, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan, mutu/keamanan pangan yang baik, dan tidak ada ketergantungan pada pihak luar.

C. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Permasalahan konektivitas di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi semakin nyata ketika melihat degradasi kualitas jalan yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2023. Salah satu isu utama adalah penurunan drastis dalam panjang jalan yang berada dalam kondisi baik, dari 716,95 km pada tahun 2019 menjadi hanya 96,07 km pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang sebelumnya dalam kondisi layak mengalami penurunan kualitas yang signifikan, yang kemudian berimbas pada konektivitas antar wilayah yang menjadi semakin terhambat. Selain itu, peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat, yang melonjak dari 63,66 km pada tahun 2021 menjadi 507,76 km pada tahun 2023, mengindikasikan adanya degradasi parah dalam infrastruktur jalan di daerah ini. Meskipun ada upaya perbaikan, fakta bahwa banyak jalan mengalami kerusakan berat menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan jalan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini tentunya berdampak langsung pada mobilitas, perdagangan, dan aksesibilitas, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disamping itu, perubahan iklim telah menjadi tantangan yang semakin nyata di Kabupaten Bengkulu Selatan, ditandai oleh fluktuasi yang signifikan dalam beberapa indikator lingkungan hidup selama periode 2021 hingga 2023. Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan penurunan yang mencolok, dari 55,00 pada tahun 2021 menjadi 45,00 pada tahun 2022, dan tetap stagnan pada angka yang sama di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan memburuknya kualitas air yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Sementara itu, meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif stabil dan bahkan mengalami sedikit peningkatan dari 92,62 pada tahun 2021 menjadi 93,04 pada

tahun 2023, ada kekhawatiran bahwa perubahan iklim di masa depan dapat memperburuk situasi ini. Peningkatan suhu global dapat meningkatkan polutan udara, yang berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

Selain itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) juga mengalami sedikit peningkatan dari 46,77 pada tahun 2021 menjadi 47,61 pada tahun 2023. Namun, peningkatan ini tidak menutupi potensi dampak perubahan iklim terhadap lahan di Bengkulu Selatan. Perubahan curah hujan yang tidak teratur, peningkatan kejadian banjir, dan erosi tanah dapat memperburuk degradasi lahan di masa depan, yang pada akhirnya mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal. Secara keseluruhan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren penurunan dari 68,43 pada tahun 2021 menjadi 64,59 pada tahun 2022, meskipun ada sedikit peningkatan menjadi 65,03 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak kumulatif dari berbagai faktor lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang semuanya berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Di sisi lain, Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2019 hingga 2023 juga mencerminkan tantangan yang dihadapi daerah ini terkait manajemen bencana dalam konteks perubahan iklim. Meskipun Indeks Risiko Bencana menunjukkan stabilitas pada angka 186,40 dari tahun 2019 hingga 2022, penurunan ke 165,20 pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen risiko bencana. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan infrastruktur tahan bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini. Namun, meskipun ada penurunan, risiko bencana di Bengkulu Selatan tetap tinggi, terutama mengingat dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Untuk mengatasi tantangan ini, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu terus mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi yang lebih komprehensif, termasuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, perlindungan ekosistem, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat meningkatkan ketahanan terhadap

perubahan iklim dan risiko bencana, serta memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

a. Peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Dengan tetap Mengutamakan pembangunan berkelanjutan dengan fokus peningkatan mutu hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan serta memiliki konsep yang berlandaskan pelestarian dan kepedulian lingkungan hidup;
b. Akses secara merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain sebagainya).
c. Infrastruktur yang terintegrasi dan mendukung pengembangan wilayah ekonomi, pertanian dan pariwisata.
d. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Lebih Baik: Pengelolaan sumber daya air yang lebih baik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur penampungan air, seperti bendungan, waduk, dan sistem irigasi, sangat penting untuk mengelola air secara efisien, terutama dalam mengantisipasi perubahan pola curah hujan dan periode kekeringan yang lebih panjang. Selain itu, konservasi sumber air melalui perlindungan dan restorasi daerah tangkapan air, seperti hutan dan lahan basah, juga harus menjadi prioritas. Upaya ini dapat membantu menjaga kualitas air dan mengurangi risiko banjir, sementara program penghijauan di daerah aliran sungai juga berperan penting dalam mencegah erosi tanah dan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan.
e. Peningkatan Kualitas Lahan dan Pengelolaan Lingkungan: Dalam rangka memperbaiki kualitas lahan dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan, penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan menjadi sangat penting. Teknik pertanian berkelanjutan seperti pertanian konservasi, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik dapat menjaga kesuburan tanah dan mengurangi degradasi lahan. Selain itu, rehabilitasi lahan terdegradasi melalui penanaman kembali tanaman asli dan pengendalian erosi harus dilakukan secara intensif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperbaiki

kualitas lahan tetapi juga menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal di tengah perubahan iklim.

f. Mitigasi Risiko Bencana: Mitigasi risiko bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Peningkatan infrastruktur tahan bencana, seperti pembangunan rumah tahan gempa dan tanggul penahan banjir, merupakan langkah penting dalam mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Penguatan sistem peringatan dini juga harus menjadi prioritas, dengan pengembangan teknologi modern dan integrasi dengan jaringan komunikasi lokal untuk memastikan bahwa informasi tentang bencana dapat disebarluaskan dengan cepat dan akurat. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim.

g. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, pengelolaan limbah yang lebih baik juga perlu diterapkan. Ini termasuk memperkenalkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, seperti daur ulang dan pengurangan sampah plastik, yang dapat mengurangi emisi serta dampak negatif terhadap lingkungan.

h. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk membangun ketahanan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kampanye kesadaran lingkungan yang menyeluruh dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana, termasuk latihan evakuasi dan penggunaan alat-alat darurat, harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi berbagai situasi darurat. Dengan demikian,

masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menjaga lingkungan dan melindungi diri dari risiko bencana.

i. Kolaborasi dan Kerjasama Antar Pihak: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dalam teknologi hijau dan proyek-proyek keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur tahan bencana. Kemitraan dengan lembaga internasional juga penting untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial, yang dapat memperkuat kapasitas lokal dalam mengimplementasikan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalisme ASN

a. Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efektifitas ASN. Dibutuhkan SOTK yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan untuk menjamin visi dan misi kepala daerah dapat tercapai dan terwujudkan.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi ini berfokus pada peningkatan kualitas kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel. Efektivitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan upaya reformasi birokrasi ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta menjalankan kebijakan pemerintah secara efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu elemen penting yang perlu diperbaiki adalah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, guna menjamin tercapainya visi dan misi kepala daerah.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, capaian indeks reformasi birokrasi selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi,

dengan skor indeks yang masih berada pada kategori C. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya optimal. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika indeks reformasi birokrasi naik ke kategori B. Peningkatan ini menunjukkan hasil dari upaya perbaikan kelembagaan dan peningkatan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu langkah kunci dalam mencapai hasil ini adalah perbaikan SOTK yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah dan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui penyesuaian SOTK yang tepat, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merespon kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, serta menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan.

Perbaikan SOTK tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN, tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen birokrasi bekerja secara sinergis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Dengan SOTK yang terus diperbaiki dan disesuaikan dengan tantangan dan peluang yang ada, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta membangun koordinasi yang lebih baik antar unit kerja. Proses ini juga memudahkan identifikasi area yang memerlukan peningkatan dan memungkinkan ASN untuk lebih berperan dalam menyukseskan agenda pembangunan yang telah dicanangkan.

Untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja ASN, terutama dalam penerapan SOTK yang baru. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan juga harus terus ditingkatkan agar ASN mampu menjalankan perannya dengan lebih baik. Dengan adanya SOTK yang diperbaiki sesuai kebutuhan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan lebih mampu mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, dan pada akhirnya, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta efektif dalam melayani masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga menjadi kunci dalam memaksimalkan hasil reformasi birokrasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam jangka panjang, reformasi birokrasi ini akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

b. Peningkatan profesionalitas ASN melalui budaya kerja, etos kerja, kompetensi, dan kedisiplinan ASN.

Implementasi dari aparatur pemerintah yang profesional dalam bekerja serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bermuara pada tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dapat diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN. Indeks ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam menjalankan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 berada di angka 36,12, yang masuk dalam kategori sangat rendah (kurang dari 60). Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN. Indeks yang rendah tersebut mencerminkan adanya masalah dalam beberapa aspek pengukuran profesionalitas, termasuk kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan strategi yang jelas untuk memperbaiki kinerja ASN di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, serta meningkatkan disiplin dan akuntabilitas pegawai.

Namun, pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan nilai mencapai 52,83, setelah sebelumnya berada pada titik terendah 35,15 di tahun 2021. Peningkatan ini menandakan

bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan mulai membuahkan hasil, meskipun masih perlu banyak upaya untuk mencapai kategori yang lebih baik. Kenaikan indeks ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam hal kompetensi, kinerja, serta penegakan disiplin pegawai ASN. Dengan demikian, tren perbaikan pada tahun 2023 ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar target profesionalitas ASN yang lebih baik di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat tercapai pada periode-periode mendatang. Pemerintah daerah diharapkan terus mengupayakan kebijakan yang fokus pada pengembangan kapasitas ASN agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.

c. Peraturan dan kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan standar pelayanan minimum.

Peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan dukungan kuat dari berbagai aspek, termasuk kebijakan yang tepat, sarana prasarana yang memadai, sistem pengaduan yang efektif, dan inovasi pelayanan. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah melalui peraturan dan kebijakan pelayanan yang mendukung standar pelayanan minimum. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik birokrasi yang lambat dan rumit, sehingga menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan yang mendukung pelayanan publik sebaiknya mencakup pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Fasilitas yang memadai, seperti gedung yang layak, teknologi yang modern, serta infrastruktur penunjang yang sesuai, akan mempercepat proses layanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara. Sarana prasarana yang berkualitas tidak hanya memudahkan akses pelayanan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang nyaman dan terjangkau.

Selain peraturan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kebijakan yang mengatur konsultasi dan pengaduan juga harus diperkuat. Sistem pengaduan publik yang efektif akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, atau saran terkait layanan pemerintah. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara transparan dan akuntabel. Proses konsultasi juga harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan yang ada secara optimal.

Penerapan sistem informasi pelayanan publik juga sangat penting untuk mendukung peningkatan standar pelayanan minimum. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Dengan adanya layanan digital yang efektif, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, melakukan pendaftaran, atau mengurus dokumen, yang pada akhirnya akan mengurangi waktu pelayanan dan meminimalkan antrian. Inovasi teknologi ini juga memungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja layanan publik menjadi lebih transparan.

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci dalam peningkatan standar pelayanan minimum. Pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi, baik dalam hal teknologi, mekanisme pelayanan, maupun peningkatan kapasitas aparatur. Dengan melakukan inovasi secara berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan layanan yang lebih dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Kombinasi dari peraturan yang kuat, sarana dan prasarana yang memadai, sistem informasi yang efisien, serta inovasi pelayanan yang terus berkembang, akan mendorong tercapainya standar pelayanan minimum yang lebih tinggi dan memenuhi harapan masyarakat luas.

d. Digitalisasi

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi sangat penting mengingat era modern yang semakin mengandalkan teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Digitalisasi bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga merupakan fondasi dalam memperkuat tata

kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif. Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk memproses data secara lebih cepat, mengurangi birokrasi, dan memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sangat relevan di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana digitalisasi dapat membantu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperbaiki konektivitas antara pemerintah dan masyarakat.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki proses administrasi dan pelayanan publik. Peningkatan dari nilai 1,96 pada tahun 2021 menjadi 2,45 pada tahun 2023 menandakan bahwa upaya digitalisasi mulai menunjukkan hasil yang positif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, serta meminimalkan potensi kesalahan dan korupsi dalam proses birokrasi.

Selain itu, digitalisasi dalam pemerintahan juga memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintahan dan sektor swasta. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat mengelola data dan informasi secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Inovasi digital, seperti e-government dan layanan berbasis aplikasi, juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan, baik melalui pengaduan publik, konsultasi, maupun evaluasi kinerja pemerintah.

Mengingat pentingnya digitalisasi, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan harus terus berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital di kalangan pegawai negeri, dan terus berinovasi dalam layanan publik. Dengan memanfaatkan potensi penuh dari transformasi digital, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya akan lebih efisien dan responsif dalam pelayanan publik, tetapi juga mampu bersaing

dalam tataran nasional dan global sebagai daerah yang adaptif dan progresif di era digital ini.

E. Peningkatan Religiusitas dan Kebudayaan di Masyarakat

Peningkatan religiusitas dan kebudayaan di masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang berbudaya dan bermoral. Religiusitas memiliki peran vital dalam membentuk nilai-nilai spiritual yang kuat di tengah masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai agama, masyarakat Bengkulu Selatan dapat menciptakan harmoni sosial yang mendukung pembangunan daerah. Nilai-nilai keagamaan menjadi landasan etika, moralitas, dan kejujuran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan religiusitas juga berarti memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga, yang pada gilirannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat harus terus didorong, baik melalui pendidikan agama, pembinaan rumah ibadah, maupun kegiatan spiritual yang mempererat kerukunan umat beragama.

Selain itu, kebudayaan daerah adalah warisan yang tidak ternilai harganya dan memiliki dampak yang sangat penting dalam membentuk identitas suatu daerah. Budaya daerah merupakan hasil dari kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kaya akan kearifan lokal, memiliki banyak potensi budaya yang dapat dijadikan aset dalam memperkuat jati diri masyarakat. Kebudayaan Nusantara, termasuk batik, wayang, gamelan, angklung, dan kesenian lainnya, adalah identitas bangsa yang tak ternilai harganya. Melestarikan budaya lokal merupakan bentuk penghargaan terhadap leluhur, serta menjaga agar identitas daerah tidak hilang di tengah arus globalisasi. Daerah seperti Bali yang konsisten melestarikan budaya lokalnya telah berhasil menarik wisatawan mancanegara dan domestik, yang membuktikan bahwa budaya dapat menjadi magnet ekonomi.

Melestarikan kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menciptakan daya tarik wisata yang kuat bagi turis mancanegara maupun domestik. Budaya Nusantara yang unik membuat Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai negara dengan keragaman tradisi dan

kekayaan budaya. Oleh karena itu, Kabupaten Bengkulu Selatan harus terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui berbagai inisiatif, seperti mengenalkan budaya kepada generasi muda, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, serta aktif mengikuti kegiatan kebudayaan. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan melestarikan budaya lokal, baik dengan mempelajari, memperkenalkan, maupun memasarkan produk hasil kesenian daerah hingga ke mancanegara.

Dengan menggabungkan peningkatan religiusitas dan pelestarian budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat membangun masyarakat yang memiliki integritas moral, etika yang baik, serta rasa bangga terhadap warisan leluhur. Pemerintah daerah harus terus mendorong inisiatif ini melalui kebijakan yang mendukung kegiatan kebudayaan dan keagamaan, serta menciptakan ruang bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya. Melalui strategi ini, Bengkulu Selatan dapat menjadi daerah yang maju secara ekonomi dan tetap mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya.

3.2.2. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

A. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu menunjukkan bahwa sejumlah faktor berkontribusi pada perlambatan ekonomi di sektor UMKM, salah satunya adalah tingkat digitalisasi UMKM yang masih rendah. Neraca Perdagangan Digital Bengkulu (Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu) pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar 1,565 triliun rupiah. Disebabkan kurangnya digitalisasi UMKM di Bengkulu, masyarakat lebih cenderung membeli produk dari perusahaan di luar Bengkulu daripada menjual produk produk UMKM ke luar Bengkulu. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah belum berkembangnya mereka. Ini terutama terkait dengan kurangnya akses modal KUKM terhadap dunia perbankan. Selain itu, fungsi dan kelembagaan koperasi masih belum optimal, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah koperasi yang tidak aktif masih cukup tinggi. Selain itu, usaha mikro dan kecil masih belum mencapai tingkat optimalisasi dalam pemasaran dan promosi produk mereka.

Kegagalan pariwisata untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga merupakan masalah penting. Ini disebabkan oleh kurangnya konektivitas antara destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan kunjungan wisatawan untuk waktu yang lama, nilai-nilai hospitality belum terinternalisasi di masyarakat, kurangnya analisis pasar wisatawan, branding, dan aktivitas promosi, dan keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal sebagai pengukur dari PDRB baru sebesar 0,1% pada tahun 2022, sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Banyak permasalahan di sektor pertanian yang ditandai dengan rendahnya produktivitas pertanian yang belum menjangkau kegiatan ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir, sehingga mengganggu jaringan pertanian dan mempersempit area pertanian. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya upaya pembangunan di sektor non-pertanian, rendahnya pengetahuan pertanian, rendahnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pertanian, maraknya hama dan penyakit pada tanaman dan produk pertanian, kurangnya peternakan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Keadaan perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 27,21% pada tahun 2022.

Pada sektor perikanan dan kelautan, nilai tukar nelayan baru pada tahun 2021 mencapai 100,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani ikan sudah baik. Namun permasalahan umum yang dapat menyebabkan penurunan NTN dapat disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap ruang laut dan polusi berat yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan (yang jatuh pada ikan) dan rusaknya lingkungan pesisir, pelabuhan perikanan Bengkulu belum dimanfaatkan dengan baik dan persediaan bahan masih terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut, begitu pula keterampilan teknis nelayan yang masih rendah.

Sementara itu, banyak permasalahan di dunia usaha yang ditandai dengan menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB. Penyebabnya adalah dominasi impor, kerentanan terhadap perubahan harga komoditas, terutama bahan baku primer, dan promosi produk industri lokal (asal Bengkulu) masih dirasa kurang, dan belum meratanya standar dalam produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Selain itu, muncul permasalahan besar dalam industri yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal ini disebabkan produk industri kurang berdaya saing akibat tingginya biaya perekonomian (pajak dan biaya distribusi). Situasi ini disebabkan oleh infrastruktur yang mendukung industri yang tidak terorganisir sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik dan pembangunan industri yang mengalami ketimpangan di Bengkulu, sebagian besar bahan baku industri ini diimpor, dengan partisipasi industri kecil dan 'usaha menengah' (IKM) masih kecil dalam hal pasokan industri dan kurangnya tenaga kerja terampil.

Industri pengolahan di Provinsi Bengkulu masih merupakan industri padat karya yang dominan dan menarik banyak tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Di sisi lain, perkembangan industri mulai membuka jalan bagi industri investasi yang membutuhkan pendidikan, kompetensi dan keterampilan pekerja yang tinggi. Dengan berkembangnya industri global di bidang Industri 4.0 (industri yang menggabungkan kecerdasan buatan, data besar, komputasiawan, kesemuanya Internet dan pencetakan tiga dimensi). Persoalan lain yang perlu direncanakan adalah industri yang berbasis bahan baku impor dan modal impor. Pada tingkat nasional, sekitar 75% impor negara adalah peralatan industri/utilitas. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan baku lokal dan mendukung industri dengan kandungan dalam negeri yang tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi isu penting dalam perencanaan masa depan pengembangan industri di Bengkulu. Permasalahan lainnya adalah infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai, kurangnya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan rendahnya kesiapan teknologi.

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi untuk mengembangkan perekonomian dan daya saingnya. Bengkulu memiliki pelabuhan di Pulau Baai di Sumatera bagian barat, yang berbatasan dengan provinsi terbesar ke-4 di Sumatera. Dengan dibangunnya

proyek jalan Tarns Sumatra ruas Bengkulu - Lubuk Linggau, perekonomian Bengkulu akan berkembang dan tumbuh pesat jika dimanfaatkan dengan baik. Bengkulu juga dapat mengandalkan investasi yang akan mempercepat pembangunan. Share PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu di atas 40%, menunjukkan bahwa pembentukan modal di Provinsi Bengkulu sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Bengkulu mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai investasi.

B. Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Kemiskinan merupakan permasalahan global dan menjadi salah satu perhatian pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah penghapusan seluruh kemiskinan di mana pun. . Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu terbilang cukup rendah. Meski mengalami perbaikan yang signifikan, akan tetapi taraf hidup penduduk di Kabupaten Bengkulu masih di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan Bengkulu mencapai 14,34% pada tahun 2022, angka ini jauh di atas angka nasional yang hanya satu digit sebesar 9,57%.

Selain itu, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu sebagian besar dari lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS per Agustus 2022, penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, SMK, Diploma, dan Universitas sebanyak 43,46%. Artinya, lebih dari 50% pekerja di Bengkulu bekerja pada pekerjaan dengan latar pendidikan yang rendah. Selain itu, 70,26% pekerja di sektor informal berisiko menerima upah rendah. Pendapatan bulanan rata-rata pekerja informal adalah sekitar 1,5 juta, masih di bawah UMP. Hal ini menunjukkan persaingan tenaga kerja di Bengkulu masih rendah dan kesejahteraan pekerja masih rendah.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama pendidikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 adalah 8,91 tahun, dan angka tersebut masih di bawah target wajib belajar 9 tahun. Jumlah penduduk yang bersekolah di perguruan tinggi masih sangat sedikit, sehingga menyebabkan banyak orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar Provinsi Bengkulu. Permasalahan pendidikan cukup kompleks karena berkaitan dengan kemampuan siswa, akses siswa, prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru dan gaya belajar. Keadaan tersebut

tercermin dari rata-rata masa pendidikan kurang dari 9 tahun. Menciptakan sistem pendidikan yang terstandar dapat memberikan kepastian bagi setiap guru dan sekolah. Fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu yang banyak masyarakatnya terampas haknya atas pendidikan adalah memberikan dan menyebarkan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warganya, khususnya di pelosok pusat kota. Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu dimulai dengan peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, pembenahan sekolah dalam sarana dan prasarana serta peningkatan jumlah/kualitas guru (quality education), peningkatan mutu pendidikan (daya saing di pasar kerja); Pemerataan kualifikasi guru serta integrasi dan penguatan kesejahteraan guru. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pengajar yang bertujuan untuk memberikan nasehat kepada guru dan kepala sekolah agar dapat menjadi guru yang berkompeten dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi siswanya, sangat diperlukannya peran guru untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya dari segi akademis tetapi juga dari segi keagamaan, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selain itu, pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dengan tidak mengabaikan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, pelayanan kesehatan jiwa, dan berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 berada di bawah rata-rata nasional sebesar 69,69 tahun, sedangkan rata-rata nasional sebesar 73,5 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Bengkulu perlu mempercepat peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutamak peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, dan peningkatan jumlah dan kualitas dokter dan paramedis. pemberian jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerjasama dengan perguruan tinggi; dan memberikan kesejahteraan kehidupan para dokter dan paramedis.

C. Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

a. Infrastruktur

Dari segi infrastruktur dasar, kondisi jalan di provinsi ini menurut dalam keadaan baik hanya sebesar 75,92%. Panjang jalan utama di Provinsi Bengkulu hanya 166 km, terpendek di Sumatera. Hal ini mengakibatkan lebih sedikit kendaraan bertonase yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan jasa, sehingga meningkatkan biaya kargo. Menurut informasi Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu (Maret 2023), tarif kargo di Bengkulu sangat tinggi yakni Rp. 179 per km, sehingga menggunakan jalan di Bengkulu tidak efisien. Selain itu, irigasi kewenangan provinsi yang berada dalam kondisi baik hanya sebesar 56,72%, sedangkan jembatan kewenangan provinsi yang berada dalam kondisi baik sebesar 68,14%. Hal ini sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri karena tingkat kualitas infrastruktur yang belum memenuhi harapan masyarakat. Apalagi masih terdapat kesenjangan pembangunan di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air minum bersih masih rendah yakni sebesar 79,71% pada tahun 2021, berada di bawah angka nasional sebesar 90,21%. Termasuk juga rumah tangga yang memiliki RTLH lebih tinggi yaitu mencapai 46,28% pada tahun 2021.

Pada sektor infrastruktur strategis, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlunya peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai seperti membangun/mengembangkan terminal curah cair, terminal peti kemas, conveyor belt dan pengerukan alur.
2. Perlunya pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Perlunya Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan/ASDP seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Enggano (Malakoni dan Kahyapu), Pelabuhan Pengumpan di Mukomuko dan Pelabuhan Pino Raya, Bengkulu Selatan;

4. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas di bandara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano;
5. Perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur tenaga listrik antara lain pengembangan PLTP Hulu Lais, PLTU Pulai Baai, pembangunan PLTP di Kabupaten Kepahiang dan jaringan transmisi sutt dan gardu induk;

Bengkulu sebenarnya memiliki infrastruktur terpenting yaitu pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai memiliki kolam alami terluas di Indonesia namun menghadapi kendala dalam pengembangannya. Pelabuhan Pulau Baai masih terus mengalami pendangkalan, dengan kedalaman hanya 11 meter. Panjang dermaga hanya 999 meter dan hanya terdapat 1 gudang. Hal ini mengakibatkan operasi bongkar muat meningkat karena harus memindahkan muatan keluar dari dermaga.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berkaitan dengan kapasitas transportasi, kualitas lingkungan harus diperhatikan, serta daya dukung, daya tampung, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang seimbang dan harmonis menjadi pertimbangan utama dalam penataan ruang di wilayah Provinsi Bengkulu. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Pembangunan yang seimbang harus didukung oleh penciptaan sistem dan infrastruktur perkotaan yang dapat memperkuat hubungan antara kegiatan-kegiatan unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri.. Konektivitas jaringan perlu ditingkatkan demi kelancaran pergerakan orang, barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Pembangunan berbasis komunitas dicapai dengan pemenuhan sarana prasarana pemukiman seperti menyediakan perumahan, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, layanan pembuangan sampah dan pengelolaan limbah. Pengelolaan sampah daerah, sanitasi perorangan dan masyarakat, pelayanan air minum, air bersih dan sanitasi perlu ditingkatkan, khususnya

pelayanan dan distribusi perlu diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri untuk pengendalian dan pengelolaan pencemaran sungai.

b. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kondisi geografis yang berhadapan dengan zona subduksi pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia hal ini mengakibatkan resiko dan potensi gempa bumi serta tsunami di wilayah Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan dua (dua) Samudera dan terletak di antara dua Lempeng Benua: Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Kedua Lempeng Benua ini dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang mungkin terjadi. Selain itu, Patahan Semangko yang membentang dari Aceh hingga Lampung melintasi wilayah Provinsi Bengkulu, yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan gempa bumi.

Provinsi Bengkulu yang terletak di sisi Barat Pulau Sumatera dalam sistem geologi/tektonik merupakan suatu daerah yang rumit dan rawan mengalami bencana gempa bumi, tsunami serta letusan gunung api karena terletak pada daerah subduksi antara Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia. Lokasi ini dilalui oleh sesar Sumatera yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Bengkulu juga memiliki salah satu gunung api di Indonesia yakni gunung Kaba, gunung ini masih aktif dan merupakan gunung api tipe A. Wilayah yang tergolong dalam area rawan bencana diantaranya adalah Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana gempa bumi dengan skala intensitasnya berkisar V-VII Skala MMI (MODIFIED MERCALLIINTENSITY). Seluruh wilayah Kota Bengkulu, Kota Curup, serta Kota Kepahiang adalah area dengan kerawanan tinggi bencana gempa. Berdasarkan data, tercatat bahwa Kota Bengkulu kerapkali mengalami gempa, dan pernah mengalami bencana tsunami pada tahun 1833. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu tahun 2022, jenis bencana yang dengan frekuensi paling sering terjadi di Provinsi Bengkulu adalah tanah longsor (2 kejadian) dan banjir (36 kejadian). Kejadian Bencana dengan urutan teratas terjadi di Seluma (11 kejadian), Kabupaten Bengkulu Utara (6 kejadian) dan Kota Bengkulu (5 kejadian).

D. Pengembangan Konektivitas Daerah

Provinsi Bengkulu memiliki tantangan dalam aspek Konektivitas. Kurangnya Optimalisasi integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum maksimalnya usaha meperkuat hubungan internasional sebagai gerbang perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan kajian geografis, Bengkulu berada pada sisi barat Pulau Sumatera, ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan kelilingi oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Kawasan-kawasan hutan yaitu Hutan Lindung dan Taman Nasional yakni seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasiona Bukit Barisan Selatan adalah kekayaan alam yang mengitari Provinsi Bengkulu. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui jalur darat hanya dapat dilalui pada 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung.

Untuk jalur Udara saat ini terdapat 1 (satu) bandar udara utama yakni Fatmawati Soekarno, dan 2 (dua) bandara perintis yakni Bandara Kabupaten Mukomuko dan Pulau Enggano. Pada jalur laut, Provinsi Bengkulu memiliki 3 Pelabuhan yang dapat diakses yakni Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Bantal Kabupaten Mukomuko, dan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. Minimnya akses konektivitas yang dimiliki provinsi Bengkulu, menjadi alasan perlunya terbentang akses yang ekstensif , baik darat, laut dan udara. Persoalan ini tentu akan memberi pengaruh pada keterbatasan alur distribusi barang, jasa dan penumpang. Keterbukaan aksesibilitas Provinsi Bengkulu masih cukup berat di wujudkan karena posisi geografis Bengkulu yang ditutupi oleh kawasan-kawasan hutan.

Keterisolasian ini harus segera diatasi oleh provinsi Bengkulu guna kelancaran perjalanan arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari segi jarak tempuh dan besaran biaya angkut. Pola-pola pembangunan koridor juga dapat ditempuh dengan membangun kerjasama antarprovinsi sekitar guna meningkatkan akses lintas provinsi. Hal ini bertujuan agar

Bengkulu memiliki nilai lebih dan daya saing untuk memikat dan meyakinkan investor.

E. Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

a. Sektor Pertanian

Aktivitas perubahan penggunaan lahan (land use change) dan pengelolaan atau manajemen areal pertanian, khususnya manajemen penggenangan lahan sawah, pemakaian pupuk terutama urea, dan peternakan (khususnya enteric atau sendawa ternak dan penindakan kotoran ternak) merupakan sektor pertanian yang menyumbang emisi Gas Rumah Kaca. Pada permasalahan emisi GRK di bidang pertanian dibutuhkan komitmen kebijakan dan konsistensi untuk mendukung program PPRK dari pemerintah daerah, terkhusus pada perubahan penggunaan lahan dan manajemen lahan pertanian yang tepat.

b. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

Perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan (Hutan) adalah faktor yang menyebabkan Persoalan emisi GRK di Provinsi Bengkulu.

c. Sektor Energi dan Transportasi

Berdasarkan dokumen IPCC 2006, pada sector energy terdiri dari 4 (empat) aktivitas: 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer 2) Konversi sumber energi primer menjadi energy sekunder melalui proses pengolahan di kilang minyak dan pembangkit listrik, 3) Transmisi dan distribusi bahan bakar, dan 4) Penggunaan bahan bakar yang digunakan pada peralatan stasioner (Tidak bergerak) dan mobile (bergerak).

d. Sektor Limbah

Penghasil emisi gas rumah kaca pada bidang pengelolaan limbah berasal dari limbah padat atau persampahan dan limbah air (domestik maupun industri). Namun limbah domestik menjadi fokus perhitungan pada RAD-GRK.

F. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

a. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Selain bertujuan untuk meningkatkan produksi, mengembangkan produk yang bermutu juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Bahan baku di Provinsi Bengkulu yang melimpah tidak diiringi dengan berkembangnya industri pendukung, sehingga bahan baku tidak dapat diolah menjadi bahan turunan maupun produk jadi. Komoditas unggulan yang telah terhilirisasi menimbulkan banyak multiplier effect, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan impor, peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upaya reformasi bottom line sistem produksi lama sangat diperlukan untuk mengembangkan industri yang dapat mendukung dan merangsang perekonomian. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya cerdas untuk meningkatkan kapasitas industri negara yang merupakan sumber utama pembangunan perekonomian di Bengkulu. Dengan demikian, peningkatan nilai tambah industri lokal akan meningkatkan daya saing perekonomian dan diharapkan semakin menguat.

Akselerasi industri dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama adalah hilirisasi komoditas pertanian yang merupakan bahan baku menjadi produk bernilai tambah didalam negeri. Kedua, menstimulus produktivitas dan kemampuan kompetisi industri dalam negeri. Ketiga, mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, proses pengambilan keputusan perlu dipercepat untuk menghilangkan hambatan birokrasi, dan kelima, pasar domestik perlu diperbesar integrasinya.

Komoditas yang terhilirisasi bertujuan untuk meningkatkan produksi, efisiensi pengolahan meningkatkan kapasitas daya jual. Hal ini akan memberikan nilai tambah, memperkuat struktur industri dan menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha. Produk akhir yang akan dikembangkan adalah berbasis sektor pertanian, meliputi pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Diharapkan dengan rencangan ini, Bemgkulu mampu bersaing dari segi manufaktur, industri berbasis agro dan keunggulan pemasaran hasil, untuk produk dalam negeri maupun ekspor.

b. Pembangunan Kemaritiman yang Integratif

Bengkulu memiliki potensi maritim yang besar karena berbatasan dengan wilayah laut. Luas perairan laut yang dapat dikelola oleh Provinsi Bengkulu mencapai 206.127,6 km2, atau 19.446.000 hektar. Ini terdiri dari perairan laut territorial (sampai batas 12 mil), yaitu 12 x 1,852 km x 525 km = 11.667,6 km2, atau 1.166.760 hektar, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (sampai batas 200 mil), yaitu 525 km x 200 mil x 1,852 km = 194.460 km2, atau 19.446.000 hektar. Perbandingan antara luas wilayah daratan dan perairan laut yang dapat dikelola Provinsi Bengkulu adalah 19.446.000 : 1.979.515, atau 1: 9,8. Dengan kata lain, luas perairan laut yang dapat dikelola Provinsi Bengkulu jauh lebih besar daripada luas wilayah daratannya. Selain itu, ada beberapa pulau kecil di wilayah perairan laut Provinsi Bengkulu, termasuk Kawasan Pulau Enggano dan beberapa pulau kecil yang terletak di sekitarnya, seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu dan Pulau Karang Baru, Pulau Tikus dan Pulau Mega. Dua dari pulau kecil ini merupakan pulau kecil terluar dari 92 pulau kecil terluar yang ada di seluruh wilayah perairan laut di Indonesia, yakni Pulau Enggano dan Pulau Mega.

Dari perspektif kemaritiman, Bengkulu memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang besar, termasuk potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan laut, energi dan sumber daya mineral. Bidang kemaritiman terdiri dari empat (empat) sektor utama: kelautan dan perikanan (termasuk sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), bidang wisata bahari, bidang perhubungan laut, dan bidang energi serta sumber daya mineral. Sebagian besar, potensi sumber daya pesisir dan lautan belum dikelola maksimal, jika potensi kemaritiman ini digunakan secara efektif dan berkelanjutan, akan sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Nilai Tukar Nelayan baru saat ini mencapai 100,89% pada tahun 2021, menurut data. Ini menunjukkan bahwa kemampuan nelayan untuk menukar produk perikanan tangkap mereka sudah lebih besar daripada barang atau jasa yang dikonsumsi

oleh rumah tangga mereka dan kebutuhan mereka untuk menghasilkan produk perikanan tangkap.

Dengan potensi maritim Bengkulu, kesejahteraan nelayan seharusnya bertambah. Pembangunan kemaritiman yang terpadu membutuhkan kebijakan tertentu sehingga dapat optimal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diintegrasikan dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan poros maritim, infrastruktur, pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, kepariwisataan, pemberdayaan nelayan dan kebijakan pendukung lain. Kemaritiman harus dibangun berdasarkan pada potensi lokal, sehingga perlu kebijakan khusus yang berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman, dan penganekaragaman peluang kerja bagi para nelayan.

G. Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

Bengkulu memiliki banyak potensi, bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi juga potensi budaya dan sejarah yang luar biasa. Potensi-potensi ini dapat membuat Provinsi Bengkulu, tanah kelahiran ibu negara pertama Indonesia, Ibu Fatmawati Soekarno, menjadi kota wisata yang kompetitif. Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu memerlukan perhatian yang lebih besar karena memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Saat ini, upaya Bengkulu untuk meningkatkan pariwisata sudah terbilang baik namun belum mencapai puncaknya, terutama karena pandemi COVID-19 merusak sektor pariwisata pada tahun 2020. Pada kondisi normal tahun 2019, Provinsi Bengkulu hanya mampu mencatatkan tingkat hunian kamar sebesar 67,97% dan rata-rata lama menginap hanya 1,8 hari. Pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya tingkat hunian kamar sebesar 45,45% dan durasi menginap rata-rata hanya 1,31 hari. Disamping itu, investasi pada sektor pariwisata masih terbilang rendah, yang berdampak pada perannya dalam pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,1% pada tahun 2022.

Jika pariwisata dikembangkan menjadi suatu bisnis, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan dan kemakmuran. Selain itu, dengan semua potensinya, pariwisata diharapkan menjadi mesin yang membantu pembangunan ekonomi nasional dan lokal. Untuk mencapai hal ini, banyak komitmen

diperlukan, termasuk perencanaan dan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, Bengkulu harus memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Ini harus mencakup pembangunan pariwisata dalam segi : wilayah destinasi, daya tarik, aksesibilitas, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; pengembangan investasi pariwisata; pengembangan pasar wisatawan; pembentukan citra, Pengembangan Kemitraan, promosi, penguatan struktur Industri, daya saing produk, ekonomi kreatif, tanggung jawab ekologis, dan penguatan kelembagaan serta SDMnya.

H. Peningkatan Kinerja Birokrasi

Siklus manajemen pembangunan tentunya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bagus, yang mencakup kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas atas kinerja pembangunan, dan pelayanan publik yang prima. Sebagai pelayan publik, aparatur dituntut untuk menyajikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mencapai performa pelayanan prima, komunikasi, keterbukaan dan informasi yang transparan menjadi modal utama. Untuk meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan masyarakat, ruang pengaduan masyarakat harus lebih gamblang. Dengan demikian, pengembangan teknologi yang memungkinkan e-Government menjadi sangat penting sebagai perangkat yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, layanan seperti administrasi kependudukan, kemudahan berusaha, perijinan, dan pendidikan serta kesehatan juga harus dioptimalkan.

Salah satu kriteria untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah akuntabilitas kinerja pembangunan. Perencanaan, penganggaran, dan implementasi adalah langkah-langkah yang membentuk akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kinerja untuk mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah. Ini akan dimulai dengan proses perencanaan untuk menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja yang relevan, selaras, dan konsisten. Hasil penilaian Kementerian PAN RB menunjukkan nilai SAKIP Provinsi Bengkulu sebesar 69,30%.

Kemandirian fiskal adalah salah satu isu yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Bengkulu termasuk dalam kategori daerah yang belum mandiri dari segi tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Bengkulu terhadap

pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan dua hal: pertama, kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Bengkulu belum optimal. Kondisi PAD saat ini tampaknya tidak lagi cukup untuk membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang setiap tahunnya terus meningkat. Kedua, beban belanja APBD Provinsi Bengkulu telah meningkat secara signifikan, yang berdampak pada tekanan pembiayaan APBD. Kemungkinannya ada pada kewajibanpemerintah daerah harus terus menstabilisasi pelayanan pemerintahan umum dan juga pembangunan daerah.

ASN yang berkualitas tinggi dan profesional bersama dengan kelembagaan yang optimal akan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Di Provinsi Bengkulu, indeks profesionalitas ASN masih cukup rendah. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2021 baru mencapai 73,87. Abdi negara, atau sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah pelayan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari pengaruh politik untuk menyediakan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk mencapai hakikat ASN berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu, peningkatan kemampuan dan mutu ASN merupakan kunci mutla, dan ASN harus ditempatkan dengan tepat sesuai kebutuhan. Begitupun penguatan lembaga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa juga penting di optimalkan efisiensi dan efektifitasnya.

Untuk menjaga stabilitas wilayah selama lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus bekerja sama dan bekerja sama dengan semua tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang aman, damai dan toleran bagi seluruh masyarakat Bengkulu. Untuk memastikan bahwa program pembangunan di Bengkulu berjalan dengan lancar dan berhasil, aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat kunci dan strategis. Selain itu, diharapkan bahwa keadaan kondusif di wilayah ini akan memungkinkan untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama, memaksimalkan perlindungan bagi kebebasan sipil, dan menciptakan masyarakat Bengkulu yang lebih rukun dari segi ketertiban sosial.

3.2.3. Isu Strategis Sumatra Dalam RPJPN

Kabupaten Bengkulu Selatan memang tidak disebutkan secara langsung di dokumen RPJPN. Dokumen RPJPN memberikan arahan kepada Pulau Sumatra dimana Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk didalamnya. Beberapa poin penting tentang pembangunan di pulau Sumatra adalah sebagai berikut:

a. Pulau Sumatra memiliki ragam sumber daya alam yang melimpah dimana secara nasional 50-70 persen pasokan karet, kopi, dan kelapa sawit berasal dari Pulau Sumatra. Sumber daya alam yang dihasilkan diperkirakan dapat ditingkatkan volume produksinya di masa yang akan datang. Selain itu, produksi tanaman pangan yang tinggi membuat beberapa provinsi di pulau Sumatra menjadi lumbung pangan nasional. Pulau Sumatra juga masih memiliki cadangan energi batubara yang diperkirakan dapat bertahan hingga 70 tahun mendatang. Pulau Sumatra juga memiliki bauran pembangkit sumber energi terbarukan terbesar dan potensi EBT terbesar secara nasional. Potensi energi terbarukan di Wilayah Sumatra antara lain surya (1.173,70 GW), panas bumi (9,48 GW), air (6,71 GW), dan angin (11,24 GW).
b. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi Pulau Sumatra untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Walaupun berada pada jalur ALKI, hingga saat ini Indonesia masih melakukan ekspor melalui Singapura, hanya sebesar 15 persen ekspor dilakukan secara langsung. Diharapkan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan keunggulan geografis Indonesia yang terletak pada jalur ALKI dan perdagangan internasional, rantai pasok yang terbentuk berpotensi menjadi lebih efisien. Namun demikian, potensi tersebut masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data Wilayah Sumatra, beberapa indikator pembangunan masih menunjukkan kinerja di bawah rata-rata nasional seperti: laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran, angka partisipasi murni SMA, harapan lama sekolah, dan prevalensi ketidakcukupan pangan
c. Secara umum, berdasarkan analisis *growth diagnostics,* faktor penghambat pembangunan ekonomi antara lain infrastruktur di Provinsi Sumatra Barat dan Riau; regulasi dan institusi di Provinsi Sumatra Utara; SDM Pendidikan di Provinsi

Sumatra Selatan dan Riau; serta isu makro dan fiskal di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Jambi dan Bengkulu. Hal menarik adalah isu infrastruktur yang belum memadai terjadi secara merata di seluruh provinsi di Pulau Sumatra. Isu infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai aspek utamanya konektivitas, yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran.

Ekonomi

Terdapat beberapa isu utama ekonomi di Pulau Sumatra yang diantaranya adalah:

1) Kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya belum beroperasi optimal;
2) Komoditas unggulan baik berupa pertanian dan perikanan maupun tambang belum bernilai tambah tinggi;
3) Jumlah turis asing terbatas akibat (tidak terpadunya Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ansilari); dan
4) Sumber Daya Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA.

Di Pulau Sumatra masih terdapat ketimpangan ekonomi antara pantai timur dan pantai barat Pulau Sumatra. Kawasan industri beraglomerasi di wilayah timur dengan ragam aktivitas industri yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengikuti pola *outlet* industri dan perdagangan yang banyak berlokasi di pantai timur Sumatra dengan tujuan mengoptimalkan potensi ALKI I di Selat Malaka. Sementara itu, konektivitas *hinterland* sebagai penyedia bahan baku dari pantai barat masih rendah, sehingga bahan baku tidak terserap dengan optimal. Selain itu, rendahnya investasi juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena industri tidak beroperasi secara optimal.

Isu kemaritiman khususnya perikanan tangkap dan perikanan laut, juga menjadi permasalahan penting. Dimana pusat-pusat pelelangan ikan masih terbatas dan kapasitas nelayan melaut masih di bawah standar, baik dari sisi alat penangkapan maupun jenis kapalnya. Selain itu, rantai distribusi ikan juga belum optimal disebabkan oleh minimnya ketersediaan *cold storage*.

Stabilitas makro terutama inflasi perlu dijaga di Pulau Sumatra. Isu utama pada komponen makanan dan transportasi yang selama tahun 2022 mengalami

peningkatan akibat penyesuaian harga BBM. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang memiliki capaian inflasi konsisten di atas nasional sejak tahun 2020 seperti Provinsi Aceh dan Jambi sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi.

Sosial

Masih terlihat kesenjangan sosial di Pulau Sumatra dengan tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di beberapa provinsi, terutama kemiskinan ekstrem di daerah 3T seperti di Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano. Pada tahun 2022, rata-rata tingkat kemiskinan Pulau Sumatra mencapai 9,47 persen, di bawah rata-rata angka nasional. Namun 4 (empat) provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dimana Provinsi Bengkulu termasuk di dalamnya.

Rata-rata tingkat pengangguran Pulau Sumatra di tahun 2022 mencapai 5,3 persen. Angka tersenut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Terdapat empat provinsi dengan rata-rata tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dimana Provinsi Bengkulu tidak terdapat di dalamnya. Keempat provinsi dengan rata-rata tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional tersebut adalah: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pulau Sumatra baru mencapai 9 tahun, angka ini masih jauh dari harapan 12 tahun. Hal tersebut disebabkan karena belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas di Pulau Sumatra. Dengan rendahnya capaian RLS, Pulau Sumatra belum mampu bersaing dengan daerah lain dan negara tetangga dalam upaya peningkatan kesempatan bekerja. Angka RLS terendah berada di Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian kesehatan di Pulau Sumatra ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting tahun 2022 terutama di Provinsi Aceh yang menjadi provinsi tertinggi ke-5 (31,2%). Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2021 di Provinsi Aceh (27,4%) dan Sumatra Barat (45,6%) juga masih jauh dari rata-rata nasional (65,8%)

yang salah satunya karena pemahaman di masyarakat tentang isu halal dan haram vaksin yang digunakan.

Penyediaan layanan kesehatan belum merata, khususnya di daerah 3T. Kurangnya jumlah pusat pelayanan dan tenaga kesehatan menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata ditunjukkan dengan baru 57,3% Puskesmas di Sumatra yang memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan dengan Bengkulu menjadi provinsi dengan ketersediaan tenaga kesehatan terendah. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit di wilayah perairan seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas.

Penyediaan layanan Pendidikan belum merata, khususnya di daerah 3T. Ketersediaan satuan pendidikan menengah atas masih minim, utamanya di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatra Utara. Selain itu, akses internet baru mencapai 40-60 persen sehingga belum mampu mendorong kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sebagian besar perguruan tinggi di Sumatra masih terakreditasi rendah atau belum terakreditasi. Hingga tahun 2022, terdapat 3 provinsi yang memiliki lebih dari 30 persen perguruan tinggi yang telah terakreditasi A maupun B. Namun demikian, masih terdapat 7 provinsi lain dengan presentase perguruan tinggi terakreditasi A atau B sebanyak 20 persen. Artinya lebih dari 70 persen perguruan tinggi di Pulau Sumatra masih terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antardaerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Wilayah Sumatra seperti Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) dan Pelabuhan Boom Baru (Sumatra Selatan), sebagai hub domestik terkendala keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Sementara itu, Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatra Utara) yang dirancang sebagai pelabuhan hub internasional, terkendala belum siapnya pengembangan fasilitas terminal dan kawasan serta rantai pasok dan jasa-jasa pendukung pada *hinterland*.

Bandara utama di Wilayah Sumatra seperti Bandara Kualanamu (Sumatra Utara), Hang Nadim (Kepulauan Riau), Sultan Mahmud Badaruddin II (Sumatra Selatan), dan bandara-bandara lainnya masih memerlukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah *hinterland* dan multimoda. Bandara perairan dan

seaplane belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan.

Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Sementara itu, Jalan Tol Trans Sumatra Aceh – Lampung maupun koridor penghubung (Padang – Pekanbaru, Bengkulu – Palembang, dan Sibolga – Tebing Tinggi) belum tuntas terbangun.

Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatra. Transportasi sungai dan danau di Wilayah Sumatra, masih sebatas dikembangkan untuk angkutan barang dan penyeberangan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata.

Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum massal di metropolitan Medan masih belum optimal, sementara kota-kota besar lainnya seperti Palembang, Pekanbaru, dan Padang belum dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi.

Layanan ketenagalistrikan di Wilayah Sumatra masih kekurangan pasokan daya atau cadangan di beberapa sistem, pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari pengaturan minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di wilayah Pulau Sumatra belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Pulau Sumatra sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai 99,07 persen area wilayah pemukiman (lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 96,97 persen). Jangkauan jaringan seluler 4G terendah ada

di Provinsi Sumatra Barat dengan jangkauan sekitar 97,77 persen dari area wilayah pemukiman. Sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi dapat dilihat pada total kepemilikan kartu elektronik di seluruh wilayah Pulau Sumatra yang baru mencapai sekitar 12,64 juta kartu elektronik.

Pulau Sumatra juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah 3T. Permasalahan yang dihadapi diantaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di kota metropolitan Medan dan Palembang. Pulau-pulau kecil di Wilayah Sumatra juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

Berdasarkan Tabel 5.1.2, rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Terkait akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki akses terendah karena fisik bangunan belum sesuai standar kelayakan.

Selain itu, perkembangan perkotaan di Wilayah Sumatra ditandai tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur *(urban sprawl)*. Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Pulau Sumatra.

Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) dan Wilayah Metropolitan Palembang (Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin) masih menghadapi isu permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di wilayah inti bisnis dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Beberapa permasalahan tata kelola kewilayahan dikarenakan oleh kualitas aparatur daerah yang rendah. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal di banyak daerah. Terdapat 9 provinsi dengan capaian Indeks SPBE

dalam kategori baik dan 1 provinsi dengan capaian Indeks SPBE dalam kategori cukup. Belum ada provinsi di Pulau Sumatra yang memperoleh capaian Indeks SPBE dalam kategori sangat baik dan memuaskan.

Integritas tata kelola pemerintahan daerah dan desa masih rentan praktek korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa tindakan penyelewengan jabatan maupun dana publik untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 menunjukkan 8 dari total 10 provinsi di Pulau Sumatra memiliki kategori indeks sangat rentan. Capaian ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada tingkat Kementerian/Lembaga. Lemahnya pengawasan dan sistem pencegahan korupsi dari otoritas terkait menjadi pemicu utama rendahnya integritas tata kelola pemerintah daerah dan desa.

Sistem merit pada beberapa provinsi di Pulau Sumatra belum baik. Beberapa provinsi masih memiliki capaian indeks sistem merit dalam kategori buruk, yaitu: Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Lampung. Sedikit lebih baik, Provinsi Sumatra Selatan memperoleh capaian dengan predikat kurang. Adapun 6 provinsi lainnya telah memperoleh predikat baik. Belum ada provinsi di Pulau Sumatra yang memiliki capaian predikat sangat baik.

Kemandirian fiskal di Wilayah Sumatra masih perlu menjadi perhatian. Ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD) masih tinggi, utamanya di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Jambi, dan Bengkulu. Kualitas belanja daerah masih rendah. Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 39,08 persen dan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset hanya 15,48 persen terhadap total belanja daerah, yang mengakibatkan rendahnya tingkat SPM dan pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal. Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Aceh pemanfaatannya masih belum optimal, terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) provinsi setiap tahun yang cukup besar. Sementara SiLPA di kabupaten/kota relatif lebih kecil.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sebagian besar Wilayah Sumatra berbatasan dengan negara lain, sehingga keamanan laut berpotensi menjadi ancaman. Sebagai contoh, wilayah Natuna yang terletak di Laut Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sementara itu, Selat Malaka merupakan jalur maritim yang menjadi jalur kapal dunia juga rawan akan

ancaman keamanan. Hal ini terlihat dari munculnya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan praktik IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) *Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711, seperti penyelundupan benih lobster ke Singapura melalui perairan Batam. Selain itu, ragam rawan kejahatan di daerah perbatasan diantaranya perdagangan senjata api, pengedaran narkoba, *human trafficking*, dan TKI ilegal yang umumnya terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan di laut perbatasan yang belum didukung oleh fasilitas yang mumpuni, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta belum kuatnya implementasi regulasi pertahanan keamanan di Indonesia.

Selanjutnya, abrasi membuat batas wilayah negara menjadi lebih sempit dan akan memengaruhi garis ZEE Indonesia yang pada akhirnya dapat memengaruhi kedaulatan batas negara.

Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Isu sosial budaya mencakup aspek keluarga, gender Isu sosial budaya mencakup aspek keluarga, gender, penyandang disabilitas, kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan. Secara umum dalam hal keluarga dan gender, Pulau Sumatra berada pada posisi yang baik dengan ditunjukkan pada Indeks Kualitas Keluarga mendekati 70 persen dan Indeks Ketimpangan Gender berada di rentang 0,21-0,4. Di sisi lain, Pulau Sumatra juga memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar kedua bila dibanding pulau lain di Indonesia yakni sebanyak 1,3 juta jiwa (21,75 persen). Terkait aspek kerukunan beragama dan pembangunan kebudayaan, provinsi yang memiliki skor kurang baik adalah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.

Isu lingkungan di Pulau Sumatra secara garis besar meliputi deforestasi, tata kelola wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), habitat satwa endemik wilayah, serta kerentanan pesisir. Masalah pertama yang muncul adalah peningkatan kumulatif deforestasi dari rentang tahun 2000-2010, tutupan hutan berkurang seluas 1,7 juta hektar. Penurunan tutupan hutan diperkirakan terus meningkat menjadi sekitar 4,2 juta hektar pada tahun 2045. Sebagai akibat cepatnya laju deforestasi menyebabkan permasalahan siklus air di Sumatra. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya ketersediaan air di Pulau Sumatra, khususnya di Wilayah Sungai (WS) Seputih-

Sekampung dan WS Toba-Asahan. Masalah lainnya adalah penurunan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatra bagian timur dan barat yang cukup tinggi.

Wilayah Pantai Barat Sumatra memiliki risiko bencana tinggi karena terletak di wilayah vulkanologi dan patahan tektonik. Hal ini diperburuk oleh kondisi lingkungan akibat abrasi dan pemanasan global. Wilayah Pantai Barat Sumatra terdiri dari kota-kota kecil dan sedang dengan kegiatan ekonomi relatif rendah. Apabila terjadi kejadian kebencanaan seperti tsunami, gempa, dan hidrometeorologi, akan berdampak signifikan kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pulau Sumatra berpotensi untuk menerapkan konsep *circular economy.* Pulau Sumatra merupakan produsen terbesar minyak sawit, dengan limbah organik yang juga besar. Dengan menerapkan konsep *circular economy*, limbah tersebut dapat dikembangkan menjadi PLTBm (berbasis limbah padat sawit) dan PLTBg (berbasis Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit/POME). Hal ini dapat juga diterapkan untuk limbah lain dari hasil pemrosesan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Banyaknya pelaku usaha dalam sektor perkebunan, industri, dan energi di Pulau Sumatra, menjadi potensi untuk penerapan circular economy pada pengolahan air limbah domestik dan sampah. Limbah organik dapat menjadi RDF biomassa pada PLTU dan pabrik semen. Hal ini mendukung visi penggunaan biomassa pada operasional PLTU pada 2045.

H. Arah Kebijakan Wilayah Sumatra

Wilayah Sumatra berkontribusi pada perekonomian Indonesia sekitar 22,04 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sumatra berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada angka 5,7 persen per tahun. Peluang kontribusi ekonomi Pulau Sumatra bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (*silk road*) dan wilayah ALKI I dan SLOC (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah Timur dan Barat dunia. Terdapat beberapa kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai

kawasan pengungkit ekonomi baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian-agroindustri, pariwisata, perkotaan, dan kawasan konservasi strategis. Termasuk optimalisasi beberapa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti: Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan (WM), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan baru ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Untuk mendukung ini, *backward* dan *forward linkage* dan konektivitas untuk efisiensi biaya produksi masih perlu ditingkatkan. Pusat-pusat pertumbuhan harus lebih diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi melalui upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya. Sementara itu, pada beberapa wilayah di Sumatra telah diterapkan rintisan *Smart City, Creative Financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Dokumen RPJPN mengarahkan wilayah Sumatra untuk menjadi Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Pengembangan Wilayah Sumatra diarahkan ke dalam 6 (enam) perioritas:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T
2. Pembangunan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atrasksi yang unik, serta amenitas, aksebilitas, dan ancillary yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan potensu blue energy.

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infratructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT
6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi resiko pada wilayah perkotaan, pedesaan, dan wilaya sepanjang pantai barat Sumatra

Arah Kebijakan Transformasional

a. Transformasi Sosial

   Transformasi Sosial diarahkan melalui kebijakan

   1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
   2. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan beban tinggi;
   3. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan adfirmasi pendayaguanaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;
   4. Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya terutama di Aceh dan Sumatran Barat;
   5. Pengembanngan sistem pelayanan kesehatan berbasis perairan di provinsi berkarakter kepulauan;

6. Pemenuhan sarana prasaranan mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
7. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
8. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi;
9. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan;
10. peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomu seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI;
12. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif melalui peningkatan jumlah akreditasi sekolah dan sertifikasi pendidik, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
13. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah;
14. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
15. Percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengentasan kemiskinan melaluu perlindungan sosial adaptif pada daerah afirmasi 3T di seluruh Wilayah terutama Aceh, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung; dan
16. perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui penyediaan insentif tercapainya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja,

perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;

b. Transformasi Ekonomi

RPJPN mengarahkan transformasi ekonomi wilayah Sumatra sebagai "Industri Berbasis SDA dan *Hub* Ekonomi Biru Barat Indonesia yang diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangang industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahaan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengelohan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkit energi listrik pada mulut tambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan metaerial dan metalurgi, industri berbasis ICT)
2. Optimalisasi kawasan strategis (KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KPBPB Sabang, dan kawasan ekonomi lainnya) sebagai *ingine of growth*.
3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, khususnya Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, antara lain pengembangan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir barat Sumatra (WPP-572), perairan Selat Malaka (WPP-571), dan perairan Natuna-Anambas (WPP-711);
4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;
5. Pengambangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian panganga di Aceh Utara, Ache Barat, Sumatra Barat, dan Palembang-Bandar Lampung, serta kawasan strategis pertanian herbal di Aceh Tengah yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi;

6. Peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif;
7. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
8. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerjasama internasional lainnya;
9. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja nekerja sama DUDI;
10. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di Pulau Sumatra melalui penguatan konsep Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ansilari (A4);
11. Pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, pengembangan konektivitas Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka) dan konektivitas Sumatra-Jawa (di Selat Sunda), yang bertujuan untuk menwujudkan konektivitas Sumatra-Jawa-ASEAN guna menurunkan biaya logistik;
12. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang, dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkal Pinang.

Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk:

1. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batubara, dan gas);

2. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (termasuk pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Sumatra maupun antar pulau;
3. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di Wilayah Sumatra;
4. Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
5. Peningkatan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk memastikan ketersediaan listrik pada saat beban puncak; serta
6. Pemanfaatan teknologi jaringan transmisi antar-wilayah dalam rangka transfer energi skala besar untuk meningkatkan kestabilan sistem serta mengurangi efek negatif transfer energi skala besar antara wilayah Sumatra dan Jawa.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di Wilayah Sumatra dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta
3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.

c. Transformasi Tata Keloka

Transformasi Tata Keloka diarahkan melalui kebijakan:

1. Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
2. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
3. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

4. Pembagian kewenangan antar tingkat pusat dan daerah dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi daerah, serta peningkatan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
6. Peningkatan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; serta
7. Pengawasan proses pengembangan karir, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan melalui:

1. Peningkatan Keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
2. Penguatan kerja sama pertahanan keamanan regional;
3. Peningkatan kemananan wilayah perbatasan terutama dengan marakanya TPPO
4. Peningkatan pengawasan keamanan dengan dukungan teknologi Integrated Maritime Intelligent Platform pada wilayah perbatasan laut untuk meminimalisir kegiatan ilegal;
5. Komitmen penguatan penegakan hukum terhadap pelanggar yang memasuki batas wilayah negara Republik Indonesia melalui Selat Malaka dan Laut Natuna;
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada pulau-pulau kecil terluar;
7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi

perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan

8. Penguatan pengendalian inflasi daerah

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Sumatra;
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
5. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi diantaranya orang utan, gajah, dan harimau Sumatra;
6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan di sepanjang pantai barat Sumatra;
7. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan di antara WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan;
8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
9. Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai;
10. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
11. Perkuatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

12. Peningkatan penggunaan EBT dalam pemenuhan energi di Pulau Sumatra;
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
14. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
15. pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
16. Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunanwilayah Sumatra.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan irigasi baru terutama pada bendungan yang sudah dibangun serta sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;
2. Pembangunan bendungan baru yang terintegrasi pengembangan kawasan untuk menambah luas layanan irigasi premium;
3. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi;
4. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir;
5. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;
6. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana;
7. Pengembangan Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS); serta
8. Perlindungan Kota Medan dan Palembang dari banjir kala ulang 100 tahun.

Kerangka Implementasi Transformasi

a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatra;
2. Penuntasan RDTR Kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
3. Peningkatan pelaksanaan reformas agraria;
4. Pengembangan pelabuhan Belawan - Kuala Tanjung (Sumatra Utara), pelabuhan Dumai (Riau), dan batam menjadi pelabuhan bertaraf global (global port) dan penguatan pelabuhan lainnya sebagai major port atau pelabuhan logistic inlet/outlet utama di Sumatra;
5. Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap;
6. Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi Wilayah Sumatra bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
7. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antar pulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Pulau Sumatra dan Jawa (Merak-Bakauheni) serta provinsi/kabupaten perairan di Sumatra;
8. Pengembangan bandara utama dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata;
9. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatra untuk mendukung pemerataan pembangunan serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah;
10. Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan;

11. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang serta kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Jambi; dan
12. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.

Arah kebijakan sarana dan prasarana dasar yaitu:

1. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, sanitasi yang aman dan berkelanjutan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah;
2. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
3. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, dan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah; serta
4. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan.

b. Kesinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di wilayah Sumatra yaitu:

1. Sinkronisasi subtansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
2. Sinkronisasi priodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
4. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko;

5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBI dan *blended finance*.

BAB IV. VISI DAN MISI

4.1. Visi

Salah satu makna dari visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk meilihat inti persoalan, pandangan atau wawasan kedepan. Di dalam suatu lembaga, visi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari lembaga tersebut. Sehingga di dalam pembangunan daerah, visi merupakan rumusan umum yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ini, visi menjadi tujuan masa depan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 20 tahun ke depan. Visi yang telah ditetapkan di RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 adalah suatu komitmen dan upaya merancang tahapan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu selatan 20 tahun ke depan dan bukan hanya serangkaian harapan semata. Untuk merumuskan visi Kabupaten Bengkulu Selatan ini telah melalui pembahasan, perumusan, dan kesepakatan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Diharapkan visi ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan

Visi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah kesepakatan untuk membawa Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan dalam 20 tahun kedepan. Setelah melalui berbagai macam forum diskusi maupun musyawarah seluruh pemangku kepentingan, terciptanya Visi Kabupaten Bengkulu Selatan ini juga berdasarkan berbagai macam permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keterkaitan Visi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan isu strategis yang ada di Kabupaen Bengkulu Selatan disampaikam dalam tabel berikut ini:

Tabel IV-1. Keterkaitan Isu Strategis dengan Pokok-Pokok Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

No	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Maju	Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan
2	Perlunya Pengembangan Ekonomi dan Komoditas Unggulan Menuju Kemandirian Daerah	Maju, Mandiri	
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Maju, Mandiri, Berkelanjutan	
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Maju, Mandiri	
5	Peningkatan Religiusitas dan Kebudayaan di Masyarakat	Mandiri, Berkelanjutan	

Pernyataan visi Kabupaten Bengkulu Selatan pada RPJPD Periode 2025-2045 ini memiliki arti dan makna yang dijelaskan sebagai berikut:

Maju

Cita-cita untuk menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan maju direncanakan dari berbagai macam aspek yang mendukung. Dari aspek ekonomi, suatu daerah dapat dikatakan maju jika daerah tersebut membangun ekonomi secara merata, meningkatkan kesempatan kerja kepada masyarakatnya, dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing. Disisi lain kondisi ekonomi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, infrastruktur yang baik yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang profesional yang memperhatikan pelayanan publik prima.

Mandiri

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini berarti sebuah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian dari daerah itu sendiri. Kabupaten Bengkulu Selatan merencanakan untuk 20 tahun ke depan harus dapat berswasembada pangan dengan indeks ketahanan pangan yang tinggi dan berfokus meningkatkan jumlah kontribusi dan persentase kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB dan menyediakan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan kodisi baik dan sedang. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif dan dapat bersaing

dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong laju ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan gini rasio.

Berkelanjutan

Berkelanjutan dapat diartikan keputusan pembangunan yang diambil oleh Kabupaten Bengkulu Selatan 20 tahun ke depan bertujuan untuk kemakmuran generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan harus mempertimbangkan untuk mempertahankan bahkan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, kualitas udara, kualitas air, kualitas lahan, dan risiko bencana yang akan dihadapi. Dengan memperhatikan pelestarian alam melalui pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas yang dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan nyaman untuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pula.

Dengan ditetapkannya visi Kabupaten Bengkulu Selatan yang menginginkan ”Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan” pada tahun 2045, visi Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional untuk tahun 2045 untuk menjadikan Indonesia yang ”Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, serta visi Provinsi Bengkulu untuk tahun 2045 untuk menjadikan Provinsi Bengkulu yang ”Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Keterkaitan Visi RPJP Nasional, Visi RPJP Provinsi Bengkulu, dan Visi Kabupaten Bengkulu Selatan akan digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV-2. Keterkaitan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Bengkulu, dan Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Visi RPJPN Indonesia 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan

4.2. Sasaran Visi

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan ini juga ditentukan Sasaran Visi agar Visi yang telah ditentukan tentunya harus dapat terukur dan mampu dievaluasi

pencapaiannya sehingga harus memiliki sasaran, baseline dan target yang ingin dicapai. Untuk menjaga keselarasan, Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan memperhatikan sasaran Visi RPJPN menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dan sasaran Visi Provinsi Bengkulu 2045. Sasaran Visi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indikator, baseline dan target adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	2029	2034	2039	Target 2045
Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	44,53-47,04	78,40-80,91	112-27-114,78	146,13-148,64	180-235
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,39-3,58	3,93-4,12	4,47-4,66	5,01-5,20	5,55-7,00
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,10-3,15	4,83-4,88	6,55-6,60	8,28-8,33	10,00-10,12
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	15,50-16,49	12,88-13,87	10,25-11,24	7,63-8,62	5,0-7,0
	Rasio gini (Indeks)	0,327 – 0,332	0,322-0,317	0,313-0,308	0,303-0,298	0,265 – 0,288
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30-3,41	3,14-3,25	2,99-3,10	2,83-2,94	1,65-2,67
Kabupaten Maju yang mampu bersaing	Indeks Daya Saing Daerah	3,20-3,30	3,40-3,50	3,60-3,70	3,80-3,90	4,0-4,5
	Indeks Inovasi Daerah	53,01-55,00	58,51-60,50	64,01-66,00	69,50-71,49	75,0-80,0
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,50	76,13	77,75	79,38	81-83
	Indeks Modal Manusia	0,53	0,57	0,61	0,64	0,68
Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,96	67,80	68,86	69,92	71,19

Sasaran Visi: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pendapatan Per Kapita

a. Indikator: PDRB per Kapita (Rp Juta)

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada kisaran Rp 44,53-47,04 juta sebagai baseline awal. Dengan upaya peningkatan sektor-sektor produktif, terutama melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan diversifikasi sektor ekonomi, PDRB per kapita diproyeksikan terus meningkat. Pada tahun 2029, target PDRB per kapita akan meningkat signifikan menjadi Rp 78,40-80,91 juta. Pada tahun 2034, targetnya diproyeksikan lebih lanjut pada kisaran Rp 112,27-114,78 juta, dan pada tahun 2039 diproyeksikan mencapai Rp 146,13-148,64 juta. Akhirnya, pada tahun 2045, target PDRB per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mencapai Rp 180-235 juta, mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan berada pada kisaran 3,39-3,58%. Seiring dengan penguatan sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan pariwisata, serta inovasi dalam sektor digital dan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat. Pada tahun 2029, target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 3,93-4,12%, kemudian pada tahun 2034 diproyeksikan menjadi 4,47-4,66%. Pada tahun 2039, target pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,01-5,20%, dengan target akhir pada tahun 2045 berada di kisaran 5,55-7,00%. Peningkatan ini mencerminkan optimisme terhadap pencapaian ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut.

c. Indikator: Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Pada tahun 2025, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada kisaran 3,10-3,15%. Dengan pengembangan sektor industri lokal yang didukung oleh inovasi teknologi, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan kerja sama dengan sektor swasta, kontribusi ini diharapkan terus tumbuh. Pada tahun 2029, target kontribusi industri pengolahan meningkat menjadi 4,83-4,88%, kemudian mencapai 6,55-6,60% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, target kontribusi naik lagi menjadi 8,28-8,33%, dan

pada tahun 2045, kontribusi industri pengolahan diharapkan mencapai 10,00-10,12%. Ini menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan industri pengolahan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sasaran Visi: Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Masyarakat

a. Indikator: Tingkat Kemiskinan (%)

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada kisaran 15,50-16,49% sebagai baseline awal. Seiring dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, target penurunan kemiskinan diproyeksikan secara bertahap. Pada tahun 2029, target tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 12,88-13,87%, kemudian berlanjut pada tahun 2034 dengan target 10,25-11,24%. Pada tahun 2039, targetnya adalah penurunan lebih lanjut menjadi 7,63-8,62%. Akhirnya tahun 2045, Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan tingkat kemiskinan hingga 5,0-7,0%, mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif.

b. Indikator: Rasio Gini (Indeks)

Rasio gini, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat, ditargetkan pada angka 0,327-0,332 pada tahun 2025. Dengan implementasi kebijakan redistribusi kekayaan dan peningkatan akses ekonomi yang lebih adil, ketimpangan sosial diharapkan menurun secara signifikan. Pada tahun 2029, target rasio gini akan berada pada kisaran 0,322-0,317, dan pada tahun 2034 turun lebih lanjut menjadi 0,313-0,308. Pada tahun 2039, rasio gini ditargetkan turun menjadi 0,303-0,298, dengan target akhir pada tahun 2045 di kisaran 0,265-0,288. Penurunan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan kesetaraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di seluruh masyarakat.

c. Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kisaran 3,30-3,41%. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan, serta pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, tingkat pengangguran diproyeksikan menurun secara bertahap. Pada tahun 2029, target tingkat

pengangguran turun menjadi 3,14-3,25%, dan pada tahun 2034 diperkirakan turun lebih lanjut menjadi 2,99-3,10%. Pada tahun 2039, tingkat pengangguran ditargetkan berada di kisaran 2,83-2,94%, dengan target akhir pada tahun 2045 mencapai 1,65-2,67%. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi pengangguran melalui program-program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Visi: Kabupaten Maju yang Mampu Bersaing

a. Indikator: Indeks Daya Saing Daerah

Pada tahun 2025, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada di kisaran 3,20-3,25 sebagai baseline awal. Seiring dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas daerah dalam infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, daya saing daerah diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2029, target indeks ini diproyeksikan naik menjadi 3,40-3,45, kemudian pada tahun 2034 meningkat lagi menjadi 3,60-3,65. Pada tahun 2039, Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan peningkatan indeks daya saing menjadi 3,80-3,85. Akhirnya, pada tahun 2045, target daya saing daerah diharapkan mencapai kisaran 4,0-4,5, mencerminkan kabupaten yang mampu bersaing secara nasional dan global dengan pembangunan yang berkelanjutan serta kualitas layanan publik yang meningkat.

b. Indikator: Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 53,01-55,00. Inovasi di berbagai sektor, termasuk pengembangan teknologi, sistem manajemen pemerintahan, dan peningkatan sumber daya manusia, menjadi prioritas dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahun 2029, target indeks inovasi meningkat menjadi 58,51-60,50, menunjukkan kemajuan signifikan dalam adopsi teknologi dan kreativitas masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2034, target indeks inovasi diharapkan naik lagi menjadi 64,01-66,00. Pada tahun 2039, target ini akan ditingkatkan menjadi 69,50-71,49. Hingga pada tahun 2045, target akhir indeks inovasi daerah diharapkan mencapai 75,0-80,0, yang mencerminkan peningkatan kemampuan inovasi daerah dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan daya saing ekonomi dan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sasaran Visi: Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Indikator: Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada di angka 74,50 sebagai baseline. Melalui berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi, IPM diharapkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2029, target IPM ditetapkan menjadi 76,13, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2034, target IPM diproyeksikan naik menjadi 77,75, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan daya saing. Pada tahun 2039, IPM diharapkan mencapai 79,38, dan akhirnya pada tahun 2045, target IPM ditetapkan pada angka 81-83, yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global, dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang optimal.

b. Indikator: Indeks Modal Manusia

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia (IMH) ditargetkan berada di angka 0,53 sebagai baseline awal. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan akan mendorong peningkatan IMH. Pada tahun 2029, target IMH diharapkan naik menjadi 0,57, dan pada tahun 2034, target ini ditetapkan menjadi 0,61, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2039, target IMH akan meningkat menjadi 0,64, dan akhirnya, pada tahun 2045, target akhir IMH diharapkan mencapai 0,68. Peningkatan ini mencerminkan upaya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membangun modal manusia yang kompetitif dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

Sasaran Visi: Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

a. Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 64,00 sebagai baseline awal. Seiring dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan implementasi kebijakan ramah lingkungan, indeks ini diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2029, targetnya adalah mencapai 67,61, mencerminkan peningkatan dalam pengelolaan lingkungan

dan keberlanjutan ekologi. Pada tahun 2034, target indeks ini diproyeksikan naik menjadi 71,21, dengan penekanan pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2039, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mencapai indeks 74,82, sejalan dengan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam. Pada tahun 2045, target akhirnya adalah mencapai indeks 78,42, sebagai bukti komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan mengarah pada net zero emission, sekaligus menjaga kualitas hidup generasi mendatang.

Tabel IV-4. Penyelerasan Sasaran Visi RPJPN, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Bengkulu, dan Sasaran Visi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045				RPJPD Kebupaten Bengkulu Selatan 2025-2045			
Sasaran Visi	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	55 – 60	180 – 235	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	44,53-47,04	180-235
	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	31,47	285,37		Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,39-3,58	5,55-7,00
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,51	10,00-10,12		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,10-3,15	5,00-6,00
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	13,10-13,60	5,0-7,0	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	15,50-16,49	1,0-2,0
	Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,327 – 0,332	0,265 – 0,288		Rasio gini (Indeks)	0,327 – 0,332	0,265 – 0,288
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,46	0,54		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30-3,41	1,65-2,67
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan Daerah dalam mendukung visi daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,33-3,35	3,80-4,02	Kabupaten Maju yang mampu bersaing	Indeks Daya Saing Daerah	3,20-3,30	4,0-4,5
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,57	0,74	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,68
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	57,74	90,73	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,96	71,19

Tabel IV-5. Sasaran Visi Kabupaten Bengkulu Selatan Sesuai Arah Kebijakan

Sasaran Pokok Visi	Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Berdaya saing global	Perwujudan Sasaran Pokok
Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita	Penguatan infrastruktur dasar dan digital untuk layanan publik yang efisien	Pengembangan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta ekonomi kreatif secara berkelanjutan	Kemitraan strategis dengan pihak internasional untuk membuka akses pasar global bagi produk-produk lokal	Tercapainya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki pendapatan per kapita yang terus meningkat
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang lebih baik	Penyediaan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	Program perbaikan sosial dan ekonomi yang fokus pada peningkatan akses dan kesempatan ekonomi di desa-desa miskin	Insentif untuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur hijau guna menciptakan lapangan kerja baru	Peningkatan indeks pembangunan manusia dan pengurangan angka kemiskinan
Kabupaten Maju yang mampu bersaing	Pengembangan infrastruktur dan layanan yang mendukung industri lokal, termasuk sektor pertanian	Kerjasama dengan sektor swasta untuk peningkatan daya saing kewilayahan dan penciptaan nilai tambah pada produk lokal	Mendorong ekspor produk lokal melalui diplomasi perdagangan	Peningkatan kualitas hidup dan ekonomi yang lebih kompetitif, serta ketahanan pangan yang terjamin
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja	Program beasiswa dan fasilitas studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Pengembangan pusat inovasi untuk mendukung kolaborasi internasional	Lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar global, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat
Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Inisiatif hijau untuk energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan	Regulasi yang mendukung inisiatif pengurangan emisi dan penerapan teknologi hijau di sektor-sektor kunci	Kampanye untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menarik dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan	Pengurangan emisi GRK yang signifikan dan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

1. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita. Fondasi transformasi dimulai dengan penguatan infrastruktur dasar dan digital yang efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Akselerasi transformasi akan melibatkan pengembangan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta ekonomi kreatif secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktif dan inovatif. Kemitraan strategis dengan pihak internasional akan dibentuk untuk membuka akses pasar global bagi produk-produk lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perwujudan dari sasaran ini adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki pendapatan per kapita yang terus meningkat.

2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang lebih baik

   Pada periode 2025-2045, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial akan menjadi fokus utama. Fondasi transformasi dimulai dengan penyediaan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan mengurangi kesenjangan sosial. Akselerasi transformasi dilakukan melalui program perbaikan sosial dan ekonomi yang fokus pada peningkatan akses dan kesempatan ekonomi di desa-desa miskin. Insentif untuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur hijau akan diberikan guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perwujudan dari sasaran ini adalah peningkatan indeks pembangunan manusia dan pengurangan angka kemiskinan, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan per kapita.

3. Kabupaten Maju yang mampu bersaing

   Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan menjadi kabupaten yang maju, mampu bersaing, dan mencapai swasembada pangan pada tahun 2025-2045. Fondasi transformasi akan melibatkan pengembangan infrastruktur dan layanan

yang mendukung industri lokal, termasuk sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Akselerasi transformasi mencakup kerjasama dengan sektor swasta untuk peningkatan daya saing kewilayahan dan penciptaan nilai tambah pada produk lokal. Untuk meningkatkan daya saing kewilayahan, mendorong ekspor produk lokal melalui diplomasi perdagangan akan menjadi fokus utama. Perwujudan dari sasaran ini adalah peningkatan kualitas hidup dan ekonomi yang lebih kompetitif, dengan pendapatan per kapita yang meningkat dan ketahanan pangan yang terjamin.

4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

   Pada periode 2025-2045, peningkatan daya saing sumber daya manusia menjadi fokus penting. Fondasi transformasi akan dimulai dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Akselerasi transformasi akan dilakukan melalui program beasiswa dan fasilitas studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pengembangan pusat inovasi akan mendukung kolaborasi internasional dan meningkatkan kreativitas serta produktivitas. Perwujudan dari sasaran ini adalah lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar global, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission

   Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission pada tahun 2025-2045. Fondasi transformasi akan dimulai dengan inisiatif hijau untuk energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan yang dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Akselerasi transformasi melibatkan regulasi yang mendukung inisiatif pengurangan emisi dan penerapan teknologi hijau di sektor-sektor kunci. Kampanye untuk meningkatkan kualitas lingkungan akan menarik dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mempromosikan Bengkulu Selatan sebagai kabupaten yang memperhatikan kualitas lingkungan di wilayah sekitar. Perwujudan dari sasaran ini adalah pengurangan emisi GRK yang signifikan dan

terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4.3. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan maka diperlukanlah misi yang merupakan pernyataan yang lebih spesifik tentang tindakan yang mendefinisikan tujuan. Dengan ditetapkannya misi dapat mempermudah dalam penyusunan panduan operasional yang lebih konkret dan untuk membantu menggambarkan yang ingin dicapai visi secara lebih jelas dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

Perumusan misi ini upaya untuk menyusun sistematika perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien, terukur, dan terencana. Oleh karena itu, misi yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan ini diharapkan mampu mewadahi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 20 tahun ke depan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD maka perlu dilakukan penyelarasan misi mulai dari misi Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 sampai dengan misi pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam menentukan misi, termasuk misi RPJPD di Kabupaten Bengkulu Selatan setidaknya memuat delapan arah transformasi misi sebagai berikut:

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata kelola;
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;

7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka misi dari Kabupaten Bengkulu Selatan untuk RPJPD tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
3. Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan

Adapun keterkaitan dari misi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 dengan arah transformasi dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel IV-6. Misi, Hubungan Visi dan Misi, dan Transformasi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045

Misi	Hubungan Visi dan Misi	Transformasi
Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	Mendukung visi dengan menciptakan ekonomi yang kuat dan mandiri, mengurangi ketergantungan eksternal, serta memastikan distribusi ekonomi yang adil untuk mencapai kemajuan dan kemandirian yang berkelanjutan.	Transformasi ekonomi
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Mendukung visi dengan memastikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, yang esensial untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan wilayah.	Transformasi sosial
		Transformasi ekonomi
		Ketahanan sosial budaya dan ekologi
Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	Mendukung visi dengan menciptakan ekonomi yang kuat dan mandiri, mengurangi ketergantungan eksternal, serta memastikan distribusi ekonomi yang adil untuk mencapai kemajuan dan kemandirian yang berkelanjutan.	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	Mendukung visi dengan memastikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, yang esensial untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan wilayah.	Transformasi tata kelola
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan	Berkontribusi terhadap visi dengan menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, yang penting untuk mendukung semua aspek pembangunan dan memastikan keberlanjutan.	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		Kesinambungan pembangunan

A. Misi Pertama: Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing

Sebelum dibagi menjadi 10 kabupaten dan kota, Provinsi Bengkulu hanya memiliki 4 kabupaten dan kota, dimana Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Bengkulu. Namun, jika kita melihat angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan, walaupun perlahan mulai turun, tetapi masih selalu masuk ke dalam tiga besar kabupaten termiskin di Provinsi Bengkulu. Permasalahan pembangunan ekonomi masih harus menjadi prioritas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan daerah. Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan, serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Oleh karena itu, dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ini, ditetapkan misi pertama untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata serta berdaya saing, langkah-langkah fondasi transformasi meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, penyediaan akses ke program magang dan pelatihan, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, modernisasi teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan disertai penyuluhan dan pelatihan bagi petani dan nelayan akan meningkatkan akses mereka terhadap pasar dan pembiayaan. Penguatan infrastruktur sosial dan layanan dasar, serta promosi kerukunan sosial dan dialog antar budaya juga menjadi prioritas. Dalam usahanya mencapai keberhasilan misi pertama ini, ditentukanlah sasaran pokok pertama meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan harapan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak hadirnya aktivitas ekonomi. Untuk memberikan kesempatan tersebut, pemerintah daerah dan investor secara bersama harus dapat membuka peluang partisipasi dan mempersiapkan kemampuan masyarakatnya.

Selanjutnya, sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dipilih untuk menjadi andalan utama Kabupaten Bengkulu Selatan selama 20 tahun ke depan demi terwujudnya kemandirian pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selama dua puluh tahun ke depan, pembangunan ekonomi diperkirakan akan mengalami perubahan besar yang menuntut kita untuk segera melakukan transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar yang diperkirakan akan mempengaruhi pembangunan ekonomi ke depannya adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi yang pesat, perubahan iklim, dan pergeseran geopolitik serta geoekonomi. Dengan dilakukannya transformasi ekonomi ini, diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dalam menghadapi hal tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan harus mampu melakukan peningkatan inovasi dan iptek. Dengan peningkatan inovasi dan iptek, diharapkan mampu memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan serta memaksimalkan pariwisata, UMKM, koperasi, dan BUMD yang menjadi akar rumput perekonomian.

Sasaran pokok selanjutnya untuk mendukung hal tersebut adalah mewujudkan pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri pengolahan dan meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, koperasi, dan BUMD. Akselerasi transformasi dilakukan melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, serta pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas turut diperhatikan. Pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi lokal untuk transformasi ekonomi digital juga menjadi fokus utama.

Upaya selanjutnya dalam mencapai transformasi ekonomi ini adalah dengan menjadikan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Maka, ditetapkan peningkatan peran perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran pokok selanjutnya. Usaha yang dilakukan dapat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan desa, mewujudkan wilayah yang layak huni, inklusif dan berbudaya, mewujudkan kota hijau dan berketahanan,

mewujudkan kota maju dan menyejahterakan, serta melakukan pengembangan kelembagaan di berbagai tingkatan di perkotaan dan desa.

Dalam konteks berdaya saing global, penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta standar pendidikan yang lebih baik menjadi kunci. Program pertukaran pelajar dan pendidik, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi, serta pengembangan potensi lokal, promosi investasi, dan kolaborasi sektor swasta juga diutamakan. Pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal, pengembangan kewirausahaan digital, promosi budaya lokal di kancah internasional, serta kerja sama budaya dengan negara lain turut mendukung daya saing global.

Dalam menunjang transformasi ekonomi juga dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas ekonomi dengan memperhatikan ekonomi makro. Ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Oleh karena luasnya pengaruh dari menjaga stabilitas ekonomi makro, diharapkan dapat menciptakan daya saing daerah dengan berbagai macam inovasi. Sasaran pokok selanjutnya adalah dengan meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Sasaran pokok terakhir adalah dengan meningkatnya transformasi ekonomi berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tetapi juga harus memikirkan keberlanjutannya. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau, memperbanyak sumber daya alam yang bisa diperbarui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan, memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan, serta mengelola sumber daya alam dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan dan pendidikan, serta kerja sama lintas sektor. Peningkatan standar hidup yang layak, akses masyarakat terhadap informasi digital untuk mendukung ekonomi, terwujudnya pembangunan kawasan, program ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta kerja sama dengan lembaga internasional dan sektor swasta akan menjadi indikator keberhasilan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata serta berdaya saing.

Tabel IV-7. Misi Pertama, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	Transformasi ekonomi	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		Meningkatkan sektor Pertanian, perkebunan, dan Perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan	
		Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri pengolahan dan meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD	
		Meningkatnya peran Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya transformasi ekonomi berkelanjutan	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
			IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
			IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

B. Misi Kedua: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya

Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan produk dan jasa yang berkualitas, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan produktivitas diharapkan mampu menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas berarti memiliki angkatan kerja yang mampu mengembangkan inovasi, menciptakan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, serta mampu menghadapi rasio ketergantungan yang akan terjadi. Salah satu alat yang digunakan oleh

Pemerintah Indonesia untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme pada tahun 1990. IPM dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas maka diperlukan manusia yang berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan dapat hidup secara layak.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, beberapa langkah fondasi transformasi telah diambil. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis kompeten, peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil, serta program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan menjadi prioritas. Selain itu, akses pendidikan yang merata dan berkualitas, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi juga penting. Penguatan infrastruktur sosial, peningkatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur TIK, pelestarian budaya lokal, dan promosi kerukunan sosial menjadi bagian integral dari upaya ini.

Dalam mewujudkan misi untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sasaran pokok dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar tercapainya arah pembangunan kesehatan untuk semua. Suatu daerah dengan warganya yang sehat mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, merangsang inovasi, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Selanjutnya, sumber daya manusia harus didukung dengan kualitas pendidikan yang baik pula agar sumber daya manusia dapat dibentuk dan dikembangkan menjadi mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan harus selalu diutamakan dalam pembangunan. Akselerasi transformasi dilakukan melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, serta pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas turut diperhatikan. Pemberdayaan ekonomi

lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi untuk transformasi ekonomi digital juga menjadi fokus utama.

Sumber daya manusia yang baik tidak hanya mampu bersaing secara luas tetapi juga memiliki budaya yang kuat. Melestarikan budaya adalah hal yang penting untuk dilakukan karena hal ini dapat mempertahankan identitas suatu masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan pengetahuan dan kearifan lokal, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya lokal. Dengan pembangunan kebudayaan dapat dijadikan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik. Dengan melestarikan budaya juga membuat kita merasa bahwa keragaman budaya bangsa semakin menambah kesadaran bahwa manusia memiliki perbedaan. Oleh karena itu, perlu pembangunan sikap saling mendukung dan kebersamaan dalam upaya mengembangkan budaya agar dapat hidup rukun berdampingan dalam perbedaan yang ada. Dalam konteks berdaya saing global, penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta standar pendidikan yang lebih baik menjadi kunci. Program pertukaran pelajar dan pendidik, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi, serta pengembangan potensi lokal, promosi investasi, dan kolaborasi sektor swasta juga diutamakan. Pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal, pengembangan kewirausahaan digital, promosi budaya lokal di kancah internasional, serta kerja sama budaya dengan negara lain turut mendukung daya saing global.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan, serta kerja sama lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, standar hidup yang layak, serta kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi digital untuk mendukung ekonomi juga menjadi indikator keberhasilan. Meningkatnya kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat, kerja sama lintas sektor, kualitas pendidikan, standar hidup yang layak, serta terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun akan menjadi hasil dari upaya yang telah dilakukan.

Tabel IV-8. Misi Kedua, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Transformasi sosial	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IE1. Kesehatan untuk Semua
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		Meningkatkan standar hidup masyarakat yang laya	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Transformasi ekonomi	Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi digital	IE6. Transformasi Digital
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

C. Misi Ketiga: Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana

Perubahan, perkembangan, transformasi digital, dan perubahan iklim adalah tantangan yang harus dapat dihadapi ke depannya. Dalam menghadapi hal tersebut, salah satunya adalah dengan memperhatikan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan ketangguhan manusia, masyarakat, serta alam dan lingkungan untuk dapat mampu bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai macam perubahan dan guncangan yang terjadi. Lingkungan pertama yang harus diperhatikan adalah lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang individu. Dalam lingkungan keluarga, seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, sasaran pokok pertama dalam misi ketiga ini adalah terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas.

Untuk mewujudkan pelestarian alam yang menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana, beberapa langkah fondasi transformasi dilakukan. Pendidikan inklusif dan kesetaraan hak, perlindungan hak-hak kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan kesehatan, pembangunan pondasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesiapsiagaan bencana, serta program mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas. Diversifikasi sumber energi dan air, peningkatan produktivitas pangan melalui teknologi pertanian, serta penyediaan infrastruktur energi dan air yang andal, serta peningkatan sistem keamanan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan,

penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta program pencegahan kriminalitas melalui pendidikan dan kesadaran hukum juga dilakukan.

Selanjutnya, sebagai tempat hidup, lingkungan hidup menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan hidup pula lah yang menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Menjaga lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menjaga kelestariannya. Pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan agar tetap asri dan nyaman. Akselerasi transformasi dilakukan melalui program pendidikan inklusif di sekolah, kampanye kesetaraan hak di masyarakat, program kesehatan keluarga berbasis komunitas, pengembangan sistem peringatan dini bencana, program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan, serta kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat. Peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengembangan teknologi pengolahan air, serta program ketahanan pangan berbasis komunitas juga menjadi fokus utama. Peningkatan sistem keamanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum turut mendukung upaya ini.

Dalam konteks berdaya saing global, peningkatan daya saing daerah melalui keragaman budaya, kolaborasi dengan organisasi internasional untuk promosi inklusivitas, serta pengembangan program sosial yang berkelanjutan menjadi kunci. Penguatan daya saing melalui lingkungan hidup yang bersih dan hijau, kerja sama internasional untuk pengelolaan lingkungan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan juga diutamakan. Penguatan daya saing melalui ketahanan energi dan air, akses ke teknologi dan pengetahuan global, serta pengembangan kerjasama internasional untuk kemandirian pangan juga menjadi prioritas. Penguatan daya saing daerah melalui keamanan yang baik, serta pengembangan teknologi keamanan mutakhir juga diperhatikan. Selain itu, lingkungan akan menjadi nyaman jika aman dengan rendahnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim. Selain itu, meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta menurunnya angka kriminalitas melalui

peningkatan penegakan hukum akan menjadi indikator keberhasilan dari upaya pelestarian alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik serta ketahanan daerah terhadap bencana.

Tabel IV-9. Misi Ketiga, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup sosial budaya yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
			IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Meningkatnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

D. Misi Keempat: Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima

Pelaksanaan tata kelola yang baik dan profesional dari suatu perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat membantu mengintegrasikan berbagai peran sektor pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki karakteristik bahwa tata kelola pemerintahan harus memiliki akuntabilitas, yaitu tanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan; independensi yang tidak memihak pada pihak manapun; transparansi yang memiliki sikap keterbukaan pemerintah atas segala informasi dan rencana kerja untuk pembangunan; partisipasi dimana anggota pemerintahan ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan negara; dan koordinasi dengan membangun komunikasi yang lancar agar bisa bekerja sama, sehingga hubungan pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima, langkah-langkah fondasi transformasi mencakup reformasi birokrasi dan transparansi dalam pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang terencana, yang berfokus kepada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan budaya birokrasi. Reformasi birokrasi yang dilakukan berfokus pada kelembagaan, penatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Implementasi sistem e-government, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi bagian penting dalam akselerasi transformasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga harus memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat bahwa pemerintahan dikelola dengan profesional dan jauh dari korupsi. Dalam konteks berdaya saing global, pengembangan kapasitas institusi pemerintahan yang berintegritas dan promosi transparansi serta akuntabilitas sebagai nilai jual untuk investasi dan kerjasama merupakan fokus utama. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga harus dapat melayani masyarakat dengan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pelayanan prima dapat dilakukan reformasi birokrasi pada pelayanan publik tersebut.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mendukung investasi, dan menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak, serta membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintahan dikelola dengan profesional dan jauh dari korupsi.

Tabel IV-10. Misi Keempat, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	Transformasi tata kelola	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel dan kualitas pelayanan publik	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

E. Misi Kelima: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan

Pada masa sekarang, berpergian antarwilayah seharusnya merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Masyarakat dapat pergi melintasi wilayah dengan berbagai macam transportasi. Konektivitas antarwilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan wilayah tersebut karena tidak dapat dipungkiri setiap wilayah membutuhkan wilayah yang lain. Konektivitas antarwilayah dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan suatu daerah karena umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di daerah berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah lainnya. Selain dampaknya dalam memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, konektivitas antarwilayah tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah dalam suatu daerah, tetapi secara aktif mempersatukan daerah tersebut dan membangun kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan, langkah-langkah fondasi transformasi meliputi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan transportasi publik. Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung perencanaan berkelanjutan, penguatan institusi perencanaan pembangunan, serta peningkatan penggunaan data dan teknologi informasi dalam perencanaan juga menjadi prioritas. Untuk dapat maju dan mandiri lebih cepat, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu melakukan penguatan konektivitas antarwilayah yang berguna untuk memperkuat kinerja perekonomian domestik dan sektor riil, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Konektivitas antarwilayah dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan infrastruktur.

Akselerasi transformasi dilakukan melalui penerapan teknologi konstruksi modern dan ramah lingkungan, pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta, serta peningkatan kapasitas lokal dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perencanaan pembangunan, integrasi sistem perencanaan untuk efisiensi dan efektivitas, serta kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk studi pembangunan juga diutamakan. Konektivitas

antarwilayah dapat memberikan manfaat kepada daerah seperti peningkatan aksesibilitas, kemudahan akses sumber daya, peningkatan pelayanan, pemerataan pelayanan umum, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pariwisata, dan penurunan konflik antarwilayah.

Dalam konteks berdaya saing global, peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung perdagangan dan pariwisata, peningkatan investasi melalui infrastruktur yang andal, serta promosi Bengkulu Selatan sebagai destinasi investasi yang menarik adalah fokus utama. Selain itu, meningkatkan daya saing regional melalui perencanaan yang tepat, pengembangan kapasitas untuk perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk inovasi dalam perencanaan juga menjadi kunci penting. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga harus memperhatikan pembangunan infrastruktur yang baik yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang, baik itu operasi saat pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir. Dengan melakukan pembangunan infrastruktur, selain membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga memberikan sumber penghasilan masyarakat, pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan pembangunan yang disusun menjadi penting karena dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan tahapan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, tahapan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Perwujudan misi ini terlihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas. Selain itu, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global juga menjadi indikator keberhasilan dari upaya ini.

Tabel IV-11. Misi Kelima, Arah Transformasi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
	Kesinambungan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tabel IV-12. Penjabaran Misi Per Periode Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045

Misi	Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Berdaya saing global	Perwujudan Misi
Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, penyediaan akses ke program magang dan pelatihan, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru, modernisasi teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penyuluhan dan pelatihan bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan akses terhadap pasar dan pembiayaan. Penguatan infrastruktur sosial dan layanan dasar, serta promosi kerukunan sosial dan dialog antar budaya.	Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas. Pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi lokal untuk transformasi ekonomi digital.	Penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, standar pendidikan yang lebih baik, program pertukaran pelajar dan pendidik, serta peningkatan kualitas penelitian dan inovasi. Pengembangan potensi lokal, promosi investasi dan kolaborasi sektor swasta, pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal, pengembangan kewirausahaan digital untuk meningkatkan daya saing wilayah, promosi budaya lokal di kancah internasional, serta kerja sama budaya dengan negara lain.	Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan dan pendidikan, kerja sama lintas sektor, peningkatan standar hidup yang layak, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi digital untuk mendukung ekonomi. Terwujudnya pembangunan kawasan, program ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta kerja sama dengan lembaga internasional dan sektor swasta.
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis kompeten, peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil, program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, akses pendidikan yang merata dan berkualitas, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Penguatan infrastruktur sosial, peningkatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur TIK, pelestarian budaya lokal, dan promosi kerukunan sosial.	Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas. Pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi untuk transformasi ekonomi digital.	Penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, standar pendidikan yang lebih baik, program pertukaran pelajar dan pendidik, serta peningkatan kualitas penelitian dan inovasi. Pengembangan potensi lokal, promosi investasi dan kolaborasi sektor swasta, pembangunan ekosistem startup, pengembangan kewirausahaan digital, promosi budaya lokal internasional, dan kerja sama budaya global.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan, kerja sama lintas sektor, meningkatnya kualitas pendidikan, standar hidup yang layak, serta kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi digital untuk ekonomi. Meningkatnya kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat, kerja sama lintas sektor, kualitas pendidikan, standar hidup yang layak, serta terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun.
Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	Pendidikan inklusif dan kesetaraan hak, perlindungan hak-hak kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan kesehatan, pembangunan pondasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesiapsiagaan bencana, serta program mitigasi perubahan iklim. Diversifikasi sumber energi dan air, peningkatan produktivitas pangan melalui	Program pendidikan inklusif di sekolah, kampanye kesetaraan hak di masyarakat, program kesehatan keluarga berbasis komunitas, pengembangan sistem peringatan dini bencana, program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan, serta kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat. Peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengembangan teknologi pengolahan air, serta program	Peningkatan daya saing daerah melalui keragaman budaya, kolaborasi dengan organisasi internasional untuk promosi inklusivitas, serta pengembangan program sosial yang berkelanjutan. Penguatan daya saing melalui lingkungan hidup yang bersih dan hijau, kerja sama internasional untuk pengelolaan lingkungan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penguatan daya saing melalui ketahanan energi dan air, akses ke teknologi dan	Telah terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim, meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum.

Misi	Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Berdaya saing global	Perwujudan Misi
	teknologi pertanian, serta penyediaan infrastruktur energi dan air yang andal. Peningkatan sistem keamanan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta program pencegahan kriminalitas melalui pendidikan dan kesadaran hukum.	ketahanan pangan berbasis komunitas. Peningkatan sistem keamanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum.	pengetahuan global, serta pengembangan kerjasama internasional untuk kemandirian pangan. Penguatan daya saing daerah melalui keamanan yang baik, serta pengembangan teknologi keamanan mutakhir.	
Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	Reformasi birokrasi dan transparansi dalam pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).	Implementasi sistem e-government, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.	Pengembangan kapasitas institusi pemerintahan yang berintegritas dan promosi transparansi serta akuntabilitas sebagai nilai jual untuk investasi dan kerjasama.	Telah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan	Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil, peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan transportasi publik, pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung perencanaan berkelanjutan, penguatan institusi perencanaan pembangunan, serta peningkatan penggunaan data dan teknologi informasi dalam perencanaan.	Penerapan teknologi konstruksi modern dan ramah lingkungan, pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta, peningkatan kapasitas lokal dalam pengelolaan proyek infrastruktur, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perencanaan pembangunan, integrasi sistem perencanaan untuk efisiensi dan efektivitas, serta kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk studi pembangunan.	Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung perdagangan dan pariwisata, peningkatan investasi melalui infrastruktur yang andal, promosi Bengkulu Selatan sebagai destinasi investasi yang menarik, meningkatkan daya saing regional melalui perencanaan yang tepat, pengembangan kapasitas untuk perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk inovasi dalam perencanaan.	Telah meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas, serta meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global.

Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata serta berdaya saing, langkah-langkah fondasi transformasi meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, penyediaan akses ke program magang dan pelatihan, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, modernisasi teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan disertai penyuluhan dan pelatihan bagi petani dan nelayan akan meningkatkan akses mereka terhadap pasar dan pembiayaan. Penguatan infrastruktur sosial dan layanan dasar, serta promosi kerukunan sosial dan dialog antar budaya juga menjadi prioritas.

Akselerasi transformasi dilakukan melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, serta pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas turut diperhatikan. Pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi lokal untuk transformasi ekonomi digital juga menjadi fokus utama.

Dalam konteks berdaya saing global, penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta standar pendidikan yang lebih baik menjadi kunci. Program pertukaran pelajar dan pendidik, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi, serta pengembangan potensi lokal, promosi investasi, dan kolaborasi sektor swasta juga diutamakan. Pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal, pengembangan kewirausahaan digital, promosi budaya lokal di kancah internasional, serta kerja sama budaya dengan negara lain turut mendukung daya saing global.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan dan pendidikan, serta kerja sama lintas sektor. Peningkatan standar hidup yang layak, akses masyarakat terhadap informasi digital untuk mendukung ekonomi, terwujudnya pembangunan kawasan, program ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta kerja sama dengan lembaga internasional dan sektor swasta akan menjadi

indikator keberhasilan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata serta berdaya saing.

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, beberapa langkah fondasi transformasi telah diambil. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis kompeten, peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil, serta program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan menjadi prioritas. Selain itu, akses pendidikan yang merata dan berkualitas, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi juga penting. Penguatan infrastruktur sosial, peningkatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur TIK, pelestarian budaya lokal, dan promosi kerukunan sosial menjadi bagian integral dari upaya ini.

Akselerasi transformasi dilakukan melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, program kesehatan preventif dan promotif, serta pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, program beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas turut diperhatikan. Pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan program jaminan sosial, serta pengembangan teknologi untuk transformasi ekonomi digital juga menjadi fokus utama.

Dalam konteks berdaya saing global, penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, inovasi dalam teknologi kesehatan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta standar pendidikan yang lebih baik menjadi kunci. Program pertukaran pelajar dan pendidik, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi, serta pengembangan potensi lokal, promosi investasi, dan kolaborasi sektor swasta juga diutamakan. Pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal, pengembangan kewirausahaan digital, promosi budaya lokal di kancah internasional, serta kerja sama budaya dengan negara lain turut mendukung daya saing global.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam program kesehatan, serta kerja sama lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, standar hidup yang layak, serta kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi digital untuk mendukung

ekonomi juga menjadi indikator keberhasilan. Meningkatnya kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat, kerja sama lintas sektor, kualitas pendidikan, standar hidup yang layak, serta terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun akan menjadi hasil dari upaya yang telah dilakukan.

Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana

Untuk mewujudkan pelestarian alam yang menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana, beberapa langkah fondasi transformasi dilakukan. Pendidikan inklusif dan kesetaraan hak, perlindungan hak-hak kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan kesehatan, pembangunan pondasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesiapsiagaan bencana, serta program mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas. Diversifikasi sumber energi dan air, peningkatan produktivitas pangan melalui teknologi pertanian, serta penyediaan infrastruktur energi dan air yang andal, serta peningkatan sistem keamanan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta program pencegahan kriminalitas melalui pendidikan dan kesadaran hukum juga dilakukan.

Akselerasi transformasi dilakukan melalui program pendidikan inklusif di sekolah, kampanye kesetaraan hak di masyarakat, program kesehatan keluarga berbasis komunitas, pengembangan sistem peringatan dini bencana, program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan, serta kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat. Peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengembangan teknologi pengolahan air, serta program ketahanan pangan berbasis komunitas juga menjadi fokus utama. Peningkatan sistem keamanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum turut mendukung upaya ini.

Dalam konteks berdaya saing global, peningkatan daya saing daerah melalui keragaman budaya, kolaborasi dengan organisasi internasional untuk promosi inklusivitas, serta pengembangan program sosial yang berkelanjutan menjadi kunci. Penguatan daya saing melalui lingkungan hidup yang bersih dan hijau, kerja sama internasional untuk pengelolaan lingkungan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan juga diutamakan. Penguatan daya saing melalui ketahanan energi dan air,

akses ke teknologi dan pengetahuan global, serta pengembangan kerjasama internasional untuk kemandirian pangan juga menjadi prioritas. Penguatan daya saing daerah melalui keamanan yang baik, serta pengembangan teknologi keamanan mutakhir juga diperhatikan.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim. Selain itu, meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum akan menjadi indikator keberhasilan dari upaya pelestarian alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik serta ketahanan daerah terhadap bencana.

Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima, langkah-langkah fondasi transformasi mencakup reformasi birokrasi dan transparansi dalam pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Implementasi sistem e-government, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi bagian penting dalam akselerasi transformasi.

Dalam konteks berdaya saing global, pengembangan kapasitas institusi pemerintahan yang berintegritas dan promosi transparansi serta akuntabilitas sebagai nilai jual untuk investasi dan kerjasama merupakan fokus utama. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui tata kelola yang baik dan efisien.

Perwujudan misi ini akan terlihat dari meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mendukung investasi, dan menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan, langkah-langkah fondasi transformasi meliputi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan transportasi publik. Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung perencanaan berkelanjutan, penguatan institusi perencanaan pembangunan, serta peningkatan penggunaan data dan teknologi informasi dalam perencanaan juga menjadi prioritas.

Akselerasi transformasi dilakukan melalui penerapan teknologi konstruksi modern dan ramah lingkungan, pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta, serta peningkatan kapasitas lokal dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perencanaan pembangunan, integrasi sistem perencanaan untuk efisiensi dan efektivitas, serta kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk studi pembangunan juga diutamakan.

Dalam konteks berdaya saing global, peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung perdagangan dan pariwisata, peningkatan investasi melalui infrastruktur yang andal, serta promosi Bengkulu Selatan sebagai destinasi investasi yang menarik adalah fokus utama. Selain itu, meningkatkan daya saing regional melalui perencanaan yang tepat, pengembangan kapasitas untuk perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk inovasi dalam perencanaan juga menjadi kunci penting.

Perwujudan misi ini terlihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas. Selain itu, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global juga menjadi indikator keberhasilan dari upaya ini.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

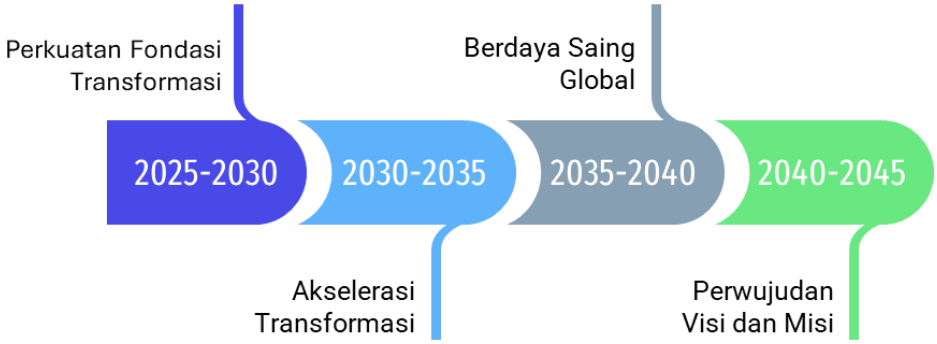
Pentahapan per lima tahun Arah kebijakan mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Tahapan arah kebijakan yang dimaksud adalah:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Fondasi Transformasi
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global
4. Arah Kebijakan Priode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas

Catatan tambahan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di setiap tahapan disesuaikan dengan tingkat kemajuan masing-masing daerah.
2. Khusus untuk ekspansi global, peran daerah tertentu dapat menjadi bagian dari rantai pasok produk ekspor sesuai dengan tingkat kemampuan daerahnya.
3. Pada tahap Indonesia Emas, setiap provinsi berhasil mewujudkan Visinya masing-masing

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah arah kebijakan RPJPN Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:



Gambar V-1. Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (2025-2030)

Fase lima tahun pertama berfokus pada penguatan landasan perubahan untuk pada akhirnya menentukan visi dan misi. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk melengkapi layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial guna meletakkan landasan yang kokoh bagi perubahan sosial. Selain itu di tahapan ini juga mempersiapkan untuk mencetak manusia-manusia yang berkualitas dan produktif. Langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat landasan transformasi ekonomi; dengan mempersiapkan hilirisasi produk sumber daya unggulan agar memiliki nilai lebih, meningkatkan riset dan inovasi untuk produktivitas tinggi, mulai menerapkan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, dan mempersiapkan fondasi bagi perkotaan dan desa untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain memperkuat landasan transformasi ekonomi, langkah-langkah juga dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan inovasi dan daya saing di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dari sudut pandang birokrasi, reformasi tata kelola fokus pada peningkatan efisiensi kelembagaan, pembuatan regulasi untuk menghilangkan peraturan berlebihan yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada teknologi informasi, dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, jenis kelamin, status perkawinan, usia, atau diskriminasi disabilitas.

Dalam upaya penguatan landasan sosial, budaya, dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini mencakup peningkatan daya manusia dan komunitas dalam menghadapi perubahan dan bencana, dengan mengoptimalisasikan nilai-nilai agama dan budaya serta meningkatkan peran masyarakat dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan memobilisasi modal sosial dalam masyarakat, menjamin ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta menciptakan sistem pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada tahap ini, pembangunan juga dilakukan secara efisien dengan memperbaiki infrastruktur yang ada dan memfokuskan pada wilayah yang memiliki peluang ekonomi besar, guna mendukung penguatan perubahan sosial dan transformasi

ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan fokusnya adalah pada penguatan landasan pembangunan yang merata dan berkualitas untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dalam peningkatan kualitas jalan, jembatan dan irigasi untuk menopang kesejahteraan perekonomian di wilayah Bengkulu Selatan. Selain itu, penyediaan tempat ibadah bagi masyarakat, tempat penyimpanan sampah, dan toilet juga menjadi pertimbangan dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.

2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (2030-2035)

Arah pembangunan pada periode lima tahun kedua RPJPD Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mempercepat perubahan yang ingin dicapai. Pemikirannya saat ini adalah bahwa landasan yang kuat untuk perubahan muncul dari periode sebelumnya. Saat ini, fokusnya adalah penguatan fondasi dalam menyediakan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social maka percepatan transformasi social lebih focus kepada penguatan pembangunan seluruh masyarakat, dan percepatan pengembangan SDM berkualitas.

Untuk mempercepat perubahan ekonomi, pada periode ini fokus pada percepatan produksi, penguatan dan perluasan pusat-pusat pembangunan ekonomi, serta optimalisasi sumber-sumber pembangunan ekonomi baru, seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi. Lalu percepatan perubahan tata kelola difokuskan kepada terwujudnya kelembagaan yang lebih kolaboratif, menciptakan angkatan kerja ASN yang yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, telah tersedianya regulasi yang berbasi teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang lebih partisipatif. Saat ini, supremasi hukum juga ditegakkan melalui pemanfaatan penegakan hukum digital untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dan menciptakan ruang publik dengan partisipasi masyarakat yang kuat, cerdas dan berkarakter Pancasila. Pembangunan yang seimbang dan berkualitas berarti meningkatkan jumlah dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi guna menjaga ketahanan ekonomi dan meningkatkan kualitas tempat ibadah, pengelolaan sampah, dan sanitasi masyarakat.

3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (2035-2040)

Tahapan ketiga dari periode lima tahunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan ini, diharapkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan hasil-hasil produksi dari

Kabupaten Bengkulu Selatan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Sebagaimana periode sebelumnya, jika implementasi program periode sebelumnya (penguatan dan percepatan perubahan) dapat tercapai secara maksimal, maka periode ini juga dapat terlaksana dengan sukses.

Pada tahap ini, perubahan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan dan memberdayakan tenaga kerja yang kompetitif, lebih produktif dan inovatif. Dalam pelaksanaan transformasi ekonomi yang fokus pada penguatan hasil produksi dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing, telah diciptakan langkah-langkah ekonomi berkelanjutan agar kota-kota dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan dapat bersaing satu sama lain. Selain itu juga dilakukan transformasi tata kelola dengan menitikberatkan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, sumber daya manusia ASN yang kompetitif, melakukan evaluasi terhadap regulasi yang telah berbasi teknologi informasi, dan terciptanya masyarakat sipil yang mandiri.

Pada periode ini juga dibentuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang dapat menjamin kebebasan sipil, hak asasi manusia dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat, serta perolehan, pengelolaan dan penggunaan sumber daya sosial, politik dan ekonomi. Dari sisi ketahanan sosial budaya dan ekologi menitikberatkan pada terwujudnya individu, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana yang akan terjadi. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pembangunan menyeluruh, menerapkan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang lebih komprehensif, menerapkan dan mengembangkan teknologi yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan pada akhirnya melindungi lingkungan dan 'munculnya polusi'. Pada tahap ini, pembangunan juga berjalan dengan baik, dengan tingkat konektivitas yang tinggi, ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, dan pelaksanaan rencana pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (2040-2045)

Fase terakhir ini berfokus pada pencapaian visi dan misi yang didukung oleh kemampuan melaksanakan tahapan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya secara maksimal. Pada tahap ini terlihat adanya perubahan sosial ke

arah terbentuknya masyarakat yang sejahtera, progresif, harmonis, maju secara moral, budaya, unggul dan berdaya saing. Capaian akhir dari transformasi ekonomi adalah terbentuknya perekonomian tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perekonomian yang maju, peningkatan jumlah tenaga kerja dan inovasi yang mampu bersaing di kancah global. Telah tercapainya tata kelola yang baik dan peraturan pemerintah serta integritas dan kemampuan beradaptasi yang terjamin.

Pada periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan telah terbentuk masyarakat damai, memiliki ketaatan dan kepekaan hukum yang tinggi serta berintegritas dalam penegakannya. Pada fase ini, individu, keluarga, dan masyarakat juga telah terlatih untuk tahan terhadap berbagai perubahan dan bencana. Setiap individu dapat hidup berkualitas, dapat bersaing dan memberi sumbangsih terhadap pembangunan. Adanya infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan pengelolaan sampah yang baik, sanitasi yang bersih, penerapan energi bersih berbasis ekonomi biru dan hijau, penerapan, dan pembangunan yang menjalankan dokumen perencanaan berkelanjutan.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD merupakan kuantifikasi visi dan misi yang menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran pokok memperlihatkan hubungan dengan visi atau misi dalam fungsinya untuk menunjukkan indikator kinerjanya. Dengan kata lain, sasaran pokok RPJPD merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD tahun 2025-2045 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun sasaran pokok berdasarkan masing-masing misi dan transformasi yang telah ditentukan untuk RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel V-1. Visi, Tranformasi, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok
Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	Transformasi ekonomi	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat
		Meningkatkan sektor Pertanian, perkebunan, dan Perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan
		Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri pengolahan dan

Misi	Transformasi	Sasaran Pokok
		meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD
		Meningkatnya peran Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya transformasi ekonomi berkelanjutan
	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Transformasi sosial	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		Meningkatkan standar hidup masyarakat yang layak
	Transformasi ekonomi	Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses infomasi digital
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun
Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim
		Meningkatnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum
Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	Transformasi tata kelola	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel dan kualitas pelayanan publik
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas
		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Kesinambungan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Sasaran Pokok: Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

Tabel V-2. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, Penyediaan akses ke program magang dan pelatihan, dan Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Program kerja sama dengan industri lokal, Fasilitasi inkubasi bisnis dan start-up, dan Promosi investasi untuk menciptakan lapangan kerja
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Pengembangan infrastruktur yang mendukung, Peningkatan daya saing daerah, dan Penyediaan layanan pendukung
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang berdaya saing

Kabupaten Bengkulu Selatan mengutamakan peningkatan kesempatan kerja melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Inisiatif ini mencakup penyediaan akses yang lebih luas ke program magang dan pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi fokus, sehingga dapat memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam berbagai sektor industri lokal. Pendekatan ini diperkuat melalui program kerja sama dengan industri lokal dan fasilitasi inkubasi bisnis dan start-up, yang ditujukan untuk menggairahkan ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja baru. Promosi investasi di daerah ini juga ditargetkan untuk meningkatkan daya tarik bagi investor dan mendukung pengembangan infrastruktur yang mendukung. Dengan peningkatan daya saing daerah melalui penyediaan layanan pendukung, Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berdaya saing.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan demi Terwujudnya Kemandirian Pangan

Tabel V-3. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatkan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan demi Terwujudnya Kemandirian Pangan untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Modernisasi teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan, Penyuluhan dan pelatihan bagi petani dan nelayan, dan Penyediaan akses terhadap pasar dan pembiayaan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Implementasi teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian, Peningkatan akses pembiayaan mikro bagi petani dan nelayan, dan Pengembangan pasar ekspor komoditas lokal
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan produksi pertanian unggul melalui teknologi, Peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan Akses ke pasar internasional
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah meningkatnya sektor Pertanian, perkebunan, dan Perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadikan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan. Modernisasi teknologi dalam sektor-sektor ini telah diidentifikasi sebagai langkah krusial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini termasuk penggunaan teknik-teknik dalam pemeliharaan dan pengolahan pascapanen yang lebih efektif. Penyuluhan dan pelatihan yang terus-menerus bagi petani dan nelayan

juga menjadi prioritas untuk memastikan mereka dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi baru ini. Selain itu, penyediaan akses terhadap pasar dan pembiayaan, khususnya melalui kredit mikro, diperkuat untuk mendukung petani dan nelayan dalam memperluas usaha dan mengakses pasar yang lebih luas. Langkah selanjutnya mencakup pengembangan pasar ekspor untuk komoditas lokal, yang akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan lokal tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Bengkulu Selatan diwilayah sekitarnya. Peningkatan produksi pertanian unggul melalui teknologi dan peningkatan akses ke pasar yang lebih luas adalah kunci untuk menjadikan daerah ini pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya kemandirian pangan yang diharapkan.

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berfokus pada Industri Pengolahan dan Meningkatkan Potensi Pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD

Tabel V-4. Penjabaran Sasaran Pokok Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berfokus pada Industri Pengolahan dan Meningkatkan Potensi Pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Penguatan kapasitas dan akses pasar untuk UMKM, Penyediaan insentif dan kemudahan perizinan bagi UMKM, Pembinaan dan pendampingan usaha kecil dan menengah, dan mulai mengembangkan wisata potensial
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Digitalisasi usaha UMKM, Pengembangan pusat inkubasi UMKM, Pemberian insentif bagi UMKM yang berkembang, dan peningkatan promosi wisata potensial
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan daya saing produk UMKM, Akses ke pasar global, dan Kerja sama internasional untuk pengembangan UMKM
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Monitoring dan evaluasi program UMKM, Pelibatan UMKM dalam perencanaan ekonomi daerah, Penguatan jejaring UMKM dengan sektor swasta, dan memiliki objek wisata unggulan

Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi lokal dengan berfokus pada industri pengolahan, pariwisata, serta mendukung pertumbuhan UMKM, Koperasi, dan BUMD. Upaya ini dimulai dengan penguatan kapasitas dan akses pasar untuk UMKM, termasuk penyediaan insentif dan kemudahan perizinan yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Pendampingan kontinu dan pengembangan kompetensi UMKM diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, pembangunan destinasi wisata potensial dimaksudkan untuk menarik lebih banyak wisatawan, yang akan meningkatkan pendapatan lokal dan memperkenalkan budaya serta produk lokal kepada dunia luar. Pada tahap akselerasi, Kabupaten Bengkulu Selatan mengimplementasikan digitalisasi UMKM dan mengembangkan pusat inkubasi yang menawarkan dukungan lebih lanjut kepada pengusaha lokal. Pemberian insentif kepada UMKM yang sedang berkembang dan peningkatan promosi wisata dilakukan untuk meningkatkan visibilitas industri tersebut di pasar yang lebih luas. Upaya ini diperkuat dengan meningkatkan daya saing produk lokal melalui akses ke pasar global dan kerja sama internasional, yang tidak hanya menguntungkan UMKM tetapi juga sektor pariwisata. Melalui monitoring yang efektif dan pelibatan aktif UMKM dalam perencanaan ekonomi daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk memiliki objek wisata unggulan dan jejaring kerja sama yang solid antara UMKM dengan sektor swasta, memperkuat fondasi ekonomi lokal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Tabel V-5. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di perkotaan dan pedesaan, Peningkatan konektivitas antar wilayah, dan Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi lokal
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Peningkatan konektivitas digital di wilayah pedesaan, Program pembangunan kawasan terpadu, dan Kolaborasi antar daerah dalam proyek infrastruktur
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Pengembangan pusat pertumbuhan baru, Peningkatan investasi di daerah terpencil, dan Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Terwujudnya pembangunan kawasan, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan Penguatan kolaborasi antar daerah

Pembangunan ekonomi di perkotaan dan pedesaan melibatkan pengembangan infrastruktur yang memadai dan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas antar wilayah untuk memperkuat ekonomi lokal. Peningkatan ini tidak hanya meliputi pembangunan fisik tetapi juga integrasi layanan pendukung yang esensial, seperti akses ke energi terbarukan dan sistem transportasi efisien, yang mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari. Selanjutnya, peningkatan konektivitas digital di

wilayah pedesaan dan pembangunan kawasan terpadu akan memfasilitasi kolaborasi antar daerah dalam proyek infrastruktur, mempercepat transformasi pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan mandiri. Inisiatif ini diperkuat dengan pengembangan pusat pertumbuhan baru dan peningkatan investasi di daerah terpencil, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang menawarkan peluang ekonomi alternatif dan berkelanjutan. Penguatan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha dan turis, yang berkontribusi pada diversifikasi ekonomi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan penguatan kolaborasi antar daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara inklusif dan menghasilkan manfaat jangka panjang, membentuk ekosistem ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Tabel V-6. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Implementasi praktik ekonomi hijau dan ramah lingkungan, Pengembangan industri berkelanjutan, dan Promosi penggunaan energi terbarukan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pengembangan industri ramah lingkungan, Penyediaan insentif bagi bisnis berkelanjutan, dan Promosi energi terbarukan di sektor industri
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan daya saing ekonomi hijau, Pengembangan produk ramah lingkungan, dan Kerja sama internasional dalam ekonomi hijau
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Terwujudnya program ekonomi hijau dan berkelanjutan

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan melalui implementasi praktik ekonomi hijau dan ramah lingkungan. Inisiatif ini mencakup pengembangan industri berkelanjutan yang memanfaatkan energi terbarukan serta promosi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional sektor industri, yang pada akhirnya membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan industri ramah lingkungan di Kabupaten Bengkulu Selatan juga didukung dengan penyediaan insentif bagi bisnis yang mengadopsi praktik berkelanjutan, serta promosi penggunaan energi terbarukan secara luas di sektor industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar internasional melalui pengembangan produk yang ramah lingkungan

dan kerja sama strategis dengan pelaku ekonomi hijau global. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Bengkulu Selatan berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau dan berkelanjutan, menarik investasi lebih besar, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih hijau.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah

Tabel V-7. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Peningkatan efisiensi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, Diversifikasi sumber pendapatan daerah, dan Peningkatan investasi daerah melalui kemudahan berbisnis
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Optimalisasi potensi pajak daerah, Diversifikasi ekonomi, dan Peningkatan kapasitas manajerial di pemerintahan daerah
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan daya saing ekonomi makro, Akses ke pasar global untuk produk daerah, dan Pengembangan investasi asing di daerah
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Kinerja ekonomi daerah yang baik, Pelibatan sektor swasta dalam perencanaan ekonomi, dan Kerja sama dengan lembaga internasional

Dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan daya saing, Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan daerah serta peningkatan investasi daerah melalui kemudahan berbisnis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Upaya ini diperkuat melalui optimalisasi potensi pajak daerah dan peningkatan kapasitas manajerial di pemerintahan daerah, yang menjamin bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah ini dilengkapi dengan strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi makro melalui akses ke pasar global untuk produk daerah dan pengembangan investasi asing di daerah. Ini tidak hanya akan membantu dalam menarik investasi asing tetapi juga mendukung pengembangan produk daerah yang dapat bersaing di pasar internasional. Keberhasilan ini diharapkan akan menghasilkan kinerja ekonomi daerah yang lebih baik, integrasi yang lebih luas dari sektor swasta dalam perencanaan ekonomi, dan kerja sama yang lebih erat dengan lembaga internasional, semuanya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pengadaan tenaga medis yang kompeten. Inisiatif ini termasuk peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil serta penerapan program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang efektif. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu di semua wilayah memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan yang berkualitas. Program-program ini didukung oleh peningkatan infrastruktur kesehatan dan penyediaan alat kesehatan yang terjangkau, yang akan membantu dalam menurunkan insiden penyakit dan meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan warga.

Tabel V-8. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang kompeten, Peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil, dan Program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, Program kesehatan preventif dan promotif, dan Pengadaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Penerapan standar yang lebih baik dalam layanan kesehatan, Inovasi dalam teknologi kesehatan, dan Peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui layanan kesehatan, Pelibatan masyarakat dalam program kesehatan, dan Kerja sama lintas sektor dalam peningkatan kesehatan

Selanjutnya, Kabupaten Bengkulu Selatan mengakselerasi layanan kesehatannya melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, termasuk inovasi dalam teknologi kesehatan yang mendukung penerapan standar yang lebih tinggi dalam praktik medis. Peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan, bersama dengan kerja sama lintas sektor, telah berkontribusi pada peningkatan keseluruhan dalam kualitas kesehatan masyarakat. Ini termasuk pelibatan masyarakat dalam program-program kesehatan dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-profit untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang disediakan adalah komprehensif dan berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian akses pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi.

Ini mencakup penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan yang luas untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Langkah-langkah ini diperkuat dengan program peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif, memastikan bahwa guru dan dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada pelajar.

Tabel V-9. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Akses pendidikan yang merata dan berkualitas, Penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan, dan Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, Program beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi, dan Kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Penerapan standar pendidikan yang lebih baik, Program pertukaran pelajar dan pendidik, dan Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Di samping itu, Kabupaten Bengkulu Selatan memfokuskan pada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja modern dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kerja sama dengan institusi pendidikan berkualitas tinggi juga telah dilakukan untuk memfasilitasi program beasiswa dan pertukaran pelajar dan pendidik, yang membuka kesempatan lebih luas bagi pendidik dan pelajar untuk mendapatkan eksposur internasional. Langkah-langkah ini diharapkan akan memperkuat fondasi pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan mendukung tercapainya peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan yang disediakan kepada masyarakat.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat yang Layak

Tabel V-10. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat yang Layak untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Penguatan infrastruktur sosial, Peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan Penguatan kelembagaan untuk pengentasan kemiskinan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pemberdayaan ekonomi lokal, dan Perluasan program jaminan sosial
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Pengembangan potensi lokal dan Promosi investasi dan kolaborasi sektor swasta
Periode IV: 2040-2045	Telah meningkatnya standar hidup masyarakat yang layak

Perwujudan Sasaran Pokok	

Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan peningkatan standar hidup masyarakat sebagai prioritas utama, dengan fokus pada penguatan infrastruktur sosial yang meliputi perluasan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Inisiatif ini juga termasuk penguatan kelembagaan untuk pengentasan kemiskinan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan yang lebih efektif kepada kelompok-kelompok rentan di dalam masyarakat. Program-program ini dirancang untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mendukung pembangunan holistik yang merata di semua sektor.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan ini, Kabupaten Bengkulu Selatan telah memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui perluasan program jaminan sosial dan pemberian insentif kepada usaha-usaha kecil yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga aktif mempromosikan investasi dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan potensi lokal yang belum tergali. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat basis ekonomi daerah tetapi juga membuka peluang kerja baru, yang secara langsung meningkatkan standar hidup masyarakat. Melalui strategi ini, Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa setiap warga memiliki akses ke kehidupan yang lebih baik dan lebih layak.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kesempatan Masyarakat dalam Mengakses Informasi Digital

Tabel V-11. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kesempatan Masyarakat dalam Mengakses Informasi Digital untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pembangunan infrastruktur TIK untuk meningkatkan konektivitas digital dan Integrasi pendidikan digital untuk persiapan ekonomi digital.
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pemberdayaan UMKM digital melalui pelatihan dan akses e-commerce dan Pengembangan teknologi lokal untuk transformasi ekonomi digital.
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Pembangunan ekosistem startup dengan inkubasi dan akses modal dan Pengembangan kewirausahaan digital untuk meningkatkan daya saing wilayah.
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses infomasi digital dalam meningkatkan ekonomi

Kabupaten Bengkulu Selatan memprioritaskan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi digital sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi lokal. Melalui pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), daerah ini berusaha meningkatkan konektivitas digital yang merupakan kunci dalam mendukung integrasi pendidikan digital dan persiapan masyarakat untuk ekonomi digital yang semakin berkembang. Langkah ini termasuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan internet yang cepat, yang akan memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan dan peluang ekonomi online.

Selanjutnya, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi menjadi fokus utama untuk memanfaatkan potensi e-commerce dan mengembangkan teknologi lokal yang mendukung transformasi ekonomi digital. Ini termasuk pelatihan dan penyediaan akses ke platform digital untuk UMKM, sehingga memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan pasar mereka baik secara nasional maupun internasional. Pembangunan ekosistem startup melalui program inkubasi dan penyediaan akses modal juga dilakukan untuk merangsang inovasi dan kewirausahaan digital, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi digital dan memanfaatkannya untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sasaran Pokok: Terciptanya Masyarakat Berbudaya dan Rukun

Tabel V-12. Penjabaran Sasaran Pokok Terciptanya Masyarakat Berbudaya dan Rukun untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pelestarian budaya lokal dan promosi kerukunan sosial, Program dialog antar budaya dan agama, dan Penguatan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Program pertukaran budaya, Penguatan pendidikan nilai-nilai kebhinekaan, dan Peningkatan akses terhadap kegiatan seni dan budaya
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Promosi budaya lokal di kancah internasional, Kerja sama budaya dengan negara lain, dan Program budaya yang mendukung pariwisata internasional
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun

Kabupaten Bengkulu Selatan menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal dan promosi kerukunan sosial sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan rukun. Upaya ini meliputi program dialog antarbudaya dan antaragama yang aktif, yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam setiap lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai kebhinekaan dan memperluas akses ke kegiatan seni dan budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan berambisi untuk mengasah kesadaran budaya yang lebih dalam dan meningkatkan keharmonisan antarkomunitas.

Pada skala yang lebih luas, Kabupaten Bengkulu Selatan juga mempromosikan budaya lokalnya di kancah internasional melalui kerja sama budaya dengan negara-negara lain dan melalui program-program yang mendukung pariwisata internasional. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan reputasi dan visibilitas budaya lokal di mata dunia, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya yang mengundang wisatawan untuk merasakan keunikan tradisi Bengkulu Selatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan tidak hanya terciptanya masyarakat yang lebih rukun dan berbudaya, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai budaya yang kuat.

Sasaran Pokok: Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dengan Mutu Keluarga yang Berkualitas

Tabel V-13. Penjabaran Sasaran Pokok Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dengan Mutu Keluarga yang Berkualitas untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pendidikan inklusif dan kesetaraan hak, Perlindungan hak-hak kelompok rentan, dan Peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan kesehatan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Program pendidikan inklusif di sekolah, Kampanye kesetaraan hak di masyarakat, dan Program kesehatan keluarga berbasis komunitas
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan daya saing daerah melalui keragaman budaya, Kolaborasi dengan organisasi internasional untuk promosi inklusivitas, dan Pengembangan program sosial yang berkelanjutan
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif dengan memastikan mutu keluarga yang berkualitas melalui penerapan pendidikan inklusif dan kesetaraan hak. Inisiatif ini mencakup perlindungan hak-hak kelompok rentan dan peningkatan kualitas pendidikan keluarga serta kesehatan,

yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua warga tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif diimplementasikan di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak dari semua latar belakang dapat belajar bersama dalam suasana yang mendukung, sementara program kesehatan keluarga berbasis komunitas diperkuat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di tingkat lokal.

Dalam konteks yang lebih luas, Kabupaten Bengkulu Selatan juga berfokus pada peningkatan daya saing daerah melalui keragaman budaya. Kolaborasi dengan organisasi internasional untuk promosi inklusivitas membantu daerah ini mengembangkan program-program sosial yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi sosial yang inklusif. Kampanye kesetaraan hak di masyarakat ditingkatkan untuk memperjuangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya keberagaman dan inklusivitas. Melalui strategi-strategi ini, Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat mengakses sumber daya yang memadai untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Resiliensi Perubahan Iklim

Tabel V-14. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Resiliensi Perubahan Iklim untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Membangun pondasi Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Kesiapsiagaan bencana, dan Program mitigasi perubahan iklim
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pengembangan sistem peringatan dini bencana, Program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan, dan Kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Penguatan daya saing melalui lingkungan hidup yang bersih dan hijau, Kerja sama internasional untuk pengelolaan lingkungan, dan Pengembangan teknologi ramah lingkungan
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim

Kabupaten Bengkulu Selatan mengedepankan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana melalui strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesiapsiagaan bencana dan implementasi program mitigasi perubahan

iklim yang efektif. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mengurangi kerusakan ekologis yang bisa terjadi akibat bencana alam atau dampak perubahan iklim. Inisiatif ini diperkuat dengan pengembangan sistem peringatan dini dan program penghijauan yang tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan tetapi juga memperkuat resiliensi ekosistem lokal.

Selanjutnya, untuk memperkuat daya saing global, Kabupaten Bengkulu Selatan mengintegrasikan praktek pengelolaan lingkungan yang bersih dan hijau, termasuk kerja sama regional dan internasional dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan. Program-program ini mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi berkelanjutan serta penerapan teknologi baru yang ramah lingkungan. Dengan mengkombinasikan upaya lokal dan global, Kabupaten Bengkulu Selatan berambisi menciptakan sebuah komunitas yang tidak hanya bertahan terhadap tantangan lingkungan saat ini dan masa depan tetapi juga menikmati peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Tabel V-15. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Diversifikasi sumber energi dan air, Peningkatan produktivitas pangan melalui teknologi pertanian, dan Penyediaan infrastruktur energi dan air yang andal
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Peningkatan penggunaan energi terbarukan, Pengembangan teknologi pengolahan air, dan Program ketahanan pangan berbasis komunitas
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Penguatan daya saing melalui ketahanan energi dan air, Akses ke teknologi dan pengetahuan global, dan Pengembangan kerjasama internasional untuk kemandirian pangan
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan melalui diversifikasi sumber energi dan air serta peningkatan produktivitas pangan dengan teknologi pertanian yang canggih. Pemerintah daerah telah memprioritaskan penyediaan infrastruktur energi dan air yang andal untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar warganya terpenuhi secara berkelanjutan. Upaya ini meliputi pengembangan sumber energi terbarukan dan teknologi pengolahan air yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan

pada sumber daya non-terbarukan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam.

Di samping itu, program ketahanan pangan berbasis komunitas diperkenalkan untuk memperkuat kemandirian pangan pada level lokal. Program ini tidak hanya mendukung penggunaan praktik pertanian yang berkelanjutan tapi juga mendorong komunitas lokal untuk mengambil bagian aktif dalam mengamankan pasokan pangan mereka. Melalui penguatan daya saing yang berfokus pada ketahanan energi dan air, serta pengembangan kerjasama internasional, Kabupaten Bengkulu Selatan berusaha untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan internal tapi juga memposisikan diri sebagai daerah yang memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi tinggi dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam aspek kemandirian pangan.

Sasaran Pokok: Menurunnya Angka Kriminalitas Melalui Peningkatan Penegakan Hukum

Tabel V-16. Penjabaran Sasaran Pokok Menurunnya Angka Kriminalitas Melalui Peningkatan Penegakan Hukum untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Peningkatan sistem keamanan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan Program pencegahan kriminalitas melalui pendidikan dan kesadaran hukum
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Peningkatan sistem keamanan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, dan Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Penguatan daya saing daerah melalui keamanan yang baik, Pengembangan teknologi keamanan mutakhir
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk menurunkan angka kriminalitas melalui peningkatan sistem keamanan dan penegakan hukum yang efektif. Ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Program pencegahan kriminalitas juga ditingkatkan melalui pendidikan dan kesadaran hukum, yang ditujukan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan mencegah tindakan kriminal sebelum terjadi. Ini mencakup pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan aspek hukum dan etika, serta kampanye kesadaran yang melibatkan semua segmen masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum menjadi titik fokus, termasuk

pengembangan dan penerapan sistem keamanan digital dan fisik yang canggih. Penggunaan CCTV, sistem pelacakan digital, dan platform pelaporan kejahatan online adalah beberapa contoh cara teknologi dapat membantu dalam memantau dan merespons insiden keamanan secara efisien. Dengan kombinasi pemberdayaan masyarakat dan inovasi teknologi, Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan dan penegakan hukum.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik

Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan fokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi. Inisiatif ini mencakup penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang tidak hanya mempercepat proses tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses pemerintahan berjalan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Tabel V-17. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Reformasi birokrasi dan transparansi dalam pemerintahan, Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Implementasi sistem e-government, Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, dan Penguatan mekanisme pengawasan internal
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Pengembangan kapasitas institusi pemerintahan yang bertintegritas dan Promosi transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai jual untuk investasi dan kerjasama
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel dan kualitas pelayanan publik

Selanjutnya, implementasi sistem e-government merupakan langkah penting lainnya yang diambil untuk mendorong efisiensi administratif dan memperkuat mekanisme pengawasan internal. Ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan mempermudah pengawasan kegiatan pemerintahan secara real-time. Dengan penguatan tata kelola yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya meningkatkan kinerja internal tetapi juga

memposisikan dirinya sebagai daerah yang menarik untuk investasi dan kerjasama internasional. Langkah-langkah ini mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang efisien dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana, dan Prasarana yang Merata dan Berkualitas

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan. Ini termasuk penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, serta transportasi publik yang lebih efisien. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengakses fasilitas yang memadai dan layak, yang merupakan fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel V-18. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana, dan Prasarana yang Merata dan Berkualitas untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, Penyediaan infrastruktur dasar di daerah terpencil, dan Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan transportasi publik
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Penerapan teknologi konstruksi modern dan ramah lingkungan, Pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta, dan Peningkatan kapasitas lokal dalam pengelolaan proyek infrastruktur
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung perdagangan dan pariwisata, Peningkatan investasi melalui infrastruktur yang andal, dan Promosi Bengkulu Selatan sebagai destinasi investasi yang menarik
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah Meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas

Dalam fase akselerasi, Kabupaten Bengkulu Selatan mengimplementasikan teknologi konstruksi modern yang ramah lingkungan dan memanfaatkan pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta untuk mengelola dan membiayai proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan ini tidak hanya memperkuat konektivitas antar daerah yang mendukung perdagangan dan pariwisata tetapi juga menarik investasi lebih lanjut dengan mempromosikan daerah sebagai destinasi investasi yang menarik. Langkah ini menggambarkan upaya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menciptakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan ekonomi serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendukung perencanaan berkelanjutan. Inisiatif ini termasuk penguatan institusi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan data serta teknologi informasi. Tujuan utama adalah untuk menciptakan sistem perencanaan yang tidak hanya efisien tetapi juga efektif, dengan memanfaatkan data akurat dan terkini yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam semua aspek pembangunan daerah. Dalam proses akselerasi, Kabupaten Bengkulu Selatan memfokuskan pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang perencanaan pembangunan. Ini dilengkapi dengan integrasi sistem perencanaan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Selain itu, ada kolaborasi yang berkelanjutan dengan universitas dan lembaga penelitian untuk studi pembangunan yang inovatif. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk meningkatkan daya saing regional melalui perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, sambil memanfaatkan teknologi terkini untuk membawa inovasi dalam perencanaan pembangunan.

Tabel V-19. Penjabaran Sasaran Pokok Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan untuk Masing-Masing Periode

Periode I: 2025-2029 Fondasi Transformasi	Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung perencanaan berkelanjutan, Penguatan institusi perencanaan pembangunan, dan Peningkatan penggunaan data dan teknologi informasi dalam perencanaan
Periode II: 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perencanaan pembangunan, Integrasi sistem perencanaan untuk efisiensi dan efektivitas, dan Kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk studi pembangunan
Periode III: 2035-2039 Berdaya saing global	Meningkatkan daya saing regional melalui perencanaan yang tepat, Pengembangan kapasitas untuk perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, dan Pemanfaatan teknologi terkini untuk inovasi dalam perencanaan
Periode IV: 2040-2045 Perwujudan Sasaran Pokok	Telah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan merupakan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada dokumen RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2025-2045 telah ditentukan arah

pembangunan (Indonesia Emas (IE)) dalam 20 ke depan dengan menggunakan paradigma baru yang terbagi kedalam 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang bersifat transformatif yang dituangkan dalam 17 IE sebagai berikut:

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif
- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- IE9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah)
- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Adapun keterkaitan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 dengan arah pembangunan (IE) adalah sebagai berikut:

Tabel V-20. Visi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Meningkatkan sektor Pertanian, perkebunan, dan Perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan	
	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri	

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
	pengolahan dan meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD	
	Meningkatnya peran Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatnya transformasi ekonomi berkelanjutan	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IE1. Kesehatan untuk Semua
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Meningkatkan standar hidup masyarakat yang layak	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses infomasi digital	IE6. Transformasi Digital
	Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	Terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	Meningkatnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel dan kualitas pelayanan publik	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi adalah upaya transformasi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun arah kebijakan transformasi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua puluh tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel V-21. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	✓	✓	✓	✓
	Pemerataan dan penyelenggaraan layanan kesehatan universal yang berkualiyas dan berkeadilan.	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	✓	✓	✓	✓
	Pemerataan dan Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan.	✓	✓	✓	✓
	Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting.*	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	✓	✓	✓	✓
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	✓	✓	✓	✓
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	✓	✓	✓	✓
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	✓	✓	✓	✓
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	✓	✓	✓	✓
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	✓	✓	✓	✓
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	✓	✓	✓	✓
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	✓	✓	✓	✓
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	✓	✓	✓	✓
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	✓	✓	✓	✓
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	✓	✓	✓	✓
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)	✓	✓	✓	✓
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi			✓	

Transformasi	Arah Kebijakan	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.			✓	
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat		✓		
	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian serta jaminan hari tua		✓		
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan				
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.		✓		
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.		✓		
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).				✓
	Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, *bank*, dan asuransi perikanan.		✓		
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu			✓	
	Penguatan infrastruktur dan penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dalam mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.				✓
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	✓			
	Percepatan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional	✓			
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.		✓		
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.			✓	
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	✓			
	Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bengkulu.				✓
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi				✓

Transformasi	Arah Kebijakan	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.		✓		
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	✓			
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah		✓		
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.			✓	
	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.			✓	
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		✓		
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		✓		
	Pembangunan ketenagalistrikan energy baru dan terbaruk serta rendah emisi				✓
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).		✓		
Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.		✓		
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.			✓	
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.		✓		
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	✓			
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Bengkulu, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Bengkulu yang profesional dan bebas korupsi.	✓			
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	✓			
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan	✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
	kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.				
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.		✓		
	Penguatan integritas partai politik.			✓	
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	✓			
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	✓			
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	✓			
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.	✓			
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	✓			
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.				✓
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.				✓
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	✓			
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	✓			
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	✓			
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.			✓	
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.			✓	
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		✓		
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.		✓		
Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	✓			
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk	✓			

Transformasi	Arah Kebijakan	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
	rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).				
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	✓			
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas			✓	
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.			✓	
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.		✓		
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.			✓	
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.			✓	
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.			✓	
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	✓			
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.				
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.		✓		
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.				✓
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.		✓		

Transformasi sosial dalam kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan sebuah komitmen menyeluruh untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk diterapkan secara konsisten dari Periode I (2025-

2029) hingga Periode IV (2040-2045), mencerminkan fokus yang kuat pada keberlanjutan pembangunan. Salah satu aspek yang sangat ditekankan adalah perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, di mana pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap air minum bersih, sanitasi yang layak, dan fasilitas kesehatan komunal. Pemerataan layanan kesehatan universal yang berkualitas juga menjadi prioritas utama yang akan terus digenjot di seluruh periode, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan percepatan penuntasan stunting, yang menjadi masalah nasional, juga menjadi fokus utama di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penurunan angka stunting ini dilakukan melalui upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi kesehatan generasi masa depan sekaligus menekan angka masalah kesehatan gizi buruk di kalangan anak-anak. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan melalui kebijakan yang terus diperkuat dari tahun ke tahun. Peran tenaga kesehatan akan dioptimalkan, dengan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi yang merata di seluruh wilayah, guna memastikan akses kesehatan yang setara di daerah-daerah terpencil.

Di sektor pendidikan, pemerintah Bengkulu Selatan mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun dan meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang. Penguatan kurikulum yang berbasis pada talenta, karakter, serta adaptasi terhadap kondisi lokal, termasuk pengembangan digital literacy, menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap bersaing di era global. Tidak hanya itu, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta pemerataan kompetensi mereka, merupakan langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Peningkatan sarana-prasarana pendidikan yang aman bencana dan transportasi khusus bagi peserta didik di daerah-daerah terpencil juga menjadi bagian dari upaya memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Selain kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah

berkomitmen untuk memperkuat potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta memperkuat sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi lokal ini juga didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti air minum bersih, sanitasi yang layak, dan rumah layak huni, yang terus diperkuat sepanjang periode pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga sangat menyadari pentingnya menyediakan fasilitas dasar yang memadai sebagai bagian integral dari pembangunan sosial. Penekanan pada penyediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas, percepatan penuntasan kemiskinan, serta peningkatan akses layanan sosial seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi fokus utama. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berupaya memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah.

Dengan transformasi sosial yang direncanakan ini, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup di semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan budaya, menciptakan fondasi yang kuat bagi masa depan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk menciptakan daerah yang mampu menghadapi tantangan global, dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kekayaan sumber daya manusia serta alamnya.

Transformasi ekonomi jangka panjang di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam RPJPD 2025-2045 didesain untuk menciptakan pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan potensi lokal yang optimal. Salah satu elemen kunci dari transformasi ini adalah peningkatan produktivitas pertanian melalui

modernisasi. Pada periode IV (2040-2045), implementasi teknologi canggih seperti smart farming, teknologi sensor, dan modifikasi cuaca akan diterapkan secara luas. Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim serta keterbatasan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian lokal.

Pada periode II (2030-2034), fokus utama akan diarahkan pada pengembangan closed loop model perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dengan penguatan kelembagaan koperasi nelayan dan petambak, pemerintah daerah akan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi perikanan yang lebih stabil dan mandiri. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara nelayan dan petambak dengan pasar, bank, dan asuransi perikanan akan dipercepat. Pendekatan ini memastikan bahwa para nelayan dan petambak mendapatkan akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan dan perlindungan risiko, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Langkah ini juga akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku di sektor perikanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut daerah.

Selanjutnya, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur ramah lingkungan yang berbasis pada keunggulan wilayah akan menjadi prioritas pada periode III (2035-2039). Industri pengolahan berbasis potensi lokal ini akan ditempatkan di kawasan strategis industri yang dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan roda perekonomian daerah, serta meminimalkan dampak lingkungan melalui penerapan teknologi industri yang lebih ramah lingkungan. Periode ini juga akan melihat peningkatan kerjasama antarwilayah dan penguatan infrastruktur di kawasan perkotaan untuk mendukung industrialisasi yang berkelanjutan.

Dalam hal pembangunan perkotaan dan pengelolaan kawasan, periode IV (2040-2045) akan mencakup penguatan koordinasi lintas wilayah dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Pembentukan regulasi dan kelembagaan lintas wilayah akan diintensifkan, terutama dalam penyediaan layanan publik seperti air minum, pengelolaan sampah, sanitasi, dan transportasi publik. Hal ini penting untuk menciptakan konektivitas dan efisiensi

dalam penyediaan layanan publik di perkotaan, sekaligus memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan di Bengkulu Selatan.

Pada saat yang sama, transformasi ekonomi hijau akan menjadi fokus utama dalam pengembangan daerah. Pada periode II (2030-2034), pemerintah daerah akan mulai mengadopsi kebijakan ekonomi hijau, termasuk penerapan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. Ini akan didukung dengan upaya penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah, guna memastikan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan global dalam hal lingkungan dan perubahan iklim. Pada periode berikutnya, yaitu periode III (2035-2039), industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah serta penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi akan menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong ekonomi berbasis rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan dari industrialisasi juga dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penguatan ekosistem digitalisasi juga akan menjadi prioritas utama transformasi ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan ekosistem digital tidak hanya mencakup perluasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga peningkatan digital literacy masyarakat. Pada periode II (2030-2034), upaya akan difokuskan pada perluasan jaringan broadband ke seluruh pelosok daerah dan peningkatan pemanfaatan teknologi digital di sektor-sektor prioritas. Misalnya, digitalisasi sektor perikanan akan membantu nelayan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi rendah emisi dan transportasi publik massal yang ramah lingkungan akan dipercepat pada periode IV (2040-2045). Hal ini akan membantu Bengkulu Selatan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Transformasi ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan ini menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi daerah. Implementasi kebijakan-kebijakan ini akan memastikan bahwa ekonomi

Bengkulu Selatan terus tumbuh dan berkembang dengan cara yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Transformasi tata kelola di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam RPJPD 2025-2045 difokuskan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan profesional. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah menjadi langkah pertama yang akan dilakukan pada periode II (2030-2034). Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kerangka regulasi agar lebih efisien, mengurangi tumpang tindih peraturan, serta mempermudah proses administrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ini akan membuka jalan bagi reformasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sederhana dan efektif.

Pada periode III (2035-2039), akan dilakukan peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat (jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah akan memperkuat mekanisme konsultasi publik dan membuka lebih banyak ruang partisipasi, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi yang lebih inklusif ini juga akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Digitalisasi menjadi elemen penting dalam transformasi tata kelola, dengan percepatan digitalisasi pelayanan publik yang akan dimulai pada periode II (2030-2034). Langkah ini meliputi peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi dan responsivitas terhadap laporan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Selain itu, pada periode I (2025-2029), penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah akan menjadi prioritas. Aparatur daerah akan dilatih untuk menjadi lebih adaptif, mampu merespons kebutuhan daerah dengan cepat, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi inti dari transformasi tata kelola ini. Pada periode I (2025-2029), akan dilakukan penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN dengan fokus pada penyelenggaraan

pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. Penguatan ini akan mencakup penerapan meritokrasi dalam pengembangan karir ASN daerah melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, serta peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja. Peningkatan ini penting untuk menciptakan aparatur yang lebih kompeten dan termotivasi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pada periode IV (2040-2045), transformasi tata kelola akan menekankan pada penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Ini akan mencakup penguatan kelembagaan politik dan integritas partai politik, sehingga proses demokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Penekanan pada integritas dan demokrasi yang sehat ini juga akan didukung oleh audit dan evaluasi berkala terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk memastikan bahwa digitalisasi tata kelola benar-benar berjalan efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.

Transformasi menuju keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi fokus utama dalam RPJPD 2025-2045. Pada periode I (2025-2029), akan dilakukan penguatan keamanan dan ketertiban sebagai langkah penting untuk mengurangi tingkat kriminalitas di daerah. Keamanan yang terjaga akan menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah, pada periode I (2025-2029), akan dilakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui berbagai strategi seperti intensifikasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Selain mengandalkan sumber pendapatan tradisional, pemerintah daerah juga akan mengeksplorasi potensi pembiayaan alternatif dan kreatif, seperti melalui pinjaman daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha daerah (KPBUD), serta pemanfaatan jasa ekosistem dan perdagangan karbon. Peningkatan kualitas belanja daerah dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi langkah penting

untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro daerah, pada periode I (2025-2029), akan dilakukan penguatan pengendalian inflasi daerah. Pengendalian inflasi yang baik penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Inflasi yang terkendali akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil bagi masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan global. Langkah-langkah yang diambil pada tahap awal ini menjadi landasan penting bagi transformasi ekonomi jangka panjang di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Bengkulu Selatan dirancang untuk memperkuat identitas budaya, solidaritas sosial, dan keseimbangan ekologi melalui kebijakan yang berkelanjutan. Pada periode I (2025-2029), fokus utamanya adalah penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat dengan dasar Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan juga menjadi prioritas, untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat yang beragam.

Pada periode berikutnya (2030-2034), arah kebijakan beralih ke peningkatan ketahanan air di kawasan yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan kekeringan. Langkah ini akan melibatkan peningkatan infrastruktur air dan manajemen risiko yang berbasis komunitas. Di samping itu, dilakukan pengelolaan sampah terpadu melalui pendekatan dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengembangan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat lokal.

Memasuki periode III (2035-2039), Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengimplementasikan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, serta meningkatkan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan wilayah tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis. Pada periode ini, pengelolaan

bencana juga menjadi fokus penting, dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penguatan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah, sistem peringatan dini, serta penerapan mitigasi bencana secara struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana.

Pada periode IV (2040-2045), kebijakan transformasi sosial budaya dan ekologi difokuskan pada pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok-kelompok ini, sekaligus memastikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif di berbagai sektor pembangunan. Pada periode ini, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial juga diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara dan berkeadilan.

Implementasi Transformasi di Kabupaten Bengkulu Selatan mengarah pada pengelolaan wilayah yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Pada Periode I (2025-2029), fokus utama diarahkan pada penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah dan percepatan penyusunan panduan serta rencana pengembangan wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi dokumen kunci yang perlu dipercepat penyusunannya, dengan tujuan untuk menciptakan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah juga menjadi prioritas, untuk memastikan bahwa pembangunan daerah sesuai dengan arahan pusat.

Pada Periode II (2030-2034), upaya percepatan reforma agraria akan difokuskan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek ekonomi strategis. Reforma agraria ini bertujuan untuk menciptakan akses yang lebih merata terhadap lahan, terutama bagi sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan. Selain itu, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sasaran prioritas nasional akan diperkuat, guna mencapai kinerja yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Memasuki Periode III (2035-2039), Kabupaten Bengkulu Selatan akan memperkuat pengembangan riset sektor-sektor ekonomi produktif, melalui peningkatan

kapasitas dan kapabilitas peneliti. Kolaborasi riset antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta akan diperkuat untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pada periode ini, pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan blended finance, akan didorong untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang lebih efisien. Penegakan standar bangunan yang berketahanan bencana juga akan diterapkan untuk menghadapi risiko bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan.

Pada Periode IV (2040-2045), kebijakan lebih diarahkan pada pengaturan kembali otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah. Ini akan mencakup pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah yang lebih berkeadilan, serta peningkatan sinkronisasi RPJPD dan RTRW provinsi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Selain itu, penerapan manajemen risiko dalam pengendalian pembangunan akan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi risiko-risiko dalam pelaksanaan proyek strategis, memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan arah kebijakan ini, Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya mencapai transformasi tata kelola yang berfokus pada kolaborasi, keadilan, dan keberlanjutan, yang semuanya akan mendukung tercapainya pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 dirancang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor. Kebijakan transformasi sosial menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pengentasan stunting, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan potensi sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah. Di sisi lain, transformasi ekonomi menargetkan peningkatan produktivitas melalui modernisasi dan adopsi teknologi, pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan, serta penciptaan konektivitas infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Transformasi tata kelola diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat. Selain itu, aspek ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi prioritas, dengan fokus pada

pelestarian budaya lokal, pengelolaan risiko bencana, dan upaya mencapai keberlanjutan lingkungan. Transformasi ini diimplementasikan melalui periode yang berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global. Selain itu di dalam dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan ini juga ditentukan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 yang merujuk pada dokumen RPJPN. Dokumen RPJPN terdapat arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang akan diterapkan di wilayah sumatra. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang akan diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut ini:

Tabel V-22. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana	
Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan adalah sebagai berikut:	1. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera;
	2. Penuntasan RDTR Kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
	3. Peningkatan pelaksanaan reformasi agraria;
	4. Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Mengkudum dan pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Bawah (Kabupaten Bnegkulu Selatan)
	5. Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap;
	6. Pengembangan bandara utama dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata;
	7. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah;
	8. Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan;
	9. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang serta kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Jambi; dan
	10. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
Arah kebijakan sarana dan prasarana dasar yaitu:	1. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, sanitasi yang aman dan berkelanjutan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah;
	2. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;

A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana	
	3. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, dan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah; serta
	4. Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan.
B. Kesinambungan Pembangunan	
Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di wilayah sumatera yaitu:	1. Sinkronisasi subtansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
	2. Sinkronisasi priodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
	3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
	4. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko;
	5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
	6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBI dan blended finance.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu daerah dalam pencapaian pembangunannya. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 ini, indikator utama pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional maupun provinsi. Adapun indikator utama pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut ini:

Tabel V-23. Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045

VISI: Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan			Target RPJPD				
Sasaran Pokok	**Arah Pembangunan**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**2029**	**2034**	**2039**	**Target 2045**
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30-3,41	3,14-3,25	2,99-3,10	2,83-2,94	1,65-2,67
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67	68,6	70,2	71,8	73,4
Meningkatkan sektor Pertanian, perkebunan, dan Perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan		Indeks ketahanan pangan	76,01	78,26	80,51	82,75	85
		Jumlah kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	34,14	35,62	37,09	38,57	40,04
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri pengolahan dan meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,10-3,15	4,83-4,88	6,55-6,60	8,28-8,33	10,00-10,12
		Pengembangan Pariwisata					
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,13	2,38	2,62	2,87	3,11
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0,1	0,38	0,65	0,93	1,2
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	0,5	3,86	7,23	10,59	13,95
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	0,5	0,96	1,41	1,87	2,32

VISI: Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan			Target RPJPD				
Sasaran Pokok	**Arah Pembangunan**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**2029**	**2034**	**2039**	**Target 2045**
		c) Rasio Kewirausahaan Kabupaten (%)	2,4	3,80	5,20	6,60	8,00
		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	1,38	1,96	2,55	3,13
Meningkatnya peran Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
		a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	61,57	71,18	80,79	90,39	100
		b) Persentase Desa Mandiri (%)	10,56	25,55	40,53	55,52	70,5
Meningkatnya transformasi ekonomi berkelanjutan	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,49	68,07	72,65	77,23	81,8
	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,04	40,13	40,23	40,32	40,41
Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,13	0,52	0,92	1,31	1,7
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,45	29,71	40,98	52,24	63,5
		d) Total Kredit/PDRB (%)	29,1	37,45	45,80	54,15	62,5
	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Indeks Inovasi Daerah	53,01-55,00	58,51-60,50	64,01-66,00	69,50-71,49	75,0-80,0
		Indeks Daya Saing Daerah	3,20-3,25	3,40-3,45	3,60-3,65	3,80-3,85	4,0-4,5
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IE1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,56	74,98	76,40	77,81	79,23
		Kesehatan Ibu dan Anak:					
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	48,36 (2023)	36,27	24,18	12,09	0
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,7	14,45	11,20	7,95	4,7
		Penanganan Tuberkulosis:					
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	82,10	85,33	88,55	91,78	95

VISI: Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan			Target RPJPD				
Sasaran Pokok	**Arah Pembangunan**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**2029**	**2034**	**2039**	**Target 2045**
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95,20	95,90	96,60	97,30	98
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:					
		a) Persentase Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
		i) Literasi Membaca	63,6-64,00	64,95-65,35	66,30-66,70	67,65-68,05	69,00-69,50
		ii) Numerasi	54,6-55,00	55,95-56,35	57,30-57,70	58,65-59,05	60,00-61,00
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
		i) Literasi Membaca	77,16-77,50	78,25-78,59	79,33-79,67	80,42-80,76	81,50-82,00
		ii) Numerasi	68,60-69,00	70,20-70,60	71,80-72,20	73,40-73,80	75,00-75,50
		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,67-9,68	10,32-10,33	10,97-10,98	11,62-11,63	12,27-12,35
		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,70-13,96	14,13-14,39	14,57-14,83	15,00-15,26	15,43-15,48
Meningkatkan standar hidup masyarakat yang layak	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	15,50-16,49	12,88-13,87	10,25-11,24	7,63-8,62	5,0-7,0
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan daerah (%)	12,8	30,91	49,01	67,12	85,22
Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses infomasi digital	IE6. Transformasi Digital	Jumlah pelanggan telepon selular per 100 penduduk	86	87,00	88,00	89,00	90
		Persentase rumah tangga dengan akses internet;	63	69,50	76,00	82,50	89
Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan terhadap total pendaftaran	3,85	23,07	42,30	61,53	80,76

VISI: Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan			Target RPJPD				
Sasaran Pokok	**Arah Pembangunan**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**2029**	**2034**	**2039**	**Target 2045**
		Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan	2,99	17,91	32,84	47,76	62,69
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,26-75,31	77,04-77,09	78,82-78,87	80,59-80,64	82,37-82,83
Terciptanya masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,781-0,779	0,639-0,637	0,496-0,494	0,354-0,352	0,211-0,192
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,00-66,07	68,88-68,95	71,75-71,82	74,63-74,70	77,50-77,57
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi perubahan iklim	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup					
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,96	67,80	68,86	69,92	71,19
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5	16,25	27,50	38,75	50
		c) Pengelolaan Sampah					
		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,00	22,50	43,00	63,50	84
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	26,00	44,50	63,00	81,50	100
	IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	161,61	155,62	149,62	143,63	137,63-117,05
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
		a. Kumulatif	20,37	24,37	28,37	32,36	36,36
		b. Tahunan	30,35	37,57	44,78	52,00	59,21
Meningkatnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
		a) Ketahanan Energi					
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	595	904	1213	1521	1830
		b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,33	6,41	4,49	2,57	0,65
		c) Ketahanan Air					

VISI: Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan			Target RPJPD				
Sasaran Pokok	**Arah Pembangunan**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**2029**	**2034**	**2039**	**Target 2045**
		- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	3,6	3,83	4,05	4,28	4,5
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	3,3	27,48	51,65	75,83	100
Menurunnya angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Angka Kriminalitas	136,57	113,47	90,36	67,26	44,15
		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan efisien, transparan, dan akuntabel dan kualitas pelayanan publik	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,76	3,32	3,88	4,44	5,00
		Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,07	4,38	4,69	5,00
Meningkatnya pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata dan berkualitas	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Persentase kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sangat baik)	59,50	64,63	69,75	74,88	80,00
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sangat baik)	83,00	85,75	88,50	91,25	94,00
		Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sangat baik)	60,00	61,25	62,50	63,75	65,00
	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Persentase ketersediaan rumah ibadah di setiap desa atau kelurahan					
		Persentase ketersediaan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan	18,18	36,36	54,55	72,73	100,00
		Persentase Desa Open Defecation Free (ODF)	73,00	79,75	86,50	93,25	100,00
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	IE9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	BB	A	A	A	A

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat

a. Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada kisaran 3,30-3,41% sebagai baseline awal. Dengan peningkatan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kecil, serta penguatan program pelatihan keterampilan untuk angkatan kerja, diharapkan angka pengangguran terbuka dapat terus menurun. Pada tahun 2029, target tingkat pengangguran terbuka akan turun menjadi 3,14-3,25%, dan lebih lanjut menurun pada tahun 2034 menjadi 2,99-3,10%. Pada tahun 2039, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 2,83-2,94%, hingga akhirnya pada tahun 2045 target penurunan pengangguran berada di kisaran 1,65-2,67%. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

b. Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Pada tahun 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 67%. Pemerintah daerah berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dengan memperluas akses ke pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan mendorong partisipasi perempuan dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih luas. Pada tahun 2029, tingkat partisipasi perempuan diproyeksikan meningkat menjadi 68,6%, seiring dengan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam dunia kerja. Pada tahun 2034, partisipasi perempuan diharapkan mencapai 70,2%, dengan terus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses yang lebih besar terhadap peluang kerja. Pada tahun 2039, target partisipasi perempuan akan meningkat menjadi 71,8%, hingga mencapai target akhir pada tahun 2045 sebesar 73,4%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap inklusi gender dalam pembangunan ekonomi daerah.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan demi Terwujudnya Kemandirian Pangan

a. Indikator: Indeks Ketahanan Pangan

Pada tahun 2025, indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 76,01. Upaya untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan akan difokuskan pada penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui modernisasi teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta peningkatan akses petani dan nelayan ke pasar dan pembiayaan. Pada tahun 2029, indeks ini diharapkan meningkat menjadi 78,26, seiring dengan program peningkatan produksi dan distribusi pangan yang lebih efisien. Selanjutnya, pada tahun 2034, target indeks ketahanan pangan diproyeksikan meningkat menjadi 80,51, dan pada tahun 2039 meningkat lagi menjadi 82,75. Pada tahun 2045, target akhir indeks ketahanan pangan mencapai 85, yang menunjukkan kemampuan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Indikator: Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB

Pada tahun 2025, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada angka 34,14%. Dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta peningkatan produktivitas perkebunan dan perikanan, kontribusi sektor ini diharapkan terus tumbuh. Pada tahun 2029, target kontribusi sektor pertanian meningkat menjadi 35,62%, seiring dengan peningkatan daya saing produk pertanian dan diversifikasi komoditas unggulan. Pada tahun 2034, kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 37,09%, dan pada tahun 2039 diperkirakan meningkat menjadi 38,57%. Pada tahun 2045, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB diharapkan mencapai 40,04%, mencerminkan penguatan sektor pangan dan kehutanan sebagai pilar ekonomi daerah.

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berfokus pada Industri Pengolahan dan Meningkatkan Potensi Pariwisata, UMKM, Koperasi, dan BUMD

a. Indikator: Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Pada tahun 2025, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan sebesar 3,10-3,15%. Melalui pengembangan industri lokal, inovasi teknologi, dan peningkatan nilai tambah produk, kontribusi sektor ini diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2029, target kontribusi industri pengolahan diproyeksikan mencapai 4,83-4,88%, yang mencerminkan penguatan sektor industri sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Selanjutnya, pada tahun 2034, target kontribusi meningkat menjadi 6,55-6,60%, pada tahun 2039 menjadi 8,28-8,33%, dan pada tahun 2045, target akhirnya diproyeksikan mencapai 10,00-10,12%, mencerminkan industrialisasi yang semakin kuat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Indikator: Pengembangan Pariwisata

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum (%)

Pada tahun 2025, rasio PDRB dari sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum ditargetkan sebesar 2,13%. Dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kualitas layanan, target ini diproyeksikan meningkat menjadi 2,38% pada tahun 2029, 2,62% pada tahun 2034, dan 2,87% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target rasio ini diharapkan mencapai 3,11%, mencerminkan pertumbuhan signifikan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)

Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan sebanyak 0,1 ribu orang. Seiring dengan pengembangan destinasi wisata unggulan dan promosi internasional, target jumlah wisatawan mancanegara diproyeksikan meningkat menjadi 0,38 ribu orang pada tahun 2029, 0,65 ribu orang pada tahun 2034, dan 0,93 ribu orang pada tahun 2039. Pada tahun 2045, diharapkan jumlah wisatawan mancanegara

mencapai 1,2 ribu orang, menunjukkan peningkatan daya tarik pariwisata daerah secara global.

c. **Indikator: Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD**

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)

Pada tahun 2025, proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian ditargetkan sebesar 0,5%. Dengan kebijakan penguatan sektor UMKM melalui pemberdayaan dan akses modal, proporsi ini diharapkan meningkat menjadi 3,86% pada tahun 2029, 7,23% pada tahun 2034, dan 10,59% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, targetnya mencapai 13,95%, menunjukkan kontribusi signifikan UMKM terhadap ekonomi daerah.

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

Pada tahun 2025, proporsi jumlah industri kecil dan menengah diproyeksikan sebesar 0,5%. Dengan fokus pada pengembangan sektor industri kecil melalui pelatihan dan dukungan teknologi, proporsi ini diproyeksikan meningkat menjadi 0,96% pada tahun 2029, 1,41% pada tahun 2034, dan 1,87% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target proporsi ini mencapai 2,32%.

Rasio Kewirausahaan Kabupaten (%)

Pada tahun 2025, rasio kewirausahaan di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan sebesar 2,4%. Dengan berbagai program pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan, rasio ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,80% pada tahun 2029, 5,20% pada tahun 2034, dan 6,60% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, rasio kewirausahaan diharapkan mencapai 8,00%, mencerminkan pertumbuhan ekosistem kewirausahaan yang kuat di daerah tersebut.

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Pada tahun 2025, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 0,79%. Dengan penguatan kapasitas koperasi dan peningkatan produktivitas, rasio ini diharapkan meningkat menjadi 1,38% pada tahun 2029, 1,96% pada tahun 2034, dan 2,55% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target rasio ini diproyeksikan mencapai 3,13%, menunjukkan peran koperasi yang semakin kuat dalam mendukung perekonomian daerah.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)

Pada tahun 2025, persentase rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan mencapai 61,57%. Melalui peningkatan program perumahan rakyat, pengembangan infrastruktur dasar, serta akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah, target ini diproyeksikan terus meningkat. Pada tahun 2029, targetnya naik menjadi 71,18%, kemudian pada tahun 2034, diharapkan persentase ini mencapai 80,79%. Pada tahun 2039, target rumah tangga dengan akses hunian layak diproyeksikan mencapai 90,39%, dan akhirnya pada tahun 2045, diharapkan seluruh rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan akan memiliki akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, mencapai target 100%. Peningkatan akses hunian ini merupakan bagian penting dari upaya untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Indikator: Persentase Desa Mandiri (%)

Pada tahun 2025, persentase desa mandiri di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan mencapai 10,56%. Melalui pengembangan ekonomi desa, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta dukungan terhadap kewirausahaan dan inovasi desa, target ini akan terus meningkat. Pada tahun 2029, persentase desa mandiri diproyeksikan mencapai 25,55%, menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan desa-desa di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2034, target desa mandiri ditingkatkan menjadi 40,53%, dan pada tahun 2039, diproyeksikan mencapai 55,52%. Akhirnya, pada tahun 2045, diharapkan persentase desa mandiri di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 70,5%. Peningkatan jumlah desa mandiri ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan desa-desa yang semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

a. Indikator: Indeks Ekonomi Hijau Daerah

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan penerapan prinsip ekonomi hijau. Pada tahun 2025, penerapan konsep ekonomi hijau akan difokuskan pada pengurangan emisi, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pengembangan energi terbarukan, meski target untuk Indeks Ekonomi Hijau masih belum secara eksplisit dikuantifikasi. Peningkatan ekonomi hijau di masa depan akan mencakup inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan, seperti pertanian ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta penerapan teknologi hijau di sektor industri.

Dengan berjalannya waktu, Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus memperkuat implementasi ekonomi hijau, di mana pada tahun 2029, 2034, dan 2039, diharapkan adanya peningkatan signifikan dalam indeks ini seiring dengan dukungan kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Target akhir pada tahun 2045 diharapkan dapat mencapai angka 81,8 yang telah menunjukkan peningkatan ekonomi yang lebih hijau, lebih seimbang, dan berkelanjutan, yang akan mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

b. Indikator: Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tetap yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi indikator penting dalam mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Pada tahun 2025, persentase PMTB terhadap PDRB diproyeksikan mencapai 40,04%. Investasi ini mencakup infrastruktur, teknologi, dan pembangunan industri yang ramah lingkungan. Seiring dengan transformasi ekonomi yang lebih terarah, pada tahun 2029, target PMTB meningkat menjadi 40,13%, dan terus bertambah menjadi 40,23% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, PMTB diproyeksikan mencapai 40,32%, hingga mencapai 40,41% pada tahun 2045.

Pertumbuhan dalam PMTB ini menunjukkan peningkatan komitmen Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menarik investasi untuk pembangunan yang

berkelanjutan, termasuk dalam sektor industri hijau dan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daya Saing Daerah

a. Indikator: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Stabilitas ekonomi makro dan peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dengan memperkuat basis fiskal, di mana Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menjadi salah satu ukuran penting. Pada tahun 2025, rasio ini diproyeksikan mencapai 0,13% sebagai baseline awal. Dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta perbaikan administrasi perpajakan, diharapkan rasio ini akan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2029, targetnya akan mencapai 0,52%, dan selanjutnya meningkat menjadi 0,92% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, rasio ini diproyeksikan naik menjadi 1,31%, hingga mencapai target 1,7% pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin kuat, mendukung stabilitas ekonomi makro serta membangun daya saing daerah.

b. Indikator: Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (%)

Pendalaman sektor keuangan juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Pada tahun 2025, total dana pihak ketiga yang dikelola oleh sektor keuangan diproyeksikan mencapai 18,45% dari PDRB. Seiring dengan penguatan intermediasi keuangan, pada tahun 2029, rasio ini akan meningkat menjadi 29,71%, dan terus naik menjadi 40,98% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, targetnya akan mencapai 52,24%, dan pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 63,5%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam memperdalam pasar keuangan daerah, memberikan dukungan bagi sektor riil, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

c. Indikator: Total Kredit terhadap PDRB (%)

Intermediasi sektor keuangan yang efektif juga diukur melalui rasio total kredit terhadap PDRB. Pada tahun 2025, targetnya adalah 29,1%, menunjukkan peran penting sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2029, rasio ini diproyeksikan meningkat menjadi 37,45%, dan pada tahun 2034

mencapai 45,80%. Dengan peningkatan akses pembiayaan dan dukungan terhadap sektor-sektor produktif, target tahun 2039 adalah 54,15%, dan pada tahun 2045 mencapai 62,5%. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kontribusi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bengkulu Selatan.

d. Indikator: Indeks Inovasi Daerah

Peningkatan daya saing daerah juga ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2025, indeks ini diproyeksikan berada di kisaran 53,01-55,00 sebagai baseline awal. Seiring dengan penguatan inovasi teknologi, pengembangan sektor kreatif, dan peningkatan kapasitas riset daerah, indeks ini akan terus meningkat. Pada tahun 2029, targetnya adalah 58,51-60,50, kemudian meningkat menjadi 64,01-66,00 pada tahun 2034. Pada tahun 2039, indeks inovasi akan mencapai 69,50-71,49, dan pada tahun 2045 target akhirnya adalah 75,0-80,0. Peningkatan inovasi daerah ini akan menjadi motor penggerak daya saing ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global.

e. Indikator: Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah juga menjadi ukuran penting dalam menentukan kemampuan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2025, indeks ini diproyeksikan berada di kisaran 3,20-3,25. Dengan berbagai program peningkatan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta pengembangan sumber daya manusia, indeks daya saing ini akan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2029, targetnya adalah 3,40-3,45, dan pada tahun 2034 meningkat menjadi 3,60-3,65. Pada tahun 2039, indeks ini diharapkan mencapai 3,80-3,85, hingga pada tahun 2045 targetnya adalah 4,0-4,5. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjadi daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Indikator: Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Pada tahun 2025, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada angka 73,56 tahun sebagai baseline awal. Seiring

dengan peningkatan layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan program kesehatan preventif, usia harapan hidup diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2029, target UHH meningkat menjadi 74,98 tahun, dan pada tahun 2034, targetnya naik lebih lanjut menjadi 76,40 tahun. Pada tahun 2039, UHH diproyeksikan mencapai 77,81 tahun, dan pada tahun 2045, target akhirnya adalah 79,23 tahun. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik.

b. Indikator: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 48,36 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta program perawatan prenatal yang lebih baik, angka kematian ibu diproyeksikan menurun secara signifikan. Pada tahun 2029, targetnya turun menjadi 36,27 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2034, angka tersebut diproyeksikan turun lebih lanjut menjadi 24,18. Pada tahun 2039, targetnya adalah 12,09, dan pada tahun 2045, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mencapai nol kematian ibu, mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang sangat baik dan penanganan kesehatan ibu yang optimal.

c. Indikator: Prevalensi Stunting pada Balita (%)

Pada tahun 2025, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada angka 17,7%. Dengan peningkatan intervensi gizi, program edukasi masyarakat, dan perbaikan dalam layanan kesehatan untuk anak-anak, prevalensi stunting diharapkan menurun. Pada tahun 2029, target prevalensi stunting turun menjadi 14,45%, kemudian pada tahun 2034 turun lebih lanjut menjadi 11,20%. Pada tahun 2039, target prevalensi stunting adalah 7,95%, dan pada tahun 2045, target akhirnya adalah 4,7%. Penurunan signifikan ini menunjukkan upaya serius untuk menangani masalah gizi buruk di kalangan balita dan memastikan pertumbuhan yang sehat.

d. Indikator: Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Pada tahun 2025, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan sebesar 82,10%. Seiring dengan upaya intensifikasi program penanggulangan tuberkulosis, penguatan layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, cakupan ini diproyeksikan meningkat. Pada tahun 2029, target cakupan adalah 85,33%, kemudian pada tahun 2034 meningkat menjadi 88,55%. Pada tahun 2039, targetnya adalah 91,78%, dan pada tahun 2045 cakupan ini diharapkan mencapai 95%, mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengendalian penyakit tuberkulosis.

e. Indikator: Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Pada tahun 2025, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan sebesar 95,20%. Dengan program pengobatan yang lebih terintegrasi dan pemantauan yang ketat, angka ini diproyeksikan terus meningkat. Pada tahun 2029, targetnya adalah 95,90%, dan pada tahun 2034 angka keberhasilan diharapkan meningkat menjadi 96,60%. Pada tahun 2039, targetnya mencapai 97,30%, hingga mencapai 98% pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas sistem kesehatan dalam menangani dan menyembuhkan pasien tuberkulosis.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

a. Indikator: Persentase Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca

Pada tahun 2025, persentase kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca ditargetkan berada pada kisaran 63,6-64,00%. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelaksanaan berbagai program literasi, target ini diharapkan terus meningkat menjadi 64,95-65,35% pada tahun 2029. Selanjutnya, pada tahun 2034, target tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 66,30-66,70%, dan pada tahun 2039 diharapkan mencapai 67,65-68,05%. Pada tahun 2045, target akhir persentase

kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca ditetapkan pada kisaran 69,00-69,50%.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam kualitas literasi di Kabupaten Bengkulu Selatan seiring dengan implementasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, memperkuat infrastruktur sekolah, dan meningkatkan kapasitas tenaga pengajar. Melalui upaya tersebut, setiap kecamatan diharapkan memiliki tingkat literasi yang memadai untuk mendukung kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan.

b. Indikator: Persentase Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Pada tahun 2025, persentase kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam numerasi ditargetkan berada pada kisaran 54,6-55,00%. Seiring dengan implementasi program-program pendidikan numerasi dan peningkatan kapasitas pengajaran, target ini diproyeksikan meningkat menjadi 55,95-56,35% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, targetnya akan naik lebih lanjut ke kisaran 57,30-57,70%, dan pada tahun 2039, persentase tersebut diharapkan mencapai 58,65-59,05%.

Pada tahun 2045, target akhir untuk persentase kecamatan yang mencapai standar minimum dalam numerasi di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada kisaran 60,00-61,00%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pendidikan yang diterapkan telah menghasilkan keterampilan numerasi dasar yang lebih baik di seluruh wilayah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat pendidikan numerasi dengan meningkatkan akses, infrastruktur, dan kualitas pengajaran agar setiap kecamatan mampu mencapai dan mempertahankan standar kompetensi minimum dalam numerasi secara berkelanjutan.

c. **Indikator: Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca**

Pada tahun 2025, persentase satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca diproyeksikan berada pada kisaran 77,16-77,50%. Dengan berbagai upaya peningkatan mutu pengajaran, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, dan perbaikan infrastruktur pendidikan, persentase ini diharapkan terus meningkat. Pada tahun 2029, targetnya akan naik menjadi 78,25-78,59%, mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pembelajaran di tingkat sekolah.

Pada tahun 2034, target persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi literasi membaca diproyeksikan berada di kisaran 79,33-79,67%, dan pada tahun 2039 akan meningkat menjadi 80,42-80,76%. Pada tahun 2045, persentase ini diharapkan mencapai 81,50-82,00%, menandakan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menciptakan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Peningkatan ini menggambarkan hasil positif dari berbagai program dan intervensi pendidikan yang dilakukan, guna memastikan setiap satuan pendidikan dapat mencapai standar kompetensi nasional dalam literasi.

d. **Indikator: Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi**

Pada tahun 2025, persentase satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam numerasi diproyeksikan berada pada kisaran 68,60-69,00%. Dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, persentase ini ditargetkan meningkat menjadi 70,20-70,60% pada tahun 2029.

Pada tahun 2034, targetnya akan mencapai 71,80-72,20%, dan pada tahun 2039 persentase tersebut diproyeksikan naik lagi menjadi 73,40-73,80%. Pada tahun 2045, target akhir ditetapkan pada kisaran 75,00-75,50%, mencerminkan komitmen Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kemampuan

numerasi di seluruh satuan pendidikan. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi matematika dasar siswa dan memastikan mereka siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

e. Indikator: Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 9,67-9,68 tahun. Seiring dengan meningkatnya akses pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, rata-rata lama sekolah diproyeksikan meningkat menjadi 10,32-10,33 tahun pada tahun 2029. Pada tahun 2034, targetnya naik menjadi 10,97-10,98 tahun, dan pada tahun 2039, target rata-rata lama sekolah adalah 11,62-11,63 tahun. Pada tahun 2045, diharapkan rata-rata lama sekolah mencapai 12,27-12,35 tahun, mencerminkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

f. Indikator: Harapan Lama Sekolah (tahun)

Pada tahun 2025, harapan lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kisaran 13,70-13,96 tahun. Dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, target ini diproyeksikan meningkat menjadi 14,13-14,39 tahun pada tahun 2029. Pada tahun 2034, target harapan lama sekolah diharapkan mencapai 14,57-14,83 tahun, dan pada tahun 2039 naik menjadi 15,00-15,26 tahun. Pada tahun 2045, harapan lama sekolah diproyeksikan mencapai 15,43-15,48 tahun, mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat yang Layak

a. Indikator: Tingkat Kemiskinan (%)

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada pada kisaran 15,50-16,49% sebagai baseline. Dengan upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup program-program pembangunan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat, angka ini diharapkan menurun secara bertahap. Pada tahun 2029, target penurunan berada di kisaran 12,88-13,87%. Seiring dengan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal dan dukungan kebijakan sosial, tingkat kemiskinan diproyeksikan

turun lagi menjadi 10,25-11,24% pada tahun 2034 dan mencapai 7,63-8,62% pada tahun 2039. Target akhir pada tahun 2045 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,0-7,0%, sebagai upaya untuk mencapai standar hidup yang lebih layak dan mengurangi kesenjangan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Indikator: Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah (%)

Pada tahun 2025, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan daerah diproyeksikan sebesar 12,8%. Melalui berbagai upaya peningkatan kesadaran dan akses pekerja terhadap program jaminan sosial, target cakupan ini diproyeksikan meningkat menjadi 30,91% pada tahun 2029. Dengan kebijakan yang terus memperkuat perlindungan tenaga kerja, cakupan tersebut akan tumbuh menjadi 49,01% pada tahun 2034 dan meningkat lagi menjadi 67,12% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target cakupan kepesertaan jaminan sosial diproyeksikan mencapai 85,22%, mencerminkan keberhasilan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan perlindungan yang lebih luas dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kesempatan Masyarakat dalam Mengakses Informasi Digital

a. Indikator: Jumlah Pelanggan Telepon Selular per 100 Penduduk

Pada tahun 2025, jumlah pelanggan telepon selular per 100 penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan mencapai 86. Dengan terus berkembangnya infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan akses terhadap perangkat digital, jumlah ini diharapkan terus bertambah. Pada tahun 2029, targetnya meningkat menjadi 87,00 pelanggan per 100 penduduk. Selanjutnya, pada tahun 2034, angka ini diproyeksikan naik menjadi 88,00, dan pada tahun 2039 diproyeksikan mencapai 89,00. Pada tahun 2045, target akhir adalah 90 pelanggan per 100 penduduk, mencerminkan tingkat aksesibilitas yang lebih baik dan meningkatnya penetrasi teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

b. Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Pada tahun 2025, persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan berada di angka 63%. Seiring dengan pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan yang mendorong peningkatan aksesibilitas, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 69,50% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, target akses internet untuk rumah tangga akan meningkat lagi menjadi 76,00%, dan pada tahun 2039 diperkirakan mencapai 82,50%. Pada tahun 2045, target akhir adalah 89% rumah tangga yang memiliki akses internet, menunjukkan keberhasilan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan mendukung transformasi digital masyarakat.

Sasaran Pokok: Terciptanya Masyarakat Berbudaya dan Rukun

a. **Indikator: Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap Total Pendaftaran**

Pada tahun 2025, Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan 3,85% dari total pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya telah ditetapkan. Seiring dengan upaya pelestarian budaya yang lebih intensif dan penguatan regulasi, angka ini diharapkan meningkat menjadi 23,07% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, targetnya mencapai 42,30%, dan pada tahun 2039 naik menjadi 61,53%. Pada tahun 2045, Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan 80,76% dari total pendaftaran telah ditetapkan sebagai cagar budaya, mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga warisan budaya dan sejarah lokal.

b. **Indikator: Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan terhadap Total Pencatatan**

Pada tahun 2025, persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada 2,99%. Seiring dengan langkah strategis untuk melestarikan dan mempromosikan budaya tak benda, target ini akan meningkat menjadi 17,91% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, targetnya diproyeksikan mencapai 32,84%, dan pada tahun 2039 meningkat lagi menjadi 47,76%. Pada tahun 2045, target akhir adalah 62,69%, menandakan keberhasilan daerah dalam memperkuat identitas budaya lokal yang tak tergantikan dan meningkatkan pengakuan terhadap warisan budaya tak benda.

c. Indikator: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kisaran 75,26-75,31, mencerminkan tingkat kerukunan yang cukup baik di masyarakat. Dengan berjalannya program-program untuk memperkuat dialog antaragama dan peningkatan pemahaman lintas budaya, IKUB diproyeksikan meningkat menjadi 77,04-77,09 pada tahun 2029. Pada tahun 2034, target indeks kerukunan umat beragama meningkat menjadi 78,82-78,87, dan pada tahun 2039 ditargetkan mencapai 80,59-80,64. Pada tahun 2045, target akhirnya adalah 82,37-82,83, menandakan adanya masyarakat yang rukun, harmonis, dan toleran dalam menjalani kehidupan beragama.

Sasaran Pokok: Terciptanya Masyarakat yang Inklusif dengan Mutu Keluarga yang Berkualitas

a. Indikator: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada kisaran 0,781-0,779 sebagai baseline awal. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik, target IKG diproyeksikan turun menjadi 0,639-0,637 pada tahun 2029. Pada tahun 2034, target IKG akan semakin menurun menjadi 0,496-0,494, menandakan penurunan yang signifikan dalam ketimpangan gender di daerah tersebut. Pada tahun 2039, target ini akan turun lebih jauh menjadi 0,354-0,352. Akhirnya, pada tahun 2045, Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan IKG pada angka 0,211-0,192, mencerminkan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara gender.

b. Indikator: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 66,00-66,07. Dengan pelaksanaan program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, target ini diproyeksikan meningkat secara bertahap menjadi 68,88-68,95 pada tahun 2029. Pada tahun 2034, target indeks pembangunan kualitas keluarga diproyeksikan mencapai

71,75-71,82, yang mencerminkan kemajuan dalam aspek kehidupan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera. Pada tahun 2039, target indeks ini akan meningkat menjadi 74,63-74,70. Pada tahun 2045, target akhir adalah 77,50-77,57, mencerminkan kualitas hidup keluarga yang semakin baik, sejahtera, dan berdaya.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Resiliensi Perubahan Iklim

a. Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada di angka 66,96. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan berbagai upaya pelestarian alam, seperti pengelolaan hutan, penanganan limbah, serta program-program hijau lainnya, target indeks ini diproyeksikan meningkat menjadi 67,80 pada tahun 2029. Selanjutnya, pada tahun 2034, target ini diharapkan mencapai 68,86, yang mencerminkan peningkatan kualitas lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2039, target naik menjadi 69,92, dan pada tahun 2045, indeks ini diproyeksikan mencapai 71,19, yang mencerminkan komitmen Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

b. Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Pada tahun 2025, hanya 5% rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang diproyeksikan memiliki akses sanitasi aman. Seiring dengan pembangunan infrastruktur sanitasi, program peningkatan kesadaran akan kesehatan lingkungan, serta investasi di sektor sanitasi, proporsi ini diperkirakan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2029, target mencapai 16,25%, kemudian meningkat lagi menjadi 27,50% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, target ini diperkirakan mencapai 38,75%, dan akhirnya pada tahun 2045, sebanyak 50% rumah tangga diharapkan memiliki akses sanitasi aman.

c. Indikator: Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2025, hanya 2% sampah yang diproyeksikan terolah di fasilitas pengolahan sampah. Dengan peningkatan infrastruktur pengolahan sampah dan kampanye kesadaran lingkungan, target ini meningkat signifikan menjadi 22,50% pada tahun 2029, 43% pada tahun 2034, dan 63,50% pada tahun 2039. Pada tahun

2045, diharapkan 84% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Di sisi lain, proporsi rumah tangga yang dilayani penuh oleh sistem pengumpulan sampah ditargetkan pada 26% pada tahun 2025, meningkat menjadi 44,50% pada tahun 2029, 63% pada tahun 2034, 81,50% pada tahun 2039, dan mencapai 100% pada tahun 2045, mencerminkan layanan pengumpulan sampah yang merata dan efisien di seluruh kabupaten.

d. Indikator: Indeks Risiko Bencana (IRB)

Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi berbagai risiko bencana, dan pada tahun 2025, Indeks Risiko Bencana berada pada angka 161,61. Dengan langkah-langkah mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas respon cepat terhadap bencana, IRB diperkirakan menurun secara bertahap, mencapai 155,62 pada tahun 2029, 149,62 pada tahun 2034, dan 143,63 pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target IRB diharapkan turun signifikan menjadi 137,63-117,05, mencerminkan peningkatan ketahanan bencana dan kesiapsiagaan yang lebih baik.

e. Indikator: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada tahun 2025, penurunan kumulatif emisi GRK diproyeksikan mencapai 20,37%, sementara penurunan tahunan diproyeksikan berada pada 30,35%. Melalui penerapan kebijakan ekonomi hijau dan teknologi ramah lingkungan, penurunan emisi kumulatif meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2029, 28,37% pada tahun 2034, dan 32,36% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, emisi GRK diproyeksikan turun menjadi 36,36%. Penurunan tahunan emisi GRK juga akan terus meningkat, mencapai 59,21% pada tahun 2045, mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Indikator: Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Pada tahun 2025, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 595 kWh. Seiring dengan peningkatan akses energi dan peningkatan infrastruktur kelistrikan, konsumsi listrik per kapita diharapkan meningkat secara signifikan. Pada tahun 2029, target konsumsi listrik diproyeksikan mencapai 904 kWh, dan pada tahun 2034, angka tersebut

diproyeksikan naik menjadi 1213 kWh. Pada tahun 2039, target konsumsi listrik ditetapkan pada 1521 kWh, dan pada tahun 2045, diharapkan mencapai 1830 kWh per kapita, mencerminkan semakin meningkatnya akses energi yang merata di masyarakat dan peningkatan kapasitas energi daerah.

b. Indikator: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

Pada tahun 2025, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ditargetkan berada pada angka 8,33%. Dengan program-program peningkatan ketahanan pangan, distribusi pangan yang lebih baik, serta berbagai inisiatif pertanian yang berkelanjutan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan menurun menjadi 6,41% pada tahun 2029. Selanjutnya, pada tahun 2034, target prevalensi ketidakcukupan pangan diperkirakan turun menjadi 4,49%, dan pada tahun 2039, turun lagi menjadi 2,57%. Pada tahun 2045, targetnya adalah 0,65%, mencerminkan pencapaian kemandirian pangan dan distribusi yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

c. Indikator: Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas air baku Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada 3,6 m^3/detik. Seiring dengan peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih dan pengelolaan sumber daya air, kapasitas ini ditargetkan meningkat menjadi 3,83 m^3/detik pada tahun 2029, dan pada tahun 2034 kapasitas air baku diproyeksikan mencapai 4,05 m^3/detik. Pada tahun 2039, kapasitas air baku ditargetkan naik menjadi 4,28 m^3/detik, dan pada tahun 2045 diharapkan mencapai 4,5 m^3/detik, mencerminkan peningkatan akses terhadap sumber air bersih yang berkelanjutan.

d. Indikator: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Pada tahun 2025, hanya 3,3% rumah tangga perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan. Dengan perbaikan sistem distribusi air dan investasi dalam infrastruktur air bersih, angka ini diproyeksikan meningkat tajam. Pada tahun 2029, targetnya adalah 27,48%, dengan peningkatan lebih lanjut hingga 51,65% pada tahun 2034.

Pada tahun 2039, diproyeksikan sebanyak 75,83% rumah tangga perkotaan akan memiliki akses terhadap air siap minum melalui perpipaan. Pada tahun 2045, diharapkan seluruh rumah tangga perkotaan (100%) akan memiliki akses terhadap air siap minum, mencerminkan kemajuan signifikan dalam penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat perkotaan di Bengkulu Selatan.

Sasaran Pokok: Menurunnya Angka Kriminalitas melalui Peningkatan Penegakan Hukum

a. Indikator: Angka Kriminalitas (Per 100.000 penduduk)

Pada tahun 2025, angka kriminalitas di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada 136,57 per 100.000 penduduk sebagai baseline awal. Dengan upaya peningkatan penegakan hukum, penguatan peran aparat keamanan, serta program-program pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat, angka kriminalitas diharapkan mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2029, targetnya menurun menjadi 113,47, mencerminkan efek positif dari peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2034, angka kriminalitas di Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan lebih lanjut turun hingga 90,36 per 100.000 penduduk. Peningkatan kualitas penegakan hukum serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan terus menjadi fokus utama. Pada tahun 2039, dengan langkah-langkah lebih terfokus dalam menegakkan hukum dan mengatasi faktor-faktor pemicu kriminalitas, target penurunan angka kriminalitas diproyeksikan mencapai 67,26 per 100.000 penduduk.

Akhirnya, pada tahun 2045, diharapkan angka kriminalitas di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat ditekan hingga 44,15 per 100.000 penduduk. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan efektif.

b. Indikator: Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui peningkatan pelaksanaan Aksi HAM secara bertahap. Pada tahun 2025, target persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM ditetapkan sebesar 80,00%, yang menjadi dasar

awal dari upaya perbaikan dalam penegakan hak-hak warga negara. Upaya ini dilanjutkan dengan peningkatan target menjadi 85,00% pada tahun 2029, 90,00% pada tahun 2034, dan 95,00% pada tahun 2039, sebelum mencapai 100,00% pada tahun 2045.

Peningkatan capaian pelaksanaan Aksi HAM ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dari diskriminasi, terlindungi secara optimal. Pencapaian 100,00% pada tahun 2045 mencerminkan ambisi Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi daerah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, serta berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Sasaran Pokok: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik

a. Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2025, Indeks SPBE di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada angka 2,76. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik akan terus didorong melalui digitalisasi proses administrasi dan pelayanan publik. Pada tahun 2029, indeks ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,32, menandakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik semakin matang dan terintegrasi. Pada tahun 2034, indeks diharapkan naik lagi menjadi 3,88, mencerminkan kemajuan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan digital. Pada tahun 2039, dengan penerapan lebih lanjut dari teknologi informasi dan komunikasi, target indeks SPBE dipatok pada 4,44, hingga mencapai target 5,00 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Indikator: Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan berada pada 3,76 sebagai baseline awal. Melalui peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan efisiensi dalam setiap aspek pelayanan publik, target

ini akan terus meningkat. Pada tahun 2029, indeks pelayanan publik diproyeksikan meningkat menjadi 4,07, dengan program-program yang fokus pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2034, indeks ini akan meningkat lebih jauh hingga mencapai 4,38, dengan reformasi birokrasi yang terus berlangsung dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan layanan prima. Pada tahun 2039, target indeks pelayanan publik berada pada 4,69, hingga akhirnya mencapai 5,00 pada tahun 2045, mencerminkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana, dan Prasarana yang Merata dan Berkualitas

a. **Indikator: Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sangat Baik)**

   Pada tahun 2025, persentase jalan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 59,50%. Dengan berfokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, target ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 64,63% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, persentase kondisi jalan mantap diproyeksikan mencapai 69,75%, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat. Pada tahun 2039, targetnya meningkat menjadi 74,88%, dan pada tahun 2045, 80,00% jalan Kabupaten diproyeksikan berada dalam kondisi mantap, memberikan aksesibilitas yang lebih baik dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

b. **Indikator: Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sangat Baik)**

   Pada tahun 2025, persentase jembatan yang berada dalam kondisi baik dan sangat baik ditargetkan sebesar 83,00%. Dengan program peningkatan infrastruktur jembatan, target ini diproyeksikan meningkat menjadi 85,75% pada tahun 2029, dan 88,50% pada tahun 2034. Pada tahun 2039, targetnya adalah 91,25%, dan pada tahun 2045, 94,00% jembatan Kabupaten Bengkulu Selatan diproyeksikan

berada dalam kondisi mantap, memastikan akses transportasi yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat.

c. **Indikator: Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sangat Baik)**

Pada tahun 2025, persentase sistem irigasi yang berada dalam kondisi baik dan sangat baik ditargetkan sebesar 60,00%. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan akan meningkatkan persentase ini menjadi 61,25% pada tahun 2029. Pada tahun 2034, targetnya adalah 62,50%, dengan peningkatan bertahap menjadi 63,75% pada tahun 2039, dan mencapai 65,00% pada tahun 2045. Pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kemandirian pangan daerah.

d. **Indikator: Persentase Ketersediaan Rumah Ibadah di Setiap Desa atau Kelurahan**

Peningkatan ketersediaan rumah ibadah yang merata di setiap desa dan kelurahan merupakan salah satu fokus dalam pembangunan infrastruktur sosial. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan memiliki akses yang memadai ke rumah ibadah, mendukung kehidupan spiritual dan keberagaman budaya masyarakat.

e. **Indikator: Persentase Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Setiap Kecamatan**

Pada tahun 2025, persentase ketersediaan tempat penampungan sampah sementara ditargetkan mencapai 18,18%. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pengelolaan sampah yang efektif dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, target ini diharapkan terus meningkat menjadi 36,36% pada tahun 2029, 54,55% pada tahun 2034, dan 72,73% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, target akhirnya adalah mencapai ketersediaan 100%, sehingga setiap kecamatan memiliki fasilitas penampungan sampah sementara yang memadai. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

f. Indikator: Persentase Desa Open Defecation Free (ODF)

Peningkatan jumlah desa yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Pada tahun 2025, target persentase desa ODF adalah 73,00%, dengan proyeksi peningkatan menjadi 79,75% pada tahun 2029, 86,50% pada tahun 2034, dan 93,25% pada tahun 2039. Pada tahun 2045, seluruh desa di Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan mencapai status ODF, yaitu 100%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong perubahan perilaku sehat di masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

a. Indikator: Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Pada tahun 2025, SAKIP ditargetkan berada pada kategori BB, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Periode berikutnya, mulai dari tahun 2029 hingga 2045, SAKIP ditargetkan mencapai kategori A, yang mencerminkan akuntabilitas yang lebih baik, dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja yang efektif, efisien, dan transparan.

Peningkatan kategori ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kegiatan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan tercapainya target SAKIP kategori A secara konsisten, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya menciptakan birokrasi yang semakin efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, demi meningkatkan kepercayaan publik dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VI. PENUTUP

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional sesuai dengan Perpres No. 39/2023 memegang peranan krusial. Pendekatan ini dirancang untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern serta inovasi dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi masalah dan hambatan, meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan mendukung visi Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Manajemen risiko dalam konteks RPJPD membutuhkan serangkaian langkah sistematis yang dimulai dengan identifikasi risiko. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait dengan berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, demografi, infrastruktur, dan lingkungan. Risiko yang diidentifikasi bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi global, dan bencana alam. Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses ini tidak dapat diabaikan, karena melalui diskusi dan konsultasi, dapat diperoleh perspektif yang lebih luas tentang potensi risiko dan cara mengatasinya.

Selanjutnya, analisis risiko dilakukan untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Analisis ini membantu dalam pemahaman mendalam tentang risiko yang paling kritis, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat dan efektif. Proses ini juga melibatkan evaluasi hubungan antar risiko dan kuantifikasi risiko untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi kerugian.

Setelah risiko diidentifikasi dan dianalisis, langkah berikutnya adalah pengembangan strategi mitigasi. Strategi ini mungkin termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, program pendidikan dan pelatihan masyarakat, penguatan lembaga pengawasan, serta adopsi teknologi baru yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Pentingnya integrasi strategi mitigasi ini dalam perencanaan

pembangunan jangka panjang tidak hanya memastikan pengurangan dampak risiko tetapi juga membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya, proses monitoring dan evaluasi yang berkala diperlukan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan efektif dan relevan dengan kondisi yang berubah. Proses ini melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko pembangunan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam penyusunan RPJPD, Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya untuk menciptakan sebuah rencana yang tidak hanya responsif terhadap potensi risiko tapi juga proaktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai visi menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dalam kurun waktu 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 merupakan dokumen strategis yang menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan untuk pengembangan daerah selama dua puluh tahun ke depan. Visi untuk menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan menuntut integrasi dan optimasi sumber daya dari semua sektor, termasuk pemerintah dan non-pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan pendanaan ini dirancang untuk mengatasi tantangan pendanaan pembangunan secara efektif dan efisien.

Integrasi dan prioritisasi pendanaan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ini. Dana akan dialokasikan untuk proyek-proyek prioritas yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Setiap proyek dirancang untuk sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang kabupaten, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Memastikan sinergi antara berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan internasional adalah kunci untuk mendukung proyek-proyek ini secara optimal.

Koordinasi dalam pembangunan dan pendanaan juga sangat penting. Melalui pembentukan kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan komunitas, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengidentifikasi dan

melaksanakan proyek pembangunan yang efektif. Model kemitraan antara pemerintah dan swasta, khususnya dalam proyek besar seperti pembangunan infrastruktur jalan tol dan pelabuhan, akan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai sektor. Pembagian tugas yang jelas dan terstruktur antara semua pemangku kepentingan penting untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari tumpang tindih peran, serta memperkuat komitmen dan koordinasi melalui perjanjian kerja sama yang mengikat.

Adaptasi modalitas pendanaan juga merupakan aspek penting lainnya. Pemadanan sumber dana dengan kebutuhan spesifik setiap proyek memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Penggunaan pinjaman jangka panjang, obligasi daerah, dan instrumen keuangan lainnya diperlukan untuk mendanai proyek strategis yang berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pendanaan, termasuk penerapan obligasi hijau dan obligasi berdampak sosial, akan mendukung proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak sosial.

Selain itu, efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana sangat krusial. Implementasi sistem pengawasan yang ketat, audit berkala oleh badan independen, dan publikasi laporan penggunaan dana secara berkala akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan forum warga akan memastikan bahwa pembangunan dijalankan secara inklusif dan transparan.

Akhirnya, peningkatan kemampuan akses pendanaan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah dan penciptaan iklim investasi yang sehat adalah esensial untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Kedua aspek ini, bersama dengan upaya promosi aktif keunggulan Kabupaten Bengkulu Selatan, akan mendukung realisasi visi kabupaten yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045, manajemen investasi memegang peranan penting dalam mewujudkan visi maju, mandiri, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang investasi di sektor-sektor kunci seperti agrikultur,

pariwisata, dan energi terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui model kemitraan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar dan inisiatif pembangunan lainnya. Melalui model kemitraan ini, sumber daya keuangan dan keahlian dari sektor swasta dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah prioritas lain yang sangat penting. Langkah-langkah seperti reformasi regulasi, penyederhanaan prosedur perizinan, dan pemberian insentif fiskal yang menarik ditujukan untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong investasi swasta. Jaminan keamanan dan kestabilan hukum juga krusial dalam memupuk iklim yang kondusif bagi investasi. Investasi dalam infrastruktur dasar tidak hanya akan menarik lebih banyak investor tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal juga sangat diperlukan. Melalui pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja yang terampil dan kompeten dapat disiapkan untuk mendukung sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus, meningkatkan daya tarik Kabupaten Bengkulu Selatan bagi investor. Proses monitoring dan evaluasi yang efektif juga vital untuk memastikan bahwa semua investasi yang masuk memberikan kontribusi positif terhadap tujuan pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten.

Langkah terakhir adalah promosi aktif dari keunggulan kompetitif Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemasaran yang efektif tentang lokasi strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan ketersediaan tenaga kerja terampil akan menarik lebih banyak investasi. Ini akan memperkuat posisi kabupaten sebagai pusat pertumbuhan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan manajemen investasi yang terstruktur dan strategis, Kabupaten Bengkulu Selatan berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi RPJPD 2025-2045 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

6.1. Kesimpulan

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 adalah dokumen penting yang merinci visi, misi, arah kebijakan daerah, dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua puluh tahun ke depan. Dokumen ini terbagi menjadi empat tahapan kebijakan lima tahunan. Tema setiap periode kebijakan ini akan menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap periodenya. Keberhasilan setiap tahapan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan akhir RPJPD ini. Oleh karena itu, tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencapai keberhasilan di masing-masing tahapan kebijakan tersebut.

Permasalahan ekonomi masih menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sejak tahun 2019, Kabupaten Bengkulu Selatan selalu masuk dalam tiga besar kabupaten termiskin di Provinsi Bengkulu. Untuk mengatasi ini, pada misi pertama RPJPD ini, pemerintah menetapkan tujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing. Misi pertama ini bertujuan meningkatkan perekonomian yang merata dengan menetapkan sasaran pokok seperti meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan demi kemandirian pangan, memfokuskan pembangunan ekonomi pada industri pengolahan, serta meningkatkan potensi pariwisata, UMKM, koperasi, dan BUMD. Selain itu, misi ini juga mencakup meningkatkan peran perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro serta daya saing daerah.

Misi kedua dari RPJPD ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Sumber daya manusia merupakan pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam proses pembangunan dibandingkan faktor produksi lainnya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, produktivitas kerja dapat meningkat sehingga tujuan daerah lebih mudah tercapai.

Untuk mencapai visi Bengkulu Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Selatan juga memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup dengan tujuan menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana. Misi ketiga ini menetapkan sasaran pokok seperti menciptakan masyarakat yang inklusif dengan mutu keluarga yang berkualitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan resiliensi terhadap perubahan iklim. Selain itu, misi ini juga memperhatikan pentingnya energi, air, dan pangan dengan meningkatkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta menurunkan angka kriminalitas melalui peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan misi keempat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas demi pelayanan publik yang prima. Tata kelola yang baik dan profesional adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik membantu mengintegrasikan berbagai peran sektor pemerintah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang baik harus memiliki akuntabilitas, independensi, transparansi, partisipasi, dan koordinasi yang baik. Pemerintahan harus dikelola dengan profesional dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahan.

Misi terakhir adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan. Konektivitas antarwilayah sangat penting dalam perkembangan wilayah karena dapat memeratakan pembangunan. Konektivitas tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah dalam suatu negara tetapi juga mempersatukan negara dan membangun kesejahteraan rakyat.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan dua puluh tahun ke depan, memberikan gagasan strategis yang terencana dan sistematis untuk menciptakan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan pada tahun 2045, mendorong partisipasi seluruh pihak dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang, dan menjadi panduan dalam menyusun dokumen perencanaan ditingkatan yang lebih rendah.

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI, SE, MM